



BAPPENAS

Kaji Ulang Satu Dekade Pengaruhutamaan Gender Bidang Pendidikan di Indonesia



**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)**

Kaji Ulang Satu Dekade Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan di Indonesia

Diterbitkan oleh:

© 2013 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

ISBN: 978-979-3764-89-4



BAPPENAS

Tim Pengendali Program Kemitraan untuk Pengembangan Kapasitas dan Analisis Pendidikan (ACDP):

- Ketua Bersama/Direktur : Prof. Dr. Ir. Khairil Anwar Notodiputro
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Ketua Bersama : Dra. Nina Sardjunani, MA
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, BAPPENAS
- Ketua Bersama : Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama
- Wakil Ketua : Ir. Hendarman, M.Sc, Ph.D.
Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Pengelola Program : Dr. Bambang Indriyanto
Kepala Pusat Penelitian Kebijakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Mitra Pembangunan Internasional : Uni Eropa
Australian Agency for International Development (AusAID)
Bank Pembangunan Asia (ADB)
- Sekretariat ACDP : Alan Prouty; John Virtue; David Harding; Abdul Malik; Basilius Bengoteku;
Lestari Boediono; Daniella Situmorang

**Kaji Ulang Satu Dekade
Pengarusutamaan Gender
Bidang Pendidikan di Indonesia**

Pemerintah Republik Indonesia (yang diwakili oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS), Pemerintah Australia melalui *Australian Aid*, Uni Eropa (UE), dan Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank/ADB*) telah membentuk Kemitraan Pengembangan Kapasitas dan Analisis Sektor Pendidikan (*Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership/ACDP*). ACDP adalah fasilitas untuk mendorong dialog kebijakan dan memfasilitasi reformasi kelembagaan dan organisasi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan untuk mengurangi kesenjangan kinerja pendidikan. Fasilitas ini merupakan bagian integral dari Program Pendukung Sektor Pendidikan (*Education Sector Support Program/ESSP*). Dukungan UE terhadap ESSP juga termasuk dukungan anggaran sektor dan program pengembangan kapasitas tentang Standar Pelayanan Minimum. Dukungan Pemerintah Australia adalah melalui Kemitraan Pendidikan Australia dengan Indonesia. Laporan ini disiapkan dengan dukungan hibah dari AusAID dan Uni Eropa melalui ACDP.



Institusi-institusi yang bertanggungjawab melaksanakan studi ini adalah PT TRANS INTRA ASIA bekerjasama dengan Institute of Public Administration of Canada (IPAC).

Anggota tim studi yang menyiapkan laporan ini adalah:

1. *Michelle Moffatt, Ketua Tim/ Research Specialist*
2. *Yusuf Supiandi, Gender Specialist*
3. *Abdul Rahman, Education Specialist*
4. *Bambang Juanda, Data Analyst*

Pendapat yang disampaikan dalam publikasi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab para penulisnya dan tidak serta merta mewakili pandangan Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Australia, Uni Eropa atau Bank Pembangunan Asia.

Prakata

Dalam sepuluh tahun terakhir, Indonesia telah meraih banyak kemajuan dalam mempromosikan dan meningkatkan kesetaraan gender serta pengarusutamaan gender dalam peraturan, kebijakan, berbagai strategi, dan program-program. Dalam sektor pendidikan, banyak kemajuan yang telah dicapai dalam upaya mengurangi kesenjangan gender termasuk dalam angka partisipasi. Indonesia saat ini berada dalam jalur pencapaian *Millennium Development Goals* untuk pendidikan dasar universal dan paritas gender. Paritas gender telah terpenuhi hampir di semua jenjang pendidikan. Selain itu, paritas gender telah dicapai dalam program keaksaraan bagi penduduk berumur 15-24 tahun. Kami percaya bahwa telah terbangun dasar yang kuat untuk pemenuhan akses belajar dan kami akan terus berupaya untuk terus mempertahankan dan meningkatkan hasil-hasil kesetaraan gender yang telah diraih selama ini. Kami juga akan terus berusaha untuk mengurangi dan memecahkan masalah ketidaksetaraan, misalnya angka partisipasi yang rendah untuk perempuan di beberapa daerah Indonesia Timur dan angka putus sekolah untuk laki-laki di tingkat sekolah menengah atas yang hingga saat ini belum mengalami perbaikan.

Walaupun Penelitian telah mencatat hal-hal kunci yang disebutkan di atas, kami pun percaya bahwa selain akses, masih ada hal-hal lain yang tak kalah penting. Pencapaian paritas gender merupakan langkah awal yang sangat penting. Namun demikian, adanya akses yang setara tidak menjamin adanya kesetaraan gender itu sendiri. Mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan memerlukan kesempatan yang sama untuk laki-laki maupun perempuan di mana mereka diperlakukan secara sama dan adil. Hal ini juga akan mempengaruhi berbagai kinerja seperti misalnya dalam hasil-hasil pembelajaran yang juga diraih dalam konteks kesetaraan. Lebih jauh lagi, anak-anak Indonesia diharapkan akan mendapatkan kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan seperti kesempatan setara dalam pasar tenaga kerja dan bagian kehidupan lainnya.

Penelitian ini melihat lebih jauh dimensi kunci yang ada dalam proses belajar dan mengajar termasuk kurikulum, buku teks, bahan ajar, lingkungan sekitar, pengembangan kapasitas guru, dan pencapaian hasil oleh murid. Salah satu berita menggembirakan yang didapat dari Penelitian ini adalah telah banyaknya praktik-praktik yang baik dan inovatif. Misalnya, inisiatif untuk menghilangkan stereotip gender dan bias dalam bahan ajar dan lingkungan sekolah, integrasi kesadaran gender dalam pelatihan kepala sekolah dan guru, dan sensitifitas gender untuk seluruh komunitas sekolah. Penelitian juga menyertakan beberapa contoh praktik yang baik serta inovasi yang menjanjikan. Namun demikian, masih ada kesempatan-kesempatan di lapangan yang belum dikembangkan secara maksimal karena praktik yang baik ini terjadi hanya di daerah tertentu saja dan dilakukan dalam skala kecil, biasanya melalui kegiatan uji coba dengan kesempatan replikasi yang terbatas.

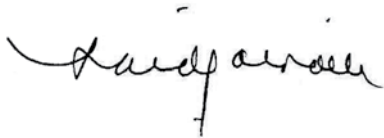
Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana mengevaluasi dan mendiseminasi praktik-praktik yang baik yang telah ada selama ini. Selain itu, Pemerintah Indonesia perlu melakukan prioritas dalam penggunaan sumber daya dan pendanaan untuk mereplikasi inisiatif yang berpotensi memiliki dampak yang baik. Untuk bisa melakukan hal itu, kita harus melihat kembali visi awal dalam kesetaraan gender dalam pendidikan dan kapasitas kita dalam memimpin dan mengelola hal tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa walaupun telah ada dukungan di tingkat pusat, saat ini masih belum ada arahan dan strategi yang jelas untuk pengarusutamaan gender dalam sektor pendidikan. Selain itu, kita juga dihadapkan pada kapasitas teknis yang terbatas. Kita tidak dapat berasumsi bahwa kesadaran gender dan upaya peningkatan kapasitas yang telah dilakukan selama lima hingga sepuluh tahun lalu sudah

cukup. Jika kita ingin melangkah ke depan dan mencapai kesetaraan gender, kita harus memperbaharui upaya-upaya dalam pengarusutamaan kesadaran gender dalam kebijakan pendidikan kunci dan lembaga perencanaan. Dan kita juga perlu terus menjaga momentum dalam upaya pembaharuan keterampilan dan pengetahuan kita kepada kaum muda.

Harapan kami, berbagai informasi dan rekomendasi dalam Penelitian ini dapat membantu kita semua dalam merevitalisasi upaya-upaya yang ada. Kami juga berharap kita dapat terus bersama-sama melangkah maju dalam mencapai kesadaran dan kesetaraan gender dalam pendidikan.

Jakarta, Juni 2013

Deputi Menteri PPN/Bappenas
Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan



Dra. Nina Sardjunani, MA

Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Singkatan	viii
Ringkasan Eksekutif	xi
Bab 1 Pengantar	1
1.1 Tujuan dan Lingkup Kajian Ulang (Tinjauan)	1
1.2 Pendekatan Umum dan Metodologi	2
1.3 Tujuan dan Metodologi Penelitian Lapangan	5
Bab 2 Lingkungan yang Kondusif	9
2.1 Peraturan dan Undang-Undang	9
2.2 Kebijakan dan Isu Strategis dalam Satu Dasawarsa Terakhir	10
2.3 Rekomendasi	12
Bab 3 Melembagakan Pengarusutamaan Gender	15
3.1 Kepemimpinan dan Tata Kelola Pemerintahan (Governance)	15
3.2 Ringkasan Temuan	18
3.3 Rekomendasi	20
Bab 4 Kesetaraan Akses	23
4.1 Gambaran Umum Pendekatan Netral Gender	23
4.2 Indikator Kinerja: Status dan Kecenderungan Perkembangan Murid	25
4.3 Indikator Kinerja: Status dan Perkembangan Guru/Tenaga Pendidik	35
4.4 Kemampuan Perencana Kabupaten/Kota dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data	39
4.5 Hambatan Memperoleh Pendidikan Bermutu	39
4.6 Kesimpulan	43
4.7 Ringkasan Temuan	43
4.8 Rekomendasi	44
Bab 5 Kesetaraan Kesempatan dalam Pendidikan	47
5.1 Gambaran Umum Pendekatan Spesifik Gender Selama Satu Dasawarsa Terakhir	48
5.2 Proses Belajar Mengajar Tanggap Gender	50
5.3 Kesetaraan Gender dalam Kurikulum dan Pengembangan	56
5.4 Kesetaraan Gender dalam Pelatihan dan Pengembangan Guru	58
5.5 Kesetaraan Gender dalam Manajemen Berbasis Sekolah	63
5.6 Kesetaraan Gender di Pendidikan Tinggi	67
5.7 Kesetaraan dalam Hasil Pendidikan	69
5.8 Kesetaraan dalam Hasil di Luar Pendidikan (Eksternal)	70
5.9 Kesimpulan	73
5.10 Rekomendasi	74
Bab 6 Ringkasan Saran/Rekomendasi	77
6.1 Lingkungan Kondusif	77
6.2 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan	77
6.3 Kesetaraan Kesempatan (AKSES) dalam Pendidikan	79
6.4 Kesetaraan Kesempatan dan Hasil dalam Pendidikan	81

Referensi	84
Annex	87
Annex 1 Daftar Peraturan Pemerintah terkait Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan	87
Annex 2 Rangkuman Kegiatan Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan Tahun 2002 - 2010	93
Annex 3 Definisi & Konsep Gender	102
Annex 4 Ringkasan Laporan Studi Kasus Kabupaten/kota	106
Annex 5 Daftar Para Pemangku Kepentingan	183
Annex 6 Daftar Peserta	185
Annex 7 Daftar Sekolah yang Dikunjungi	192
Kredit Foto	193

Daftar Gambar

Gambar 1.	Lembaga Pendidikan yang Dikunjungi Selama Penelitian Lapang ACDP 005	6
Gambar 2.	Struktur Organisasi Kelompok Kerja Gender Tingkat Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	16
Gambar 3.	Struktur Organisasi Kelompok Kerja Gender Tingkat Provinsi	16
Gambar 4.	Kerangka Kerja Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan	17
Gambar 5.	Perkembangan APM Menurut Jenjang Pendidikan 2000-2010	26
Gambar 6.	Perkembangan IPG dari APM Menurut Tingkat Pendidikan	26
Gambar 7.	Peta IPG dalam APM Sekolah Menengah Atas 2010	27
Gambar 8.	Angka Partisipasi Kasar menurut Kuintil Kemiskinan dan Gender, 2010	28
Gambar 9.	APM menurut Kuintil Kemiskinan dan Gender	28
Gambar 10.	Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki-laki (IPG dalam APM) menurut pedesaan/ perkotaan, Tahun 2000, 2005 dan 2010	29
Gambar 11.	Perkembangan Angka Keaksaraan menurut Laki-laki/Perempuan, 2000-2010	29
Gambar 12.	Angka Melek Huruf Perempuan dan Laki-laki usia 15-24 tahun menurut kuintil kemiskinan, Tahun 2010	30
Gambar 13.	Angka Mengulang di Tingkat SD Menurut Provinsi 2009/10	30
Gambar 14.	Perkembangan Angka Putus Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan 2001-2010	32
Gambar 15.	Trend Angka Melanjutkan menurut Laki-laki/Perempuan 2003/04-2009/10	33
Gambar 16.	Angka Melanjutkan dari SD ke SMP Menurut Provinsi, 2009/10	34
Gambar 17.	Perkembangan Rata-rata Lama Bersekolah, 2004-2010	34
Gambar 18.	Rata-rata Lama Bersekolah Menurut Provinsi pada Tahun 2010	35
Gambar 19.	Persen Guru Kemenag yang Bersertifikat Menurut Laki/Perempuan, 2009/10	36
Gambar 20.	Rasio Guru Perempuan terhadap Guru Laki – laki 2000/01 – 2009/10	36
Gambar 21.	Proporsi Kepala Sekolah SD menurut Provinsi dan Gender, 2009/10	37
Gambar 22.	Proporsi Kepala Sekolah SMP menurut Provinsi dan Gender, 2009/10	37
Gambar 23.	Proporsi Kepala Sekolah SMA menurut Jenis Kelamin dan Provinsi, 2009/10	37
Gambar 24.	Proporsi Dosen Universitas menurut Gender	38
Gambar 25.	Persen Pegawai Kemdikbud menurut Eselon dan Gender, 2012.	38
Gambar 26.	Pernikahan Dini dan Putus Sekolah Murid Perempuan Tingkat SMA (Korelasi: 0.288; Nilai P: 0.104)	42
Gambar 27.	Hasil PISA untuk Indonesia Menurut Gender	53
Gambar 28a.	Contoh Bias Gender dalam Buku pelajaran TK	57
Gambar 28b.	Contoh Stereotip Gender dalam Buku Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Kelas 6	57
Gambar 28.	Proporsi Pegawai Negeri Sipil Menurut Gender dan Provinsi, 2010	71
Gambar 29.	Tenaga Kerja Perempuan di Pertanian/Non Pertanian	71
Gambar 30.	Upah per Bulan Menurut Gender dan Provinsi (Sektor Non Pertanian 2010)	72
Gambar 31.	Indeks Paritas Gender Upah per Bulan Menurut Provinsi (non pertanian), 2010	73

Daftar Tabel

Tabel 1.	Jumlah Murid Penerima Beasiswa 2011-2012	25
Tabel 2.	Kecenderungan Angka Mengulang di SD, SMP dan SMA	31
Tabel 3.	Alasan untuk Putus Sekolah, 2009	40
Tabel 4.	Mahasiswa Menurut Fakultas di Universitas Nusa Cendana, Kupang	68

Daftar Singkatan

ADB	: Asian Development Bank
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APK	: Angka Partisipasi Kotor
APM	: Angka Partisipasi Murni
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
BPS	: Badan Pusat Statistik
BSM	: Bantuan Siswa Miskin
CEDAW	: <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women</i> (Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan)
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
EDS	: Evaluasi Diri Sekolah
EFA	: <i>Education For All</i> (Pendidikan Untuk Semua)
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i> (Diskusi Kelompok Terfokus)
GAP	: <i>Gender Analysis Pathway</i> (Jalur Analisis Gender)
GBS	: <i>Gender Budget Statement</i> (Pernyataan Anggaran Gender)
GRB	: <i>Gender Responsive Budget</i> (Anggaran Tanggap Gender)
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
Inpres	: Instruksi Presiden
IPG	: Indeks Paritas Gender
Kemdikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenag	: Kementerian Agama
KKG	: Kelompok Kerja Guru
KKKS	: Kelompok Kerja Kepala Sekolah
KPPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
LPMP	: Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
LPPKS	: Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepala Sekolah
LPTK	: Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MA	: Madrasah Alliyah
MDGs	: <i>Millennium Development Goals</i>
M&E	: <i>Monitoring and Evaluation</i>
MGMP	: Musyawarah Guru Mata Pelajaran
MI	: Madrasah Ibtidaiyah

MKKS	: Musyawarah Kelompok Kerja Kepala Sekolah
MKPS	: Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah
MTs	: Madrasah Tsanawiyah
P4TK	: Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PAKEM	: Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif dan Menyenangkan
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
PAUDNI	: Pendidikan Usia Anak Dini, Non Formal dan Informal
PBB	: <i>Performance Based Budgeting</i> (Anggaran Berbasis Kinerja)
PIRLS	: <i>Progress in International Reading Literacy Study</i> (Penelitian Kemajuan Membaca dan Menulis Internasional)
PISA	: <i>Programme for International Student Assessment</i> (Program Penilaian Murid Internasional)
PKBM	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
PKH	: Program Keluarga Harapan
PMPTK	: Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PNFI	: Pendidikan Non Formal Informal
Pokja	: Kelompok Kerja
PUG	: Pengarusutamaan Gender
PSW/G	: Pusat Studi Wanita/Gender
QEM	: <i>Quality of Education in Madrasah (Study)</i> (Penelitian Mutu Pendidikan di Madrasah)
Renstra	: Rencana Strategis
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RPS	: Rencana Perbaikan Sekolah
Sakernas	: Survei Tenaga Kerja Nasional
SD	: Sekolah Dasar
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
STAIN	: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Susenas	: Survei Sosial Ekonomi Nasional
TIMMS	: <i>Trends in International Mathematics and Science Study</i> (Penelitian dalam Tren Matematika dan Sains Internasional)
UIN	: Universitas Islam Negeri
UNESCO	: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNICEF	: United Nations Children's Fund
WB	: The World Bank
WID	: <i>Women in Development</i>



Ringkasan Eksekutif

Pendahuluan

Selama satu dasawarsa terakhir, upaya melaksanakan pendidikan di Indonesia telah berjalan seiring dengan perjanjian-perjanjian internasional seperti Deklarasi Millennium dan Deklarasi Dakar tentang Pendidikan untuk Semua. Upaya-upaya tersebut menitikberatkan pada pencapaian pemerataan partisipasi sekolah antara kalangan mampu dan kalangan kurang mampu serta untuk mencapai dan mempertahankan kesetaraan gender pada semua jenjang pendidikan. Namun demikian, pencapaian paritas gender terkait akses dalam pendidikan hanya merupakan langkah pertama. Pemerintah menyadari tantangan yang dihadapi dan tetap melanjutkan berbagai upaya untuk mendorong kesetaraan dalam pendidikan. Salah satu hal yang sangat penting adalah ketepatan umur anak laki-laki maupun perempuan pada saat masuk sekolah untuk pertama kali. Namun, upaya lain yang tak kalah pentingnya yaitu menjamin bahwa mereka tidak putus sekolah serta dapat belajar dan berhasil dalam pendidikan. Mencapai tujuan terakhir ini membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam investasi sektor pendidikan.

Indonesia telah mencapai kemajuan yang mengesankan dalam sektor pendidikan selama sepuluh tahun terakhir dan diperkirakan akan mencapai *Millennium Development Goals (MDG)* 2 dan 3 (Angka Partisipasi pendidikan dasar 100% dan paritas gender). Angka Partisipasi Murni untuk pendidikan dasar (kelas 1 - 6) telah mencapai 94.7% dengan partisipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan.¹ Pemerintah menyadari bahwa sasaran nasional Pendidikan untuk Semua (*Education for All* atau EFA) yaitu wajib belajar 9 tahun bagi semua anak laki-laki maupun perempuan belum tercapai karena Angka Partisipasi Murni untuk pendidikan menengah pertama (kelas 7 - 9) baru mencapai 67.6%.² Pemerintah mengakui bahwa adanya akses dalam pendidikan saja tidak menjamin keberhasilan pendidikan. Mutu pendidikan masih beragam di berbagai daerah dan secara umum mutu pendidikan Indonesia masih kurang baik jika dibandingkan dengan negara Asia dengan tingkat pendapatan menengah lainnya.

Selama beberapa tahun terakhir ini, Pemerintah Indonesia memberi perhatian yang besar terkait angka meneruskan sekolah, keberhasilan belajar serta mutu dan relevansi pendidikan untuk semua. Namun demikian, kesetaraan gender dapat dicapai pada saat anak perempuan maupun laki-laki mendapatkan pengalaman yang sama di sekolah dan proses belajar dan mengajar dilakukan secara tanggap gender. Pencapaian kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam proses belajar mengajar serta pencapaian hasil pembelajaran menjadi salah satu tantangan utama bagi Pemerintah Indonesia dalam dasawarsa mendatang.

Meskipun berbagai tantangan masih harus dihadapi, Indonesia memiliki landasan yang kuat dalam mendukung upaya meningkatkan mutu dan kesetaraan pendidikan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Upaya-upaya tersebut didukung oleh komitmen politik maupun anggaran serta kerangka kebijakan yang tepat sebagaimana diuraikan dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014. Pemerintah Indonesia saat ini sedang melanjutkan upaya meningkatkan mutu pembelajaran, kesetaraan gender, perluasan kesempatan memperoleh pendidikan (akses) dan mendukung tata kelola sektoral yang lebih baik.

1 RPJMN Hal. I-51 (Prioritas 2: Pendidikan)

2 Kementerian Pendidikan Nasional, 2010, Rencana Strategis Pendidikan (Renstra) 2010-2014

Melembagakan Pengarusutamaan Gender

Dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai persetujuan dan perjanjian internasional, selama satu dasawarsa terakhir Indonesia telah menetapkan peraturan/perundangan serta kerangka kelembagaan yang komprehensif demi pencapaian tujuan kesetaraan gender. Indonesia juga telah mengadopsi peraturan/perundangan yang mendukung kesetaraan gender dalam pendidikan.

Struktur pendukung pengarusutamaan gender telah dibentuk dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) maupun Kementerian Agama (Kemenag). Selama dasawarsa terakhir telah diselenggarakan cukup banyak sosialisasi kesetaraan gender oleh Kemdikbud dan juga Kemenag. Semua pegawai/pejabat pendidikan di seluruh tingkat pemerintahan, yang diwawancarai selama kegiatan Tinjauan ini, mengerti dan tertarik untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam sektor pendidikan. Para pemangku kepentingan yang terlibat dalam Tinjauan ini mengatakan bahwa sepuluh tahun yang lalu konsep kesetaraan gender dapat dikatakan tidak dikenal sama sekali. Sedangkan sekarang sudah banyak pihak terkait yang mengerti tentang hal ini.

Kepemimpinan Kemdikbud mendukung kesetaraan gender di pendidikan. Dukungan tersebut tercermin dalam terlokasinya anggaran untuk kegiatan kesetaraan gender serta adanya program inovatif yang sedang diujicobakan di sekolah formal maupun non formal. Namun demikian, saat ini masih belum ada arah/haluan strategis yang jelas untuk pengarusutamaan gender dalam pendidikan formal. Pada waktu pelaksanaan Tinjauan ini, Biro Perencanaan Kemdikbud memberitahukan bahwa Sekretariat Pengarusutamaan Gender direncanakan akan dipindahkan ke Biro tersebut. Hal ini merupakan perkembangan yang positif. Para pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun provinsi mengatakan bahwa sekarang sudah waktunya tanggung jawab atas pengarusutamaan gender dialihkan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) kepada Biro Perencanaan yang berada di bawah Sekretaris Jenderal agar kesetaraan di seluruh sistem pendidikan formal dapat lebih ditingkatkan.

Kepemimpinan Kemenag juga mendukung kesetaraan gender dalam pendidikan dan beberapa Direktur Jenderal mengusulkan agar Sekretariat Pengarusutamaan Gender yang sekarang berada di bawah Biro Perencanaan "diaktifkan" kembali. Namun demikian, perlu dipertimbangkan betapa besar tantangan-tantangan yang dihadapi Kemenag dalam pengarusutamaan gender selama sepuluh tahun terakhir. Istilah pengarusutamaan gender dapat menimbulkan tanggapan negatif secara otomatis di beberapa kalangan agama. Salah satu Direktur Jenderal menyatakan bahwa langkah selanjutnya yang bisa dilakukan adalah menyusun strategi "Kesetaraan dalam Pendidikan" yang menitikberatkan pada kaitan antara mutu dan kesetaraan dalam pendidikan bagi laki-laki maupun perempuan. Strategi tersebut dapat mengatasi belum adanya arah/haluan strategis yang jelas untuk menuju pengarusutamaan gender dalam sekolah Islam/madrasah dan juga untuk sekolah berbasis agama lainnya.

Keterlibatan pakar gender dari Kemdikbud dan Kemenag dalam pengelolaan program sangat penting bagi pelaksanaan kesetaraan gender dalam pendidikan. Namun demikian, saat ini ke dua Kementerian mengalami keterbatasan dalam hal ini karena banyak perintis perjuangan kesetaraan gender yang telah memasuki masa pensiun sementara proses regenerasi belum membuahkan hasil. Salah satu langkah strategis untuk mengatasi keterbatasan ini adalah dengan menghadirkan ahli gender laki-laki dan perempuan sebagai anggota tim dan menghasilkan kegiatan pengembangan kapasitas yang tanggap gender terutama di lingkungan di mana kecenderungan menolak kesetaraan gender masih kuat. Selama dasawarsa terakhir, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kemdikbud maupun Kemenag telah merasakan manfaat keberadaan pria maupun wanita pejuang kesetaraan gender di mana mereka memiliki pengetahuan mendalam mengenai kesetaraan gender dalam pendidikan. Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum memiliki contoh-contoh praktik yang baik dalam pelebagaan pengarusutamaan gender.

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah tidak adanya basis data yang terpilah menurut jenis kelamin yang dapat mendukung perencanaan dan penganggaran tanggap gender untuk mengatasi kesenjangan gender dalam partisipasi dan indikator kinerja pendidikan. Di antara semua sekolah di lima Kabupaten dan Kota yang dikunjungi selama Tinjauan ini, tidak ada yang menyusun data yang dipilah menurut jenis kelamin sebagai laporan kinerja kepada Dinas Pendidikan. Kabupaten dan Kota tersebut menyatakan

bahwa mereka belum diminta mengumpulkan data yang dipilah menurut jenis kelamin dan mereka belum mempunyai instrumen pengumpulan data tersebut. Di tingkat sekolah, diperlukan analisis data yang dipilah menurut jenis kelamin agar Manajemen Berbasis Sekolah dapat dilaksanakan dengan lebih efektif. Kabupaten dan Kota perlu mengumpulkan dan menganalisis data yang dipilah menurut jenis kelamin dalam rangka pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang tanggap gender.

Kesetaraan Kesempatan Belajar (Akses)

Selama satu dasawarsa terakhir, banyak kemajuan telah dicapai di Indonesia dalam hal peningkatan Angka Partisipasi Murni dalam pendidikan. Selain itu, telah banyak kemajuan dalam mempertahankan paritas gender dalam Angka Partisipasi Murni pendidikan tingkat nasional. Persentase penduduk (umur 15 – 24 tahun) yang bisa membaca dan menulis (*literacy*) telah mencapai 99,9%. Keberhasilan tersebut berasal dari gabungan antara kebijakan yang efektif dan adanya investasi nasional yang berkelanjutan bagi sektor pendidikan. Kombinasi tersebut telah berhasil memperluas ketersediaan sekolah di daerah pedesaan serta mengurangi biaya sekolah yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Selain itu, mutu dan relevansi merupakan faktor penting lain dalam menentukan berapa lama anak disekolahkan. Pemerintah telah mengembangkan berbagai strategi untuk mengatasi tantangan ini.

Adanya program subsidi pendidikan yang netral gender³ dari Pemerintah seperti BOS, Beasiswa Miskin and Keluarga Harapan, serta pembangunan sekolah baru dan perluasan sekolah yang sudah ada (Satu Atap), telah membantu pencapaian tujuan kesempatan belajar (akses) untuk semua. Setelah program subsidi dan pengarusutamaan gender dalam pendidikan dilaksanakan selama sepuluh tahun, beberapa keberhasilan yang penting dalam akses terhadap pendidikan pada tingkat nasional telah dicapai, antara lain:

- Angka Partisipasi Murni laki-laki maupun perempuan sudah meningkat
- Paritas gender dalam angka partisipasi dan keaksaraan sudah tercapai untuk kelompok umur 15 – 24 tahun
- Angka Melanjutkan laki-laki dan perempuan telah meningkat, terutama dari SMP/MTs ke SMA/MA
- Angka Putus Sekolah menurun bagi laki-laki di semua jenjang pendidikan dan bagi perempuan di SMP/MTs dan SMA/MA
- Rata-rata Lama Sekolah murid laki-laki maupun perempuan naik
- Biaya langsung pendidikan turun dan jumlah sekolah di daerah pedesaan meningkat
- Lebih dari 7,7 juta anak laki-laki dan perempuan dari keluarga miskin menerima beasiswa dan jumlah ini merupakan peningkatan sejak 2012
- Sekitar 778.000 rumah tangga miskin telah menerima subsidi yang memungkinkan mereka menyekolahkan anaknya
- Pelaksanaan program BOS sejak tahun 2005 berkorelasi dengan peningkatan Angka Melanjutkan bagi laki-laki maupun perempuan
- Penambahan SMP sebanyak 4.700 sekolah telah direncanakan untuk tahun 2014. 3.500 SD akan digabungkan dengan SMP (Satu Atap) sedangkan 1.200 SMP baru yang berdiri sendiri juga akan dibangun. Pembangunan sekolah tersebut demi memenuhi tuntutan peningkatan kesempatan bersekolah (akses)
- Perkawinan usia dini sudah mulai berangsur-angsur turun pada tingkat nasional
- Jumlah mahasiswa perempuan naik secara signifikan selama satu dasawarsa terakhir
- Rasio kepala sekolah SD perempuan telah naik di sejumlah provinsi

Namun masih ada perbedaan antar provinsi yang perlu ditangani. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2010 menunjukkan bahwa angka nasional tidak menggambarkan kondisi di tingkat provinsi terutama untuk pendidikan menengah pertama dan menengah atas. Di beberapa provinsi, Indeks Paritas Gender untuk Angka Partisipasi Murni menunjukkan bahwa jauh lebih banyak murid perempuan daripada murid laki-laki di SMP/MTs maupun SMA/MA. Di seluruh Indonesia, murid laki-laki dari keluarga kurang mampu putus sekolah karena kemiskinan dan tekanan dari keluarga agar mereka membantu mencari nafkah. Namun di beberapa provinsi proporsi murid perempuan jauh lebih rendah dibandingkan murid

3. Pendekatan netral gender termasuk program dan kegiatan di mana gender tidak berpengaruh terhadap keberhasilan. Proses belajar mengajar dan hasil pembelajaran juga tidak boleh mempertahankan ketidaksetaraan gender yang sudah berada di dalam lingkungan yang bersangkutan.

laki-laki di SMP/MTs dan SMA/MA. Perkawinan dini yang disetujui oleh kepala keluarga laki-laki menjadi penyebab putus sekolah untuk murid perempuan miskin, terutama di daerah pedesaan (lihat juga Bab IV). Angka Melanjutkan masih perlu ditingkatkan, karena di beberapa provinsi terdapat Angka Melanjutkan ke SMP/MTs dan SMA/MA yang sangat rendah baik untuk laki-laki dan terutama perempuan (lihat Bab IV).

Para pengawas dan kepala sekolah kurang mengerti pentingnya pengumpulan dan analisis data kinerja yang dipilah menurut jenis kelamin (misalnya Angka Putus Sekolah, kehadiran murid, Angka Mengulang, dan kinerja belajar) untuk mendukung pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah yang efektif. Keberadaan data dan analisis tersebut memungkinkan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan strategi, serta pemantauan terhadap upaya penghapusan kesenjangan (*gap*) gender dalam keikutsertaan maupun prestasi belajar murid di tingkat sekolah. Rencana Pengembangan Sekolah (*School Improvement Plans*) serta Evaluasi Diri Sekolah yang baru tidak mewajibkan pengumpulan dan analisis data yang dipilah menurut jenis kelamin agar kesenjangan gender dalam keikutsertaan dan prestasi belajar di tingkat sekolah dapat ditemukan dan ditanggapi.

Kesetaraan Kesempatan dalam Pendidikan

Pengarusutamaan gender telah diterima di seluruh dunia sebagai strategi untuk mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan. Pengarusutamaan bukanlah tujuan, melainkan proses pembentukan pengetahuan dan kesadaran serta pertanggungjawaban bagi semua tenaga profesional pendidikan untuk mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan. Pembangunan pendidikan di Indonesia berlandaskan pada tiga pilar: pemerataan akses, mutu dan relevansi serta efisiensi dalam pengelolaan. Pilar-pilar tersebut bertujuan memperkuat penyelenggaraan pendidikan bermutu untuk semua murid. Strategi kesetaraan gender dalam pendidikan harus ikut memberi sumbangan terhadap pencapaian pilar pendidikan yang juga berkaitan erat dengan pencapaian tujuan Pendidikan Untuk Semua yang telah ditandatangani oleh Indonesia.

Selama satu dasawarsa terakhir, cukup banyak kegiatan peningkatan kapasitas dalam sosialisasi konsep kesetaraan gender dan peraturan/perundangan terkait telah dilakukan oleh Kemdikbud di seluruh Indonesia. Pengarusutamaan gender di Kemdikbud dimulai pada tahun 2003 dengan adanya anggaran pusat untuk melaksanakan kegiatan pengarusutamaan gender. Keberhasilan yang dilaporkan oleh pihak terkait dalam Tinjauan ini antara lain:

- Pedoman pelaksanaan, penelitian dan kertas kerja kebijakan, modul serta alat pelatihan telah dikembangkan dan disebarluaskan baik di tingkat pusat maupun daerah. Hasil tersebut dicapai melalui kemitraan antara pemerintah, LSM, Pusat Kajian Gender di berbagai perguruan tinggi serta – baru-baru ini – melalui Kelompok Kerja (Pokja) Gender di tingkat pusat, provinsi serta kabupaten/kota.
- Peningkatan kesempatan bersekolah untuk semua anak, termasuk perempuan. Selain itu, jumlah perempuan yang melanjutkan ke perguruan tinggi merupakan jumlah yang paling tinggi selama ini.
- Peningkatan kesadaran pemangku kepentingan sektor pendidikan tentang masalah-masalah kesetaraan gender dalam pendidikan
- Kebanyakan kabupaten/kota yang dikunjungi melaporkan bahwa sudah lebih banyak perempuan yang menjadi pengawas dan kepala sekolah jika dibandingkan dengan sepuluh tahun yang lalu. Di tingkat pusat dilaporkan bahwa telah banyak perempuan yang menjadi pegawai negeri sipil.
- Sudah ada beberapa provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi contoh pengarusutamaan gender dengan program uji coba yang inovatif untuk pendidikan formal maupun non formal (sekolah tanggap gender). Program tersebut dibiayai oleh *block grant* dari anggaran pusat, provinsi dan -- pada beberapa tempat -- anggaran kabupaten/kota.
- Pengembangan dan pelaksanaan modul pelatihan pendidikan tanggap gender untuk kepala sekolah, guru, guru bimbingan dan konseling di sekolah uji coba.
- Pengembangan kurikulum dan bahan ajar yang tanggap gender untuk semua mata pelajaran di semua tingkat sekolah yang ikut program uji coba.
- Sosialisasi kesetaraan gender bagi masyarakat dan keluarga melalui media serta program non formal dan informal.
- Semakin banyak provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan perencanaan dan anggaran tanggap gender.

Namun masih banyak hal lain yang masih perlu dilakukan. Proses belajar mengajar saat ini cenderung masih tetap mempertahankan ketidaksetaraan gender. Proses pendidikan bisa memperkuat ketidaksetaraan gender melalui pembagian tugas di kelas seperti menugaskan murid perempuan untuk melakukan kegiatan yang dianggap berstatus rendah seperti menyapu dan membersihkan ruang kelas sedangkan laki-laki ditugaskan melakukan kegiatan yang dianggap memiliki status tinggi seperti mengatur waktu (*time keeping*). Ketidaksetaraan gender juga bisa dengan tidak sengaja diperkuat melalui tindakan misalnya selalu memilih murid laki-laki sebagai pemimpin kelas atau menggunakan poster-poster yang hanya menggunakan laki-laki sebagai contoh yang baik. Hal-hal yang disebutkan ini ditemui pada saat kunjungan ke sekolah. Di Indonesia, pelatihan guru untuk memperlakukan murid laki-laki dan perempuan secara setara dengan memberikan tugas-tugas yang sama kepada mereka seringkali tidak dilakukan. Pengawas dan kepala sekolah perlu dilatih untuk mempromosikan lingkungan belajar yang ramah anak dan tanggap gender dan juga mengembangkan serta mendorong ketaatan terhadap kode etik sekolah yang juga mencakup peraturan dalam tingkah laku anti sosial.

Semua program pelatihan calon kepala sekolah dan kepala sekolah perlu menyertakan pelatihan kesetaraan gender dalam pendidikan. Para kepala sekolah perlu mengetahui bagaimana mengembangkan strategi untuk meningkatkan kinerja belajar murid laki-laki maupun perempuan dalam setiap mata pelajaran. Kepala sekolah juga bisa bekerja sama dengan komite sekolah dalam meningkatkan kesadaran orang tua tentang pentingnya kehadiran anaknya di sekolah (pada saat penelitian lapangan, beberapa sekolah melaporkan bahwa ketidakhadiran lebih banyak terjadi diantara murid laki-laki). Para kepala sekolah harus mengamati berapa kali guru memberi pekerjaan rumah serta apakah pekerjaan rumah tersebut diperiksa guru dan hasilnya dibicarakan dengan murid. Selain itu, perlu diamati sampai seberapa jauh pekerjaan rumah tersebut dikerjakan oleh murid laki-laki dan murid perempuan. Beberapa sekolah melaporkan bahwa murid perempuan lebih tekun dalam mengerjakan pekerjaan rumah dibandingkan dengan murid laki-laki. Perbedaan ini menjadi lebih bermakna jika mengingat perbedaan kinerja antara murid laki-laki dan perempuan dalam pelajaran tertentu. Para kepala sekolah harus menjamin juga bahwa setiap murid mempunyai buku teks. Penelitian QEM⁴ menemukan bahwa hanya dua-pertiga dari murid di 150 MTs di seluruh Indonesia mempunyai buku teks untuk Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Survei tersebut menemukan juga bahwa murid yang mempunyai lebih banyak bahan ajar dan buku teks untuk Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris cenderung lebih memiliki sikap yang positif tentang sekolah.

Pendidikan mempunyai peran penting dalam mendukung masyarakat yang lebih progresif dalam hal gender di mana laki-laki dan perempuan menjadi mitra sejajar di ranah publik maupun pribadi. Hasil penelitian baru-baru ini tentang kurikulum dan buku ajar dari jenjang PAUD hingga SMA di Indonesia, baik di sekolah maupun madrasah, menunjukkan bahwa biasanya perempuan hanya digambarkan sebagai seseorang yang memiliki kegiatan dalam rumah tangga saja atau memiliki peran sebagai orang yang merawat dan mendukung orang lain. Pada sisi lain, lelaki digambarkan sebagai orang yang kuat, tegas, dan pintar serta sebagai pemimpin masyarakat. Peran gender dalam buku ajar tersebut searah dengan pandangan tradisional yaitu laki-laki lebih unggul serta berkedudukan lebih tinggi dan berkuasa. Akibatnya, bahan ajar memperkuat stereotip gender. Namun demikian, baik Kemenag maupun Kemdikbud telah melaksanakan kajian ulang terhadap buku teks dan bahan ajar dan menyadari akan kebutuhan perubahan pada pengembangan kurikulum berikutnya.

Ada perbedaan prestasi belajar dalam mata pelajaran inti di antara laki-laki dan perempuan di Indonesia. Selama satu dasawarsa terakhir sudah diselenggarakan ujian internasional PISA untuk murid berumur 15 tahun sebanyak empat kali. Setiap kali ujian tersebut dilaksanakan, hasil ujian menunjukkan murid laki-laki nilainya lebih rendah dari perempuan dalam bidang membaca (*literacy*) Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris – hal tersebut juga merupakan kecenderungan di seluruh dunia. Hasil survei madrasah QEM menunjukkan hal yang sama, yaitu bahwa murid perempuan mencapai nilai lebih tinggi secara signifikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sedangkan murid laki-laki mencapai nilai lebih tinggi dalam Ilmu Pengetahuan Alam. Tidak ada perbedaan dalam Matematika. Selama penelitian untuk Tinjauan ini, baik kepala sekolah maupun guru pada semua SMP dan SMA yang dikunjungi melaporkan bahwa murid perempuan mencapai nilai lebih tinggi dari murid laki-laki dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sedangkan murid laki-laki mencapai nilai lebih tinggi dalam Ilmu Pengetahuan Alam. Pihak terkait melaporkan bahwa kepala sekolah dan guru belum mengetahui cara mengembangkan strategi untuk mendorong murid laki-laki dan perempuan yang prestasinya rendah di bidang yang berbeda agar dapat menutup “kesenjangan” prestasi tersebut.

4. Kementerian Agama, Februari 2011. Penelitian Mutu Pendidikan di Madrasah (*Quality of Education in Madrasah Study*) Laporan Final.

Di dalam wawancara informal selama Tinjauan ini murid dan guru SMA, baik laki-laki maupun perempuan semuanya mengatakan bahwa murid laki-laki lebih unggul dalam Ilmu Pengetahuan Alam sedangkan murid perempuan lebih unggul dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Pendapat ini mencerminkan hasil penilaian internasional yang diselenggarakan di Indonesia untuk bidang-bidang tersebut. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui apakah pendapat seperti ini bisa menghalangi murid perempuan di SMA/MA untuk meraih sukses dalam Ilmu Pengetahuan Alam dan juga murid laki-laki di bidang Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Para guru harus dilatih agar mengerti bahwa pendapat dan harapan mereka tentang murid laki-laki dan perempuan bisa mempengaruhi proses evaluasi murid yang mereka lakukan seperti bagaimana caranya menilai kemajuan murid, menilai ulangan, serta memberi umpan balik pada murid. Demikian juga, kurikulum dan buku teks yang memperkuat gambaran bahwa laki-laki lebih baik dari perempuan dalam Ilmu Pengetahuan Alam harus diubah.

Pada saat memilih bidang studi untuk pendidikan menengah atas dan yang lebih tinggi, guru bimbingan dan konseling tidak mendorong murid perempuan untuk memilih bidang dan karir yang secara tradisional dipandang sebagai "milik" laki-laki. Jumlah perempuan yang memilih bidang IPTEK di SMK dan perguruan tinggi lebih kecil dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Hal tersebut disebabkan oleh pandangan dan stereotip gender yang terjadi mulai dari pendidikan dasar dan menengah pertama tentang kemampuan perempuan dan laki-laki dalam Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Stereotip gender mendorong perempuan memilih bidang karir dengan gaji/upah lebih rendah, seperti di bagian administrasi, PAUD, pendidikan dan kesehatan masyarakat sedangkan laki-laki cenderung memilih Ilmu Pengetahuan Alam, teknologi, teknik dan hukum. Hal ini dapat dilihat pada rasio gender murid SMK dan perguruan tinggi di Indonesia.

Selama satu dasawarsa terakhir, kegiatan pengarusutamaan gender di Kemdikbud dititikberatkan pada pendidikan non formal, sehingga pelatihan tanggap gender bagi guru sekolah formal masih belum mendapatkan perhatian penuh. Namun demikian, belakangan ini semakin banyak guru dari berbagai provinsi yang telah diikutsertakan dalam lokakarya atau seminar guna meningkatkan kesadaran mereka tentang kesetaraan gender. Kegiatan pelatihan tersebut dibiayai oleh Kemdikbud melalui program uji coba dan pelatihan dan kegiatan yang didanai lembaga donor. Penelitian lapangan di Kabupaten Sleman, Klaten dan Kupang menemukan bahwa sejumlah kepala sekolah dan guru telah dilatih dan kemudian mereka menyebarkan isi pelatihan tersebut kepada rekan-rekan di dalam sekolahnya sendiri dan melalui forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Proyek uji coba kesetaraan gender di sekolah terpilih di Kabupaten Sleman dan Kupang melaporkan dampak positif di tingkat sekolah. Proyek uji coba seperti ini memang sangat diperlukan untuk menemukan model praktik yang baik (*good practice*) untuk dicontoh oleh sekolah lain. Namun waktu lebih panjang diperlukan untuk memperluas dampak contoh-contoh yang baik tersebut. Strategi tambahan juga masih diperlukan untuk menjangkau lebih banyak guru, dosen dan tenaga manajemen pendidikan.

Pelatihan guru di tingkat provinsi menjadi tanggung jawab 30 Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini ada 12 Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) yang sebagian besar berada di Pulau Jawa. Setiap P4TK merupakan pusat nasional untuk bidang tertentu di mana guru terpilih (*master/key trainers*) dilatih untuk menyebarkan isi pelatihan pada guru lain di provinsi dan kabupaten/kota masing-masing. Namun, masih belum tersedia program pelatihan cara belajar murid aktif (PAKEM) yang tanggap gender. Adanya peran baru LPMP Provinsi yaitu sebagai lembaga penjaminan mutu membuka peluang baru (*key entry point*) bagi pelatihan guru yang tanggap gender di tingkat provinsi sebagai bagian dari peningkatan mutu guru – selain melalui P4TK dan jaringan profesi.

Beberapa perguruan tinggi sudah mulai menyelenggarakan kegiatan pengarusutamaan gender dalam program pendidikan guru. Rektor (perempuan) salah satu perguruan tinggi di Kupang telah mengarusutamaan kesetaraan gender secara aktif di perguruan tingginya. Beliau menceritakan perlunya peningkatan kapasitas bagi para dosen dalam bidang metode belajar mengajar yang inovatif, termasuk metode modern (PAKEM) yang dapat dilaksanakan secara tanggap gender sehingga mempengaruhi perilaku murid. Perguruan tinggi dengan program pendidikan guru merupakan peluang baru (*key entry point*) untuk peningkatan mutu guru yang tanggap gender.

Meningkatkan paritas dalam tingkat partisipasi hanya langkah pertama untuk mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan karena paritas partisipasi hanya “mengobati gejala”, bukan “menyembuhkan akar” ketidaksetaraan. Jika hanya memperhatikan kesempatan belajar (akses) sebagai isu utama bagi murid perempuan dan laki-laki, maka hal lain seperti mutu dan relevansi pendidikan dapat terabaikan. Oleh sebab itu, Tinjauan ini tidak hanya mengkaji kesempatan belajar melainkan memperluas kajian untuk mencakup dimensi mutu pendidikan yang berdampak terhadap kesetaraan, yaitu mengkaji beberapa aspek pendidikan dari sudut pandang gender antara lain proses belajar mengajar, isi kurikulum dan bahan ajar lainnya, pelatihan dan pengembangan kapasitas guru, keberhasilan murid, hubungan guru murid, serta keamanan lingkungan belajar. Kajian tentang isu-isu tersebut berdasarkan penelitian lapangan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Kupang dan Gorontalo, serta hasil dari beberapa penelitian yang dilakukan di Indoneisa dan tempat lain.

Ringkasan saran/rekomendasi dari Kajian ini dapat ditemukan dalam Bab VI.



Bab I

Pengantar

Gender merupakan konsep yang banyak digunakan dan, di berbagai tempat, diartikan sebagai “masalah perempuan”. Padahal dalam kenyataannya, gender menunjukkan perbedaan peran dan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan secara sosial. Dari sisi gambaran yang lebih luas ini, istilah gender menunjukkan penggolongan perempuan dan laki-laki secara sosial budaya. Penggolongan tersebut berdasarkan pada norma dan nilai sosial yang menentukan peran laki-laki dan perempuan yang harus dilakukan dalam bermasyarakat.

1.1 Tujuan dan Lingkup Kajian Ulang (Tinjauan)

Tinjauan Satu Dasawarsa Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan di Indonesia bertujuan untuk memberikan sumbangan terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka menengah dan panjang dalam bidang sosial dan ekonomi. Sumbangan tersebut berbentuk dukungan terhadap penyusunan strategi untuk memperluas penerapan praktik-praktik baik yang sudah ada serta pengembangan kebijakan, strategi dan program baru dalam pencapaian kesetaraan gender. Tujuan Kajian Ulang Satu Dasawarsa Pengarusutamaan Gender adalah:

- (a) melakukan evaluasi yang menyeluruh terkait pengarusutamaan gender dalam pendidikan di Indonesia yang berdasarkan bukti nyata,
- (b) mengajukan saran tentang strategi yang dapat digunakan untuk memperluas praktik-praktik baik yang sudah ada serta strategi baru untuk perluasan dan penguatan pengarusutamaan gender dalam penentuan kebijakan, perencanaan, serta penyelenggaraan jasa pendidikan.

Dengan demikian, fokus Tinjauan ini adalah masa yang akan datang dengan harapan bahwa Tinjauan dapat menjadi rujukan bagi reformasi kebijakan. Oleh sebab itu, Tinjauan mencakup pelaksanaan pengarusutamaan gender di Indonesia, serta kesenjangan, tantangan dan saran. Salah satu titik perhatian kegiatan ini adalah praktik-praktik yang baik (*good practice*) dengan harapan bahwa hal tersebut dapat diperluas pelaksanaannya. Studi kasus yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan juga telah menjadi masukan dalam Tinjauan ini. Karena keterbatasan waktu dan kesulitan dalam mengumpulkan data-data sebelumnya, dampak dari semua proyek dan program yang pernah dilaksanakan selama satu dasawarsa terakhir tidak dibahas secara rinci.

Kajian Ulang (Tinjauan) ini mencakup penyelenggaraan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) maupun Kementerian Agama (Kemenag). Tinjauan ini memberikan gambaran garis besar kebijakan serta lingkup strategis yang terkait dengan pengarusutamaan gender dalam pendidikan selama sepuluh tahun terakhir. Tinjauan juga mencakup analisis tata kelola pendidikan yaitu peran dan tanggung jawab dalam pengarusutamaan gender di tingkat pusat, provinsi serta kabupaten/kota. Tinjauan ini melihat berbagai program selama sepuluh tahun terakhir (termasuk program dengan

sasaran gender maupun program yang bersifat netral gender) dengan menitikberatkan pada program-program saat ini. Termasuk juga analisis perubahan (*trend*) dalam indikator keberhasilan pencapaian kesetaraan gender dalam kesempatan memperoleh pendidikan (akses) seperti indikator angka partisipasi dalam pendidikan.

Melalui penelitian lapangan di lima kabupaten/kota, Tinjauan ini mengkaji upaya-upaya pengarusutamaan gender di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu dianalisis pula sampai seberapa jauh data tentang perbedaan gender dalam partisipasi dan keberhasilan belajar telah digunakan untuk pengkajian terkait serta bagaimana informasi tersebut digunakan secara efektif dalam perencanaan dan penganggaran yang bersifat tanggap gender. Sasaran lain penelitian lapangan yaitu mengkaji bukti-bukti penggunaan upaya-upaya pengarusutamaan gender untuk meningkatkan kesetaraan gender pada penyelenggara pendidikan (sekolah, perguruan tinggi), termasuk pendidikan dan pengembangan profesional guru.

Keterbatasan Tinjauan antara lain adalah kesulitan tim dalam memperoleh data tentang kegiatan pengarusutamaan gender baik dulu maupun sekarang. Selain itu ada kesulitan dalam mendapatkan data statistik yang lengkap. Tidak semua wakil Direktorat dari Kemdikbud dan Kemenag berhasil ditemui karena keterbatasan waktu dan staf inti (*key persons*) yang tidak ada di tempat.

Laporan ini disusun dalam enam bagian yang mengikuti model konsep kesetaraan gender yang dijelaskan di bawah ini. Laporan ini mencakup tiga pilar pembangunan pendidikan Indonesia, yaitu kesempatan (akses), mutu, dan efisiensi dalam pengelolaan. Setelah bagian Pengantar ini, bagian kedua berisikan informasi tentang latar belakang lingkungan yang kondusif terhadap pencapaian kesetaraan gender dalam pendidikan. Bagian ketiga meninjau beberapa program yang sedang dilaksanakan pemerintah yang bersifat netral gender dan dirancang untuk mencapai kesetaraan dalam kesempatan (akses). Data tolok ukur kinerja yang terkait dengan akses selama satu dasawarsa terakhir menjadi salah satu titik perhatian, baik untuk melihat kecenderungan maupun ketidakmerataan di antara provinsi yang masih terjadi. Bagian keempat mengajukan beberapa pendekatan yang khusus bercirikan kesetaraan gender yang dilaksanakan selama satu dasawarsa terakhir. Selain itu, bagian ini juga meneliti berbagai unsur kesetaraan dalam proses belajar mengajar, hasil pembelajaran serta hasil di luar bidang pendidikan (*external results*). Laporan ditutup dengan masukan bagi Kemdikbud maupun Kemenag untuk mendukung berbagai upaya menuju kesetaraan gender dalam pendidikan dalam satu dasawarsa ke depan.

1.2 Pendekatan Umum dan Metodologi

Model konsep⁵ untuk Tinjauan ini melingkupi kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam kesempatan (akses), kesetaraan dalam proses pembelajaran, kesetaraan hasil pembelajaran serta kesetaraan hasil di luar bidang pendidikan (*external results*) baik di dalam sistem pendidikan maupun dalam masyarakat luas. Pendekatan kesetaraan gender mendorong kesempatan yang setara namun secara lebih jauh lagi juga memperhatikan relevansi dan mutu pendidikan untuk menjamin kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam kesempatan mencapai pendidikan serta mencapai hasil pendidikan.

Kesetaraan akses berarti anak perempuan maupun laki-laki disediakan kesempatan setara untuk mengikuti pendidikan dasar formal, non formal, atau dengan pendekatan lain.

Indikator kunci:

Data yang terpilah menurut jenis kelamin adalah:

- Angka Buta Huruf (usia 15-24)
- Angka Partisipasi Murni pada tingkat provinsi, dibagi menurut status sosio-ekonomi
- Angka Putus Sekolah
- Angka Lulusan
- Angka Mengulang
- Rata-rata Lama Sekolah
- Angka Melanjutkan

5. Diadaptasi dari Kerangka Kerja Kesetaraan Gender USAID dan CIDA. Kerangka kerja ini dikembangkan berdasarkan keterlibatan UNESCO dalam kegiatan Gender dan Pendidikan Untuk Semua: Lompatan Menuju Kesetaraan.

- Proporsi guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan perempuan dibanding guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan laki-laki

Kesetaraan kesempatan dalam proses pembelajaran berarti perempuan maupun laki-laki menerima perlakuan dan perhatian yang setara serta mendapat kesempatan yang sama dalam proses pembelajaran. Termasuk di antara upaya ini adalah murid diajarkan kurikulum yang sama walaupun isi mata pelajaran bisa dibedakan untuk melayani gaya belajar yang berbeda di antara mereka. Kesetaraan proses pembelajaran menuntut juga bahwa para murid mengalami metode pengajaran serta bahan ajar yang bebas dari stereotip dan bias gender. Semua murid harus bebas belajar, mencari dan mengembangkan keterampilan pada semua bidang ajar, olah raga dan kegiatan ekstrakurikuler dalam lingkungan yang aman.

Indikator kunci:

- Manajemen berbasis sekolah yang tanggap gender
- Pilihan bidang studi berdasarkan gender
- Kurikulum, buku dan bahan ajar yang tanggap gender
- Guru, kepala sekolah dan pengawas yang dilatih tanggap gender
- Pengajaran dan proses pembelajaran yang tanggap gender
- Tingkat kualifikasi dan sertifikasi guru laki-laki dan perempuan
- Keikutsertaan yang setara dalam semua kegiatan ekstra kurikuler

Kesetaraan kesempatan dalam prestasi belajar dan hasil pendidikan berarti anak perempuan dan anak laki-laki mengalami kesempatan setara dalam mencapai prestasi belajar dan hasil pendidikan berdasarkan upaya dan kemampuan sendiri. Ulangan, ujian dan metode evaluasi lain bersifat bebas dari bias gender. Tidak ada pengarahannya "tersirat" melalui proses evaluasi yang mengarahkan laki-laki atau perempuan untuk tidak melanjutkan sekolah ataupun mendorong mereka untuk memilih/menghindari bidang ilmu tertentu.

Indikator kunci:

- Nilai ujian untuk setiap mata pelajaran
- Guru terlatih yang mengerti bahwa persepsi dan harapan mereka tentang murid laki-laki dan perempuan dapat mempengaruhi evaluasi mereka termasuk dalam proses evaluasi kemajuan, memberikan nilai ujian dan masukan kepada murid.
- Ujian dan ulangan terdiri dari berbagai jenis pertanyaan (esai, gambar, bagan, tabel, pilihan ganda/*multiple choice*, jawaban tertulis, dan sebagainya) agar dapat menanggapi keberagaman gaya belajar laki-laki dan perempuan.
- Ulangan, ujian dan penilaian dikaji ulang untuk menjamin bebas bias dan stereotip gender, baik contohnya maupun bahasanya.

Kesetaraan hasil di luar bidang pendidikan tercapai apabila laki-laki dan perempuan setara dalam kedudukan, kesempatan memperoleh barang dan sumber daya (*resources*), kesempatan menyumbang dalam kegiatan ekonomi, sosial budaya dan politik serta menikmati hasil dari kegiatan tersebut. Kesetaraan ini menuntut agar kesempatan karir serta pendapatan laki-laki dan perempuan juga sama bagi mereka yang memiliki kualifikasi dan pengalaman yang sama. Walaupun dimensi kesetaraan ini berada di luar sistem pendidikan, namun pencapaian kesetaraan pendidikan menjadi pendorong serta memberi sumbangan terhadap pencapaian kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam bidang kehidupan lainnya termasuk dalam ranah ketenagakerjaan dan pribadi seperti rumah tangga.

Indikator Kunci:

- Pendidikan bermutu yang menyediakan keterampilan yang sesuai bagi laki-laki dan perempuan untuk berhasil pada saat mulai bekerja dan memenuhi permintaan pasar tenaga kerja
- Adanya peraturan/perundangan tenaga kerja yang menjamin kesempatan yang sama dalam pekerjaan dan pendapatan. Juga penegakkan peraturan/perundangan tersebut
- Perempuan yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan sebagai pemimpin baik dalam pendidikan dan sektor lain
- Reformasi peraturan/perundangan untuk menjamin bahwa laki-laki dan perempuan memperoleh perlindungan hukum dan hak yang sama dalam keluarga/rumah tangga, kewarganegaraan, hak milik, keikutsertaan dalam proses politik, warisan dan sektor keuangan

Pengumpulan dan analisis data terpilah menurut jenis kelamin sebagai berikut:

- Data kecenderungan (*trend*) pendidikan tingkat provinsi, perkotaan/pedesaan dan kelompok sosial ekonomi dari Susenas BPS dan Kemdikbud.
- Data tenaga kerja dan upah tingkat provinsi dari Sakernas.
- Partisipasi politik dan jabatan kepemimpinan pegawai negeri sipil.

Metode baku dalam pengumpulan data yang digunakan untuk Tinjauan:

- Wawancara terarah (*semi structured interview*)
- Diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion* atau FGD)
- Kajian dokumen

Kerangka Pemikiran Evaluasi

Sumber data utama yang digunakan:

- Staf inti (*key persons*) dalam urusan kebijakan maupun manajemen di Kemdikbud, Kemenag, KPPPA, BAPPENAS, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Anggota Pokja Gender, dan staf lain yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender
- Staf Kemdikbud dan Kemenag tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan
- Staf satuan penyelenggara pendidikan termasuk pengawas, kepala sekolah, guru, komite sekolah, murid (SD/MI, SMP/MTs/LPMB, SMA/SMK/MA/MAK, PKBM), Ketua Pusat Studi Wanita/Gender, staf manajemen dan pengajaran pada lembaga pelatihan guru, peneliti

Kerangka kerja Kaji Ulang Pengarusutamaan Gender di Bidang Pendidikan selama Satu Dasawarsa



1.3 Tujuan dan Metodologi Penelitian Lapangan

Tujuan dari penelitian lapangan adalah memperoleh bukti tentang kemajuan dalam pengarusutamaan gender serta kemampuan pelaksanaannya, berdasarkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- Sampai seberapa jauh kemajuan dan kapasitas staf di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan satuan penyelenggara pendidikan dalam pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender?
- Kegiatan pengarusutamaan gender apa saja yang sedang dilakukan di tingkat sekolah untuk meningkatkan kesetaraan gender, termasuk pelatihan dan pengembangan guru?

Penelitian lapangan tersebut menghasilkan lima studi kasus dari lima kabupaten/kota yang memberikan sumbangan kepada Tinjauan dalam bentuk bukti nyata tentang kemajuan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam sistem pendidikan. Penelitian tersebut mengemukakan contoh praktik yang baik (*best practice*) tapi menemukan juga kesenjangan dan tantangan yang dihadapi. Temuan penelitian tersebut digunakan dalam analisis Tinjauan serta dibagi juga kepada pemangku kepentingan.

Penelitian lapangan dilaksanakan di Jawa Barat dan Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur dan Gorontalo. Beberapa provinsi tersebut dipilih karena mencapai status A dalam Program Kemdikbud Perluasan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan. Status tersebut menunjukkan bahwa tiga di antara provinsi di atas sedang mengujicobakan upaya pengarusutamaan gender pada kabupaten/kota terpilih.

Di dalam setiap provinsi, kabupaten/kota dipilih untuk mewakili ciri/keadaan sebagai berikut:

- Kabupaten/kota yang tidak dibantu pembiayaan oleh pemerintah untuk kegiatan pengarusutamaan gender dalam pendidikan (Indramayu dan Gorontalo)
- Kabupaten/kota yang dibantu pembiayaan oleh pemerintah untuk kegiatan pengarusutam gender dalam pendidikan (Klaten, Kupang, dan Sleman)
- Kabupaten/kota dengan kesenjangan gender seperti kesenjangan dalam kinerja pendidikan misalnya tingginya putus sekolah untuk murid laki-laki karena kemiskinan dan/atau murid perempuan karena faktor budaya seperti pernikahan dini (Indramayu, Kupang, Gorontalo)
- Kabupaten terdiri dari Indramayu, Klaten, dan Gorontalo
- Kota terdiri dari Kupang
- Kabupaten/kota yang melaksanakan contoh praktik yang baik (*best practice*) pengarusutamaan gender dalam pendidikan (Klaten, Sleman dan Kupang)

Tiga orang ditugaskan sebagai Koordinator Lapangan untuk membantu penelitian lapangan di empat provinsi, termasuk menyiapkan laporan studi kasus (salah satu Koordinator Lapangan mencakup Jawa Tengah dan DI Yogya). Para Kepala Pusat Kajian Wanita dipilih berdasarkan keahlian dalam pengarusutamaan gender dalam pendidikan, pengetahuan mendalam tentang penelitian yang sudah/sedang dilakukan, kemampuan melaksanakan studi kasus dan diskusi kelompok terfokus serta keanggotaannya dalam Pokja Gender di Kemdikbud. Para Koordinator Lapangan dibimbing oleh tim konsultan ACDP005 dalam melaksanakan tugasnya. Studi kasus yang dihasilkan oleh para Koordinator Lapangan disertakan dalam Lampiran 7.

Penelitian studi kasus merupakan metodologi utama untuk penelitian kualitatif. Metode ini memungkinkan tim untuk menyelidiki kenyataan sehari-hari tentang pengarusutamaan gender di kabupaten/kota terpilih serta kesenjangan dan tantangannya.

Sejumlah tiga diskusi kelompok terfokus (FGD) diselenggarakan untuk setiap kabupaten/kota. Jumlah peserta FGD terdiri dari 122 perempuan dan 149 laki-laki (lihat Lampiran 2) yang mewakili hal-hal sebagai berikut:

- Kebijakan dan pengelolaan pendidikan tingkat provinsi dan kabupaten/kota - DPRD Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Bappeda Kabupaten/Kota, Kantor Kemenag, Dewan Pendidikan, Pusat Studi Wanita, Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, Kantor Statistik Kabupaten/Kota.
- Staf pengajar dan manajemen lembaga pelatihan guru termasuk FKIP, LPMP, P4TK, Balai Diklat Kemenag, dan Badan Diklat Provinsi/Kabupaten/Kota.
- Manajemen sekolah dan tenaga pengajar - Kepala sekolah, guru, pengawas, komite sekolah dan perwakilan murid laki-laki dan perempuan.

Sebanyak 12 satuan pendidikan dikunjungi di 5 kabupaten/kotasebagai berikut:

Gambar 1. Lembaga Pendidikan yang Dikunjungi Selama Penelitian Lapang ACDP 005

NO	Nama Kabupaten/Kota	Jenis Sekolah yang Dikunjungi				
		PAUD/TK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/MAN	PKBM
1.	Sleman	✓			✓ MAN	✓
2.	Klaten		✓	✓		
3.	Kota Kupang	✓		✓	✓ SMKN	
4.	Indramayu		✓		✓ MAN	
5.	Gorontalo		✓		✓ SMA N	

Catatan: Pada rencana awalnya, satu sekolah luar biasa (SLB) termasuk sekolah yang akan dikunjungi namun hal tersebut tidak dilakukan karena perubahan jadwal.

Untuk metode pengumpulan data, sekolah terpilih diamati dengan menggunakan alat observasi kelas untuk memperoleh data kuantitatif dan kualitatif termasuk interaksi antara guru dan para murid. Data kualitatif diperoleh melalui FGD dan wawancara informal dengan murid. Pada awalnya tim merencanakan untuk melakukan analisis bias gender dalam buku ajar. Namun ketika Tinjauan sedang berjalan, ada berita bahwa hasil penelitian baru tentang buku ajar telah terbit. Oleh sebab itu, tim memutuskan untuk menggunakan hasil penelitian tersebut. Pengamatan informal tentang buku ajar tetap dilakukan oleh tim. Para konsultan ACDP005 menyusun pedoman FGD (lihat Lampiran 7) untuk penelitian lapangan.



Bab 2

Lingkungan yang Kondusif

2.1 Peraturan dan Undang-Undang

Indonesia telah mengesahkan perjanjian pokok internasional yang mendukung prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam pendidikan dan akan menindaklanjuti berbagai rekomendasi dalam Deklarasi Dakar tentang Pendidikan Untuk Semua (*Education for All* atau EFA) tahun 2000, *Beijing Platform for Action* tahun 1995 serta Deklarasi Milenium PBB tahun 2000. Pada tahun 1990 Indonesia mengesahkan Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak. Konvensi PBB tentang Penghapusan Semua Jenis Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) disahkan oleh Undang-undang 7/1984 dan Protokol Tambahan Tidak Wajib terhadap CEDAW ditandatangani pada tahun 2000.⁶

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) tahun 1984 merupakan persetujuan internasional yang menegaskan prinsip-prinsip dasar hak asasi dan kesetaraan di seluruh dunia. Di antara berbagai perjanjian internasional terkait hak asasi manusia, Konvensi tersebut sangat penting karena menyertakan perempuan dalam kancah hak asasi manusia. Semangat Konvensi berakar pada tujuan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yaitu menegaskan kembali hak asasi manusia serta wibawa dan martabat setiap orang melalui kesetaraan hak laki-laki dan perempuan. CEDAW bertujuan mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan dewasa dan anak perempuan dalam pendidikan. CEDAW mendorong kesetaraan dalam kesempatan memperoleh pendidikan dan sumber daya pendidikan bagi perempuan dewasa dan anak perempuan pada semua jenjang pendidikan dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga pendidikan profesi dan pelatihan keterampilan, termasuk kesempatan memperoleh beasiswa dan kesempatan turut serta dalam aktifitas olah raga.⁷

Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua tahun 1990 di Jomtien menyatakan tujuan mencapai pendidikan setingkat sekolah dasar untuk semua pada tahun 2000. Deklarasi Dakar (tahun 2000) menegaskan kembali tujuan tersebut serta memperluas perjanjian Jomtien dengan menitikberatkan pada peningkatan mutu pendidikan. Salah satu dari enam tujuan Pendidikan untuk Semua yang diharapkan akan tercapai pada tahun 2015 adalah *penghapusan ketidaksetaraan gender dalam pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2005 dan pencapaian kesetaraan gender dalam pendidikan pada tahun 2015*. Tujuan tersebut menitikberatkan pada peningkatan mutu pendidikan dalam segala hal serta menjamin keunggulan hasil bagi semua murid sehingga berbagai keberhasilan pembelajaran yang telah diakui dan dapat diukur tersebut dapat diraih oleh semua murid, terutama dalam kemampuan membaca, menghitung, dan keterampilan hidup yang mendasar.

The Beijing Platform of Action Tahun 1995 menetapkan bahwa setiap negara harus menjamin kesetaraan gender dalam proses pembangunan dan menitikberatkan pada kesetaraan dan keadilan dalam

6. Konvensi-konvensi lain yang telah disahkan oleh Indonesia termasuk Konvensi Tentang Hak Politik Perempuan yang disahkan oleh Undang-undang 68/1958, Deklarasi Copenhagen Tentang Pembangunan Sosial tahun 1994. Untuk hak buruh, Indonesia mengesahkan Konvensi No. 100 *International Labour Organization* (ILO) tentang Penerimaan Bayaran yang Sama di antara Laki-laki dan Perempuan untuk Pekerjaan yang Nilainya Sama melalui Undang-undang 80/1957. Selain itu Indonesia telah mengesahkan banyak lagi Konvensi Inti dari ILO.

7. CEDAW and *Education Factsheet*. www.cedaw2011.org

kesempatan memperoleh pendidikan (akses) bagi semua warganegara. Salah satu pernyataan dari kegiatan tersebut adalah “pendidikan merupakan hak manusia serta salah satu alat utama untuk mencapai tujuan kesetaraan, pembangunan dan perdamaian. Pendidikan yang tidak bersifat diskriminatif antara laki-laki dan perempuan memberi manfaat bagi perempuan maupun laki-laki dan, dengan demikian, akhirnya membantu menciptakan hubungan yang lebih setara antara perempuan dan laki-laki.”⁸

Millenium Development Goals (MDGs) juga menegaskan kembali bahwa pencapaian pendidikan dasar untuk semua serta kesetaraan gender pada pendidikan dasar maupun menengah akan dicapai pada tahun 2015. MDGs menjadi rujukan penting dalam persiapan perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah telah mengarusutamakan MDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2004-2009 dan 2010-2014), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

2.2 Kebijakan dan Isu Strategis dalam Satu Dasawarsa Terakhir

Dalam rangka memenuhi kewajiban dari persetujuan dan perjanjian tersebut di atas, selama satu dasawarsa terakhir Indonesia telah menetapkan kerangka undang-undang dan peraturan serta kelembagaan yang menyeluruh untuk mencapai tujuan kesetaraan gender.

Pemerintah telah menyatakan komitmen yang tinggi untuk menghapus kesenjangan gender dalam segala sektor strategis termasuk pendidikan. Instruksi Presiden (Inpres) No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional serta petunjuk teknisnya bertujuan agar kepentingan-kepentingan kesetaraan gender disertakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari setiap kebijakan dan program nasional. Walaupun Inpres bukan undang-undang, namun beberapa pemerintah daerah telah menggunakan Inpres 9/2000 tersebut sebagai rujukan terkait kesetaraan gender dalam mengembangkan kebijakan dan program pendidikan daerah. Pada tahun 2002, KPPPA mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam pelaksanaan Inpres 9/2000. Permendiknas 84/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pendidikan di tingkat pusat maupun daerah.

Perundang-undangan dan peraturan lain yang telah dilaksanakan termasuk:

1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 menetapkan bahwa semua warga negara berkedudukan sama, tanpa pengecualian, di depan hukum dan pemerintahan serta berhak hidup bermartabat. Pasal 31 menjamin kesempatan memperoleh pendidikan (akses) untuk semua. Selain itu, amandemen yang ditetapkan pada tahun 2000 menjamin hak untuk bebas dari diskriminasi. Amandemen tersebut juga mengamanatkan agar pemerintah menyediakan 20 persen dari anggaran (APBN) untuk pendidikan.
2. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 20/2003 menetapkan demokrasi, kesetaraan dan non-diskriminasi sebagai prinsip dalam pelaksanaan pendidikan (Pasal 4). Undang-undang tersebut juga mewajibkan persamaan hak dalam pendidikan bagi semua warga negara serta mewajibkan pemerintah untuk menyediakan layanan pendidikan, menjamin mutu pendidikan dan tidak diskriminatif.
3. UU 17/2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menetapkan pengarusutamaan gender sebagai salah satu dari tiga isu lintas sektoral dalam pembangunan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 15/2008 berisikan pedoman penerapan analisis gender dalam proses penganggaran bagi semua instansi pemerintah daerah. Pemerintah daerah diperintahkan untuk melaksanakan proses perencanaan yang tanggap gender dan membentuk Kelompok Kerja Gender (Pokja Gender) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 84/2008 memberi pengarah dalam pelembeagaan dan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pendidikan di Kementerian serta dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota.
6. Peraturan Menteri Keuangan 119/2009 memilih tujuh kementerian percontohan termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk melaksanakan Anggaran Berbasis Kinerja

8. <http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/educa.htm#diagnosis>

(*Performance-Based Budgeting/PBB*) yang tanggap gender dalam tahun 2010. Belakangan ini Anggaran Tanggap Gender (*Gender Responsive Budget/GRB*) menjadi hal yang semakin sering digunakan untuk mempertanggungjawabkan komitmen kebijakan nasional dalam pengarusutamaan gender.

7. Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 menetapkan 11 prioritas termasuk pendidikan dan tiga prinsip lintas sektor sebagai dasar operasional pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan. Ketiga prinsip lintas sektoral yaitu 1) pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan; 2) pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik dan 3) pengarusutamaan gender.
8. Kemdikbud dan Kemenag telah membuat Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan 2010-2014 sebagai penjabaran RPJMN dan pedoman reformasi. Renstra Pendidikan tersebut tetap mempertahankan prioritas pemerintah untuk pendidikan dasar dan penyediaan pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu bagi semua anak laki-laki dan perempuan. Mengingat bahwa Kemdikbud bertanggungjawab secara keseluruhan atas sistem pendidikan nasional, maka Renstra Kemdikbud mencakup pendidikan negeri maupun swasta. Sasaran strategis Renstra Kemdikbud tersebut mencakup sekolah di bawah Kemdikbud maupun madrasah di bawah Kemenag. Lima prioritas kunci dalam Renstra, yaitu:
 - pengurangan ketidakerataan dalam kesempatan memperoleh pendidikan (akses) terutama di tingkat SMP/MTs
 - peningkatan mutu proses belajar mengajar
 - peningkatan relevansi pendidikan terutama untuk SMA/MA dan pendidikan tinggi
 - peningkatan efisiensi dan keterjangkauan biaya sekolah, dan
 - peningkatan tata kelola dan pertanggungjawaban (akuntabilitas) untuk semua tingkat – pusat, provinsi, kabupaten/kota dan sekolah.

Tujuan strategis Pendidikan Islam dikembangkan dalam Renstra Kemenag yang meliputi satuan pendidikan madrasah negeri dan swasta serta satuan pendidikan lain di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Visi Renstra Kemenag agar madrasah menjadi setara dengan sekolah dalam hal sarana dan prasarana, mutu pengajaran dan prestasi akademik. Oleh sebab itu, upaya Kemenag dititikberatkan pada peningkatan mutu untuk menjamin bahwa madrasah dapat memenuhi standar dan bahwa mutu dan kompetensi tenaga madrasah dapat menyelenggarakan metode belajar mengajar yang baik di kelas. Untuk mencapai hal ini, Kemenag akan melatih guru dan tenaga kependidikan dalam hal manajemen, kepemimpinan dan profesionalisme, dan mewajibkan madrasah untuk menjalani akreditasi.

Baik dalam Renstra Kemdikbud maupun Kemenag tidak ada penjelasan khusus yang menyangkut prinsip lintas sektor RPJMN tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pendidikan.

RUU Kesetaraan Gender saat ini sedang dibahas oleh DPR dan konsultasi publik sedang dilaksanakan. Setelah disetujui oleh DPR, diharapkan undang-undang baru tersebut akan memperkuat pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam semua sektor, termasuk pendidikan. RUU Kesetaraan Gender Bab V Pasal 12 menetapkan sebagai berikut:

1. Lembaga pemerintah, kementerian, masyarakat serta pengusaha wajib melaksanakan pengarusutamaan gender dalam kegiatan dan fungsinya.
2. Pengarusutamaan gender perlu dilaksanakan dalam penyusunan kebijakan dan program, termasuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi (M&E).
3. Tentang pelaksanaan butir 1 dan 2 di atas, wajib memasukkan pengarusutamaan gender ke dalam setiap pelatihan dan diklat untuk pegawai negeri pusat maupun daerah serta masyarakat dan pengusaha.
4. Pelaksanaan butir 1 – 3 akan diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Sistem penganggaran negara (*Public Expenditure Management System*) dikembangkan dengan menggunakan Undang-undang Keuangan Negara sebagai salah satu dasarnya. Namun demikian masih belum ada sistem pemantauan pengeluaran untuk program dan kegiatan kesetaraan gender, termasuk pengeluaran yang dibiayai melalui program-program di sektor pendidikan. Untuk menanggapi kekurangan tersebut, pada tahun 2009 tujuh kementerian, termasuk Kemdikbud, telah dipilih untuk uji coba pengembangan Pernyataan Anggaran Gender (*Gender Budget Statement/GBS*) serta Anggaran Berbasis Kinerja dari tahun 2010. Pada tahun 2009, beberapa wakil Kementerian telah dilatih dalam penyusunan Pernyataan Anggaran Gender yang terkait dengan Anggaran Berbasis Kinerja dan Anggaran Tanggap Gender.⁹

9. UNDP. 2009. *Assessing Gender Responsive Local Capacity Development in Indonesia*. UNDP Bangkok.

Pada tingkat pemerintah daerah, Anggaran Tanggap Gender telah diperkenalkan sebagai alat pertanggungjawaban dalam pelaksanaan komitmen kebijakan nasional untuk kesetaraan gender dalam pendidikan. Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2008 mewajibkan semua instansi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menerapkan analisis gender dalam proses penyusunan anggaran. Sudah banyak kegiatan sosialisasi gender dan pelatihan tentang konsep dan alat analisis gender maupun penganggaran tanggap gender. Pelatihan tersebut juga membahas cara menyertakan kepentingan kesetaraan gender ke dalam pengembangan kebijakan dan program. Beberapa pemerintah kabupaten/kota yang didukung oleh lembaga donor atau LSM sudah berhasil melaksanakan pelatihan pengembangan Anggaran Tanggap Gender. Namun demikian, penggunaan Anggaran Tanggap Gender dengan hasil yang jelas, khususnya untuk sektor pendidikan, masih merupakan tantangan untuk provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Seperti yang disebutkan oleh seorang anggota DPRD dari Kabupaten Sleman, "Regulasi dari Kementerian Dalam Negeri diperlukan untuk memperkuat komitmen pengarusutamaan gender di DPRD."

Sebagai salah satu contoh reformasi tata kelola anggaran pada tahun 2009 BAPPENAS mengeluarkan Peraturan Menteri tentang Pembentukan Panitia Pengarah dan Tim Teknis untuk Anggaran Tanggap Gender dan Tanggap Kemiskinan (*Gender-Responsive Pro-Poor Budgeting*). Tim tersebut terdiri dari pejabat Eselon 1 dan 2 dari enam Kementerian termasuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pekerjaan tim didukung oleh Sekretariat Anggaran Tanggap Gender. Penyusunan strategi pelaksanaan anggaran tanggap gender merupakan salah satu prioritas utama dari tim tersebut.

Dalam sepuluh tahun terakhir, Indonesia telah mencapai banyak kemajuan yang penting dan berada pada jalur yang tepat dalam mencapai Millennium Development Goals 2 dan 3 (pendidikan dasar universal dan paritas gender). Angka Partisipasi Murni untuk pendidikan dasar (kelas 1 - 6) sudah mencapai 94.7% dengan partisipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan.¹⁰ Pemerintah sadar bahwa sasaran nasional Pendidikan untuk Semua yaitu wajib belajar 9 tahun bagi semua anak laki-laki maupun perempuan saat ini belum tercapai karena Angka Partisipasi Murni di tingkat SMP/MTs (kelas 7 - 9)¹¹ baru mencapai 67.6%. Pemerintah mengakui bahwa adanya akses dalam pendidikan saja tidak menjamin keberhasilan pendidikan. Mutu pendidikan sangat beragam di berbagai daerah dan secara umum mutu pendidikan Indonesia masih kurang baik jika dibandingkan dengan negara Asia dengan tingkat pendapatan menengah lainnya.

Indonesia memiliki basis yang kuat untuk terus berupaya meningkatkan mutu dan kesetaraan pendidikan yang juga merupakan komponen yang berhubungan sangat erat. Indonesia memiliki dukungan politis, komitmen dalam pendanaan, dan kerangka kerja kebijakan yang baik dalam Rencana Strategis Pendidikan. Indonesia terus memperkuat manajemen sektor pendidikan dengan meningkatkan akses, memperbaiki mutu pembelajaran, dan mengembangkan berbagai pendekatan termasuk dalam kesetaraan gender.

2.3 Rekomendasi

1. Rancangan Undang-Undang Kesetaraan Gender segera diselesaikan dan diundangkan.
2. Dibutuhkan Peraturan Kemdikbud dan Kemenag yang mewajibkan semua Direktorat Jenderal untuk mengarusutamakan kesetaraan gender dalam pendidikan di semua jenjang pendidikan.
3. Dibutuhkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mewajibkan semua pemerintah daerah dan DPRD untuk mengarusutamakan kesetaraan gender dalam pendidikan di semua jenjang pendidikan.
4. Dibutuhkan Peraturan Menteri Agama yang mewajibkan semua Kantor Wilayah dan Kantor Departemen untuk mengarusutamakan kesetaraan gender dalam pendidikan di semua jenjang pendidikan.

10. RPJMN Hal. 1-51 (Prioritas 2: Pendidikan)

11. Kementerian Pendidikan Nasional, 2010. Rencana Strategis Pendidikan (Renstra) 2010-2014



Bab 3

Melembagakan Pengarusutamaan Gender

3.1 Kepemimpinan dan Tata Kelola Pemerintahan (*Governance*)

Pada tahun 2002, Inpres 9/2000 tentang Pengarus Utama Gender dalam Pembangunan Nasional memerintahkan semua lembaga pemerintah di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota agar melaksanakan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi semua kebijakan dan program. Pelaksanaan Inpres tersebut dimulai oleh Kemdikbud dengan kegiatan terkait untuk pendidikan non formal dan informal pada tahun anggaran 2003. Dengan adanya Permen 84/2008, Kemdikbud membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja Gender) sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal (PAUDNI). Pokja Gender tersebut dianggap sebagai cara yang efektif untuk melaksanakan kegiatan pengarusutamaan gender dalam pendidikan. Sejak itu, Pokja Gender telah dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Namun demikian, belum banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Pengarusutamaan Gender di Kemenag dan Pokja hanya menyelenggarakan pertemuan satu tahun sekali.

Pokja Gender Kemdikbud diketuai oleh Direktur Jenderal PAUDNI. Pokja tersebut terdiri dari: tim penasihat, yaitu pejabat Eselon 1, tim penasihat ahli dari instansi lain (BAPPENAS, Kemenag, KPPPA, BPS, perguruan tinggi dan ahli independen) serta Sekretariat yang terdiri dari staf operasional dan pendukung dari Eselon3 dan 4.

Tim Teknis terdiri dari Sekretaris Direktorat Jenderal (Eselon 2) dari Badan Penelitian dan Pengembangan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal PAUDNI, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan dan Kepala Pusat Data dan Informasi. Tim teknis tersebut berada di bawah koordinasi Kepala Biro Perencanaan. Sekretariat Pokja dikoordinasi oleh Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan anggotanya terdiri dari para kepala bagian perencanaan dari semua unit utama dan staf PAUDNI.

Tim Penasihat bertugas untuk:

- 1) Mengkoordinasi unit kerja terkait dalam Kemdikbud dan LSM (organisasi berbasis masyarakat) dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender.
- 2) Menyiapkan rumusan kebijakan Kemdikbud.
- 3) Menyusun rencana aksi nasional bagi berbagai Direktorat yang diperlukan dalam rangka persiapan pelaksanaan pembangunan pendidikan yang tanggap gender.

Tim Ahli bertugas untuk:

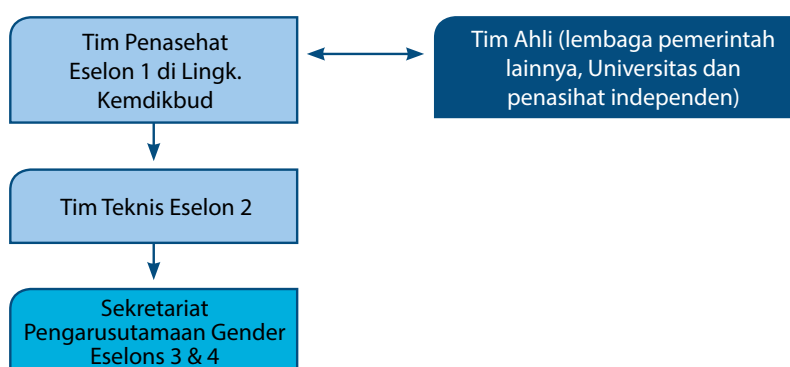
- 1) Membantu para pemimpin Kemdikbud dalam pengarusutamaan kesetaraan gender melalui saran kebijakan dan rencana aksi nasional.
- 2) Memfasilitasi pengarusutamaan gender di semua Dirjen dan pemerintahan daerah demi kesetaraan gender dalam sektor pendidikan.

Tim Teknis bertugas untuk:

- 1) Mengarahkan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender nasional dalam pembangunan pendidikan baik di tingkat pusat maupun daerah.
- 2) Menyusun rencana kebijakan operasional di Direktorat terkait.
- 3) Menyusun rencana aksi nasional yang mengarah pada penciptaan kesempatan pendidikan yang seimbang antar gender.
- 4) Mengembangkan rencana tahunan untuk pembangunan pendidikan tanggap gender di tingkat pusat.
- 5) Mendukung keberlangsungan komitmen Kemdikbud untuk melaksanakan pengarusutamaan gender di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Sekretariat Pokja bertugas mengkoordinasikan kegiatan dari semua kelompok kerja gender lainnya yang dibentuk di masing-masing Direktorat Jenderal Kemdikbud. Pembentukan Pokja tingkat Direktorat Jenderal tersebut dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam semua kegiatan Direktorat. Pokja tingkat Direktorat Jenderal diketuai oleh staf Eselon 1 yang bertanggung jawab untuk perencanaan.

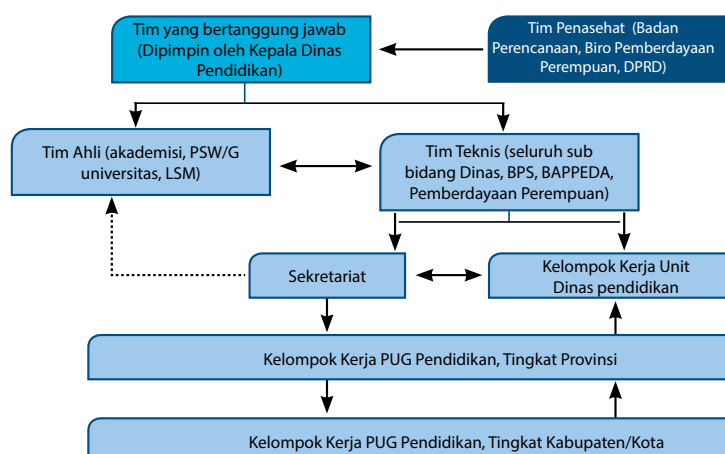
Gambar 2. Struktur Organisasi Kelompok Kerja Gender Tingkat Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Sumber: Kemdikbud

Banyak kegiatan yang disebutkan di atas dilaksanakan melalui Kelompok Kerja Gender tingkat Provinsi yang strukturnya hampir sama dengan Kelompok Kerja Gender Kemdikbud. Kelompok Kerja Gender Provinsi bekerja secara lintas sektor dan bertanggung jawab atas pengarusutamaan gender dalam pendidikan (lihat Gambar 2). Walaupun beberapa Kelompok Kerja Gender Provinsi mendapatkan dukungan dari pemerintah setempat dan memiliki anggaran dari berbagai sumber seperti *block grant* Direktorat Jenderal PAUDNI dan anggaran provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan terkait kesetaraan gender, masih banyak daerah lain yang kurang aktif dalam kegiatan-kegiatan tersebut.

Gambar 3. Struktur Organisasi Kelompok Kerja Gender Tingkat Provinsi



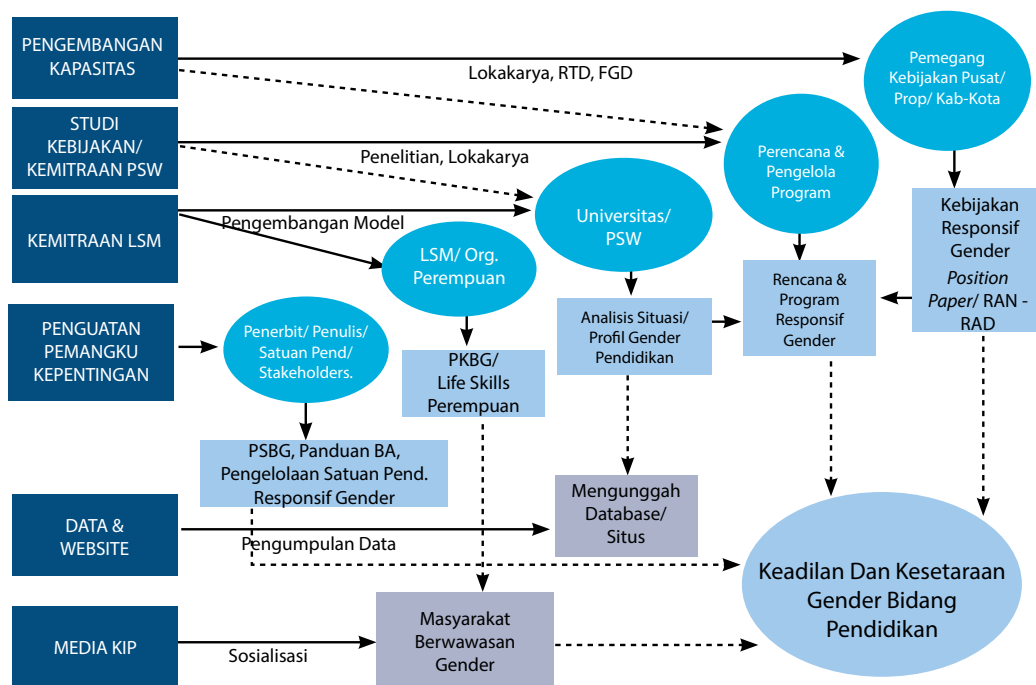
Sumber: Kemdikbud

Prioritas Kemdikbud dan Pokja dalam pengarusutamaan gender dalam pendidikan diuraikan sebagai berikut¹²:

Peningkatan kapasitas dan mutu perencanaan pendidikan oleh pembuat kebijakan agar dapat merencanakan pendidikan yang tanggap gender. Selama satu dasawarsa terakhir, sosialisasi terkait gender sudah banyak dilakukan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Kemitraan dengan Pusat Studi Wanita/Gender (PSW) untuk melakukan beberapa studi kebijakan kesetaraan gender. Prioritas ini dilaksanakan oleh Pokja Gender Kemdikbud dan dibantu oleh beberapa Ketua PSW melalui pemberian saran dan masukan serta penelitian di tingkat nasional dan provinsi. PSW yang terpilih dalam kegiatan Pokja tersebut telah terlibat secara aktif sebagai penasihat kegiatan pengarusutamaan gender dalam pendidikan non formal dan informal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Akhir-akhir ini mereka juga terlibat dalam proyek uji coba yang saat ini sedang dilaksanakan dan didukung melalui *block grant* dari Kemdikbud maupun provinsi.

Gambar 4. Kerangka Kerja Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan



Sumber: Kemdikbud

Kemitraan dengan LSM dalam kegiatan pendidikan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan gender dilaksanakan melalui program peningkatan pendapatan, keterampilan dan keaksaraan, yang dikenal sebagai Program Pendidikan “Keluarga Tanggap Gender”. Sebagian besar pesertanya merupakan remaja dan mereka yang beranjak dewasa yang putus sekolah setelah pendidikan menengah pertama.

Peningkatan pengetahuan, kesadaran dan partisipasi pemangku kepentingan mengenai kesetaraan gender dalam pendidikan. Sebagian besar kegiatan selama satu dasawarsa terakhir dititikberatkan pada prioritas yang bertujuan untuk mensosialisasikan kesetaraan gender melalui lokakarya dan seminar di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dari tahun 2002 hingga tahun 2005, Pokja Gender secara aktif bekerja sama dengan 15 provinsi dan 30 kabupaten/kota. Dalam empat tahun terakhir, kegiatan utama Pokja Gender termasuk:

12. Kemdikbud. 2010. Satu Dasawarsa Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan.

- Mengawasi pelaksanaan kegiatan *block grant* untuk proyek uji coba di 32 provinsi, 54 kabupaten/kota terkait pendidikan formal dan non formal
- Peningkatan kapasitas secara berkelanjutan untuk pemangku kepentingan tingkat pusat
- Pelatihan kepekaan gender (*gender sensitivity*) untuk pihak terkait
- Pelatihan Jalur Analisis Gender atau *Gender Analisis Pathway (GAP)*
- Pelatihan anggaran tanggap gender dan penyusunan laporan anggaran gender

Terkait prioritas dalam pelaksanaan basis data yang terpilah menurut jenis kelamin dalam pendidikan, belum ada kegiatan yang dilakukan untuk mencapai prioritas ini. Namun anggota Pokja Gender melaporkan bahwa pada tahun 2012 telah dimulai proyek perumusan panduan pelaksanaan pengumpulan data pendidikan yang terpilah menurut jenis kelamin.

Peningkatan Komunikasi, Informasi, Pendidikan (KIP) Gender dalam pendidikan, baik melalui media cetak dan media elektronik. Banyak kegiatan yang dilaksanakan untuk prioritas ini, termasuk menerbitkan berbagai publikasi, laporan penelitian, buku panduan, lokakarya dan kampanye media (TV dan radio), disertai kegiatan sosialisasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

3.2 Ringkasan Temuan

Struktur yang diperlukan dalam pengarusutamaan gender telah dimiliki oleh Kemdikbud dan Kemenag. Dalam sepuluh tahun terakhir, Kemdikbud dan Kemenag telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengertian terkait kesetaraan gender. Wakil sektor pendidikan yang diwawancarai untuk Tinjauan ini menunjukkan bahwa mereka mengerti dan tertarik dalam mendukung kesetaraan gender dalam pendidikan. Pemangku kepentingan dalam Tinjauan ini juga menyebutkan bahwa sepuluh tahun yang lalu kesetaraan gender masih merupakan hal yang tidak diketahui dan dimengerti sama sekali. Namun demikian, kini pemangku kepentingan sudah memiliki pengertian mengenai pengarusutamaan gender dalam bidang pendidikan.

Karena Sekretariat Pengarusutamaan Gender ditempatkan sebagai bagian Direktorat Jenderal PAUDNI, sebagian besar kegiatan pengarusutamaan gender di Kemdikbud cenderung dititikberatkan untuk pendidikan non formal dan informal. Pada tahun 2002, Sekretariat Pengarusutamaan Gender menjadi bagian pendidikan non formal karena Direktorat yang bersangkutan saat itu didukung oleh keahlian dalam kesetaraan gender serta keinginan untuk mengembangkan strategi kesetaraan gender. Karena hal tersebut, maka Pokja Gender tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga menjadi bagian pendidikan non formal. Hal ini mengakibatkan adanya kecenderungan bahwa pengarusutamaan gender belum sepenuhnya menjadi prioritas untuk pendidikan formal.

Para pemimpin Kemdikbud mendukung kesetaraan gender di pendidikan. Dukungan tersebut tercermin dalam adanya anggaran untuk kegiatan kesetaraan gender serta program inovatif yang sedang diujicobakan di sekolah formal maupun non formal. Namun demikian masih belum ada arah / haluan strategis yang jelas untuk pengarusutamaan gender dalam pendidikan formal. KPPPA telah menyarankan kepada Kemdikbud untuk menempatkan Sekretariat Pengarusutamaan Gender sebagai bagian dari Biro Perencanaan. Saat Tinjauan ini dilaksanakan, Biro Perencanaan Kemdikbud melaporkan bahwa telah ada rencana tersebut dan hal ini merupakan perkembangan yang positif. Para pihak terkait di tingkat pusat maupun provinsi menyampaikan bahwa kini waktunya meningkatkan keberhasilan pengarusutamaan gender dalam sistem pendidikan formal. Hal ini dapat dicapai dengan menjadikan Biro Perencanaan yang berada di bawah Sekretaris Jenderal sebagai penanggungjawab utama upaya pengarusutamaan gender dalam sektor pendidikan.

Keterlibatan ahli gender dari Kemdikbud dan Kemenag dalam pengelolaan program sangat penting bagi pelaksanaan kesetaraan gender dalam pendidikan. Namun demikian, saat ini ke dua Kementerian mengalami keterbatasan dalam hal ini karena banyak perintis perjuangan kesetaraan gender yang telah memasuki masa pensiun sementara proses regenerasi belum membuahkan hasil. Salah satu langkah strategis untuk mengatasi keterbatasan ini adalah dengan menghadirkan ahli gender laki-laki dan perempuan sebagai anggota tim dan menghasilkan kegiatan pengembangan kapasitas yang tanggap gender terutama di lingkungan di mana kecenderungan menolak kesetaraan gender masih kuat. Selama

dasawarsa terakhir, KPPPA, Kemdikbud maupun Kemenag merasakan manfaatnya dengan keberadaan pria maupun wanita yang menjadi pejuang kesetaraan gender dimana mereka memiliki pengetahuan mendalam mengenai kesetaraan gender dalam pendidikan. Selain itu, Tinjauan ini juga mengidentifikasi beberapa pejabat Eselon 2 dari Kemdikbud dan Kemenag yang juga memiliki pengetahuan mendalam terkait gender.

Tujuan kesetaraan gender dalam pendidikan perlu diperluas agar tidak hanya mencakup kesetaraan kesempatan memperoleh pendidikan (akses) namun juga termasuk kesetaraan dalam proses belajar mengajar, prestasi dan hasil pendidikan formal. Dengan demikian, sulit untuk dapat mencapai kesetaraan gender di seluruh sektor pendidikan jika tanggung jawab terkait pengarusutamaan gender hanya berada pada satu Direktorat Jenderal saja.

Dalam wawancara untuk Tinjauan ini, salah satu pemimpin tingkat provinsi menyatakan: *"Telah ada kesalahfahaman bahwa kesetaraan gender hanya berlaku pada pendidikan non formal. Kebijakan top-down hanya menitikberatkan pada non formal. Mengapa Direktorat lain tidak memperhatikan pengarusutamaan gender? Bagaimana pendidikan formal, pendidikan kejuruan?"* - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Yogyakarta.

Para pejabat senior Kemdikbud (Eselon 1 dan 2) yang diwawancarai sepakat bahwa perlu "meletakkan kembali" (*re-positioning*) strategi karena telah ada pandangan bahwa pengarusutamaan gender hanya berlaku untuk pendidikan non formal saja. Para wakil Direktorat yang diwawancarai menyatakan bahwa tanpa adanya peraturan yang dikeluarkan oleh pimpinan Kemdikbud yang mewajibkan pengarusutamaan gender pada semua Direktorat Jenderal, kecil kemungkinan hal ini akan mendapatkan perhatian penuh dari pihak-pihak terkait.

Para pemimpin Kemenag mendukung kesetaraan gender dalam pendidikan dan beberapa Direktur Jenderal mengusulkan agar Sekretariat Pengarusutamaan Gender yang sekarang berada di bawah Biro Perencanaan digiatkan kembali. Namun demikian, perlu dipertimbangkan besarnya tantangan yang dihadapi Kemenag dalam pengarusutamaan gender selama sepuluh tahun terakhir. Istilah "pengarusutamaan gender" sendiri dapat menimbulkan tanggapan negatif dari beberapa kalangan Agama. Salah satu Direktur Jenderal berkeyakinan bahwa penyusunan strategi "Kesetaraan dalam Pendidikan" yang menitikberatkan pada kaitan antara mutu dan kesetaraan dalam pendidikan bagi laki-laki maupun perempuan merupakan salah satu kegiatan yang dapat dilakukan. Pendekatan tersebut dapat membahas belum adanya arah/haluan strategis yang jelas untuk mendukung pengarusutamaan gender dalam sekolah Islam/madrasah dan juga pada sekolah yang berbasis agama lainnya.

Kerjasama Kemdikbud dan Kemenag dalam pengarusutamaan gender sangat terbatas, baik di tingkat pusat maupun tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Para pihak terkait mengutarakan bahwa koordinasi di antara Kementerian tersebut merupakan salah satu bidang yang perlu diperkuat. Di beberapa provinsi, staf Kemenag telah diundang untuk mengikuti lokakarya yang diselenggarakan dalam rangka program uji coba yang dilaksanakan oleh Kemdikbud.

Penelitian lapangan Tinjauan ini menemukan perbedaan yang menonjol di antara kelima kabupaten/kota yang dikunjungi. Di Kabupaten Sleman dan Klaten, Pokja Gender, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota bekerja dengan baik dengan adanya keahlian teknis dan dukungan kuat dari pimpinan. Sedangkan Pokja Gender tingkat provinsi dan kota di Kupang belum bekerja secara baik karena kepemimpinan dan keahlian teknis lokal yang masih kurang kuat. Dilaporkan bahwa keadaan tersebut disebabkan oleh kurangnya kemauan politik (*political will*) termasuk keengganan untuk menyediakan anggaran bagi rapat Pokja Gender. Kinerja pengarusutamaan gender di Kabupaten Indramayu belum ada sama sekali karena kurangnya keahlian teknis di daerah tersebut. Semua Kabupaten/Kota yang dikunjungi melaporkan tidak ada tenaga tetap yang terlatih dalam pengarusutamaan gender untuk mengisi jabatan terkait dalam hal ini. Semua koordinator gender mempunyai tugas pokok lain dan sebagian belum dilatih dalam pengarusutamaan gender dalam pendidikan. Kantor Wilayah dan Kantor Departemen Kemenag belum mempunyai Pokja Gender yang aktif karena belum adanya arahan dari pusat.

Pada beberapa provinsi dan kabupaten/kota sedang dilaksanakan kegiatan pengarusutamaan gender yang inovatif namun keberhasilan diukur dengan menghitung jumlah kegiatan program (*output*) dan bukan hasil kegiatan (*outcome*). Selain itu, beberapa pemangku kepentingan menyampaikan bahwa

keterlambatan pencairan dana pusat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat mempengaruhi kinerja mereka dalam mendukung pengarusutamaan gender. Saat ini belum diselenggarakan sistem pemantauan dan evaluasi (M&E) pengarusutamaan gender dari pusat yang dapat mengidentifikasi keberhasilan yang sudah tercapai di beberapa provinsi.

Tantangan lain yang dihadapi adalah sulitnya mempertahankan keahlian teknis di daerah mengingat seringnya mutasi PNS (pegawai negeri sipil) dilakukan. Pada tingkat pusat dan daerah, kendala ini seringkali mengakibatkan 'pejuang gender' yang memiliki bakat memimpin dipindahkan dan diganti oleh anggota staf lain yang keahlian teknis dan kemampuan kepemimpinannya lemah. Masalah kaderisasi kepemimpinan tersebut dialami oleh hampir semua lembaga pemerintah, perguruan tinggi (PSW/PSG), dan LSM. Karena transfer pengetahuan atau informasi kepada penerus jarang dilakukan, hal ini sering mengakibatkan kegagalan kaderisasi dan hilangnya keutuhan pengetahuan gender dalam lembaga yang bersangkutan.

Anggota DPRD Sleman menyatakan, "Salah satu kendala utama adalah mutasi pegawai Kementerian dan pemerintah daerah yang terlalu sering sehingga lembaga pemerintah tersebut mulai dari "titik nol" lagi dan terpaksa melatih staf baru. Kita perlu mengubah kebiasaan ini."

Kurangnya dana untuk penelitian dan pengembangan menghambat keberhasilan Pusat Studi Wanita/Gender dalam melakukan penelitian bermutu tinggi tentang kesetaraan gender dalam pendidikan formal. Kebanyakan Rektor belum menyediakan dana pengembangan PSW dari anggaran perguruan tinggi. Salah satu perguruan tinggi di Kupang tidak menyediakan anggaran sama sekali pada tahun 2012. PSW menjadi sering bergantung kepada sumber dana luar – yang cukup langka – untuk membiayai penelitian. Kemdikbud menyediakan hibah untuk peningkatan kapasitas PSW serta untuk penelitian dan pengembangan dari Dana Revitalisasi. Saat ini, tugas PSW tidak termasuk pengembangan kesetaraan gender di dalam perguruan tingginya mereka sendiri.

Meskipun adanya kendala seperti disebut di atas, pelembagaan pengarusutamaan gender bisa berhasil jika ada kemauan politik. Salah satu contoh terbaik di Indonesia adalah Kementerian Pekerjaan Umum yang dianugerahi Penghargaan *Best Performance* (Anugrah Parahita Eka Praya) dalam Pengarusutamaan Gender pada tahun 2011. Kementerian Pekerjaan Umum telah melembagakan pengarusutamaan gender secara utuh di seluruh Institusi tersebut sejak tahun 2004, dengan menjamin bahwa semua Direktorat dan jabatan khusus lainnya bertanggung jawab dalam pengarusutamaan gender. Kementerian ini memiliki Kertas Posisi (*Position Paper*) Pengarusutamaan Gender yang jelas sebagai rujukan bagi semua Direktorat dalam penyusunan rencana aksi dan anggaran masing-masing. Sekretariat Pengarusutamaan Gender tetap (*full time*) di bawah Sekretaris Jenderal memantau, mengevaluasi dan melaporkan semua kegiatan di Kementerian dan menyediakan jasa teknis, konsultasi dan koordinasi untuk semua Direktorat.

3.3 Rekomendasi

1. Tinjauan ini mendukung rencana pemindahan Sekretariat Pengarusutamaan Gender, yang saat ini berada di bawah Direktorat Jenderal ke Biro Perencanaan di bawah Sekretaris Jenderal. Hal ini dilakukan agar prioritas dan pelaksanaan kesetaraan gender dalam sektor pendidikan oleh seluruh Direktorat di Kementerian dapat dengan lebih mudah dilaksanakan. Selain itu, hal ini dapat memperkuat kegiatan dan hasil kesetaraan gender untuk semua tingkat pendidikan dari PAUD sampai dengan pendidikan tinggi.
2. Sekretariat Pengarusutamaan Gender di bawah Biro Perencanaan Kemdikbud maupun Kemenag agar dikelola oleh staf yang terlatih (Eselon 3 atau 4.) Hal ini akan memungkinkan Sekretariat untuk memfasilitasi pengembangan kesetaraan dalam strategi pendidikan melalui kerjasama dengan semua Direktorat Jenderal kedua Kementerian tersebut.

3. Memberikan prioritas untuk peningkatan kapasitas pengarusutamaan gender dalam pendidikan bagi para pimpinan Kemdikbud dan Kemenag.
4. Pengembangan strategi di Kemdikbud dan Kemenag yang juga menyertakan upaya pencapaian kesetaraan gender pada semua lembaga pendidikan (tidak hanya menitikberatkan pada kesempatan memperoleh pendidikan/akses melainkan kesetaraan kesempatan dalam proses belajar mengajar, prestasi belajar dan keberhasilan pendidikan). Strategi tersebut perlu menegaskan keterkaitan antara mutu pendidikan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan serta mengukur keberhasilan (*outcome*) upaya yang telah dilakukan. Selain itu, informasi terkait digunakan sebagai masukan untuk Renstra.
5. Peningkatan kapasitas bagi Pokja Gender di daerah. Pengarahan strategis yang jelas bagi Pokja terkait tentang pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi agar Pokja tersebut dapat mempertahankan peningkatan mutu sekolah yang tanggap gender secara konsisten.
6. Kemdikbud mengadakan evaluasi resmi terhadap model uji coba kesetaraan gender dalam pendidikan yang dikembangkan di Kabupaten Sleman, Klaten serta Kabupaten/Kota lain. Evaluasi tersebut termasuk informasi tentang proses dan bahan sebagai rujukan bagi penyebarluasan model tersebut. Kemenag mulai melakukan uji coba model kesetaraan gender di madrasah yang berlokasi di Kabupaten/Kota yang sama dengan Kabupaten/Kota dimana uji coba telah dilaksanakan oleh Kemdikbud. Uji coba model dilaksanakan melalui Pokja Gender yang dibentuk oleh Kemenag bekerjasama dengan lembaga setempat seperti Universitas Islam Negeri (UIN,) Institut Agama Islam Negeri (IAIN,) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN,) dan Pusat Studi Wanita/Gender.
7. Dibutuhkan *Memorandum of Understanding* antara Pemerintah dan lembaga donor untuk menjamin semua bantuan dalam sektor pendidikan yang dibiayai donor juga melakukan pengarusutamaan gender secara komprehensif dalam kegiatan dan programnya.
8. Pusat Studi Wanita/Gender di perguruan tinggi perlu dukungan dalam peningkatan kapasitas penelitian dan pengembangan tentang unsur kesetaraan gender dalam pendidikan formal.
9. Kemdikbud dan Kemenag mengembangkan standar nasional kesetaraan gender untuk lembaga pendidikan. Definisi sekolah tanggap gender menjadi bagian pedoman pelaksanaan untuk sekolah dan digunakan dalam rencana pengembangan sekolah (Rencana Kegiatan Sekolah/RKS dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/RKAS).



Bab 4

Kesetaraan Akses

4.1 Gambaran Umum Pendekatan Netral Gender¹³

Dalam satu dasawarsa terakhir Indonesia telah mencapai kemajuan dalam peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) serta dalam menjaga paritas APM pendidikan di tingkat nasional (Lihat Gambar 5). Selain itu, paritas gender di tingkat nasional juga telah dicapai untuk program keaksaraan bagi penduduk berusia 15-24 tahun (Lihat Gambar 11). Keberhasilan ini merupakan gabungan dari adanya kebijakan yang efektif dan investasi nasional dalam sektor pendidikan yang berkelanjutan. Dengan adanya dua hal tersebut, kini telah tersedia lebih banyak sekolah di daerah pedesaan. Selain itu, biaya sekolah yang bersifat langsung maupun tidak langsung¹⁴ menjadi semakin ringan. Namun hal-hal lain seperti mutu dan relevansi pendidikan juga merupakan pertimbangan yang mempengaruhi keputusan tentang lamanya anak disekolahkan. Pemerintah telah mengembangkan berbagai strategi untuk mengatasi hal-hal ini.¹⁵

4.1.1 Strategi Pemerintah

Program subsidi netral gender seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Beasiswa Miskin dan Keluarga Harapan, serta peningkatan ketersediaan sekolah melalui pembangunan sekolah baru dan perluasan sekolah yang ada (Satu Atap), telah memberi sumbangan terhadap pencapaian sasaran peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan (akses) untuk semua dalam satu dasawarsa terakhir.

Program BOS yang dimulai tahun 2005 merupakan tindakan reformasi kebijakan pembiayaan pendidikan yang paling penting. Program BOS tersebut menjadi pengawal perubahan dari sistem pendidikan yang tersentralisasi menuju sistem yang mendukung Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan pemberdayaan masyarakat. BOS bertujuan meningkatkan kesempatan belajar bagi setiap anak di Indonesia melalui: (i) *block grant* langsung kepada sekolah untuk membiayai kegiatan operasional dimana besaran dana dihitung dengan rumus berdasarkan jumlah murid. Hal ini berdampak pada (ii) pengurangan biaya sekolah bagi orang tua¹⁶ dan (iii) memberi dana BOS kepada semua sekolah negeri, swasta dan madrasah.

13. Pendekatan netral gender termasuk program dan kegiatan di mana gender tidak berpengaruh terhadap keberhasilan dari upaya yang sedang dilakukan. Namun demikian, proses dan hasil yang dicapai tidak mendukung atau meneruskan ketidaksetaraan gender yang telah ada

14. Biaya tidak langsung (*opportunity cost*) yang tinggi seringkali mempengaruhi keputusan apakah anak bersekolah atau tidak. Misalnya, anak yang berusia cukup untuk pendidikan dasar bisa tidak bersekolah karena harus bekerja di rumah atau di ladang.

15. Proses sertifikasi dan kualifikasi guru yang komprehensif saat ini sedang berlangsung. Tujuan proses tersebut yaitu meningkatkan mutu pelayanan pendidikan secara langsung. Pendidikan anak usia dini telah diluncurkan supaya mereka lebih siap untuk bersekolah. Standar Nasional Pendidikan telah dikembangkan dan sedang dilaksanakan secara bertahap.

16. Unsur-unsur biaya tersebut termasuk i) sumbangan/biaya masuk sekolah pertama kali bagi murid baru ii) biaya pendaftaran ulang untuk murid lama iii) biaya pakaian seragam iv) uang sekolah bulanan/semesteran v) biaya buku vi) lembar kerja murid vii) biaya laboratorium komputer viii) sumbangan/biaya koperasi ix) kursus/pelajaran ekstrakurikuler x) biaya pramuka xi) biaya perpisahan bagi murid kelas/tingkat akhir xii) studi banding xiii) dan lain-lain

Sekolah Satu Atap dibangun untuk mengurangi biaya transportasi yang menjadi bagian besar biaya pendidikan menengah pertama. Untuk menjangkau penduduk di pedesaan terpencil Sekolah Satu Atap telah dikembangkan di mana tiga ruang kelas tambahan dibangun untuk kegiatan SMP di sekolah dasar yang sudah ada. Apabila dana tidak tersedia untuk membangun ruang kelas baru, beberapa Sekolah Satu Atap menggunakan gedung SD yang ada pada sore hari untuk kelas SMP dan banyak Sekolah Satu Atap menggunakan guru sekolah dasar untuk mengajar murid SMP.

Program Beasiswa Miskin di Kemdikbud memberi subsidi tambahan (atau dikenal sebagai beasiswa jaring pengaman sosial) untuk murid yang keluarganya hidup di bawah garis kemiskinan. Pemberian subsidi bagi murid dari keluarga tidak mampu agar mereka dapat bersekolah dianggap sebagai prioritas untuk meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM.) Subsidi tersebut diberikan pertama kali kepada murid SD dan SMP dari keluarga tidak mampu setelah krisis ekonomi 1998/1999 dan dilanjutkan hingga tahun 2006. Meskipun anggaran untuk subsidi tersebut dihentikan pada tahun 2007, program beasiswa dimulai kembali pada tahun 2008 untuk meningkatkan angka partisipasi sesuai dengan tujuan *Millennium Development Goals* dan Pendidikan Untuk Semua.

Studi Kasus: Program Beasiswa Miskin

Kepala SMP di Kupang melaporkan bahwa sekolahnya mengalami kesulitan memilih penerima beasiswa karena semua murid termasuk kurang mampu. Namun, dengan mengikuti kriteria seleksi kemiskinan secara ketat serta keterlibatan komite sekolah, keputusan yang berat tersebut dapat dibuat. Kepala Sekolah juga melaporkan walaupun gender tidak menjadi bahan pertimbangan karena tidak masuk dalam kriteria seleksi, dalam setahun terakhir 65 persen dari beasiswa di sekolahnya diberikan kepada murid perempuan.

Sumber: ACDP 005 Penelitian Studi Kasus, Kupang, Februari 2012

Program Beasiswa Miskin Kemenag menyediakan subsidi untuk murid tidak mampu baik di madrasah negeri maupun swasta. Calon penerima yang tidak mampu dan berisiko putus sekolah dicalonkan oleh komite madrasah dan diverifikasi dengan surat dari kelurahan atau desa. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag bertanggung jawab untuk memantau beasiswa tersebut. Data murid penerima beasiswa yang terpilah menurut jenis kelamin tersedia di empat Provinsi - Bali, Kalimantan Timur, Gorontalo, dan Sulawesi Barat. Di Provinsi-provinsi tersebut, sebanyak 37.693 murid telah menerima subsidi dimana 49% penerima adalah perempuan. Hal ini menunjukkan tidak adanya bias gender dalam pembagian subsidi murid miskin. Data Susenas 2009 menunjukkan bahwa alasan utama murid, baik laki-laki maupun perempuan, untuk tidak melanjutkan pendidikannya adalah keadaan ekonomi. Data tersebut juga menunjukkan lebih banyak murid perempuan (7,2%) yang berumur 16 sampai dengan 18 tahun yang putus sekolah karena pernikahan dini di daerah perkotaan dibandingkan dengan murid laki-laki yang hanya sebesar 0,2 persen (lihat Tabel 3).

Anggaran untuk Beasiswa Miskin telah meningkat dua kali lipat dalam 5 tahun terakhir. Hal ini mencerminkan komitmen Pemerintah dalam upaya mencapai Pendidikan Untuk Semua. Lebih dari 7,7 juta murid tidak mampu akan menerima subsidi pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 alokasi ini direncanakan akan meningkat¹⁷. Yang mungkin juga perlu dipertimbangkan adalah peningkatan jumlah subsidi agar murid dapat melanjutkan ke SMP dan SMA karena biaya menjadi kendala bagi murid tidak mampu yang ingin melanjutkan ke tingkat lebih tinggi. Menurut data BPS, selama dasawarsa terakhir proporsi murid perempuan di SMA tampaknya mulai menurun dibandingkan dengan proporsi murid laki-laki (lihat Gambar 6).

17 Biro Perencanaan Kemdikbud

Tabel 1. Jumlah Murid Penerima Beasiswa 2011-2012

Beasiswa Miskin (Kemenag 2011 & Kemdikbud 2012)	
Tingkat Pendidikan	Jumlah Murid
SD	3.530.305
MI	745.758
SMP	1.295.450
MTs	592.015
SMA	505.290
SMK	617.576
MA	397.647
Perguruan Tinggi Kemdikbud	80.000
Total	7.763.630

Sumber: Kemdikbud & Kemenag

Pada pertengahan 2007, Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu program bantuan tunai bersyarat yang diujicobakan di 40 kabupaten/kota di tujuh Provinsi¹⁸ Kemudian cakupan program uji coba tersebut diperluas dan menjangkau 25 Provinsi dan 11 Kabupaten/Kota. Pada tahun 2010, sekitar 778.000 rumah tangga menerima manfaat dari program ini. PKH bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dalam indikator kesehatan dan pendidikan melalui pemberian bantuan tunai bersyarat yang dananya berasal dari anggaran pusat. Adapun persyaratannya adalah kesediaan peserta untuk ikut dalam program kesehatan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. PKH memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin setelah dibuktikan bahwa anak usia sekolah dalam rumah tangga tersebut memenuhi syarat kehadiran di sekolah. Dilaporkan bahwa PKH berhasil meningkatkan kehadiran (jumlah jam belajar di sekolah) bagi murid yang terdaftar SD atau SMP.¹⁹

4.2 Indikator Kinerja: Status dan Kecenderungan Perkembangan Murid

Di Indonesia, berbagai indikator terkait partisipasi di sekolah yang berdasarkan gender memberikan gambaran ringkas yang baik untuk memantau disparitas gender dalam pendidikan. Pemenuhan kebutuhan khusus laki-laki maupun perempuan diperlukan untuk mencapai serta mempertahankan kesetaraan gender dan menjamin semua anak dapat menyelesaikan pendidikannya. Agar kebijakan pendidikan dapat berjalan efektif, sangat diperlukan pemahaman tentang proses terbentuknya perbedaan gender. Perbedaan gender tersebut terbentuk pada beberapa titik perkembangan perempuan dan laki-laki pada saat mereka bersekolah di jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Oleh karena itu, bagian ini mengkaji perbedaan gender dalam hal kesempatan bersekolah (akses), melanjutkan ke tingkat pendidikan berikutnya (*progression*), kelulusan (*completion*) dan keaksaraan.

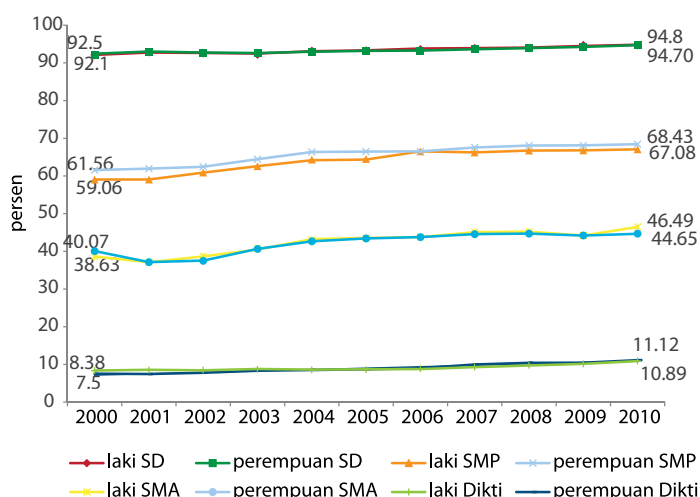
4.2.1 Angka Partisipasi Murni

Selama satu dasawarsa terakhir, Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat nasional telah meningkat untuk laki-laki maupun perempuan pada semua jenjang pendidikan. Sasaran Pendidikan Untuk Semua Nasional adalah mencapai 100% untuk APM SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2015. Secara keseluruhan pada tahun 2010, APM untuk SD/MI mencapai 94,76% sementara untuk SMP/MTs 67,73% dan SMA/MA 45,59%. Selama kurun waktu 2000-2010, peningkatan terbesar dalam APM adalah murid laki-laki di SMP/MTs yaitu sebesar 8,02% dibandingkan dengan kenaikan APM perempuan untuk tingkat yang sama sebesar 6,87%. Demikian juga, APM laki-laki untuk pendidikan menengah atas menunjukkan peningkatan sebesar 7,86% yaitu lebih besar dibandingkan kenaikan APM perempuan sebesar 4,58% (lihat Gambar 5). Untuk pendidikan tinggi, APM tahun 2010 telah meningkat menjadi 11,1% untuk perempuan dan 10,8% untuk laki-laki.

18. Tujuh Provinsi tersebut yaitu Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo dan Nusa Tenggara Timur

19. SMERU. 2011. "Studi Dampak Kualitatif PNP-Generasi dan PKH terhadap Penyediaan dan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak serta Pelayanan Pendidikan Dasar di Provinsi Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur." Laporan Penelitian. Jakarta: Lembaga SMERU.

Gambar 5. Perkembangan APM Menurut Jenjang Pendidikan 2000-2010

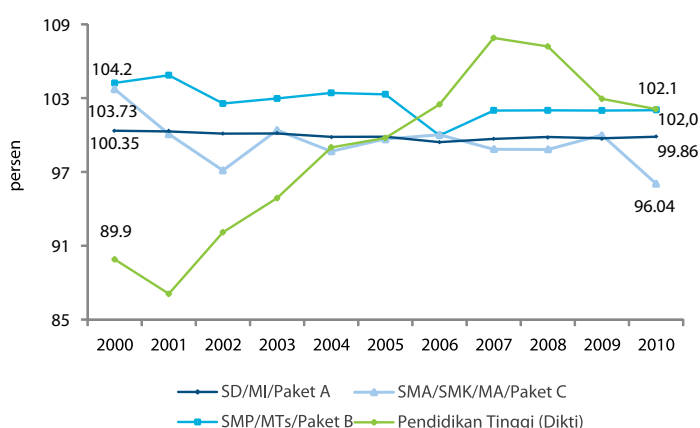


Sumber: Susenas 2010, BPS (termasuk formal, non formal dan madrasah)

4.2.2 Indeks Paritas Gender (IPG)²⁰ dalam Angka Partisipasi Murni (APM)

Selama satu dasawarsa terakhir, perbandingan jumlah perempuan terhadap laki-laki dalam Angka Partisipasi Murni nasional tidak berubah kecuali untuk pendidikan menengah atas di mana telah terjadi sedikit penurunan terkait proporsi perempuan. Data Susenas (Gambar 6) menunjukkan perbandingan APM laki-laki terhadap APM perempuan untuk semua jenjang pendidikan pada tahun 2010. Hasilnya berkisar antara 96% sampai 102% persen.²¹ Pada tahun 2010, IPG untuk pendidikan dasar (SD/MI/Paket A) adalah 99,9%, sedangkan untuk pendidikan menengah pertama (SMP/MTs/Paket B) sebesar 102%. Untuk pendidikan menengah atas (SMA/MA/Paket C) dalam lima tahun terakhir, perbandingan APM perempuan terhadap laki-laki menunjukkan penurunan dari 100% pada tahun 2006 menjadi 96% pada tahun 2010. Sementara itu, IPG dalam APM pendidikan tinggi menunjukkan kecenderungan meningkat secara signifikan selama satu dasawarsa terakhir. Pada tahun 2000, perbandingan APM perempuan terhadap laki-laki di pendidikan tinggi sebesar 89,8%, kemudian pada tahun 2010 telah meningkat menjadi 102,1%. Sehubungan dengan itu, dapat disimpulkan saat ini telah terjadi kesetaraan gender dalam APM pendidikan tinggi di Indonesia.

Gambar 6. Perkembangan IPG dari APM Menurut Tingkat Pendidikan

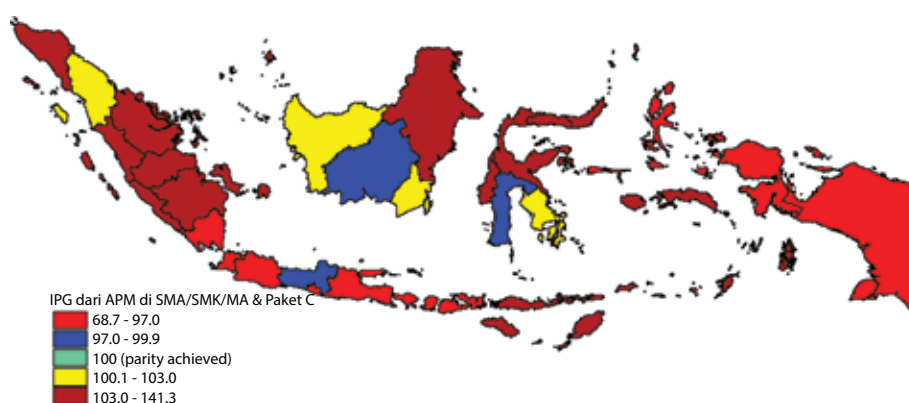


Sumber: Susenas, CBS

20. Indeks Paritas Gender (IPG): perbandingan jumlah perempuan per laki-laki dalam bidang tertentu. Dalam hal APM, nilai IPG sebesar 100 menunjukkan partisipasi yang setara antara perempuan dan lelaki pada kelompok umur formal tertentu; angka IPG lebih tinggi dari 100% menandakan partisipasi perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki; sedangkan pada angka yang lebih rendah dari 100% menunjukkan partisipasi yang lebih tinggi untuk laki-laki dibandingkan perempuan.
21. UNESCO (2003) telah menetapkan kisaran nilai IPG 0,97-1,03 sebagai pencapaian kesetaraan gender. Laporan ini menyajikan IPG dalam persentase sehingga kisaran nilai 97%-103% dianggap sebagai pencapaian kesetaraan gender.

Kesenjangan APM antar provinsi masih menjadi tantangan, terutama untuk pendidikan menengah atas. Data Susenas 2010 menunjukkan bahwa IPG dalam APM untuk pendidikan dasar berkisar antara 96,9% (Papua Barat) sampai 103% (Kepulauan Riau) dan perbandingan APM perempuan terhadap APM laki-laki hampir sama di antara semua provinsi. Untuk pendidikan menengah pertama, IPG berkisar antara 90,4% (Papua) sampai 117% (Gorontalo). Di tiga Provinsi (Gorontalo, Nusa Tenggara Timur dan Yogyakarta), IPG melebihi 110%, yang menunjukkan bahwa APM perempuan lebih tinggi dari APM laki-laki. Sebaliknya, tiga Provinsi (Bali, Maluku Utara dan Papua) memiliki IPG di bawah 95% untuk pendidikan menengah pertama yang menunjukkan APM perempuan lebih rendah dari APM laki-laki. Untuk pendidikan menengah atas, IPG berkisar antara 68,7% (Papua Barat) sampai 142% (Kepulauan Riau). Di lima Provinsi (Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Timur), IPG juga melebihi 110% yang menunjukkan APM perempuan lebih tinggi dari APM laki-laki. Sebaliknya enam Provinsi (Jakarta, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Papua) memiliki IPG di bawah 90% untuk pendidikan menengah atas yang menunjukkan APM perempuan secara signifikan lebih rendah dari APM laki-laki (lihat Gambar 7).

Gambar 7. Peta IPG dalam APM Sekolah Menengah Atas 2010



Sumber: Susenas2010, BPS (termasuk SMA/SMK/MA & Paket C)

Kenaikan signifikan tingkat partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi terlihat jelas meskipun APM masih relatif rendah (11,1% untuk perempuan dan 10,9% untuk laki-laki, tahun 2010). Data pendidikan tinggi Susenas 2010 menunjukkan bahwa IPG dalam APM di 13 Provinsi berkisar antara 120% dan 148,6% yang menunjukkan APM perempuan lebih tinggi dari APM laki-laki. Data tren dalam Gambar 5 juga menunjukkan telah terjadi peningkatan yang besar dalam APM perempuan untuk jenjang pendidikan tinggi selama satu dasawarsa terakhir, terutama dalam lima tahun terakhir. Hanya empat Provinsi (Jawa Barat, Jakarta, DI Yogyakarta dan Papua) yang menunjukkan IPG kurang dari 90% yaitu APM perempuan lebih rendah dari APM laki-laki.

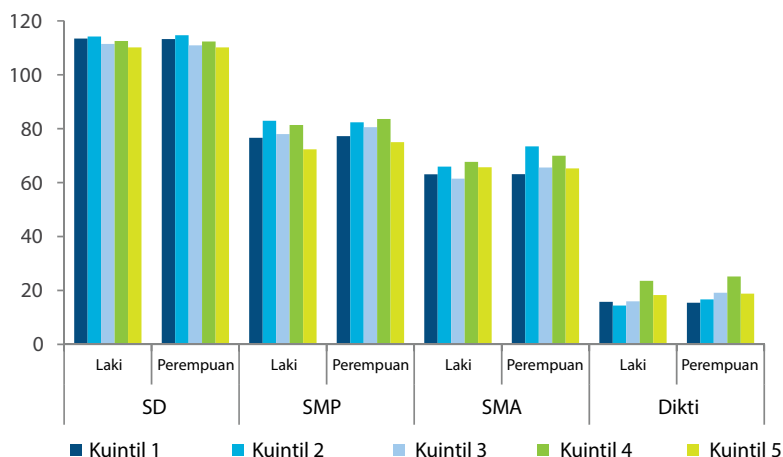
Peningkatan terbesar dalam APM perempuan di hampir semua wilayah di dunia terjadi untuk jenjang pendidikan tinggi. Kecenderungan jangka panjang tersebut menunjukkan bahwa peralihan dari dukungan terhadap partisipasi laki-laki menjadi dukungan terhadap partisipasi perempuan telah terjadi di banyak tempat. Partisipasi perempuan telah melampaui laki-laki selama puluhan tahun di Eropa Tengah dan Timur, Amerika Utara dan Eropa Barat (mulai sebelum pertengahan 1980an), Amerika Latin dan Karibia (sejak pertengahan 1990an), dan baru-baru ini di Asia Tengah.²² Di Indonesia, laki-laki memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk langsung bekerja setelah SMA daripada perempuan.

4.2.3 APM dan Gender Menurut Kuintil Kemiskinan

Hipotesa yang menyatakan bahwa 'semakin miskin suatu keluarga, semakin rendah partisipasi sekolah anak perempuannya' didukung data empiris di Indonesia. Untuk pendidikan dasar, APM perempuan dari kuintil termiskin hampir sama dengan anak laki-laki; sedikit lebih tinggi untuk perempuan di pendidikan menengah pertama, dan sedikit lebih rendah untuk perempuan di pendidikan menengah atas. Untuk APM dalam kuintil terkaya, proporsi laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan (Gambar 9) Analisis Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan pola yang sama (Gambar 8).

22. UNESCO. 2010. *Global Education Digest 2010: Comparing Education Statistics*

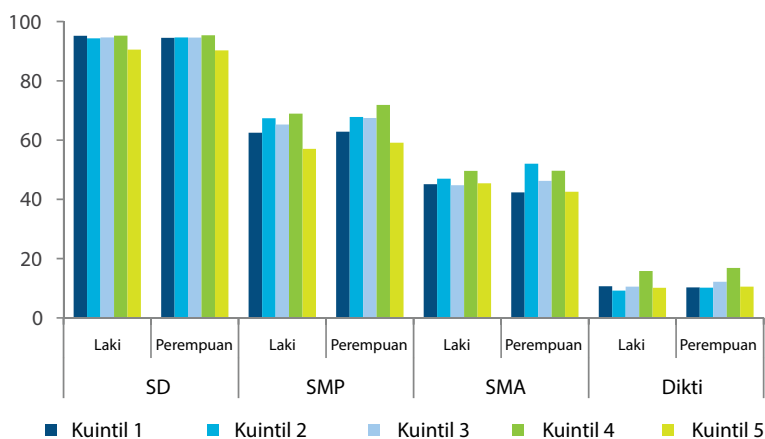
Gambar 8. Angka Partisipasi Kasar menurut Kuintil Kemiskinan dan Gender, 2010



Sumber: BPS

Namun, kesenjangan APM antara golongan yang mampu dan kurang mampu di pendidikan dasar dan menengah pertama lebih besar daripada kesenjangan APM antara laki-laki dan perempuan (dalam masing-masing golongan). Dalam hubungan ini, peningkatan kesempatan pendidikan (akses) bagi rakyat miskin masih merupakan salah satu tantangan yang tetap harus dihadapi. Peningkatan anggaran untuk rakyat miskin dari Kemdikbud melalui Program Beasiswa Miskin - bersamaan dengan meningkatnya ketersediaan sekolah dan perguruan tinggi di daerah yang membutuhkan - diperkirakan akan membantu meningkatkan kesempatan bersekolah (akses) untuk murid tidak mampu.

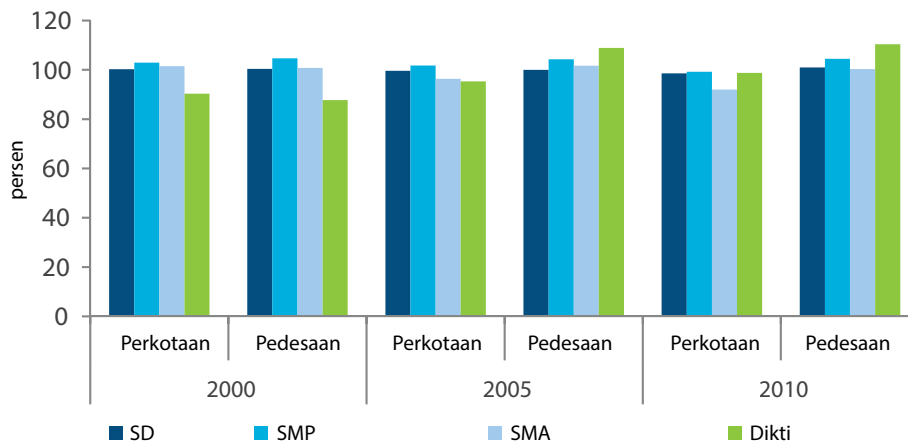
Gambar 9. APM menurut Kuintil Kemiskinan dan Gender



Sumber: BPS

Terkait kesenjangan kota-desa, data Susenas menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan IPG dalam APM antara daerah pedesaan dengan perkotaan untuk pendidikan dasar dan menengah pertama (Gambar 10). Namun, untuk pendidikan menengah atas tahun 2010, IPG dalam APM di daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan. Ada penurunan IPG dalam APM untuk pendidikan menengah atas di daerah perkotaan selama satu dasawarsa terakhir. Pada tahun 2000 kesetaraan gender dalam APM di daerah perkotaan telah mencapai 101,5% namun pada tahun 2010 turun menjadi 92%.

Gambar 10. Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki-laki (IPG dalam APM) menurut pedesaan/perkotaan, Tahun 2000, 2005 dan 2010

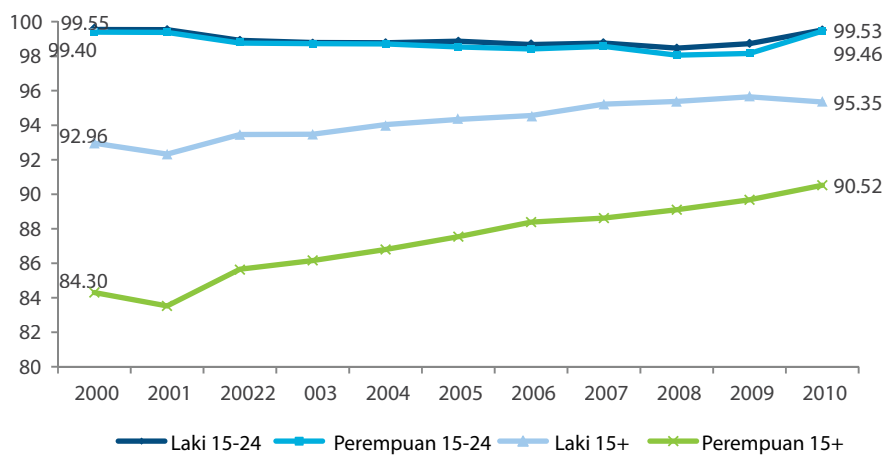


Sumber: SUSENAS

4.2.4 Keaksaraan Usia 15-24 tahun²³

Tingkat keaksaraan nasional bagi orang berusia 15-24 telah mencapai 99,9% pada tahun 2010, terdiri dari 99,46% untuk perempuan dan 99,53% untuk laki-laki. Tingkat keaksaraan nasional untuk kelompok usia 15+ meningkat selama dasawarsa terakhir dan mencapai 94,9% pada tahun 2010, dengan 90,5% untuk perempuan dan 95,3% untuk laki-laki berumur 15 tahun ke atas.

Gambar 11. Perkembangan Angka Keaksaraan menurut Laki-laki/Perempuan, 2000-2010



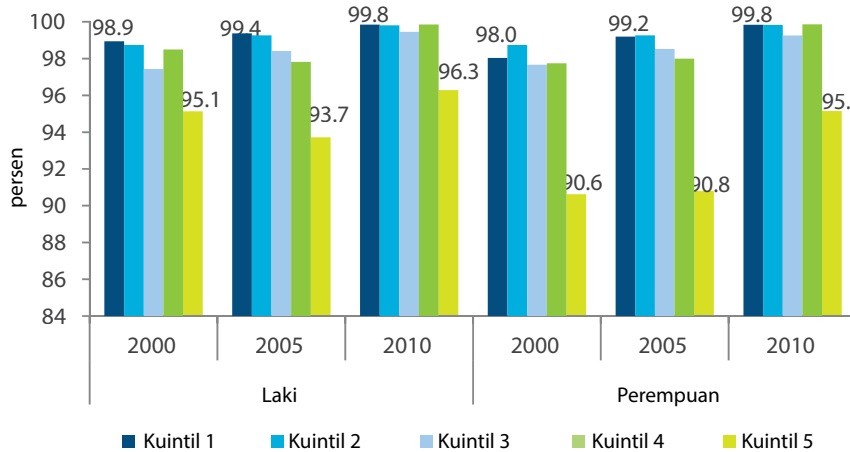
Sumber: SUSENAS, BPS

Di tingkat provinsi, Papua baru mencapai tingkat keaksaraan perempuan sebesar 77,4% yang jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki sebesar 83,3%. Empat Provinsi lainnya yang belum mencapai tingkat keaksaraan 100% termasuk Papua Barat 96,9% untuk perempuan dan 98,5% untuk laki-laki; Sulawesi Barat baru mencapai tingkat keaksaraan perempuan sebesar 97,2% yang lebih rendah dibandingkan laki-laki sebesar 98,4%, sedangkan tingkat keaksaraan untuk Sulawesi Selatan adalah 98,3% untuk perempuan dan 98,6% untuk laki-laki. Di NTT, tingkat keaksaraan perempuan sebesar 98,1%, lebih tinggi dibandingkan laki-laki sebesar 97,9% (Susenas 2010).

23. Keaksaraan Remaja: Jumlah orang berusia 15 sampai 24 tahun yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana/pendek tentang kehidupan mereka sehari-hari, dibagi dengan penduduk dalam kelompok umur tersebut. Umumnya, pengertian 'keaksaraan' termasuk juga 'menghitung', yaitu kemampuan untuk membuat perhitungan aritmatika sederhana

Angka Keaksaraan perempuan dan laki-laki kelompok usia 15-24 tahun menurut kuintil sosial-ekonomi telah mengalami konvergensi dalam lima tahun terakhir dan hampir mencapai 100%, kecuali untuk kuintil termiskin yang masih tertinggal. Namun, tingkat keaksaraan untuk laki-laki maupun perempuan, terutama dalam kuintil termiskin, telah meningkat selama lima tahun terakhir. Angka Keaksaraan perempuan telah meningkat dari 90,79% pada tahun 2005 menjadi 95,15% pada tahun 2010. Angka Keaksaraan laki-laki memperlihatkan peningkatan yang lebih kecil, yaitu dari 93,72% pada tahun 2005 menjadi 96,28% pada tahun 2010.

Gambar 12. Angka Melek Huruf Perempuan dan Laki-laki usia 15-24 tahun menurut kuintil kemiskinan, Tahun 2010

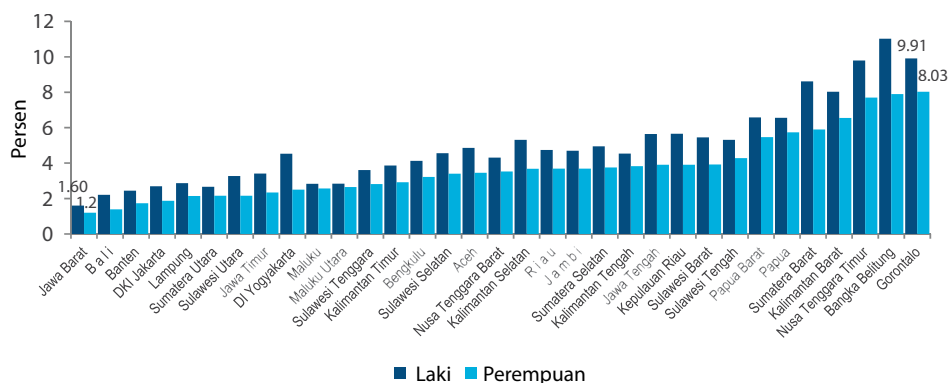


Sumber: Susenas

4.2.5 Angka Mengulang²⁴

Angka Mengulang tertinggi secara keseluruhan terjadi pada pendidikan dasar, dimana Angka Mengulang laki-laki rata-rata di seluruh provinsi lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kecenderungan data nasional dari Kemdikbud 2003-2010 menunjukkan bahwa Angka Mengulang mengalami peningkatan kecil untuk laki-laki dalam pendidikan dasar sementara untuk perempuan menurun (Tabel 2). Kesenjangan provinsi dalam Angka Mengulang jelas terlihat dimana Angka Mengulang untuk laki-laki di 11 Provinsi lebih dari 5%. Di Provinsi Bangka Belitung, Angka Mengulang untuk laki-laki mencapai 11,02% dan diikuti oleh Provinsi Gorontalo sebesar 10%. Provinsi yang mempunyai Angka Mengulang terendah untuk laki-laki adalah Jawa Barat sebesar 1,6%. Untuk perempuan, terdapat 7 Provinsi yang mempunyai Angka Mengulang untuk pendidikan dasar yang lebih tinggi dari 5%. Provinsi Gorontalo memiliki persentase tertinggi dengan 8% sementara Provinsi Jawa Barat terendah dengan 1,2% (lihat Gambar 13).

Gambar 13. Angka Mengulang di Tingkat SD Menurut Provinsi 2009/10



Sumber: Kemdikbud

24. Angka Mengulang Berdasar Kelas (*Repetition Rate*): Proporsi murid dari kohort yang terdaftar dalam kelas tertentu pada tahun ajaran tertentu yang masih berada di kelas yang sama pada tahun ajaran berikutnya

Kecenderungan Angka Mengulang Nasional tahun 2003-2010 untuk pendidikan menengah pertama dan atas menunjukkan angka yang relatif konstan, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Menurut data Kemdikbud (lihat Tabel 2), kesenjangan gender dapat dilihat di pendidikan menengah pertama di 26 Provinsi di mana laki-laki menunjukkan Angka Mengulang yang lebih tinggi daripada perempuan. Angka Mengulang tertinggi tercatat di Maluku Utara yaitu 1,89% untuk laki-laki dan 2,09% untuk perempuan. Tingkat mengulang terendah tercatat di Bali, yaitu 0,12% untuk laki-laki dan 0,05% untuk perempuan. Untuk pendidikan menengah atas, 31 Provinsi menunjukkan Angka Mengulang yang lebih tinggi untuk laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Angka Mengulang tertinggi untuk laki-laki maupun perempuan terdapat di Papua, yaitu 1,75% untuk laki-laki dan 1,63% untuk perempuan; sedangkan terendah tercatat di Bali yaitu 0,19% untuk laki-laki dan 0,04% untuk perempuan. Di luar negeri, baik negara maju maupun negara berkembang juga mengalami hal yang sama. Penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang erat antara Angka Mengulang dengan Angka Putus Sekolah, yaitu anak yang mengulang memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk putus sekolah pada tahun-tahun berikutnya.²⁵

Tabel 2. Kecenderungan Angka Mengulang di SD, SMP dan SMA

Tahun	SD		SMP		SMA	
	Laki	Perempuan	Laki	Perempuan	Laki	Perempuan
2003/04	3,78	3,87	0,74	0,24	0,41	0,14
2004/05	5,57	3,55	0,73	0,27	0,48	0,28
2005/06	4,77	3,06	0,57	0,37	0,32	0,12
2006/07	4,55	3,03	0,71	0,34	0,72	0,34
2007/08	3,65	2,25	0,53	0,31	0,66	0,36
2008/09	4,42	2,70	0,52	0,26	0,55	0,30
2009/10	4,10	3,03	0,33	0,43	0,55	0,27

Sumber: Kemdikbud

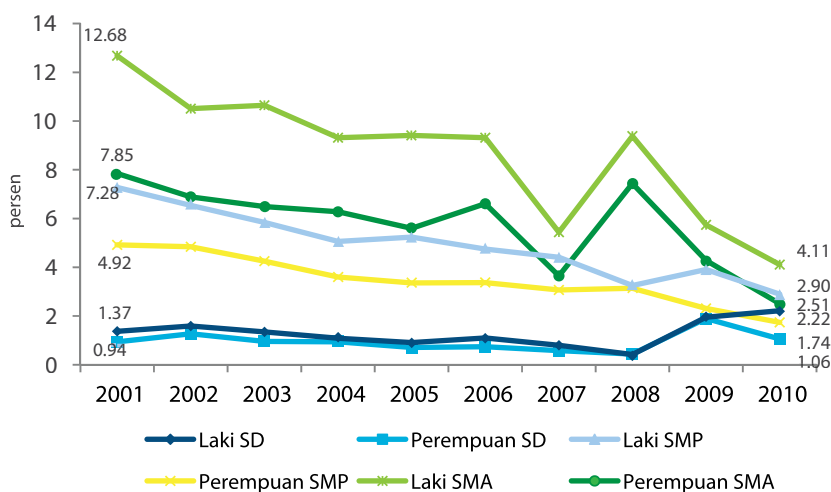
4.2.6 Angka Putus Sekolah (*Drop Out*)²⁶

Dalam rangka mencapai tujuan wajib belajar 9 tahun, selain mendukung agar anak masuk sekolah juga tidak kalah penting adalah dukungan agar mereka dapat menyelesaikan sekolahnya hingga kelas terakhir. Ada berbagai alasan mengapa anak putus sekolah atau meninggalkan sekolah sebelum lulus, sebagaimana diuraikan di atas. Salah satu indikator untuk memantau kemajuan murid adalah Angka Putus Sekolah. Gambar 14 menunjukkan bahwa Angka Putus Sekolah untuk laki-laki dan perempuan telah berkurang secara cukup signifikan selama satu dasawarsa terakhir untuk pendidikan menengah pertama dan atas. Sejak tahun 2001 sampai 2010, Angka Putus Sekolah murid laki-laki di pendidikan menengah atas tetap yang tertinggi pada 4,11%, dibandingkan dengan perempuan pada 2,51%. Akan tetapi sejak tahun 2002, Angka Putus Sekolah murid laki-laki untuk pendidikan menengah atas tersebut juga telah memperlihatkan penurunan yang terbesar (-6,4%). Untuk pendidikan dasar, data menunjukkan bahwa Angka Putus Sekolah murid laki-laki meningkat sedikit sejak tahun 2008. Kemdikbud mencatat 995.956 murid putus sekolah pada tahun 2010 (termasuk madrasah), dengan 442.670 murid berasal dari pendidikan dasar (191.717 perempuan dan 250.953 laki-laki), 310.593 dari pendidikan menengah pertama (145.005 perempuan dan 165.588 laki-laki) dan 242.693 dari pendidikan menengah atas (137.854 laki-laki dan 104.839 perempuan).

²⁵ Ibid.

²⁶ Angka Putus Sekolah berdasarkan kelas (*Drop Out Rate*): Proporsi murid dari kohor yang terdaftar dalam suatu kelas pada tahun ajaran tertentu yang tidak terdaftar lagi pada tahun ajaran berikutnya

Gambar 14. Perkembangan Angka Putus Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan 2001-2010



Sumber: BPS (2001-2008) Kemdikbud (2009-2010)

Data tingkat provinsi menunjukkan, Angka Putus Sekolah di SD/MI lebih tinggi untuk laki-laki daripada perempuan dan hal ini terjadi di 25 Provinsi. Ada enam Provinsi (Papua Barat, Sulawesi Barat, Aceh, Riau, Sumatra Barat dan Bangka Belitung) yang memiliki Angka Putus Sekolah lebih tinggi untuk laki-laki dibanding perempuan yang perlu mendapatkan perhatian serius, di mana Angka Putus Sekolah paling tinggi sebesar 4,88% di Papua Barat. Ada tiga Provinsi (NTT, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur) yang memiliki Angka Putus Sekolah lebih tinggi untuk perempuan dibanding laki-laki, dengan Angka Putus Sekolah untuk perempuan tertinggi sebesar 4,79% di Kalimantan Timur. Pada tingkat SMP/MTs sebanyak 25 Provinsi menunjukkan DO lebih tinggi bagi peserta didik laki-laki. Ada enam Provinsi (NTB, Sulawesi Barat, Riau, Jawa Barat, Banten dan Lampung) yang menunjukkan Angka Putus Sekolah lebih tinggi untuk murid laki-laki daripada perempuan, dengan Angka Putus Sekolah untuk murid laki-laki tertinggi sebanyak 8,85% di Riau. Sedangkan Angka Putus Sekolah murid perempuan tertinggi sebesar 5,57% terjadi di Gorontalo. Pada tingkat SMA/MA terdapat 23 Provinsi termasuk Jawa Timur, Bangka Belitung, Aceh, Riau, dan Sumatera Barat yang menunjukkan Angka Putus Sekolah lebih tinggi untuk murid laki-laki dibandingkan perempuan. Riau memiliki Angka Putus Sekolah murid laki-laki tertinggi sebesar 10,69%. Angka bagi peserta didik perempuan paling tinggi (7,49%) terjadi di Kalimantan Barat.

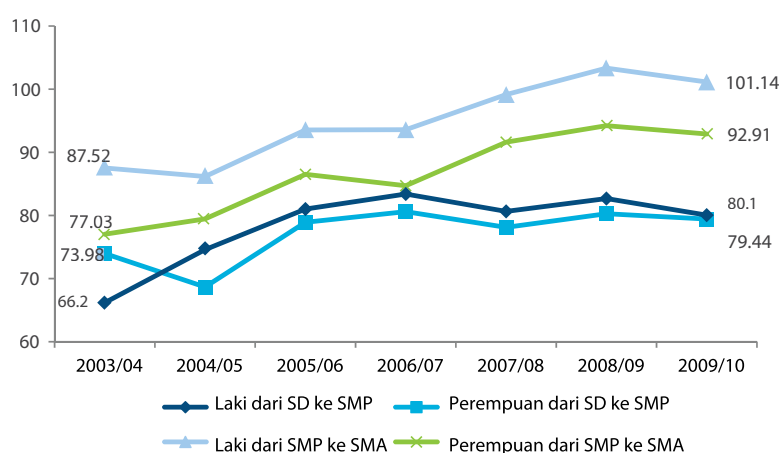
Ada beberapa kondisi yang bisa digunakan untuk mendeteksi kemungkinan anak berisiko atau rentan terhadap putus sekolah. Kondisi ini termasuk pengulangan kelas, prestasi rendah, dan di mana anak memulai sekolah pada usia yang lebih tua dibanding anak sekelas. Selain itu, kondisi lainnya termasuk anak yang sering tidak hadir atau anak yang pernah keluar sementara dari sekolah. Walaupun belum jelas bahwa pengulangan kelas meningkatkan kemungkinan anak yang bersangkutan akhirnya akan lulus, tetapi yang jelas adalah bahwa pengulangan kelas memperbesar rentang usia di kelas tertentu dan meningkatkan kemungkinan putus sekolah (Hunt, 2008; Lewin, 2008). Persepsi orang tua juga mempengaruhi anak putus sekolah.

Di Kabupaten Gorontalo, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mengatakan, "Bersekolah, bahkan pada jenjang pendidikan dasar pun tidak dirasakan oleh banyak orangtua di daerah pedesaan dan terpencil sebagai hal yang berharga bagi keluarga dalam jangka pendek. Pola pikir orang tua perlu diubah. Program pendidikan keluarga Bina Lingkungan Keluarga sedang dipromosikan di tahun 2012 untuk sosialisasi nilai-nilai jangka panjang pendidikan kepada para orang tua miskin. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang bekerjasama dengan sektor lain akan memperkenalkan sebuah program baru dalam pengembangan industri rumah tangga dengan sasaran orang tua miskin termasuk beasiswa untuk mendukung anak-anak mereka melanjutkan ke SMP dan SMA."

4.2.7 Angka Melanjutkan²⁷

Angka Melanjutkan menunjukkan tren meningkat selama sepuluh tahun terakhir di tingkat nasional baik untuk laki-laki maupun perempuan (lihat Gambar 15). Data Kemdikbud menunjukkan bahwa sejak dimulainya program BOS tahun 2004/2005, Angka Melanjutkan untuk perempuan telah meningkat sebesar 10,7% dibandingkan 5,5% untuk laki-laki. Saat ini sudah hampir tidak ada kesenjangan gender dalam hal melanjutkan ke pendidikan menengah pertama antara laki-laki dan perempuan pada tingkat nasional. Hal ini menunjukkan bahwa BOS dan program subsidi lainnya serta meningkatnya ketersediaan sekolah setingkat SMP berdampak positif untuk mencapai sasaran Pemerintah Indonesia yaitu meningkatkan akses baik untuk laki-laki maupun perempuan dalam pendidikan dasar sembilan tahun. Angka Melanjutkan ke pendidikan menengah atas menunjukkan peningkatan besar selama satu dasawarsa terakhir meskipun data Kemdikbud menunjukkan bahwa Angka Melanjutkan ke pendidikan menengah atas untuk perempuan hampir 10% lebih kecil dibanding Angka Melanjutkan untuk laki-laki.

Gambar 15. Trend Angka Melanjutkan menurut Laki-laki/Perempuan 2003/04-2009/10



Sumber: Kemdikbud

Kesenjangan dalam Angka Melanjutkan ke pendidikan menengah pertama di tingkat provinsi terlihat jelas. Menurut data Kemdikbud 2009/2010 (lihat Gambar 16), dua Provinsi (Sulawesi Utara dan DKI Jakarta) telah mencapai 100% Angka Melanjutkan untuk perempuan maupun laki-laki. Sebelas Provinsi berikutnya (dalam Gambar 16) memiliki Angka Melanjutkan 80% atau lebih untuk laki-laki dan perempuan. Angka Melanjutkan terendah terjadi di Nusa Tenggara Barat (64% untuk perempuan dan 66,9% untuk laki-laki), Kalimantan Selatan (64,8% untuk perempuan dan 67,1% untuk laki-laki) dan di Gorontalo (68,1% untuk perempuan dan 73,2% untuk laki-laki).

Gorontalo: Alasan bagi laki-laki dan perempuan untuk tidak melanjutkan ke SMP atau SMA

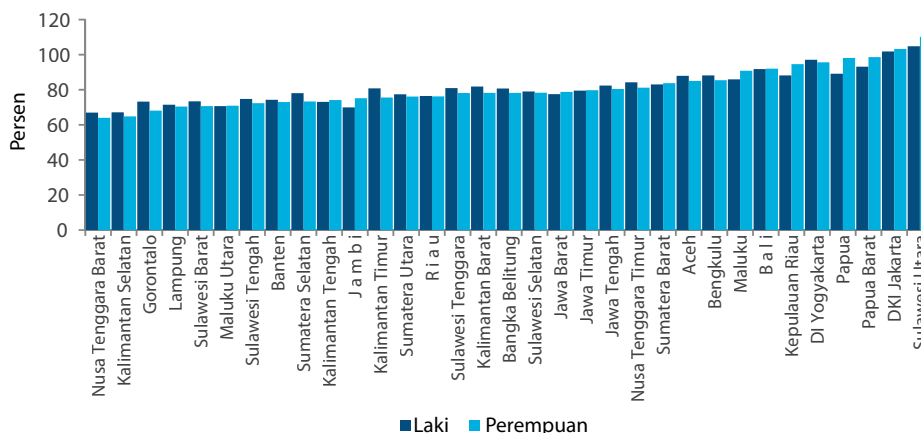
Kepala Sekolah di Gorontalo berpendapat bahwa "Beberapa murid, laki-laki maupun perempuan dari keluarga miskin di daerah perkotaan tidak melanjutkan sekolah ke SMP atau SMA terutama karena mereka menjadi pekerja di bawah umur di pasar tradisional dengan upah rendah. Banyak murid di daerah pedesaan terpicil dari keluarga petani miskin tidak melanjutkan sekolah setelah SD karena menjadi pekerja di bawah umur dengan upah rendah, terutama pada masa panen padi. Untuk menanggapi masalah ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo menawarkan "sekolah sore atau malam ditambah dengan kunjungan guru tutor untuk mencegah putus sekolah/tidak melanjutkan untuk murid miskin."

Kepala SMP di Gorontalo berpendapat bahwa "di SMP kami jumlah laki-laki dari keluarga miskin yang putus sekolah untuk bekerja lebih banyak dari perempuan."

Sumber: ACDP 005 Penelitian Studi Kasus, FGD Maret 2012

27. Angka Melanjutkan (*Transition Rate*): Jumlah murid yang diterima di kelas satu dari tingkat pendidikan yang lebih tinggi pada tahun tertentu. Dihitung sebagai persen dari jumlah murid keseluruhan yang terdaftar di kelas akhir dari tingkat pendidikan yang lebih rendah pada tahun sebelumnya.

Gambar 16. Angka Melanjutkan dari SD ke SMP Menurut Provinsi, 2009/10

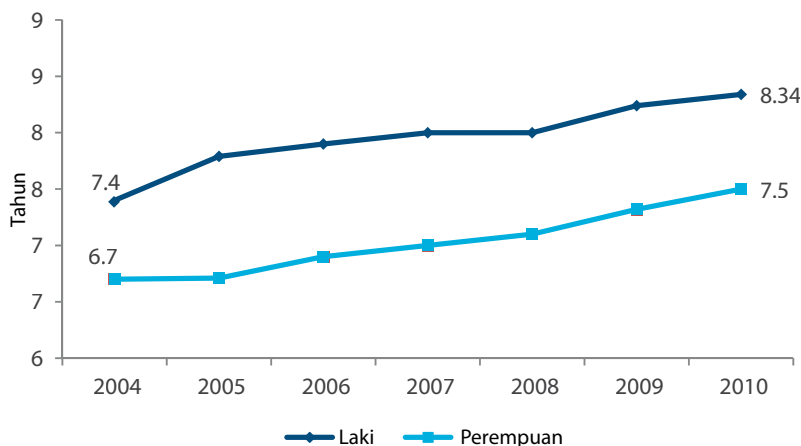


Sumber: Kemdikbud

4.2.8 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)²⁸

Menurut data Susenas Rata-rata Lama Sekolah (RLS) telah meningkat sejak 2004. Pada tahun 2010, RLS untuk perempuan lebih rendah yaitu sebanyak 7,5 tahun dibandingkan dengan laki-laki 8,3 tahun (lihat Gambar 17).

Gambar 17. Perkembangan Rata-rata Lama Bersekolah, 2004-2010

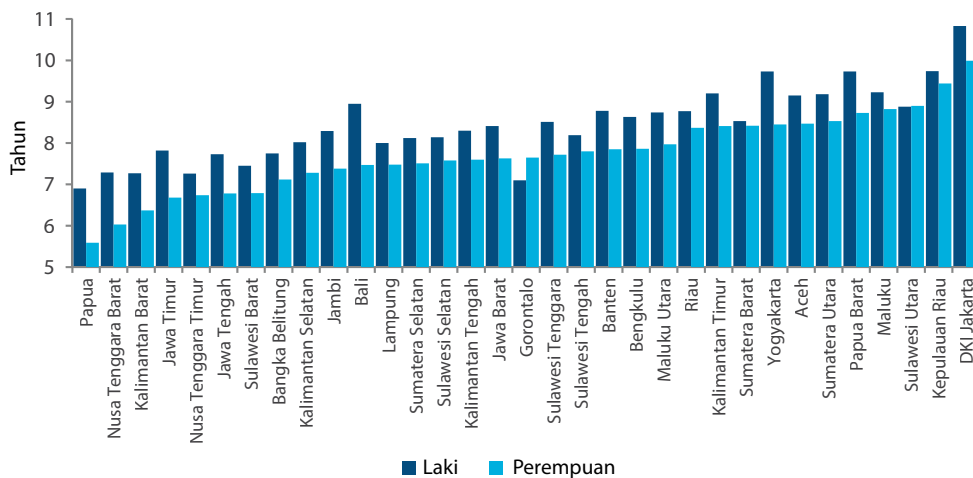


Sumber: Susenas, BPS

Terdapat kesenjangan antar provinsi dalam RLS. Sebanyak 12 Provinsi tercatat RLS-nya di bawah rata-rata nasional sebesar 7,5 tahun untuk perempuan dan 14 Provinsi di bawah rata-rata nasional sebesar 8,3 tahun untuk laki-laki (lihat Gambar 18). Papua memiliki RLS terendah untuk perempuan maupun laki-laki, masing-masing sebanyak 5,5 tahun dan 6,9 tahun. Pada ujung paling kanan dalam Gambar 18, DKI Jakarta mempunyai RLS tertinggi sebanyak 10,8 tahun untuk laki-laki dan 9,9 tahun untuk perempuan. Hanya ada dua provinsi yang menunjukkan RLS yang sama bagi laki-laki dan perempuan yaitu Sulawesi Utara dan Sumatera Barat.

28. Rata-rata Lama Sekolah (*Mean Years of Schooling*): adalah rata-rata jumlah tahun pendidikan yang diterima oleh seseorang yang berusia 15 tahun ke atas. Jumlah tahun pendidikan ini kemudian dikonversi dengan menggunakan jumlah waktu resmi (tidak termasuk waktu untuk mengulang) untuk setiap tingkat pendidikan.

Gambar 18. Rata-rata Lama Bersekolah Menurut Provinsi pada Tahun 2010



Sumber: Susenas 2010, BPS

4.3 Indikator Kinerja: Status dan Perkembangan Guru/Tenaga Pendidik

4.3.1 Rasio Gender bagi Guru yang Berkualifikasi dan Bersertifikasi

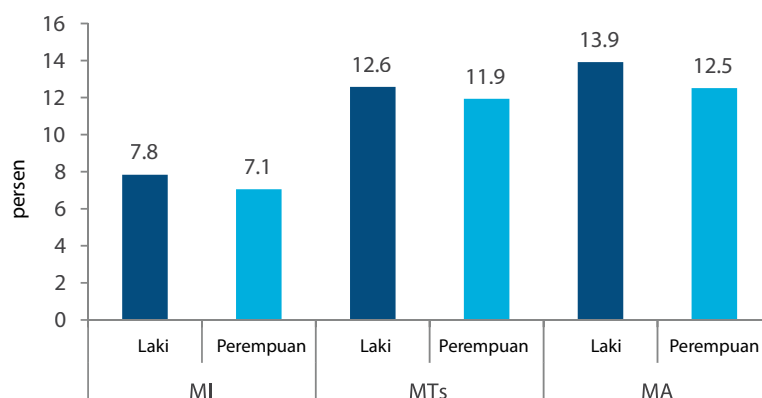
Undang-undang Guru tahun 2005 bertujuan memberikan insentif bagi guru untuk meningkatkan kualifikasi dan keterampilan profesional mereka. Intinya, UU Guru memberikan mandat untuk reformasi yang komprehensif yang berlaku untuk seluruh pelayanan pengajaran. Guru diwajibkan memenuhi dua syarat. Pertama, semua guru wajib memiliki kualifikasi akademik minimum empat tahun pendidikan setelah SMA atau gelar S1 (setara dengan gelar “*bachelor*”). Kedua, setelah mencapai kualifikasi akademik, guru (*in-service*) harus lulus ujian portofolio. Calon guru (*pre-service*) harus menempuh satu atau dua semester pelatihan profesional dan lulus ujian sertifikasi. Guru bersertifikasi menerima tunjangan profesi tambahan sebesar gaji pokok mereka dan guru bersertifikasi yang ditugaskan ke daerah terpencil menerima tambahan tunjangan khusus yang juga sama besarnya dengan gaji pokok mereka. UU Guru merupakan upaya ambisius untuk meningkatkan mutu guru Indonesia dan sekaligus merupakan pengendalian mutu terhadap mahasiswa yang ingin menjadi guru (pendidikan *pre-service*) atau untuk meningkatkan kualifikasi guru (pelatihan *in-service*) yang masih rendah.

Semua perguruan tinggi yang menghasilkan guru dikelompokkan menjadi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), di antaranya 31 perguruan tinggi yang telah dipilih untuk mengelola proses sertifikasi²⁹. Di dalam wawancara untuk Survei Sekolah dan Kabupaten³⁰ 2009/2010, beberapa guru, terutama guru perempuan, mengatakan bahwa jarak terlalu jauh dari rumah ke LPTK (yang umumnya terletak di ibukota Provinsi). Hal ini sering menjadi kendala mereka untuk mengajukan sertifikasi karena mereka harus sering mendatangi LPTK tersebut untuk mengurus proses sertifikasi. Data Kementerian Agama 2009/10 (Gambar 19) menunjukkan bahwa jumlah guru laki-laki bersertifikasi sedikit lebih besar dari jumlah perempuan. Data Kemdikbud tidak berhasil diperoleh untuk Tinjauan ini.

29. Menurut Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No.057/O/2007, terdapat 31 perguruan tinggi yang dipilih untuk mengelola sertifikasi. Perguruan tinggi tersebut tersebar dari Universitas Syiah Kuala di Aceh hingga Universitas Cenderawasih di Papua. Rata-rata terdapat satu LPTK di setiap provinsi di Indonesia

30. AusAID 2010. AIBEP Ringkasan Laporan Survei Sekolah dan Kecamatan (Bagian 4, Bab 5-9)

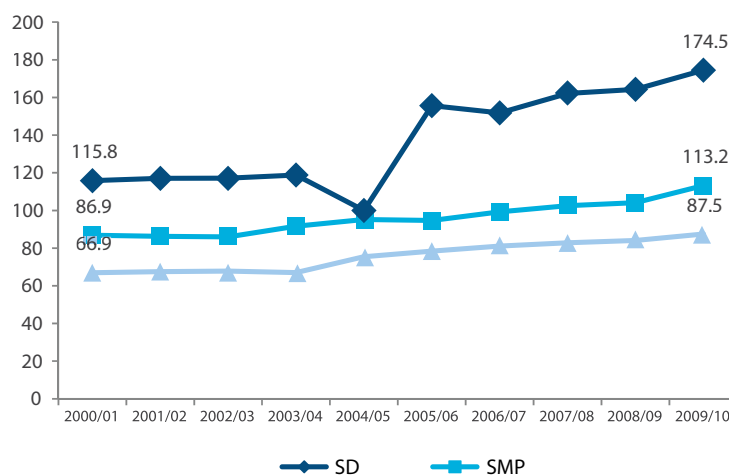
Gambar 19. Persen Guru Kemenag yang Bersertifikat Menurut Laki/Perempuan, 2009/10



Sumber: Kemenag

Pelatihan guru di Indonesia dilaksanakan melalui kegiatan *pre-service* dan *in-service*, seperti halnya di banyak negara. *Pre-service* dilakukan melalui dua jalur. Jalur pertama adalah belajar di perguruan tinggi pendidikan guru (*TTC - teacher training college*). Terdapat 268 perguruan tinggi pendidikan guru di Indonesia yang menyelenggarakan program pendidikan dengan gelar S1. Sebanyak 23 *TTC* menawarkan pendidikan jarak jauh dengan sistem *multi-mode*. Di setiap provinsi, terdapat paling sedikit satu *TTC* yang menyelenggarakan program pendidikan diploma (D1 atau D2) dan S1 untuk guru. Pilihan kedua yaitu perguruan tinggi umum yang juga mendidik guru melalui fakultas pendidikan dan gelar yang diperoleh mahasiswanya juga berupa gelar S1. Gelar ini memenuhi salah satu syarat sertifikasi guru dan hak atas gaji yang lebih besar sesuai Undang Undang Guru tahun 2005. Gambar 20 di bawah ini menunjukkan bahwa perempuan mendominasi jumlah guru untuk pendidikan dasar. Hal yang sama juga ditemukan dalam pendidikan menengah pertama, namun tidak demikian untuk pendidikan menengah atas.

Gambar 20. Rasio Guru Perempuan terhadap Guru Laki – laki 2000/01 – 2009/10

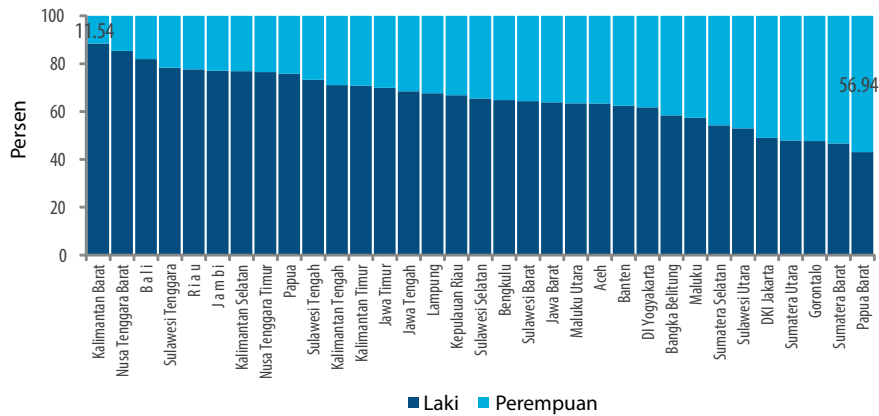


Sumber: Kemdikbud

4.3.2 Rasio Gender Kepala Sekolah

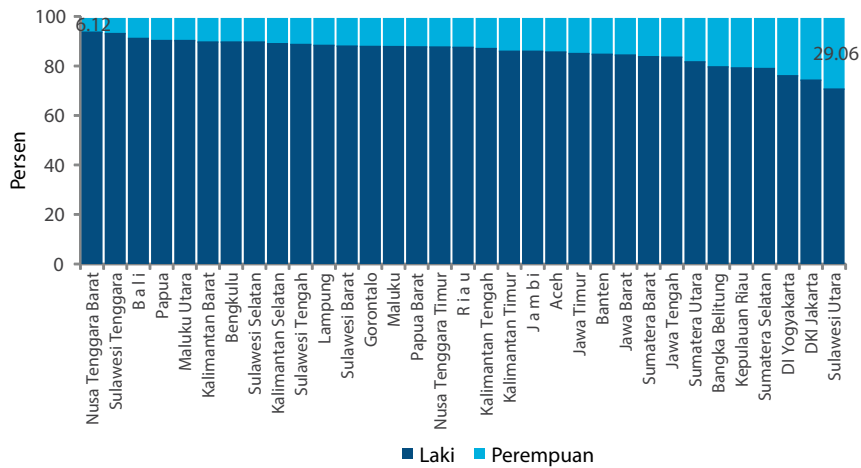
Proporsi kepala sekolah perempuan masih sangat rendah di semua jenjang pendidikan, khususnya pendidikan menengah pertama dan atas. Data Kemdikbud menunjukkan bahwa rasio kepala sekolah/madrasah perempuan cukup rendah yaitu 33,6% untuk pendidikan dasar dan hanya 14,8% and 12,1% untuk pendidikan menengah pertama dan atas. Untuk pendidikan dasar terdapat 5 Provinsi di mana rasionya seimbang (lihat Gambar 21). Dalam diskusi Tinjauan ini, pihak terkait di Gorontalo mengatakan bahwa Gorontalo telah mendukung pengangkatan kepala sekolah/madrasah perempuan yang memenuhi syarat. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten mengatakan bahwa pengalaman telah menunjukkan kepala sekolah/madrasah perempuan juga memiliki etika kerja dan keterampilan manajemen yang baik.

Gambar 21. Proporsi Kepala Sekolah SD menurut Provinsi dan Gender, 2009/10



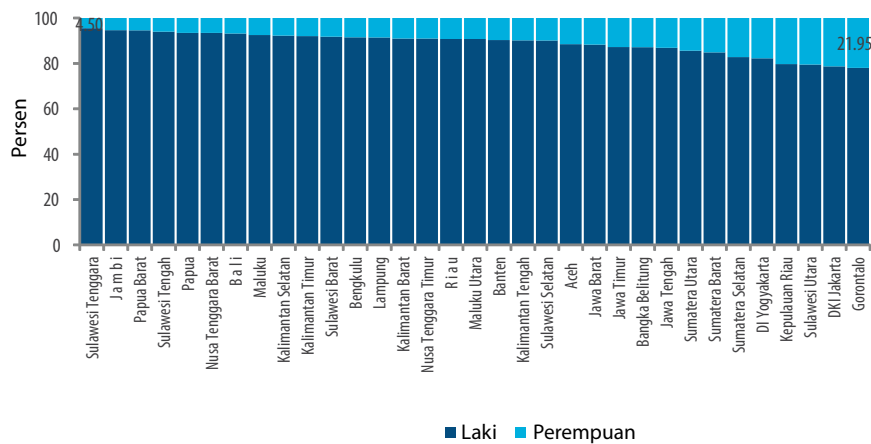
Sumber: Kemdikbud 2012

Gambar 22. Proporsi Kepala Sekolah SMP menurut Provinsi dan Gender, 2009/10



Sumber: Kemdikbud 2012

Gambar 23. Proporsi Kepala Sekolah SMA menurut Jenis Kelamin dan Provinsi, 2009/10

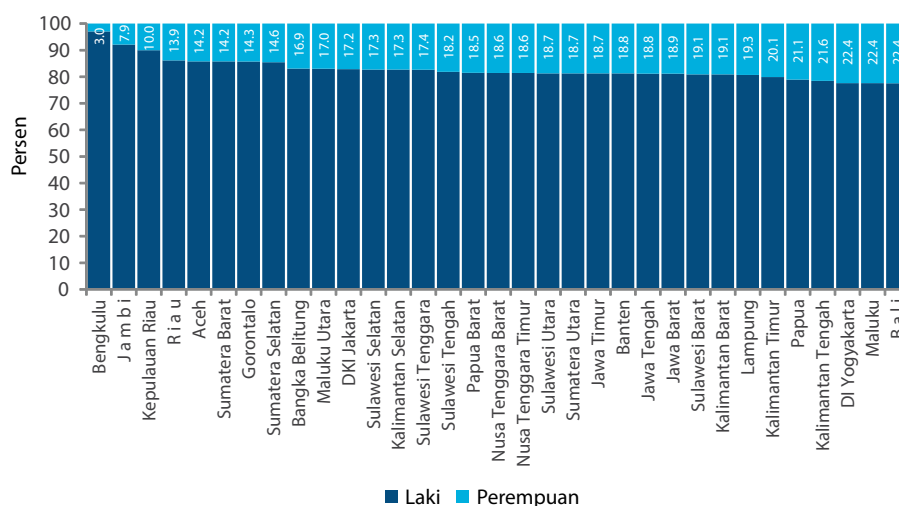


Sumber: Kemdikbud 2012

4.3.3 Rasio Gender Dosen Perguruan Tinggi

Untuk profesi dosen, jumlah dosen laki-laki lebih banyak dibandingkan dosen perempuan. Di sebagian besar provinsi, dosen perempuan hanya mencapai 20% dari jumlah total pengajar untuk perguruan tinggi. DKI Jakarta memiliki proporsi tertinggi untuk dosen perempuan sebesar 22,4%, diikuti oleh Gorontalo dan Sulawesi Utara sebesar 22,4% dan 22,3%. Di sisi lain, Gambar 24 menunjukkan bahwa Provinsi Bengkulu memiliki proporsi terendah untuk dosen perempuan, yaitu hanya 2,96%.

Gambar 24. Proporsi Dosen Universitas menurut Gender

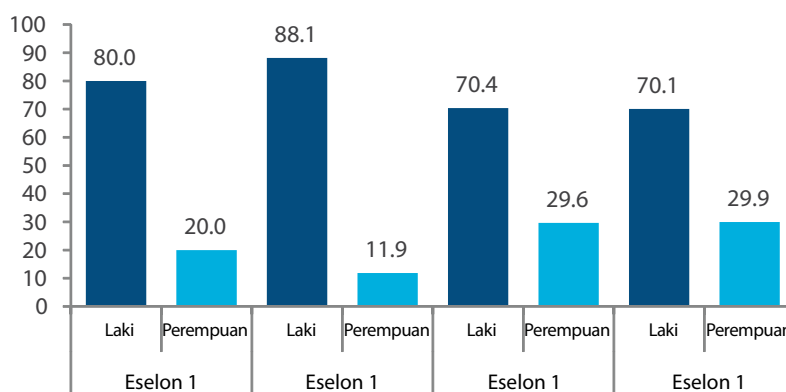


Sumber: Kemdikbud 2012

4.3.4 Rasio Pegawai Laki-laki dan Perempuan di Lingkungan Kemdikbud

Sejak dulu hingga sekarang, jumlah perempuan dalam jabatan kepemimpinan dari Eselon 1 sampai dengan Eselon 4 di lingkungan Kemdikbud tetap masih belum seimbang. Data terbaru menunjukkan bahwa hanya 3 perempuan dari 17 pejabat Eselon 1; 7 perempuan dari 54 pejabat Eselon 2, dan 55 perempuan dari 195 pejabat Eselon 3. Rasio pegawai Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota sama seperti Kemdikbud. Salah satu pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu menegaskan, "Jabatan kepemimpinan pemerintah daerah masih didominasi laki-laki. Dari 38 pejabat Eselon 3, 33 laki-laki dan hanya 5 perempuan. Tidak ada perempuan di Eselon 1 atau 2 di Indramayu." (Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu).

Gambar 25. Persen Pegawai Kemdikbud menurut Eselon dan Gender, 2012.



Sumber: Kemdikbud 2012

4.4 Kemampuan Perencana Kabupaten/Kota dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data

Statistik terpilah menurut jenis kelamin sangat penting karena dapat menggambarkan tingkat kesenjangan gender dalam pendidikan, baik prestasi maupun partisipasi pendidikan. Pengumpulan data ini sangat penting untuk analisis kesenjangan dan untuk mendukung perencanaan serta penganggaran yang tanggap gender secara efektif. Oleh karena itu, data yang tidak cocok dengan situasi yang ada dan diolah menggunakan definisi variabel yang tidak jelas akan menghasilkan hitungan angka yang dapat menyesatkan³¹. Selama penelitian lapangan Tinjauan ini, beberapa pertanyaan terkait keandalan data statistik tingkat kabupaten/kota juga timbul.

Data yang dipilah menurut jenis kelamin sehingga dapat digunakan untuk merumuskan anggaran pendidikan yang lebih tanggap gender saat ini masih terbatas. Namun demikian, hasil penelitian lapangan Tinjauan ini menemukan bahwa selama dua tahun terakhir, Kabupaten Sleman sudah mulai memilah data menurut jenis kelamin sebagai hasil proyek uji coba pengarusutamaan gender. Kelompok Kerja Gender Provinsi di Gorontalo melaporkan adanya kesulitan untuk memperoleh data yang valid dan terkini. Pada tahun 2012, Pokja tersebut berencana untuk menyusun kertas kerja yang berisikan rancangan pengumpulan dan analisis data terpilah menurut jenis kelamin sebagai langkah pertama dalam proses untuk mengembangkan kebijakan, perencanaan dan penganggaran tanggap gender. Adanya data terkini yang terpilah menurut jenis kelamin dari semua sekolah akan membantu pemantauan dan evaluasi kemajuan kabupaten/kota agar lebih mudah memenuhi sasaran Pendidikan Untuk Semua dan komitmen kesetaraan gender.

Studi Kasus: Tidak Adanya Data Terpilah Menurut Jenis Kelamin di Sekolah

Pengawas di Gorontalo, *"Belum ada panduan atau pun instrumen khusus pengumpulan data sekolah untuk membantu sekolah dalam penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin."*

Staff Dinas Pendidikan Gorontalo *"Tim Pengembangan Sekolah yaitu pengawas, kepala sekolah, guru dan anggota komite sekolah membutuhkan pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan data untuk pembentukan sistem pendidikan yang tanggap gender."*

Staf Universitas Cendana Kupang, *"Staf Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi belum memilah data menurut jenis kelamin laki-laki/perempuan. Tidak ada anggaran dari APBD untuk mensosialisasikan kegiatan ini. Tidak ada komitmen dari para pengambil keputusan sektor pendidikan."*

Kepala Bagian Dinas Pendidikan, Kupang *"Kebijakan pengarusutamaan gender penting untuk mencapai kinerja terbaik dalam pelayanan publik dan untuk mendukung kegiatan pengarusutamaan gender di sekolah. Data gender baru akan dibuat jika pemerintah pusat memintanya."*

Sumber: ACDP 005 Penelitian Studi Kasus, Februari, 2012

4.5 Hambatan Memperoleh Pendidikan Bermutu

Sekitar 27% anak usia sekolah tidak memperoleh pendidikan dasar penuh selama sembilan tahun. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor di setiap jenjang dan siklus pendidikan.

4.5.1 Hambatan di Tingkat Sekolah

Data Susenas tahun 2009 (Tabel 3) mengungkapkan bahwa alasan utama laki-laki maupun perempuan tidak melanjutkan pendidikan mereka adalah karena tidak mampu membiayai. Alasan mencari nafkah juga disebut oleh laki-laki dan perempuan, terutama perempuan di daerah perkotaan. Pada kelompok

31. AusAID. 2011. Studi Kebutuhan Pengetahuan dan Kendala Pasokan untuk Penelitian Gender dalam Sektor Pengetahuan Indonesia. Universitas Indonesia, Jakarta

usia 13-14 tahun hanya perempuan yang memberikan alasan putus sekolah karena pernikahan dini, baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Tabel 3. Alasan untuk Putus Sekolah, 2009

Alasan	Usia 13 -14 tahun				Usia 16 – 18 tahun			
	Perkotaan		Pedesaan		Perkotaan		Pedesaan	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Tidak punya uang	70,2	64,6	60,0	64,0	70,6	64,3	67,1	64,3
Kerja/mencari nafkah	7,6	9,6	7,8	4,4	13,6	18,0	13,1	7,0
Tidak diijinkan	0,3	2,1	0,2	0,5	1,0	0,4	0,9	0,5
Sekolah terlalu jauh	0,0	0,9	4,9	6,6	0,0	0,4	2,4	2,2
Tingkat pendidikan dipandang cukup	0,5	3,6	3,6	4,2	4,8	3,6	5,0	6,0
Malu	1,7	2,7	1,4	1,8	0,7	0,9	0,7	0,9
Menikah/berumah tangga	0,0	0,1	0,0	1,2	0,2	7,2	0,3	11,9
Lainnya	19,7	16,5	22,2	17,4	9,1	5,2	10,5	7,1

Sumber: Susenas 2009

Tidak adanya SMP dan SMA di daerah pedesaan dan terpencil juga masih menjadi salah satu masalah. Namun Pemerintah Indonesia berencana untuk membangun atau memperluas sekitar 4.700 SMP hingga 2014. Sekitar 3.500 SD akan ditingkatkan menjadi SMP (Satu Atap) yang bertempat di lokasi yang lama; sedangkan 1.200 sekolah akan merupakan sekolah yang berdiri sendiri di lokasi baru³².

Meskipun terdapat perbedaan Angka Mengulang antara perempuan dan laki-laki, namun interpretasi data ini harus dilakukan secara hati-hati. Tingginya Angka Mengulang untuk murid laki-laki sering kali menunjukkan kinerja akademis yang kurang. Namun, data tersebut juga bisa dimaknai sebagai perhatian sekolah yang lebih besar pada laki-laki dibandingkan perempuan karena laki-laki lebih menonjol dan lebih sering dipilih untuk mengulang kelas. Tapi hampir semua negara di dunia mengalami kesenjangan gender di mana justru perempuan cenderung maju lebih cepat dari laki-laki pada saat menjalani pendidikan dasar³³. Pengalaman mengulang bisa memengaruhi kepercayaan diri dan motivasi murid sehingga menimbulkan kesan bahwa mereka gagal atau tidak mampu. Mengulang kelas berarti murid akan mengulangi bahan ajar yang sama seperti apa yang telah mereka pelajari dan biasanya juga dengan guru yang sama, sehingga dapat menurunkan motivasi murid, terutama jika pengajarannya kurang bermutu. Mengulang tidak menjawab mengapa kinerja murid rendah sehingga kemungkinan tidak dapat meningkatkan kinerja murid secara signifikan dan bahkan dalam banyak kasus dapat menyebabkan putus sekolah.

Banyak anak secara berkala tidak hadir di sekolah dasar karena berbagai alasan. Hal ini mengakibatkan murid harus mengulang karena banyaknya pelajaran yang tidak diikuti. Biaya sekolah yang terdiri dari biaya langsung (uang sekolah) dan biaya tidak langsung (seragam, transportasi, bahan, hilangnya pendapatan karena tidak bekerja) termasuk alasan utama bagi banyak keluarga tidak mampu yang mempengaruhi keputusan tentang sekolah. Jika seorang anak gagal atau harus mengulang kelas maka kemungkinan besar keluarganya akan menarik anak tersebut dari sekolah (putus sekolah) dengan alasan penghematan.

32. AusAID. Oktober 2010. Kemitraan Pendidikan Australia dengan Indonesia: Suatu Kontribusi terhadap Program yang Mendukung Sektor Pendidikan Pemerintah Indonesia.

33. UNESCO. 2010. *Global Education Digest 2010: Comparing Education Statistics*

Kurangnya fasilitas sanitasi di sekolah menjadi masalah khusus untuk anak perempuan setelah mereka mencapai masa puber dimana mereka terpaksa tidak hadir di sekolah selama seminggu dalam setiap bulan. Masalah ini dilaporkan dalam penelitian untuk Tinjauan ini di satu sekolah dasar di Indramayu, Jawa Barat (di mana ada murid perempuan yang berusia lebih tua dari rata-rata usia rekan sekelasnya) dan tidak memiliki fasilitas toilet. Banyak murid yang juga membantu pekerjaan rumah tangga atau mencari nafkah atau keduanya. Hal ini terjadi terutama untuk anak tidak mampu di daerah pedesaan dan pesisir. Selama penelitian untuk Tinjauan ini di daerah pesisir di Indramayu, satu sekolah dasar melaporkan bahwa para orang tua yang bekerja sebagai nelayan sering menarik anak laki-laki keluar dari sekolah pada musim tertentu untuk menemani ayahnya melaut. Sedangkan anak perempuan ditarik ke luar sekolah untuk membantu ibunya dalam usaha pengeringan ikan asin. Angka Putus Sekolah baik untuk murid laki-laki atau perempuan untuk SD tersebut cukup tinggi.³⁴

Bayangan/persepsi tentang pengaruh pendidikan terhadap masa depan dan kesempatan kerja sudah terbukti berdampak pada Angka Putus Sekolah dan Angka Melanjutkan dan dipengaruhi juga oleh kondisi lingkungan. Di daerah pedesaan dan terpencil, adanya kesempatan melanjutkan ke pendidikan menengah pertama atau yang lebih tinggi mempengaruhi keputusan orang tua terkait penyelesaian pendidikan dasar untuk anak-anak mereka. Persepsi orang tua mengenai mutu pendidikan dan kesempatan anak untuk berhasil mencapai tingkat yang lebih tinggi juga mempengaruhi prioritas rumah tangga tentang pendidikan.³⁵ Selain itu, jika orang tua pernah bersekolah, maka anak akan disekolahkan juga dan cenderung melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Sikap dan tindakan yang berdasarkan gender yang terjadi di keluarga, masyarakat dan sekolah berdampak pula pada pola kesempatan (akses) bagi perempuan dan laki-laki. Pernikahan dini dan kehamilan di luar pernikahan mempengaruhi kesempatan perempuan untuk menyelesaikan pendidikan menengah atas (lihat Bab V).

Walaupun di Indonesia telah terjadi penurunan dalam pernikahan dini, hal ini masih dilakukan di banyak tempat. Data BPS 2010 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan terjadi di beberapa Provinsi seperti DKI Jakarta (12,2%), Yogyakarta (16,8%), Sumatera Barat (16,5%) dan Kepulauan Riau (13%). Namun di sisi lain, angka pernikahan dini terbesar terjadi di Sulawesi Tengah (37,2%), Sulawesi Barat (36,4%) dan Papua (36,8%). Hukum Fikih dalam agama Islam tidak menyebutkan usia tertentu dimana seorang perempuan wajib menikah. Di Indonesia, masih banyak orang tua yang memaksa anak perempuannya untuk menikah dini. Di kelompok usia 16-18 tahun, murid laki-laki maupun perempuan menyebutkan pernikahan dini sebagai alasan untuk putus sekolah, dengan jumlah perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki (lihat Tabel 3). Gambar 26 menunjukkan korelasi tinggi antara pernikahan dini dan putus sekolah bagi murid perempuan di pendidikan menengah atas.

Pernikahan Dini di Kabupaten Indramayu

Dinas Pendidikan Indramayu, *"Pernikahan usia dini dianggap sebagai fenomena sosial-budaya yang dapat diterima di daerah ini. Data Suseda tahun 2004 menunjukkan bahwa 75% perempuan menikah pada usia 18 tahun atau di bawahnya. Lima tahun kemudian, Dinas Pendidikan Indramayu mencatat bahwa 79% perempuan menikah sebelum usia 19 tahun."*

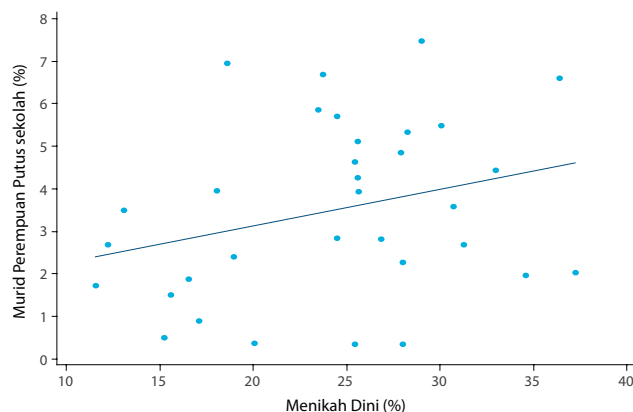
Kepala Sekolah SMK Eretan Kulon Indramayu, *"Kode etik kami melarang orang yang terdaftar sebagai murid untuk menikah. Pada tahun 2007 dua murid perempuan putus sekolah untuk menikah. Kami mencoba untuk membujuk orang tuanya agar mengizinkan anak perempuannya menyelesaikan pendidikannya dulu, tapi mereka tidak mau mendengarkan masukan kami."*

Gender Focal Point Universitas Bandung, *"Pendidikan dan pekerjaan di luar industri rumah tangga harus didorong untuk mencegah peningkatan jumlah kasus pernikahan dini di Kabupaten Indramayu."*

Sumber: ACDP 005 Penelitian Studi Kasus, Januari 2012

34. Studi Kasus Penelitian Reviu Tinjauan, FGD SD Eraton Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Indramayu, Jawa Barat.

35. ADB PRMAP/IPB. 2009. *Parents Satisfaction Survey in Indramayu*.

Gambar 26. Pernikahan Dini dan Putus Sekolah Murid Perempuan Tingkat SMA (Korelasi: 0.288; Nilai P: 0.104)

Persentase pernikahan dini di daerah pedesaan lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah perkotaan.³⁶ Antara tahun 2000 – 2008, tingkat pernikahan dini menurun sedikit lebih cepat di daerah pedesaan dibandingkan daerah perkotaan, meskipun pada tahun 2008 pernikahan dini di daerah pedesaan masih 15% lebih tinggi dari perkotaan. Angka kelahiran ibu berusia remaja dilaporkan 9% lebih tinggi di daerah pedesaan dibandingkan dengan perkotaan dan berkorelasi dengan tingginya angka pernikahan dini. Tingkat kelahiran ibu berusia remaja menurun lebih cepat di daerah perkotaan dibandingkan dengan pedesaan. Dengan menyelesaikan pendidikan, remaja perempuan dapat menunda kehamilan dan memperluas kesempatan untuk meningkatkan penghasilan.³⁷ Namun, kehamilan di luar pernikahan bagi ibu berusia remaja memang terjadi dan merupakan kenyataan untuk pendidikan menengah di seluruh Indonesia. Kepala Sekolah melaporkan pada FGD Tinjauan ini bahwa rata-rata 1-2 kehamilan di luar pernikahan bagi ibu berusia remaja terjadi di sekolahnya setiap tahun.

4.5.2 Hambatan Mencapai Pendidikan Tinggi

Kesempatan (akses) mencapai pendidikan tinggi dipengaruhi oleh banyak faktor: tingkat pencapaian akademis di jenjang pendidikan dasar dan menengah; ekonomi orang tua, dan sikap orang tua tentang nilai untuk pendidikan bagi anak perempuan dan laki-laki. Kelas sosial ekonomi dan pekerjaan orang tua menentukan jati diri keluarga dan mempengaruhi secara kuat kemampuan anak remaja laki-laki dan perempuan namun dengan pola yang berbeda. Norma budaya dan agama tentang hubungan gender mempunyai pengaruh kuat terhadap kesempatan mencapai pendidikan tinggi. Remaja penyandang disabilitas menghadapi tantangan lebih berat lagi. Masyarakat tidak mampu di daerah pedesaan dan pesisir memanfaatkan remaja laki-laki untuk bekerja penuh dalam sektor pertanian atau perikanan informal, sehingga tidak mungkin melanjutkan pendidikan formal lagi. Pernikahan dini, kehamilan remaja dan tanggungjawab rumah tangga menghambat perempuan untuk melanjutkan pendidikannya.

Lingkungan dimana murid berada atau kondisi yang harus dihadapi – seperti jarak fisik ke kampus atau mutu pendidikan – mendorong atau menghambat remaja laki-laki dan perempuan untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Data BPS 2010 menunjukkan bahwa APM pendidikan tinggi di Yogyakarta jauh lebih tinggi dari daerah lainnya baik untuk laki-laki (45,7%) maupun perempuan (35,7%). Angka tinggi tersebut disebabkan oleh kedatangan mahasiswa dari provinsi lain untuk kuliah pada perguruan tinggi yang terkenal bermutu tinggi di Yogyakarta. Di sisi lain, APM pendidikan tinggi Riau sangat rendah baik untuk murid laki-laki (5%) maupun perempuan (4,7%) yang disebabkan antara lain oleh alasan ekonomi dan jarak ke perguruan tinggi terdekat. Kemdikbud mengakui hambatan kesempatan kuliah tersebut dan berencana mendirikan perguruan tinggi baru di beberapa daerah yang saat ini tidak memiliki akses terhadap pendidikan tinggi, termasuk Riau. Mulai tahun 2012, ada kebijakan afirmatif dimana Kemdikbud menambah jumlah penerima beasiswa pendidikan tinggi untuk murid tidak mampu dari 50.000 menjadi 80.000 orang.

36. BAPPENAS. 2010. *MDGs Roadmap*. Jakarta.

37. BAPPENAS. 2010. *Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia*, Jakarta

4.6 Kesimpulan

Angka partisipasi yang dibahas di atas menunjukkan bahwa keluarga tidak mampu – baik laki-laki maupun perempuan – menghadapi kendala terhadap kesempatan memperoleh pendidikan (akses). Hal tersebut menggambarkan bahwa kesetaraan gender tidak hanya menyangkut perempuan dewasa dan anak melainkan juga mencakup laki-laki dewasa dan anak. Walau Indonesia telah mencapai banyak keberhasilan dalam upaya wajib belajar 9 tahun serta telah mencapai paritas gender untuk pendidikan dasar, namun hal ini belum dicapai untuk pendidikan menengah atas. Jumlah perempuan yang menjabat sebagai pemimpin pada semua lembaga masih belum seimbang dengan jumlah laki-laki. Keseimbangan antara perempuan dan laki-laki pada jabatan tersebut dapat membantu menjamin bahwa kebutuhan perempuan maupun laki-laki diperhitungkan dan suara perempuan maupun laki-laki didengarkan. Selain itu, tidak hanya cukup dengan mengumpulkan data yang terpilah menurut jenis kelamin – walaupun data ini sangat diperlukan – melainkan data tersebut perlu digunakan untuk menanggapi kesenjangan dan ketidaksetaraan gender. Mengaitkan antara penelitian dan kebijakan sangat penting. Diperlukan lebih banyak data dan analisis sebagai dasar penentuan kebijakan pada tingkat kabupaten/kota. Data tersebut harus bersifat kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari tingkat sekolah.

4.7 Ringkasan Temuan

Tingkat Keaksaraan Usia 15-24. Tingkat keaksaraan nasional bagi orang berusia 15-24 telah mencapai 99,9% pada 2010, terdiri dari 99,46% untuk perempuan dan 99,53% persen untuk laki-laki. Pada tahun 2010, tingkat keaksaraan nasional untuk kelompok usia 15+ meningkat selama satu dasawarsa menjadi 94,9%.

Angka Partisipasi Murni (APM) nasional untuk laki-laki maupun perempuan telah meningkat dalam semua jenjang pendidikan selama dasawarsa terakhir. Sasaran Pendidikan Untuk Semua Nasional adalah 100% APM di sekolah dasar dan menengah pertama pada tahun 2015. Pada tahun 2010, APM nasional untuk sekolah dasar (SD) telah mencapai 94,76% sedangkan APM nasional untuk sekolah menengah pertama (SMP) adalah 67,73% dan sekolah menengah atas (SMA) 45,59%. Selama periode 2000 - 2010, peningkatan APM tertinggi adalah peningkatan APM laki-laki untuk pendidikan menengah pertama, dengan angka sebesar 8,02% dibandingkan dengan peningkatan bagi perempuan sebesar 6,87%. Hal yang sama terjadi juga untuk pendidikan menengah atas, yaitu peningkatan APM laki-laki sebesar 7,86% sedangkan peningkatan perempuan hanya sebesar 4,58%. Untuk jenjang pendidikan tinggi, APM 2010 telah meningkat secara signifikan menjadi 11,1% untuk perempuan dan 10,8% untuk laki-laki.

IPG dalam APM tingkat nasional. Untuk pendidikan menengah atas (SMA / MA / Paket C), data Susenas menunjukkan IPG (rasio perempuan terhadap laki-laki) dalam APM sedikit menurun dalam 5 tahun terakhir dari 100% pada tahun 2006 menjadi 96% pada tahun 2010.

IPG dalam APM tingkat provinsi. Data Susenas untuk IPG dalam APM di tingkat provinsi menunjukkan kesenjangan gender di beberapa provinsi untuk pendidikan menengah pertama dan terutama pendidikan menengah atas serta pendidikan tinggi.

Angka Mengulang. Data Kemdikbud menunjukkan Angka Mengulang untuk pendidikan dasar tertinggi secara keseluruhan. Di semua provinsi, lebih banyak laki-laki mengulang kelas dibandingkan dengan perempuan. Untuk SMP/MTs dan SMA/MA, Angka Mengulang murid laki-laki lebih tinggi pada sebagian besar provinsi (26 provinsi untuk SMP/MTs dan 31 provinsi untuk SMA/MA).

Angka Putus Sekolah. Data Susenas dan Kemdikbud menunjukkan Angka Putus Sekolah untuk pendidikan menengah pertama dan atas telah menurun cukup signifikan selama satu dasawarsa terakhir baik untuk laki-laki maupun perempuan. Namun Angka Putus Sekolah untuk laki-laki di pendidikan menengah atas tetap yang tertinggi, yaitu 4,11% dibandingkan dengan perempuan dengan angka 2,51%.

Angka Melanjutkan. Data Kemdikbud menunjukkan Angka Melanjutkan yang cenderung meningkat selama satu dasawarsa terakhir di tingkat nasional baik untuk laki-laki maupun perempuan. Sejak adanya BOS pada tahun 2005, Angka Melanjutkan ke pendidikan menengah pertama untuk perempuan telah meningkat, mencapai kesetaraan dengan laki-laki. Namun, Angka Melanjutkan ke pendidikan menengah atas untuk murid perempuan 10% lebih rendah dari Angka Melanjutkan untuk murid laki-laki.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Menurut data Susenas, Rata-rata Lama Sekolah telah meningkat sejak tahun 2004. Pada tahun 2010, RLS untuk perempuan adalah sebanyak 7,5 tahun, lebih rendah dari laki-laki yang memiliki RLS sebanyak 8,3 tahun.

Data Susenas and Kemdikbud menunjukkan kesenjangan antar dan di dalam provinsi untuk semua indikator di atas.

4.8 Rekomendasi

1. Memastikan data yang dipilah menurut jenis kelamin dari semua sekolah di tingkat kabupaten/kota dikumpulkan secara sistematis dan mencakup indikator partisipasi serta kinerja. Hal ini dilakukan untuk menjamin instrumen untuk pengumpulan data di tingkat sekolah memungkinkan kabupaten/kota dengan mudah merekam dan menganalisis data yang dipilah menurut jenis kelamin.
 - Pelatihan pengembangan profesi dan khususnya pelatihan manajemen berbasis sekolah untuk kepala sekolah dan pengawas, harus mencakup kepentingan dan kebutuhan pengumpulan dan analisis data yang dipilah menurut jenis kelamin.
 - Perlu ada peraturan yang mewajibkan kepala sekolah menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran yang efektif untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan dan menghilangkan kesenjangan gender pada tingkat sekolah.
 - Memastikan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) yang baru diperkenalkan serta Pemantauan Sekolah oleh Kabupaten/Kota (MSD) memerlukan analisis data yang dipilah menurut jenis kelamin agar dapat mengidentifikasi dan menanggapi kesenjangan gender dalam partisipasi dan kinerja tingkat sekolah.
2. Memberi prioritas dalam peningkatan kinerja bagi kabupaten/kota dan sekolah yang kinerjanya rendah. Pemerintah daerah agar:
 - Mengembangkan sistem untuk menemukan sekolah yang berisiko tinggi dan murid laki-laki maupun perempuan yang memiliki risiko tersebut.
 - Mendukung sekolah untuk mencapai tujuan yang telah mereka tetapkan untuk pengembangan sekolah termasuk kesetaraan gender. Menciptakan sistem insentif untuk mendukung peningkatan kinerja murid sebagaimana diukur dalam penurunan Angka Putus Sekolah dan keberhasilan pelajaran bagi murid laki-laki dan perempuan.
 - Melakukan pemetaan sekolah dengan menggunakan model Pemetaan Sekolah Partisipatif yang telah berhasil di Gorontalo agar dapat mencapai SPM di semua sekolah.
3. Meskipun bukti menunjukkan bahwa tidak ada bias gender dalam alokasi subsidi murid miskin laki-laki dan perempuan, pemantauan ketat Program Beasiswa Miskin perlu dilakukan untuk memastikan bahwa subsidi tersebut diterima langsung oleh penerima yang berhak – baik murid perempuan maupun laki-laki yang tidak mampu. Pemantauan tersebut memerlukan pengumpulan secara sistematis data yang dipilah menurut jenis kelamin. Juga perlu untuk mempertimbangkan perluasan beasiswa untuk menambah jumlah laki-laki dan perempuan miskin yang melanjutkan ke pendidikan menengah pertama dan menengah atas.
4. Melaksanakan pelaporan kemajuan tahunan bagi kabupaten/kota berdasarkan indikator Pendidikan Untuk Semua dengan menggunakan statistik tingkat sekolah yang dipilah menurut jenis kelamin. Laporan ini akan memberikan gambaran singkat dari situasi yang terjadi di sekolah serta mengungkapkan unsur penting untuk memahami arah pengembangan sistem pendidikan kabupaten/kota.

5. Bekerjasama dengan mitra perguruan tinggi dan LSM untuk penelitian tentang 1) anak remaja yang menikah dini dan 2) murid perempuan yang hamil di luar pernikahan, terutama murid kelas 12, untuk lebih memahami gejala putus sekolah pada kelompok tersebut serta keputusan kepala sekolah untuk membantu atau tidak membantu murid tersebut menyelesaikan pendidikan formalnya. Mempertimbangkan kebijakan dan pedoman bagi sekolah untuk menjamin bahwa murid perempuan tersebut bisa mengikuti ujian akhir sekolah.
6. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk lebih memahami penyebab:
 - a) Angka Mengulang untuk laki-laki lebih tinggi daripada perempuan pada semua tingkat pendidikan di sebagian besar provinsi. Analisis tersebut sebaiknya dilakukan pada provinsi yang menunjukkan tingkat mengulang kelas yang tertinggi untuk laki-laki maupun perempuan. Selain itu, analisis tersebut juga dilakukan untuk melihat keterkaitan tingkat mengulang kelas dengan indikator lain termasuk tingkat putus sekolah.
 - b) Putus sekolah murid laki-laki dan perempuan. Kabupaten/kota mengadopsi strategi praktik yang baik (*best practice*) agar langkah pengaman dapat dilakukan untuk mengurangi Angka Putus Sekolah dan membantu murid yang telah putus sekolah untuk kembali.
 - c) Analisis kesenjangan IPG dalam APM antara kabupaten/kota. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan IPG dari APM yang lebih rendah atau lebih tinggi dari rata-rata perlu melakukan analisis untuk menjelaskan kesenjangan tersebut terutama untuk pendidikan menengah pertama dan menengah atas.
7. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar menindaklanjuti rendahnya jumlah kepala sekolah perempuan yang memenuhi syarat untuk pendidikan menengah pertama dan terutama menengah atas.
8. Perguruan tinggi agar menindaklanjuti rendahnya jumlah dosen perempuan yang memenuhi syarat sebagai tenaga pengajar di institusi masing-masing.



Bab 5

Kesetaraan Kesempatan dalam Pendidikan

Pengarusutamaan gender telah diterima di seluruh dunia sebagai strategi untuk mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan. Pengarusutamaan gender bukanlah tujuan, namun proses pembentukan pengetahuan dan kesadaran serta pertanggungjawaban untuk mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan bagi tenaga profesional dalam sektor ini. Pembangunan pendidikan di Indonesia berlandaskan pada tiga pilar: pemerataan akses, mutu dan relevansi serta efisiensi dalam pengelolaan. Ketiga pilar tersebut bertujuan untuk memperkuat penyelenggaraan pendidikan bermutu untuk semua murid. Strategi kesetaraan gender dalam pendidikan harus ikut memberi sumbangan terhadap pencapaian pilar pendidikan tersebut. Pilar tersebut juga sangat erat kaitannya dengan pencapaian enam tujuan Pendidikan Untuk Semua yang ditetapkan di Dakar tahun 2000:

- *Perluasan dan peningkatan perawatan dan pendidikan anak usia dini, secara menyeluruh, terutama bagi anak yang paling rentan dan tertinggal*
- *Menjamin bahwa, pada tahun 2015 semua anak, terutama perempuan, anak dalam keadaan sulit dan anak etnis minoritas, memperoleh kesempatan mengikuti dan menyelesaikan program wajib belajar gratis pendidikan dasar yang bermutu*
- *Menjamin bahwa kebutuhan belajar anak, remaja dan dewasa telah terpenuhi di mana mereka memiliki akses untuk melakukan kegiatan yang mendukung peningkatan keterampilan belajar dan keterampilan hidup yang tepat*
- *Mencapai peningkatan 50% dalam kemampuan membaca dan menulis (literacy) dewasa pada tahun 2015, terutama bagi perempuan serta pemerataan dalam kesempatan mengikuti pendidikan dasar dan pendidikan seumur hidup bagi semua orang dewasa*
- *Menghapus disparitas gender di jenjang pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2015 dan mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan pada tahun 2015 dengan menitikberatkan pada jaminan bagi perempuan untuk bisa memperoleh akses secara penuh dan sama dengan laki-laki serta keberhasilan yang sama dengan laki-laki dalam pendidikan dasar yang bermutu baik*
- *Peningkatan semua unsur mutu pendidikan dan menjamin keunggulan mutu bagi semua agar semua murid bisa berhasil mencapai tolok ukur yang disepakati bersama dan bisa diukur, terutama dalam membaca (literacy), menghitung dan keterampilan hidup yang mendasar*

Meningkatkan paritas dalam tingkat partisipasi merupakan langkah pertama untuk mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan karena paritas partisipasi hanya “mengobati gejala” daripada “menyembuhkan akar” ketidaksetaraan. Jika hanya memperhatikan kesempatan belajar (akses) sebagai isu utama bagi semua perempuan dan laki-laki, mutu dan relevansi pendidikan dapat terlupakan. Oleh sebab itu, Bab ini tidak hanya mengkaji tentang kesempatan belajar, melainkan memperluas kajian hingga mencakup dimensi mutu pendidikan yang berdampak terhadap kesetaraan. Bab ini mengkaji beberapa aspek pendidikan dari sudut pandang gender yaitu proses belajar mengajar, isi kurikulum dan bahan ajar lainnya, pendidikan dan pelatihan guru, keberhasilan murid, hubungan guru-murid, serta keamanan lingkungan belajar. Kajian tentang isu-isu tersebut berdasarkan hasil penelitian di Jawa Barat, Jawa Tengah, Kupang dan Gorontalo serta hasil beberapa penelitian yang dilakukan di Indonesia dan tempat lain.

Kesetaraan dalam kesempatan belajar tercapai apabila semua anak perempuan dan laki-laki menerima perlakuan dan perhatian yang adil serta memperoleh kesempatan yang sama dalam proses belajar mengajar. Mereka menerima kurikulum yang sama walaupun gaya mengajar bisa berbeda untuk melayani gaya belajar (*learning style*) yang berbeda. Kesetaraan proses belajar mengajar juga menuntut agar semua murid menerima metode pengajaran serta bahan ajar yang bebas dari stereotip dan bias gender. Mereka harus memiliki kebebasan dalam belajar, bereksplorasi, dan mengembangkan keterampilan terkait semua mata pelajaran/bidang ilmu serta mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dalam lingkungan yang aman.

5.1 Gambaran Umum Pendekatan Spesifik Gender Selama Satu Dasawarsa Terakhir

Selama satu dasawarsa terakhir, telah banyak upaya peningkatan kapasitas yang sudah dilakukan oleh Kemdikbud termasuk sosialisasi kesetaraan gender beserta peraturan/perundangan terkait. Pengarusutamaan gender dimulai pada tahun 2003 dengan disediakannya anggaran pusat untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Pedoman, laporan penelitian serta sarana pendukung pelatihan telah dikembangkan dan disebarluaskan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Hasil ini dicapai berkat kerjasama dengan LSM dan Pusat Kajian Perempuan/Gender di perguruan tinggi serta Kelompok Kerja (Pokja) Gender yang baru-baru ini dibentuk di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Telah banyak laporan mengenai peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan (akses) bagi semua, sebagaimana yang ditunjukkan oleh indikator kinerja pada Bab IV serta semakin banyaknya perempuan melanjutkan ke tingkat pendidikan tinggi. Selain itu, telah terjadi peningkatan kesadaran tentang gender diantara pemangku kepentingan sektor pendidikan. Peserta penelitian Tinjauan ini juga melaporkan bahwa di kebanyakan kabupaten/kota yang dikunjungi, semakin banyak perempuan yang diangkat menjadi pengawas dan kepala sekolah dibandingkan sepuluh tahun yang lalu. Namun demikian, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Sistem pendidikan saat ini masih memperkuat ketidaksetaraan gender melalui proses belajar mengajar. Selain itu kurikulum dan buku ajar yang mempertahankan stereotip gender masih digunakan secara luas.

5.1.1 Kesetaraan Gender dalam Proyek Uji Coba Pendidikan Kemdikbud

Saat ini Kemdikbud belum memiliki strategi gender atau indikator untuk memantau pendidikan formal. Namun demikian, selama beberapa tahun terakhir ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal telah merancang dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan uji coba inovatif dalam pengarusutamaan gender. Kegiatan tersebut dibiayai melalui *block grant* dari anggaran pusat dan, kemudian, dari anggaran provinsi dan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kesetaraan gender dalam pendidikan. Kegiatannya mencakup upaya mendukung kesetaraan gender dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), di sekolah formal di semua jenjang dan pendidikan non formal (PKBM). Penelitian untuk Tinjauan ini menemukan adanya perubahan positif di kabupaten/kota di mana uji coba tersebut dilaksanakan. Dampak kegiatan di tingkat sekolah belum dievaluasi secara keseluruhan di tingkat pusat namun Tinjauan ini menemukan adanya contoh praktik yang baik (*best practice*) yang bisa diterapkan. Studi kasus dari Kabupaten Sleman di bawah ini menunjukkan keberhasilan proyek uji coba tersebut:

Beberapa Contoh Praktik yang Baik (*Best Practice*) di Sekolah Terpilih di Kabupaten Sleman

Pada tahun 2005, Dinas Pendidikan Provinsi DI Yogyakarta menerima dana Rp.30 juta dari Kemdikbud untuk memfasilitasi pembentukan Pokja Gender serta peningkatan kapasitas untuk menyebarluaskan kesetaraan gender dalam sekolah formal maupun non formal. Kertas kerja kebijakan dan rencana kerja Pokja telah dihasilkan pada tahun 2006. Pada tahun 2007/2008, lokakarya sosialisasi diselenggarakan untuk semua pihak terkait. Sejak tahun 2008, kegiatan pengarusutamaan gender didukung secara penuh oleh Pemerintah Provinsi. Hal ini dapat dilihat dari adanya peraturan/perundangan yang menyeluruh serta peningkatan alokasi anggaran untuk kesetaraan gender dalam pendidikan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2010, Kabupaten Sleman menerima *block grant* dari Kemdikbud sebesar Rp.100 juta untuk mengujicobakan pengarusutamaan gender di 7 sekolah terpilih (SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK and PKBM di Kecamatan Tempel. Pokja Gender di Dinas Pendidikan Kabupaten bekerjasama dengan UIN Yogyakarta mengembangkan model kesetaraan gender di sekolah serta modul-modul pelatihan untuk kepala sekolah, guru terpilih dan guru bimbingan dan konseling dari sekolah yang berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Pelatihan tersebut mencakup keterampilan menyadari dan menanggapi bias dan stereotip gender dalam lingkungan sekolah, proses belajar mengajar serta bahan ajar. Peserta pelatihan dari sekolah uji coba kemudian melatih rekan-rekannya.

Setiap sekolah menerima 5 juta rupiah untuk membiayai kegiatan kesetaraan gender di sekolah masing-masing. Kegiatan yang diselenggarakan antara lain menjelaskan bahan ajar kepada murid dan masyarakat dan pembuatan media termasuk spanduk, brosur dan papan yang menampilkan visi dan misi sekolah. Para pihak terkait melaporkan dampak positif dari kegiatan tersebut, termasuk perlakuan yang sama pada anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian tugas yang merata serta peningkatan kesadaran tentang pentingnya kesetaraan di antara semua murid. Pada tahun 2011, program uji coba tersebut diperluas ke 7 sekolah baru di Kabupaten Sleman, dimana satu penyelenggara PAUD juga diikutsertakan.

Model yang serupa di Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten dikunjungi oleh tim Tinjauan. Di sana, model tersebut telah berhasil dilaksanakan di sekolah-sekolah sejak tahun 2010.

Sumber: ACDP 005 Penelitian Studi Kasus, Januari, 2012

Selama beberapa tahun terakhir, proyek-proyek uji coba yang dibiayai Kemdikbud serta proyek uji coba yang dibiayai AIBEP di Kupang telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai kesetaraan gender dalam penyelenggara pendidikan formal maupun non formal. Pendekatan menyeluruh (*holistic*) yang langsung menyentuh upaya tanggap gender sekolah sudah mulai terlihat seperti yang diuraikan di bawah ini:

Unsur-unsur Kesetaraan Gender di Sekolah Percontohan

Membangun sistem manajemen sekolah yang tanggap gender untuk menjamin kesetaraan gender dalam tata kelola dan pelaksanaan kegiatan sekolah misalnya visi & misi yang menjamin kesetaraan gender. **(Sleman, Klaten, Kupang)**

Melakukan peningkatan kepekaan (*sensitivity*) tentang gender bagi orang tua, tokoh masyarakat, guru, murid perempuan dan laki-laki untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang perlunya dukungan yang sama bagi pendidikan murid perempuan dan laki-laki. **(Sleman, Klaten)**

Pelatihan keterampilan mengajar bagi guru agar mereka tanggap terhadap kebutuhan khas perempuan dan laki-laki. Pedomandan pelatihan Proses Belajar Mengajar yang Tanggap Gender untuk guru. **(Kupang, Sleman, Klaten)**

Pengkajian tanggap gender dalam bahan ajar untuk menemukan materi bermuatan stereotip gender. **(Sleman, Klaten, Kupang)**

Pelatihan warga sekolah dalam hal kesehatan reproduksi perempuan maupun laki-laki. **(Sleman, Kecamatan Tempel, bermitra dengan LSM)**

Menyediakan sarana dan prasarana yang tanggap gender termasuk: 1) toilet terpisah dan memadai bagi perempuan dan laki-laki, 2) air bersih yang memadai dalam jumlah yang cukup, terutama untuk keperluan menstruasi dan pelayanan kesehatan secara keseluruhan bagi seluruh warga sekolah. **(Kupang, Sleman, Klaten)**

Melakukan kegiatan untuk meningkatkan kesetaraan partisipasi dan prestasi akademik dalam semua mata pelajaran. **(Sleman, Klaten, Kupang)**

Melaksanakan pelatihan gender untuk seluruh tim manajemen sekolah, termasuk komite sekolah, demi meningkatkan kesadaran tentang perlunya mendukung kesetaraan dalam pendidikan. **(Sleman, Klaten dan Kupang)**

Perencanaan pembelajaran dengan mempertimbangkan tata ruang kelas. Guru mempertimbangkan tata ruang kelas dan hubungan dengan murid yang mendukung kesetaraan partisipasi baik perempuan maupun laki-laki. **(Sleman, Klaten, Kupang)**

Membangun basis data atau catatan manual tingkat sekolah untuk merekam prestasi dan kesejahteraan murid laki-laki maupun perempuan serta upaya tanggap gender yang telah dilakukan sekolah. **(Kupang)**

Menetapkan Kebijakan Kesetaraan Gender tingkat sekolah yang dapat mencegah diskriminasi dan perilaku anti sosial serta mendukung kesetaraan kesempatan bagi murid perempuan dan laki-laki. **(Sleman, Klaten, Kupang)**

5.2 Proses Belajar Mengajar Tanggap Gender

Kepala sekolah dan guru dapat meningkatkan kinerja belajar murid laki-laki maupun perempuan melalui pendekatan tanggap gender dalam Manajemen Berbasis Sekolah, pengembangan kurikulum serta proses belajar mengajar. Kepala sekolah perlu melakukan analisis tentang perbedaan kinerja serta keberhasilan pendidikan antara murid laki-laki dan perempuan. Mereka juga perlu bekerja sama dengan guru untuk mengembangkan strategi demi meningkatkan kinerja yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam mata pelajaran Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia dan Ilmu Pengetahuan Alam. Strategi tersebut berupa proses belajar mengajar yang tanggap gender termasuk peningkatan kesempatan membaca dalam kurikulum serta penyediaan lebih banyak bahan bacaan yang menarik dan memenuhi berbagai minat yang berbeda antara laki-laki dan perempuan; penyelenggaraan diskusi dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia tentang topik/tema yang sangat menarik bagi laki-laki dan perempuan; peningkatan rasa percaya diri perempuan terhadap Ilmu Pengetahuan Alam serta penyelenggaraan kegiatan pendukung dalam mata pelajaran ini yang menarik bagi perempuan. Salah satu sekolah di Kupang melaporkan dampak positif dari upaya “menemani” (*mentoring*) secara individu murid laki-laki yang berprestasi rendah untuk membantu mereka agar tertarik belajar Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Proses belajar mengajar yang tanggap gender memerlukan guru yang dapat melaksanakan pendekatan gender secara menyeluruh yaitu pada perencanaan proses belajar mengajar, pengajaran, pengelolaan kelas dan penilaian. Guru masih menggunakan metode belajar mengajar yang belum tentu memberikan kesempatan yang sama untuk murid perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi secara aktif. Mereka juga menggunakan bahan ajar yang mempertahankan stereotip gender. Banyak pendekatan belajar mengajar aktif yang inovatif yang telah diperkenalkan di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir seperti simulasi tukar peran (*role play*), diskusi kelompok, studi kasus, atau drama pendek. Namun pendekatan inovatif tersebut tidak selalu dilakukan dengan menyertakan sudut pandang gender. Selain itu, kebanyakan pengajaran masih sering menggunakan metode tradisional yang tidak menanggapi kebutuhan dan kepentingan belajar murid laki-laki maupun perempuan.

Guru PAUD yang terlatih tanggap gender menyadari bahwa anak cenderung memilih kegiatan yang paling cocok dengan kemampuan mereka. Umpamanya murid laki-laki lebih memilih bermain “bangun-bangunan” dengan balok kayu atau batu sedangkan anak perempuan lebih memilih menggunting dan

menempel kertas atau mewarnai. Menjadi kewajiban guru untuk menjamin bahwa semua anak mengikuti semua kegiatan untuk meningkatkan keterampilannya. Pada saat anak lahir, pihak keluarga cenderung untuk langsung membiasakan anak perempuan maupun laki-laki untuk mengikuti peran dan perilaku yang berbeda menurut norma dan nilai setempat. Guru yang pernah mengikuti pelatihan kesetaraan gender mengetahui cara melakukan analisis gender secara berkala. Analisis tersebut memungkinkan mereka untuk menyadari bias gender dalam masyarakat agar bias gender secara aktif dapat dihindari dalam ruang kelas.

Beberapa Contoh Praktik yang Baik (*Best Practice*) oleh Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman

Salah satu penyelenggara PAUD di Kabupaten Sleman mengikuti program uji coba pengarusutamaan gender yang dibiayai oleh Kemdikbud. Tim Tinjauan melihat anak laki-laki maupun perempuan sama-sama mengikuti semua peran seperti memasak di dapur dan merawat bayi (*boneka*). Hasil karya seni murid laki-laki maupun perempuan dipasang di dinding ruang kelas. Rencana pengajaran mingguan yang tanggap gender telah disusun oleh para guru. Hal tersebut menjamin bahwa murid laki-laki maupun perempuan menerima kesempatan dan perlakuan yang sama. Buku ajar yang berisikan stereotip gender tidak digunakan dan bahan ajar tidak berisikan stereotip gender.

Sumber: ACDP 005 Penelitian Studi Kasus, Januari, 2012

Di kelas, cara belajar murid laki-laki bisa sangat berbeda dengan cara belajar anak perempuan. Hal ini bisa mempengaruhi tingkat keikutsertaan mereka dalam kegiatan kelas, prestasi belajar dan hasil pembelajaran. Nilai dan stereotip tentang gender dari masyarakat dan budaya setempat bisa secara tidak sadar terbawa di ruang kelas maupun sekolah melalui hubungan guru-murid dan antara murid. Pendekatan dan metode mengajar serta menilai prestasi belajar bisa juga memihak pada laki-laki. Terutama di Indonesia, di mana sering kali perempuan diarahkan untuk tidak bicara di depan umum, tidak mengeluarkan pendapat dan tidak mempersoalkan wewenang laki-laki. Harapan bahwa guru bisa menjadi pemicu perubahan (*change agent*) yang efektif – pemicu reformasi dari dalam – tidak akan tercapai kecuali para guru didukung dan diberdayakan melalui upaya bersama lembaga pendidikan guru dan lembaga pelatihan guru serta didukung kegiatan pengembangan kapasitas yang dilakukan secara berkala.

Proses pendidikan bisa memperkuat ketidaksetaraan gender melalui pembagian tugas di kelas seperti menugaskan murid perempuan untuk melakukan kegiatan yang dianggap berstatus rendah seperti menyapu dan membersihkan ruang kelas sedangkan laki-laki ditugaskan melakukan kegiatan yang dianggap memiliki status tinggi seperti mengatur waktu (*time keeping*). Murid perempuan tidak didorong, bahkan dilarang, untuk mengikuti kegiatan olah raga ekstra kurikuler yang dianggap sebagai olah raga laki-laki seperti sepakbola dan bola basket. Sedangkan murid laki-laki tidak didorong untuk mengikuti kegiatan ekstra kurikuler yang dianggap sebagai kegiatan perempuan seperti memasak atau menjahit.

Studi Kasus: Ketidaksetaraan Kesempatan dalam Proses Belajar Mengajar

Pada saat evaluasi proyek Kemenag *Madrasah Education Development* baru-baru ini, tim mengunjungi dua madrasah di mana murid perempuan melaporkan bahwa mereka berniat mengikuti kegiatan olah raga namun tidak diijinkan memakai celana pendek atau panjang. Oleh sebab itu, mereka tidak bisa mengikuti kegiatan olah raga. Peraturan tentang busana perempuan di madrasah mengakibatkan bahwa murid perempuan tidak selalu mempunyai kesempatan yang sama dalam mengikuti olah raga padahal olah raga merupakan unsur penting dari proses belajar di sekolah.

Sumber: ADB Studi KDP Special Review Mission report, May, 2012

Selain itu, juga ditemukan bahwa poster yang dipasang di dinding kelas hanya menampilkan gambar lelaki sebagai teladan (*role model*). Murid laki-laki lebih banyak dipilih sebagai pemimpin kelas. Ini berarti para guru secara tidak sadar memperkuat bias gender. Pada saat membimbing murid pendidikan menengah atas dan yang lebih tinggi, guru bimbingan dan konseling belum tentu mendorong murid perempuan untuk memilih jurusan atau karir yang secara tradisional didominasi laki-laki. Pelatihan guru di Indonesia sering tidak menyertakan materi terkait perlakuan yang sama bagi murid perempuan dan laki-laki seperti penugasan bersama-sama dalam semua tugas dan bersama-sama mengikuti semua kegiatan sekolah.

Seperti yang dikatakan salah satu guru SD di Gorontalo³⁸, “Di SDN kami, pimpinan upacara hari Senin selalu laki-laki. Saat membersihkan ruang kelas, murid perempuan yang menyapu, sementara laki-laki yang mengangkat kursi ke atas meja. Banyak guru dan murid merasa bahwa anak laki-laki lebih kuat dari anak perempuan.”



SDN Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Di sekolah ini, para guru melakukan pembagian peran secara tradisional kepada para murid dimana hanya perempuan yang terlihat mengepel lantai. Karena tidak ada air di sekolah tersebut, murid wajib bergiliran membawa air dari rumah untuk mengepel dan untuk keperluan WC guru. Selain itu, karena murid tidak memiliki kamar mandi, mereka harus pulang ke rumah jika harus pergi ke kamar mandi. Guru juga melaporkan bahwa kehadiran perempuan berkurang pada saat mereka menstruasi (ada murid yang berusia lebih tua dari rata-rata usia teman sekelasnya) karena tidak ada fasilitas sanitasi yang memadai.

Sumber: ACDP005 Studi Kasus Penelitian Lapangan, Indramayu, Januari 2012

Namun tidak semua sekolah melakukan kegiatan yang bias gender. Sebagai contoh, kepala sekolah dari salah satu madrasah (MAN) inti di Kabupaten Indramayu menceritakan bahwa di sekolahnya, dulu ketua kelas selalu dijabat oleh murid laki-laki. Sedangkan sekarang ini 40% ketua kelas dijabat murid perempuan. Beliau juga menceritakan bahwa upacara bendera mingguan sering dipimpin oleh perempuan. Beliau mengatakan bahwa beliau mendapatkan informasi tentang gender dari Kepala Kantor Kemenag, tapi sampai sekarang belum ada peningkatan kapasitas dalam bidang kesetaraan gender. Menurutnya, peningkatan kapasitas tersebut akan berguna bagi sekolahnya. Di Kabupaten Indramayu, tidak terdapat program kesetaraan gender karena adanya keterbatasan dalam keahlian serta kepemimpinan. Pada tahun 2010, Kabupaten Indramayu mengajukan dan menerima dana Kemdikbud sebesar Rp.100 juta dalam rangka program uji coba kesetaraan gender. Namun akhirnya dana tersebut harus dikembalikan karena kekurangan kemampuan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Kejadian ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas pimpinan kabupaten/kota dan Pokja Gender sebelum dana pendukung kegiatan disediakan dan diberikan kepada pemangku kepentingan terkait.

5.2.1 Prestasi Keterampilan Membaca dan Menulis (*Literacy*)

Pimpinan sekolah dan guru perlu menyadari pilihan bahan bacaan murid yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta kemungkinan adanya perbedaan antara pilihan murid laki-laki dan perempuan. Berbagai macam kebijakan dan kegiatan telah dilakukan di banyak negara untuk meningkatkan prestasi laki-laki dalam membaca dan menulis (*literacy*) serta untuk mendorong mereka membiasakan diri membaca. Penelitian PISA menemukan bahwa “murid yang sangat sering membaca berbagai macam bacaan cenderung lebih efektif dalam belajar dan lebih berhasil di sekolah.”³⁹ Adapun berbagai kebijakan dan tindakan yang dapat memperkuat keterampilan membaca dan menulis bagi murid laki-laki maupun perempuan antara lain: mewajibkan setiap sekolah mempunyai ruang perpustakaan, penyediaan dana untuk membeli buku perpustakaan yang menarik bagi murid laki-laki maupun perempuan, mendorong sekolah agar menggunakan waktu pelajaran untuk kegiatan membaca, serta peningkatan kesadaran orang tua. Penelitian tentang kebiasaan membaca, sikap dan pilihan bahan bacaan murid laki-laki dan perempuan dapat menjadi masukan bagi kebijakan pembaharuan kurikulum dalam bidang membaca dan menulis (*literacy*).

Berdasarkan data Susenas tahun 2009, Suharti (2012) menemukan bahwa murid laki-laki lebih sedikit membaca dibanding perempuan. Di antara murid pendidikan sekolah menengah pertama yang disurvei, hanya 17% murid laki-laki membaca buku cerita dibandingkan 22% perempuan. Persentase murid perempuan yang membaca koran juga dua kali lipat dari persentase laki-laki. Hal ini dapat menjelaskan perbedaan prestasi dalam pelajaran Bahasa Indonesia antara murid laki-laki dan perempuan.

38. Penelitian Studi Kasus ACDP005, Gorontalo, Maret 2012

39. PISA *In Focus 8* www.pisa.oecd.org

Tinjauan ini menemukan bahwa buku yang “sangat menarik untuk dibaca” (*high-interest’ reading*) dan mencerminkan perbedaan minat antara murid laki-laki dan perempuan, kurang tersedia di dalam perpustakaan sekolah yang dikunjungi. Keadaan perpustakaan lebih buruk di sekolah yang sumber dayanya terbatas, di mana isi perpustakaan sangat sedikit atau bahkan tidak ada buku bacaan sama sekali. Kepala sekolah, petugas perpustakaan dan guru tidak mendapatkan pelatihan yang baik dalam mengembangkan strategi inovatif mendorong murid laki-laki maupun perempuan untuk lebih sering membaca dan meningkatkan keterampilan membaca. Sering kali upaya agar perpustakaan menjadi lebih menarik bagi murid laki-laki maupun perempuan tidak diperhatikan seperti menciptakan “sudut baca” yang dilengkapi kursi yang nyaman; memasang gambar yang berwarna-warni, peta atau hasil karya seni murid di dinding; atau gambar yang berisi informasi menarik tentang tokoh olahraga atau keilmuan (laki-laki maupun perempuan).

Sumber Daya Perpustakaan untuk Membaca di SMP di Kupang

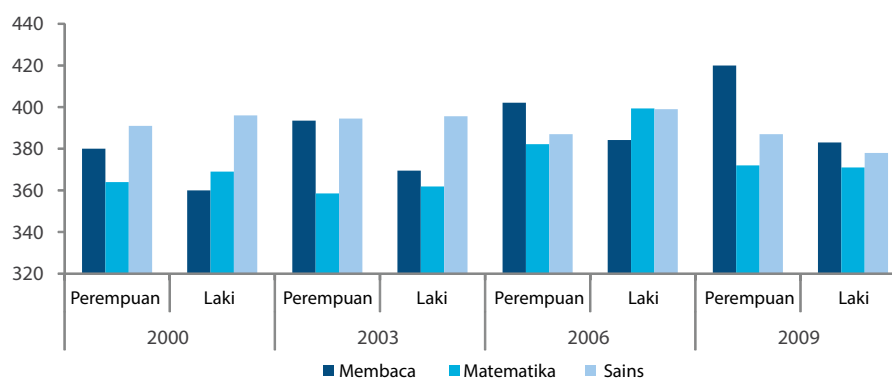
Di salah satu SMP yang dikunjungi di Kupang, jumlah dan jenis buku bacaan di perpustakaan sangat terbatas walaupun ada lebih dari 1.000 murid di sekolah tersebut. Masa pinjam buku di sekolah tersebut dibatasi selama dua hari dan hanya boleh diperpanjang dua kali. Hal ini mendorong murid untuk tidak membaca mengingat bahwa waktu bebas untuk membaca di sekolah juga sangat terbatas baik selama jam sekolah maupun setelah jam sekolah. Petugas perpustakaan menceritakan bahwa murid perempuan lebih sering⁴⁰ mengunjungi perpustakaan daripada murid laki-laki pada waktu istirahat siang dan murid perempuan lebih sering meminjam buku daripada laki-laki.

Sumber: ACDP 005 Penelitian Studi Kasus, Februari, 2012

5.2.2 Kesenjangan Gender dalam Prestasi Belajar Murid

Ada perbedaan prestasi belajar dalam mata pelajaran inti antara murid laki-laki dan perempuan di Indonesia. Selama satu dasawarsa terakhir, penilaian internasional PISA sudah diselenggarakan sebanyak empat kali untuk murid berumur 15 tahun. Setiap penilaian menunjukkan bahwa hasil ujian murid laki-laki lebih rendah dari perempuan dalam bidang membaca (*literacy*) untuk Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Hal tersebut juga merupakan kecenderungan di seluruh dunia (lihat Gambar 27). Hasil survei Madrasah QEM⁴¹ menunjukkan hal yang sama, bahwa murid perempuan mencapai nilai lebih tinggi secara signifikan dalam bidang Bahasa Indonesia dan Inggris sedangkan murid laki-laki mencapai nilai lebih tinggi dalam Ilmu Pengetahuan Alam. Tidak ada perbedaan dalam bidang Matematika. Selama penelitian untuk Tinjauan ini, hampir semua kepala sekolah maupun guru pendidikan menengah pertama dan atas yang dikunjungi melaporkan bahwa murid perempuan mencapai nilai lebih tinggi dari murid laki-laki dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Sedangkan murid laki-laki mencapai nilai lebih tinggi dalam Ilmu Pengetahuan Alam.

Gambar 27. Hasil PISA untuk Indonesia Menurut Gender



Sumber: Data dari situs PISA

40. Riviu dari *Madrasah Education Development (MEDP)* juga menemukan bahwa murid perempuan menghabiskan lebih banyak waktu di perpustakaan dibandingkan murid laki-laki.

41. Kementerian Agama, Februari 2011. Penelitian Mutu Pendidikan di Madrasah (*Quality of Education in Madrassah Study*) Laporan Final.

Berdasarkan data Ujian Nasional SMP/MTs tahun 2010, Suharti⁴² menemukan bahwa rata-rata nilai murid perempuan lebih tinggi dari murid laki-laki dalam semua pelajaran yang diuji (Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam) dengan perbedaan nilai paling besar untuk Bahasa Indonesia. Namun hasil yang berbeda didapatkan setelah dilakukan analisis bertingkat (*multi-level*) dengan menggunakan berbagai komponen termasuk murid, sekolah, kabupaten/kota, karakteristik keluarga (pendidikan dan pekerjaan orang tua), jenis penyelenggara pendidikan (sekolah atau madrasah), status penyelenggara pendidikan (negeri atau swasta), jumlah dan kualifikasi guru, karakteristik kepala sekolah, dan karakteristik kabupaten/kota (penduduk). Hasil analisis bertingkat menunjukkan bahwa murid perempuan memiliki prestasi lebih tinggi dari laki-laki namun hanya dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris saja. Sedangkan murid perempuan memiliki nilai sedikit lebih tinggi daripada laki-laki dalam Matematika dan nilai yang sama dengan murid laki-laki dalam Ilmu Pengetahuan Alam.

Kajian Suharti⁴³ juga menggambarkan bahwa murid laki-laki menunjukkan varian nilai yang lebih besar daripada perempuan untuk pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, tetapi varian nilainya lebih kecil untuk Matematika dan IPA. Adapun bukti kuat bahwa perbedaan di sekolah mempunyai dampak lebih besar terhadap perbedaan nilai murid perempuan daripada nilai laki-laki. Sedangkan perbedaan eksternal yaitu antara sekolah dan kabupaten/kota mempunyai dampak lebih besar terhadap perbedaan nilai murid laki-laki dari pada nilai perempuan. Menurut Suharti, temuan kajian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang menyimpulkan bahwa prestasi murid laki-laki lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya (*external*) daripada perempuan (Baker dan Jones, 1993 dan Riegler-Crumb, 2005). Analisis lebih lanjut menjelaskan bahwa pengaruh gender terhadap prestasi belajar dalam Matematika berbeda pada sekolah dan kabupaten/kota yang berbeda. Data dari Nusa Tenggara Barat digunakan oleh Suharti untuk menganalisis perbedaan yang terjadi di sekolah-sekolah dan berbagai kabupaten/kota. Suharti kemudian menyimpulkan bahwa temuan-temuan tersebut merupakan bukti perlunya kebijakan kesetaraan gender dalam pendidikan untuk daerah yang memiliki perbedaan prestasi belajar antara perempuan dan laki-laki.

Penelitian lebih lanjut diperlukan di Indonesia sebagai masukan kebijakan tentang reformasi kurikulum pendidikan calon guru dan kurikulum sekolah agar menjadi lebih tanggap gender. Basis data nasional PISA memiliki data yang sangat penting untuk dianalisis lebih lanjut, termasuk hasil PISA 2006 tentang sikap terhadap membaca murid perempuan dan laki-laki berumur 15 tahun serta hasil PISA 2009 tentang sikap terhadap pelajaran Matematika untuk murid perempuan dan laki-laki. Basis data nasional TIMMS dan PIRL menyertakan data serupa yang dapat dianalisis lebih lanjut menurut gender dan kelompok umur. Strategi untuk meningkatkan kemampuan membaca dan mengerti isi bacaan (*comprehension*) oleh murid perempuan dan terutama laki-laki dapat berdampak positif terhadap keberhasilan belajar secara menyeluruh serta menghapus kesenjangan gender dalam prestasi belajar. Penelitian internasional menunjukkan bahwa upaya memperkuat kemampuan membaca, menulis dan menghitung (*literacy* dan *numeracy*) pada tahun-tahun awal sekolah dasar merupakan kunci keberhasilan pada tahun-tahun berikutnya/kelas lebih atas. Upaya tersebut harus dilakukan oleh guru kompeten yang telah menjalani pelatihan khusus serta dilengkapi dengan bahan ajar khusus untuk membantu murid yang ketinggalan pelajaran (*remedial*).

5.2.3 Pandangan Guru dan Murid tentang Prestasi Belajar dalam Mata Pelajaran Tertentu

Dalam wawancara informal selama Tinjauan ini, semua murid pendidikan menengah pertama dan atas - baik laki-laki maupun perempuan - menyatakan bahwa murid laki-laki lebih unggul dalam bidang Ilmu Pengetahuan Alam, sedangkan murid perempuan lebih unggul dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Pendapat ini juga didukung oleh hasil penilaian internasional yang diselenggarakan di Indonesia dalam berbagai pelajaran tersebut. Dengan demikian, masih perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah pendapat seperti ini bisa menghalangi kemajuan murid perempuan di kelas yang lebih tinggi dalam Ilmu Pengetahuan Alam dan juga untuk laki-laki dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Para guru harus dilatih agar mengerti bahwa pendapat dan harapan mereka tentang

42. Sumber: Suharti. 2012. *Schooling and Destiny: The Influences of Student, School, and District Characteristics on Education Performance in Indonesia. Working paper for PhD thesis, Australian Demographic and Social Research Institute, Australian National University.*

43. Sumber: Suharti. 2010. *Are Indonesian Girls Left Behind? The Evolution of Gender Gaps in Education. Presented at the 10th International Conference on Women in Asia, Canberra, 30 September, 2010*

murid laki-laki dan perempuan bisa mempengaruhi proses evaluasi murid yang mereka lakukan, seperti bagaimana caranya menilai kemajuan murid, menilai ulangan, serta memberi umpan balik kepada murid. Demikian juga kurikulum dan buku ajar yang memperkuat gambaran bahwa laki-laki lebih ahli dari pada perempuan dalam Ilmu Pengetahuan Alam harus diubah (lihat Gambar 28). Penelitian di Amerika Serikat tahun 2008 menemukan bahwa dukungan dan harapan orang tua merupakan kunci keberhasilan dalam kedua mata pelajaran (IPA dan Matematika) untuk murid laki-laki atau perempuan pada pendidikan menengah pertama dan atas. Untuk murid perempuan yang berusia lebih muda, faktor lain yang penting adalah kedekatan mereka dan pengalaman yang menyenangkan dengan guru. Studi ini memperkuat pandangan bahwa dibutuhkan waktu lama untuk menghilangkan stereotip. Baik murid laki-laki maupun perempuan berpendapat bahwa guru yakin murid laki-laki lebih ahli dari perempuan dalam mata pelajaran Matematika dan IPA. Bagi murid laki-laki, pandangan tersebut dianggap sebagai dukungan untuk mereka. Sebaliknya, murid perempuan menganggap pandangan tersebut sebagai penghalang.⁴⁴

Studi Kasus: Kesenjangan Gender dalam Prestasi Belajar di Kupang

Seorang kepala SMP di Kupang menjalani pelatihan kesadaran gender pada tahun 2009 melalui proyek AIBEP⁴⁵ yang didanai oleh AusAID. Setelah kembali ke sekolahnya, Beliau memilah data prestasi murid menurut jenis kelamin dan melihat bahwa murid laki-laki memiliki prestasi lebih rendah dari pada perempuan dalam semua mata pelajaran. Namun, para guru bersikeras bahwa data tersebut terlalu "sensitif" untuk dipilah menurut jenis kelamin karena mereka tidak ingin data tersebut diketahui orang tua. Sejak saat itu, datanya tidak dipilah. Kepala sekolah tersebut belum menemukan cara bagaimana mengembangkan strategi untuk mengatasi kesenjangan gender dalam prestasi.

Tim Tinjauan memantau SMP di mana dua pertiga murid laki-laki absen dari sekolah. Murid perempuan dan guru menjelaskan bahwa murid laki-laki yang "hilang" tersebut datang ke sekolah di pagi hari agar tercatat dalam daftar hadir dan kemudian pergi untuk bermain. Sekolah tersebut belum mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah absensi serta bagaimana caranya memberi motivasi pada murid laki-laki agar berada tetap di sekolah dan kembali mengikuti proses belajar mengajar.

Di SMP lainnya, kepala sekolah melaporkan bahwa prestasi belajar laki-laki jauh lebih rendah dari perempuan. Baru-baru ini para guru mulai melaksanakan kegiatan "menemani" (*mentoring*) dimana satu guru mendampingi satu murid laki-laki yang berprestasi rendah. Mereka melaporkan bahwa pendekatan menemani tersebut membawa dampak positif.

Namun, kedua sekolah ini juga melaporkan bahwa prestasi murid perempuan dalam Ilmu Pengetahuan Alam lebih rendah dari prestasi laki-laki dan, di salah satu sekolah, prestasi laki-laki dalam Matematika juga lebih baik dari prestasi perempuan walau hanya sedikit lebih baik. Para guru dari kedua sekolah ini melaporkan bahwa banyak murid laki-laki bermasalah dalam hal motivasi untuk belajar tapi tidak dengan murid perempuan. Mereka belum mempunyai strategi untuk mendorong prestasi murid perempuan dalam mata pelajaran IPA.

Pada kedua sekolah tersebut, guru laki-laki maupun perempuan memandang bahwa "*murid laki-laki lebih ahli dalam bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, sedangkan murid perempuan lebih ahli dalam bidang Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.*"

Kasus-kasus di atas menunjukkan perlunya pendekatan tanggap gender dalam menyusun strategi untuk mengatasi masalah motivasi dan keberhasilan belajar dalam mata pelajaran yang berbeda.

Sumber: ACDP 005 Penelitian Studi Kasus, FDG Sekolah, Kupang, Februari 2012

Studi QEM⁴⁶ menanyakan sikap murid laki-laki dan perempuan kelas 6 dari 150 MTs tentang kehidupan sekolah. Temuan studi tersebut menunjukkan bahwa laki-laki bersikap sedikit lebih positif daripada perempuan mengenai besarnya perhatian serta status yang mereka terima dari guru dan orang lain di sekolah. Setengah dari murid perempuan (51%) dan sedikit lebih banyak murid laki-laki (56%) merasa bahwa para guru membantu mereka mengerjakan pekerjaan rumahnya. Lebih banyak murid laki-laki (61,6%) daripada perempuan (55,8%) merasa bahwa para guru mendengarkan pendapat mereka. Seorang guru dapat meningkatkan prestasi belajar murid dengan menggunakan bahasa yang inklusif di dalam ruang kelas, mendengarkan pendapat murid serta memberi umpan balik tentang pekerjaan rumah. Para guru perlu menyisihkan waktu untuk mendengarkan tanggapan dari murid laki-laki maupun perempuan untuk meyakinkan bahwa mereka sudah mengerti isi pelajarannya. Mereka juga harus mendorong murid laki-laki maupun perempuan untuk bertanya jika mereka kurang mengerti.

44. Nadya Fouad. 2008. *Tracking the Reasons Why Many Girls Avoid Science and Mathematics*. University of Wisconsin-Milwaukee. USA.

45. Australia-Indonesia Basic Education Partnership 2006-2010

46. Kementerian Agama, Februari 2011. Penelitian Mutu Pendidikan di Madrasah (*Quality of Education in Madrasah Study*) Laporan Final.

Studi Kasus: Ketidaksetaraan Kesempatan Menggunakan Media Ajar IPA

Sehubungan dengan riviur kegiatan *Madrasah Education Development* (MEDP) yang dilaksanakan oleh Kemenag baru-baru ini, tim mengunjungi salah satu Madrasah Aliyah Negeri Pesantren di Kabupaten Bangkalan, Madura. Para laki-laki dan perempuan, baik guru maupun murid, beraktivitas secara terpisah di sekolah maupun di kawasan tinggal. Hanya ada satu laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam yang terletak di bagian laki-laki yang tidak boleh dimasuki oleh perempuan. Murid perempuan menuntut (melalui gurunya) agar mereka juga diberi laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (yang akhirnya dibiayai oleh MEDP). Walaupun pada awalnya ditolak oleh Komite Madrasah yang semua anggotanya laki-laki, permintaan ini akhirnya disetujui. Komite tersebut sebelumnya mengajukan usulan untuk membangun hanya satu laboratorium yang terletak di bagian laki-laki. Guru perempuan menilai bahwa tidak adanya perempuan sebagai anggota Komite merupakan penghalang. Namun, mereka juga menyatakan bahwa tidak mungkin perempuan menjadi anggota Komite karena hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan konteks Islam.

Sumber: ADB MEDP Special Review Mission Report, May, 2012

5.3 Kesetaraan Gender dalam Kurikulum dan Pengembangan

Pendidikan mempunyai peran penting dalam mendukung masyarakat untuk lebih progresif dalam hal gender, di mana laki-laki dan perempuan menjadi mitra sejajar dalam urusan publik maupun rumah tangga. Hasil penelitian baru-baru ini tentang kurikulum dan buku ajar baik di sekolah maupun madrasah menunjukkan bahwa perempuan biasanya digambarkan beraktivitas di rumah atau sebagai orang yang mengurus dan mendukung orang lain. Di sisi lain, laki-laki digambarkan sebagai orang yang kuat, tegas dan pintar serta dianggap sebagai pemimpin masyarakat. Peran gender dalam buku ajar tersebut searah dengan pandangan tradisional di mana laki-laki lebih unggul serta berkedudukan lebih tinggi dan berkuasa. Akibatnya, bahan ajar seperti ini memperkuat stereotip gender.

Guru harus bisa memantau buku ajar dan bahan ajaran lain agar tidak mengandung stereotip gender. Sebaiknya guru juga mampu menggunakan gambar yang terlanjur berisi stereotip gender sebagai contoh untuk menyadarkan murid tentang kesetaraan gender. Mereka juga harus bisa mengembangkan dan menggunakan bahan ajar yang tanggap gender. Namun pada umumnya kebanyakan kurikulum pendidikan calon guru tidak melatih calon guru untuk bisa mengenali stereotip gender dalam buku ajar. Kekurangan tersebut perlu diselesaikan sesuai CEDAW Bagian 1 Pasal 10 yang berbunyi: Anggota (negara yang menandatangani CEDAW) akan melaksanakan tindakan yang sesuai untuk “menghapus semua konsep stereotip tentang peran laki-laki dan perempuan, pada semua tingkat dalam segala bentuk pendidikan melalui dorongan terhadap pendidikan bersama (laki-laki bersama dengan perempuan) serta semua bentuk pendidikan lain yang dapat membantu mencapai tujuan tersebut serta, pada khususnya, melalui perbaikan buku ajar, program sekolah dan metode pengajaran.”⁴⁷

Laporan Kemdikbud menunjukkan bahwa kebanyakan penulis buku ajar adalah laki-laki. Pada tahun 2009, persentase laki-laki penulis buku ajar adalah 73% untuk buku ajar pendidikan dasar, 82% untuk pendidikan menengah pertama, dan 83% untuk pendidikan menengah atas. Menurut laporan, tidak ada penulis buku ajar yang sudah mengikuti pelatihan menulis yang tanggap gender. Walaupun perbandingan jumlah penulis buku ajar laki-laki dan perempuan masih perlu diperbaiki, keduanya perlu dilatih agar dapat menyertakan keseimbangan gender ke dalam buku ajar yang mereka tulis. Pada tahun 2004, Kemdikbud mengembangkan pedoman untuk bahan ajar yang tanggap gender.⁴⁸ Namun masih banyak buku ajar yang diterbitkan untuk pendidikan dini hingga menengah atas yang memperkuat ketidakseimbangan gender melalui naratif yang bias gender dan gambar yang stereotip. Beberapa negara termasuk Cina, Laos, Mongolia, dan Thailand telah melakukan pengkajian ulang terhadap kurikulum dan bahan ajar dari sudut pandang gender yang bertujuan untuk menemukan stereotip dan bias gender. Di Laos, para pengembang kurikulum dilatih tanggap gender. Dari pelatihan ini, mereka mengembangkan bahan ajar tambahan, kurikulum baru untuk pendidikan dasar, dan buku ajar.⁴⁹

47. <http://www.unwomen-eseasia.org/projects/Cedaw/cedawconventionfull.html>

48. Kemdikbud. 2010. Satu Dasawarsa Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan, Jakarta

49. UNESCO. 2005. PUS Penilaian Pertengahan Dasawarsa Kesetaraan Gender dalam Pendidikan.

Pada tahun 2011, analisis gender dilakukan terhadap buku ajar yang diterbitkan oleh 15 penerbit. Buku ajar yang dianalisis termasuk Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Pendidikan Agama Islam, Biologi, Ilmu Pengetahuan Sosial serta Pendidikan Kesegaran Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan. Kelas yang buku ajarnya dianalisis adalah kelas 1, 6, 9 and 12. Gambar yang menampilkan perempuan sebagai satu-satunya gender yang mengerjakan tugas rumah tangga ditemukan dalam semua buku. Tingkat stereotip yang paling tinggi ditemukan pada buku kelas 6 dan diikuti oleh buku kelas 1. Dominasi laki-laki dalam bidang publik ditemukan dalam buku untuk semua kelas, dengan jumlah gambar yang menunjukkan stereotip terbanyak pada buku untuk kelas 6. "Gambar tentang kepemimpinan sosial dan bidang teknologi didominasi oleh laki-laki. Walaupun sebenarnya di Indonesia ada banyak perempuan yang merupakan pemimpin sosial, aktivis, politisi, mantan presiden, mantan menteri dan pejabat negara, ilmuwan yang diakui secara internasional serta astronot, perempuan seperti ini kurang dikedepankan dalam buku ajar"⁵⁰. Survei Tinjauan menemukan cerita dan gambar yang digunakan dalam buku ajar Bahasa Inggris lebih baik dari buku ajar bidang lain dalam hal penyampaian citra kesetaraan gender.

Buku ajar IPA pun bisa memperkuat kesalahpahaman bahwa prestasi laki-laki dalam pelajaran IPA lebih baik dibandingkan perempuan. Penulis buku di bawah ini menggunakan sekelompok anak yang terdiri dari dua murid perempuan dan satu laki-laki sebagai ilustrasi. Salah satu perempuan digambarkan sebagai orang yang selalu bertanya dan berbuat kesalahan seperti memegang wajan yang panas atau tidak mematikan lampu pada malam hari. Sedangkan murid perempuan yang lainnya digambarkan sebagai seseorang yang selalu bertanya. Sedangkan murid laki-laki digambarkan sebagai seseorang yang cakap, selalu tahu jawaban yang benar, dan bisa menjelaskan kepada temannya (lihat Gambar 28b). Gambar tersebut memperkuat stereotip bahwa murid laki-laki pengetahuannya lebih luas dari pada murid perempuan. Tinjauan ini juga menemukan contoh bias gender dalam buku pelajaran untuk taman kanak-kanak (TK) yang gambarnya hanya menampilkan laki-laki (lihat Gambar 28a).

Gambar 28a. Contoh Bias Gender dalam Buku pelajaran TK



Gambar 28b. Contoh Stereotip Gender dalam Buku Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Kelas 651



Sumber: Rachmat, S. 2007. Ilmu adalah teman terbaik, (Sains Sahabatku, Pelajaran IPA untuk SD Kelas 6). KTPS. Ganeca Exact, Jakarta.

50. Iwu, D. Utomo & P. McDonald. 2011. *Policy Brief No.1. Gender Depiction in Indonesian Primary and Secondary School Textbooks: The Way Forward. Gender and Reproductive Health Survey*, Australia National University/ADSRI-ANU. Penelitian sebagian didanai oleh BAPPENAS.

51. Contoh yang diproduksi dari Iwu, D. Utomo & P. McDonald. 2011

Pada tahun 2011, dilakukan pemantauan terhadap 35 buku ajar Pendidikan Agama Islam (PAI)⁵² di Indonesia. Buku-buku yang dipilih adalah buku ajar yang paling banyak digunakan oleh sekolah di empat Provinsi. Pada umumnya isi uraian bersifat bias gender masih ditemukan misalnya hanya laki-laki yang disebutkan dalam pembahasan tentang pemimpin agama atau ulama, pemimpin politik maupun sahabat Nabi Muhammad SAW. Buku tersebut juga mengandung banyak gambar laki-laki yang mendukung sistem patriarki sebagai suatu ideologi. Hanya laki-laki yang digunakan untuk menggambarkan tokoh raja, pemuka agama, pegawai negeri, direktur, dan hakim. Selain itu, pengambilan keputusan digambarkan hanya dilakukan oleh laki-laki saja. Dalam kebanyakan buku PAI tersebut, laki-laki ditempatkan sebagai pemimpin keluarga. Sejumlah Hadits yang dikutip mengandung bias gender karena mengabaikan kewenangan perempuan dalam keluarga. Pembagian tugas rumah tangga berdasarkan gender juga terlihat dalam berbagai ilustrasi pada buku-buku ajar tersebut. Beberapa saran dari pemantauan ini adalah sebagai berikut:

Saran Kebijakan dari Penelitian Buku Ajar 2011, Utomo & Rosyidah, ANU:

1. Kurikulum nasional tidak mendukung secara tersurat (*explicit*) kebijakan progresif dalam hal hubungan gender. Penyesuaian hal ini menjadi prioritas melalui penambahan dan perubahan dalam semua mata pelajaran.
2. Ilustrasi dan gambar buku ajar dari Tahun 1 sampai Tahun 12 yang dipilih oleh penulis dan penerbit cenderung sangat bias gender dan harus diubah. Penggunaan contoh dan gambar yang berisikan norma gender yang lebih progresif harus lebih sering dilakukan.
3. Mereka yang terlibat dalam upaya perlindungan anak harus memimpin dalam memastikan bahwa buku ajar berisikan pengetahuan, informasi serta ilustrasi dan gambar yang mendukung norma gender yang progresif.
4. Dana untuk melatih para penulis buku ajar harus disiapkan agar mereka memahami konsep kesetaraan gender dan menunjukkan norma gender yang lebih progresif dalam ilustrasi dan gambar yang digunakan dalam buku ajar.
5. Penulis harus disertifikasi bahwa mereka secara progresif memahami gender dan hanya penulis bersertifikat yang diizinkan menulis buku ajar.

Studi internasional serta penelitian terbaru oleh Utomo dkk⁵³ pada tahun 2011 menyoroti masalah-masalah peka seputar kebutuhan agar sekolah dapat menyediakan pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif serta pengetahuan seks aman. Buku ajar yang ada sudah berisikan informasi tentang masalah kesehatan reproduksi dan penyakit HIV/AIDS, tetapi penelitian tersebut menemukan bahwa tidak semua pemimpin agama dan orang tua mendukung adanya pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah. Penelitian di Papua dan Papua Barat oleh Diarsvitri dkk⁵⁴ pada tahun 2011 menemukan bahwa pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif di sekolah berdampak positif pada perilaku seksual yang lebih bertanggung jawab, meskipun masih banyak anggapan bahwa pendidikan kesehatan reproduksi dapat mendorong peningkatan aktivitas seksual murid.

5.4 Kesetaraan Gender dalam Pelatihan dan Pengembangan Guru

Banyak negara yang telah melaksanakan pelatihan guru dalam kesetaraan gender dan metode belajar mengajar yang peka gender. Pelatihan guru dalam kesetaraan gender menjadi sangat berguna apabila diikutsertakan pada kegiatan pendidikan calon guru (*pre-service*) maupun pelatihan guru (*in-service*). Lembaga pendidikan dan pelatihan perlu memiliki kemampuan untuk mengajarkan proses belajar mengajar aktif yang dilaksanakan dari sudut pandang kesetaraan gender. Kemampuan tersebut diperlukan

52. Ida Rosyidah & Iwu D. Utomo. 2011. *Policy Brief No.4 Gender in Islamic Studies Textbooks. Gender and Reproductive Health Survey*. Australia National University/ADSRI-ANU

53. ADSRI. 2011. *Policy Brief No.5 Reproductive Health Services for Single Young Adults*. I. D.Utomo, P. Macdonald, A. Reimondos, T. Hull, A. Utomo, Australian National University. Canberra

54. Diarsvitri, W., I.D. Utomo, T. Neeman, A. Oktavian, 2011. *Sexuality among senior high school students in Papua and West Papua Provinces & implications for HIV prevention*. <http://dx.doi.org/10.1080/13691058.2011.599862>

baik pada pengembangan program pelatihan maupun pada saat para pelatih mengajar. Sampai saat ini lembaga pelatihan guru (LPMP dan LPTK) di Indonesia belum menjalani pengarusutamaan gender. Beberapa pemangku kepentingan yang diwawancarai selama Tinjauan ini berulang kali menegaskan pentingnya hal-hal di atas untuk dicapai agar Indonesia dapat menghasilkan guru masa depan yang bermutu tinggi dan mendukung kesetaraan gender serta melaksanakan proses pendidikan bermutu tinggi bagi laki-laki maupun perempuan.

5.4.1 Pelatihan Guru (*In-Service*)

Mengingat bahwa kegiatan pengarusutamaan gender Kemdikbud selama satu dasawarsa terakhir dititikberatkan pada pendidikan non formal, dapat diperkirakan bahwa pelatihan tanggap gender untuk guru pendidikan formal kurang diperhatikan. Namun demikian, beberapa waktu lalu sejumlah kepala sekolah dan guru di berbagai provinsi dilatih secara langsung dalam lokakarya terkait kesetaraan gender. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya uji coba Kemdikbud maupun kegiatan yang didukung lembaga donor. Pada saat penelitian lapangan di Sleman, beberapa guru yang telah dilatih melaporkan bahwa mereka menyebarkan hasil pelatihan yang telah mereka terima kepada rekan di sekolahnya sendiri maupun melalui forum guru. Di Sleman dan Kupang, kegiatan uji coba kesetaraan gender dengan sasaran kepala sekolah dan guru melaporkan dampak positif di tingkat sekolah (lihat studi kasus di bawah).

Studi Kasus: Contoh Praktik yang Baik (*Best Practice*) Tingkat Sekolah di Kabupaten Kupang

Pada tahun 2008, beberapa sekolah di Kota Kupang dipilih untuk mengikuti proyek uji coba kesetaraan gender. Kegiatan uji coba mencakup pelatihan kepala sekolah dan guru tentang kesetaraan gender dalam pendidikan serta cara melaksanakan proses belajar mengajar yang tanggap gender di sekolah masing-masing. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pokja Gender dan didukung oleh Pemerintah Kabupaten Kupang. Dukungan tersebut memungkinkan adanya kerjasama antara para pihak terkait termasuk Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten, Pokja Gender, Pusat Studi Perempuan Universitas Cendana serta sekolah yang bersangkutan.

Sekolah yang menjadi peserta kegiatan dipilih dari dua kecamatan (Kupang Barat dan Fatuleu). Salah satu unsur yang sangat penting bagi proyek uji coba tersebut yaitu pada tahun 2009 telah dikembangkan bahan/modul pelatihan tentang pengarusutamaan gender di tingkat sekolah oleh guru SMP dan SMA, kepala sekolah, tutor PKBM, dosen serta anggota Pokja Gender Provinsi. Pada tahun 2010, data tingkat sekolah tentang kinerja belajar dipilih menurut jenis kelamin. Pada tahun yang sama, diselenggarakan pelatihan tentang perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan tanggap gender dengan menggunakan Jalur Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway* atau GAP). Selama tahun 2010, para kepala sekolah dan guru melaksanakan kegiatan uji coba di sekolahnya masing-masing, termasuk perubahan dalam Visi dan Misi sekolah, bahan ajar serta pendekatan belajar mengajar agar menjadi lebih tanggap gender.

Modul pelatihan pengarusutamaan gender diterbitkan sebelum kegiatan berakhir pada awal tahun 2011. Para kepala sekolah peserta proyek diharapkan dapat menyebarkan pelatihan di sekolah-sekolah di dua kecamatan lain yang bukan peserta kegiatan ini yaitu Takari dan Nekamese. Rencana penyebaran pelatihan tersebut menggunakan modul yang telah mereka susun dan laksanakan. Salah satu kepala sekolah berinisiatif membuat proposal pembiayaan untuk kegiatan selanjutnya setelah proyek berakhir pada tahun 2011. Namun sampai sekarang, proposal tersebut belum disetujui untuk dibiayai dari dana pusat, provinsi ataupun kabupaten.

Sumber: ACDP 005 Studi Kasus Wawancara Penelitian Dengan Kepala Sekolah Menengah Atas, Februari, 2012

Guru yang turut serta dalam beberapa kegiatan Kemdikbud dalam pengarusutamaan gender sudah menyebarkan kesadaran gender kepada guru di sekolah sekitarnya. Sudah terlihat bahwa paling sedikit kebanyakan guru sudah mengerti dasar-dasar kesadaran gender. Ada beberapa guru yang melaporkan bahwa pada awalnya mereka sangat tertarik dengan bidang tersebut, namun setelah beberapa waktu niat mereka menurun karena mereka tidak mendapatkan pelatihan lanjutan tentang bagaimana mengubah teori kesetaraan gender menjadi tindakan di dalam ruang kelas serta menghadapi tidak adanya dukungan dari rekan yang belum menerima pelatihan gender. Studi kasus di bawah ini menunjukkan sudut pandang serta saran tenaga kependidikan tentang pelatihan guru dalam kesetaraan gender di sekolah.

Tanggapan Tentang Kebutuhan Pelatihan Kesetaraan Gender di Sekolah

Di Sleman, Kelompok Kerja Gender menyatakan bahwa *“Banyak guru tidak mengetahui tentang pengarusutamaan gender dalam pendidikan. Dibutuhkan pengembangan bahan pelatihan pengarusutamaan gender yang praktis untuk guru. Kita tidak bisa menggunakan pedoman yang ada dari Kemdikbud karena tidak mencakup masalah-masalah setempat yang terkait kurikulum pelatihan.”*

Di Klaten, Staf LPMP menyatakan, *“Menurut saya, ada tiga sasaran – guru terpilih, kepala sekolah dan pengawas – yang perlu dilatih dalam kesetaraan gender di sekolah. Kemudian, mereka bisa menyebarkannya melalui forum - MGMP, MKKS, MKPS. Modul pelatihan seharusnya lebih praktis dan bukan hanya teori, seperti bagaimana menerapkan kesetaraan gender dalam sekolah dan ruang kelas.”*

Di Klaten, Staf Badan Diklat Kemenag menyatakan, *“Tidak ada keengganan melaksanakan pelatihan pengarusutamaan gender di madrasah. Setiap guru diberitahu tentang peraturan pengarusutamaan gender oleh pusat pelatihan Kemenag. Tidak ada pengarahan dari Kemenag tentang pengarusutamaan gender dalam kurikulum. Hanya prakarsa dari beberapa guru yang mengembangkan bahan sendiri dari sudut pandang gender. Tidak ada kebijakan ataupun dana.”*

Di Sleman, Dosen Universitas Negeri Yogyakarta menyatakan bahwa *“Pelatihan pelatih (Training of Trainers atau ToT) untuk pengarusutamaan gender dalam pendidikan untuk setiap tingkat dan jenis sekolah merupakan prioritas untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktek dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di setiap sekolah.”*

Sumber: ACDP 005 Studi Kasus Penelitian FGD Kabupaten Sleman dan Klaten, Jawa Tengah, Januari 2012

Selama ini proses belajar mengajar di sekolah-sekolah Indonesia didominasi oleh metode belajar mengajar tradisional seperti ceramah, mencatat dan latihan soal dari buku ajar. Akibatnya proses belajar mengajar menjadi satu arah dari guru kepada peserta didik. Pelatihan guru di tingkat provinsi menjadi tanggung jawab 30 LPMP yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu juga ada 12 P4TK yang sebagian besar berada di Pulau Jawa. Setiap P4TK merupakan pusat nasional untuk bidang tertentu di mana guru terpilih (*master/key trainers*) dilatih untuk menyebarkan isi pelatihan untuk guru lain di provinsi dan kabupaten/kota masing-masing. Namun, masih belum ada program pelatihan cara belajar murid aktif (PAKEM) yang tanggap gender. Adanya peran baru LPMP Provinsi sebagai lembaga penjaminan mutu membuka peluang baru (*key entry point*) bagi pelatihan guru yang tanggap gender di tingkat provinsi sebagai bagian dari peningkatan mutu guru – selain melalui P4TK.

Kebutuhan Kesetaraan Gender dalam Pelatihan Pendidikan di LPMP

Widyaiswara LPMP Jawa Tengah di Klaten mengatakan bahwa *“Pengarusutamaan gender telah ada selama sepuluh tahun namun belum menyentuh LPMP. Bagaimana mungkin LPMP menjadi kunci pengarusutamaan gender masa depan? Pengarusutamaan gender harus dimasukkan ke dalam pengembangan media/bahan ajar.”*

Pelatih tingkat kabupaten di Klaten: *“LPMP kini secara formal berada di bawah Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemdikbud. Setiap unit di Kemdikbud menggunakan LPMP untuk pelatihan, sehingga LPMP merupakan lembaga utama bagi pengarusutamaan gender dalam pendidikan.”*

Widyaiswara LPMP dan Dosen Universitas Negeri Gorontalo, *“Kita memiliki 9 tenaga widyaiswara dan kita sudah siap memulai pelatihan pelatih dalam pengarusutamaan gender untuk melanjutkan kegiatan tersebut di masa mendatang, termasuk lokakarya, seminar, evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam manajemen sekolah.”*

Widyaiswara LPMP Gorontalo, *“Sarana dan prasarana pelatihan untuk mendukung program pelatihan pengarusutamaan gender sudah tersedia. Namun, tidak ada dana untuk memasukkan gender pada program pelatihan LPMP.”*

Dalam FGD dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan di Sleman, Widyaiswara LPMP, P4TK, dan Badan Diklat Keagamaan menjelaskan, *“Banyak widyaiswara LPMP, P4TK, dan Badan Diklat yang belum mendapatkan pelatihan formal tentang pengarusutamaan gender, tetapi beberapa mendapatkannya melalui lokakarya dan seminar lain.”*

Dalam FGD dengan lembaga pelatihan di Sleman ditemukan bahwa “bahan pengarusutamaan gender seharusnya dimasukkan ke dalam pusat pelatihan PNFI. Pelatihan pengarusutamaan gender diselenggarakan oleh Kemdikbud tapi tidak diselenggarakan oleh LPMP atau P4TK.”

Pengawas di Klaten menyatakan, “LPMP seharusnya melatih pengawas dalam pengarusutamaan gender sebelum mereka mulai bertugas”.

LPMP di Kupang mengatakan, “Staf kami bersedia menyelenggarakan pengarusutamaan gender, tetapi tidak ada pengarahan dari pimpinan.”

Staf LPMP Kota Kupang menyatakan, “LPMP tidak pernah menjalankan program pelatihan khusus tentang pengarusutamaan gender, termasuk bagaimana caranya mengembangkan kurikulum dan rencana pembelajaran tanggap gender.”

Sumber: ACDP 005 Penelitian Studi Kasus, Januari-Maret 2012

Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) merupakan jaringan pengembangan profesi guru setempat untuk membantu guru dalam proses pengajaran. Disebut juga sebagai gugus (*cluster*), jaringan tersebut mendukung pengembangan kapasitas kepala sekolah dan guru selama 30 tahun terakhir. Gugus tersebut didukung oleh P4TK dan LPMP. KKG melayani guru pendidikan dasar sedangkan MGMP melayani kelompok guru yang mengajarkan mata pelajaran yang sama untuk pendidikan menengah pertama dan atas. KKKS dan MKKS melayani kepala sekolah pendidikan dasar, menengah pertama, dan atas. Beberapa forum tersebut telah dimanfaatkan untuk menyebarkan pengarusutamaan gender dalam pendidikan dan bisa menjadi sumber dukungan untuk menyebarkan proses belajar mengajar yang tanggap gender di masa depan. Namun demikian, diperlukan dana untuk membiayai pertemuan berkala serta narasumber untuk memfasilitasi serta menyebarkan berbagai materi pendukung. Di masa yang akan datang, Pokja Gender tingkat kabupaten/kota dapat bekerjasama dengan LPMP untuk mengembangkan kapasitas kesetaraan gender dalam pendidikan melalui jaringan pengembangan profesi tersebut.

Pembelajaran jarak jauh juga merupakan pilihan bagi pelatihan guru (*in-service*). Universitas Terbuka menyediakan mata kuliah terakreditasi dalam bentuk cetakan (*print based*) maupun melalui internet. Selain itu, saat ini sudah ada 92 perguruan tinggi yang diizinkan menyelenggarakan pendidikan guru (*in-service*) di seluruh Indonesia. Program *Hybrid Learning for Indonesian Teachers* (HYLITE) merupakan program pelatihan guru jarak jauh berbasis Teknologi Informasi. HYLITE diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan bersama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud pada tahun 2007. HYLITE merupakan program pendidikan guru (*in-service*) yang bertujuan untuk meningkatkan kualifikasi guru pendidikan dasar dari D2 menjadi S1, dengan menggunakan metodologi pendidikan terbuka dan jarak jauh (*sistem multi mode*). HYLITE diselenggarakan oleh perguruan tinggi sebagai upaya pendidikan sepanjang hidup bagi guru pendidikan dasar di seluruh Indonesia. Program HYLITE sangat dimungkinkan untuk menjadi titik masuk upaya peningkatan mutu guru yang tanggap gender.

Sebagai bagian kegiatan yang didanai lembaga donor, staf LPMP dan P4TK, pengawas, kepala sekolah dan guru telah dilatih dalam pendekatan menyeluruh (*whole school integrated approaches*), termasuk kepemimpinan sekolah serta berbagai metode belajar aktif (di Indonesia disebut PAKEM).⁵⁵ Metode belajar aktif termasuk pembahasan bersama (*discussion*), simulasi tukar peran (*role play*) dan percobaan (*experiment*). Perluasan sumber bahan ajar mengikutsertakan cara murid mendapatkan informasi dari buku, surat kabar, majalah, internet, dan selain dari lingkungan rumah murid. Sebagai hasilnya, guru-guru peserta kegiatan tersebut sekarang menggunakan berbagai macam media untuk pengajaran terutama bahan yang sederhana dan murah. Hasil evaluasi kegiatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kinerja belajar murid. Namun, beberapa di antara kegiatan sepertinya belum mengikutsertakan perspektif gender dan hal ini merupakan momentum yang kemudian hilang karena tidak digunakan.

55 PAKEM adalah singkatan dari Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif dan Menyenangkan atau secara umum dipahami sebagai pembelajaran aktif.

5.4.2 Pendidikan Calon Guru (*Pre-Service*)

Baik perguruan tinggi pendidikan guru maupun fakultas ilmu pendidikan perguruan tinggi umum menyelenggarakan program pendidikan calon guru (*pre-service*). Banyak perguruan tinggi di Indonesia yang menyelenggarakan program S1 pendidikan bagi calon guru sebelum memulai bekerja sebagai guru. Jangka waktu program pendidikan *pre-service* tersebut rata-rata 4,5 tahun. Perguruan tinggi pendidikan guru menyelenggarakan 4 program pendidikan calon guru yaitu untuk guru pendidikan dasar, menengah pertama, menengah atas, dan kejuruan.

Beberapa perguruan tinggi sudah mulai menyelenggarakan kegiatan pengarusutamaan gender dalam program pendidikan guru. Rektor (perempuan) pada salah satu perguruan tinggi di Kupang sudah mengarusutamaan kesetaraan gender secara aktif dalam perguruan tingginya. Beliau menceritakan perlunya peningkatan kapasitas bagi para dosen dalam bidang metode belajar mengajar yang inovatif, termasuk metode modern (PAKEM) yang dapat dilaksanakan secara tanggap gender sehingga mempengaruhi perilaku murid. Para pemangku kepentingan selama kunjungan lapangan untuk Tinjauan melaporkan bahwa banyak Rektor perguruan tinggi kurang memahami pentingnya kesetaraan gender dalam pendidikan. Oleh karena itu, banyak perguruan tinggi yang kurang berperan dalam hal pengarusutamaan gender walaupun mereka yang seharusnya berada di garis depan.

Pelatihan Kesetaraan Gender bagi Dosen Pendidikan

Di Kota Kupang Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cendana mengatakan, *"Gender seharusnya diikutsertakan ke dalam kurikulum dan bahan ajar setiap mata kuliah untuk setiap program studi S1."*

Di Kota Kupang, Rektor Universitas Dharma Karya mengatakan, *"Fakultas Ilmu Pendidikan sudah mempunyai sumber daya manusia, pedoman, instrumen dan bahan ajar untuk pengarusutamaan gender. Setiap dosen dan beberapa guru pendidikan menengah dan atas yang mengikuti program S2 sudah menerima pelajaran pengarusutamaan gender selama satu semester."*

Di Kota Kupang, Dosen Fakultas Pendidikan Universitas Cendana mengatakan, *"Hanya beberapa dosen yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mengenali kesenjangan gender dalam buku ajar, ulangan/ujian dan evaluasi."*

Kota Kupang, Rektor Universitas Darma Karya *"Hanya beberapa dosen yang dapat melaksanakan kesadaran gender dalam pengembangan proses belajar mengajar yang dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan yang berbeda di antara laki-laki dan perempuan."*

Dosen Bimbingan dan Konseling, Universitas Nusa Cendana, *"Saya mengharapkan bahwa kesetaraan gender dapat disertakan ke dalam pendidikan sertifikasi bagi semua guru."*

Sumber: ACDP 005 Penelitian Studi Kasus Februari, 2012

Pada tahun 2009 Kemenag mengembangkan model perkuliahan tanggap gender untuk mahasiswa calon guru di beberapa UIN. Melalui proyek ELOIS⁵⁶, beberapa UIN yang menjadi peserta proyek mengembangkan modul pelatihan yang menunjukkan pendekatan belajar mengajar yang bersifat inklusif gender dan dapat digunakan oleh guru. Termasuk di antaranya modul tentang kesetaraan gender dalam manajemen, perencanaan pelajaran, belajar mengajar serta pandangan Islam terhadap gender dan inklusi. Modul tersebut diharapkan dapat memberi dorongan besar terhadap kemajuan gender serta inklusi dalam pendidikan calon guru. Beberapa di antara peserta proyek kemudian melaksanakan modul tersebut di universitasnya. Pelatihan untuk pelatih terkait PAKEM telah dikembangkan dan dilaksanakan dimana kegiatannya termasuk sesi peningkatan kesadaran tentang kesetaraan gender. Selain itu, beberapa lokakarya peningkatan kapasitas dosen serta kepala sekolah, ketua komite dan guru madrasah juga telah dilakukan. Namun, sejak berakhirnya kegiatan pada tahun 2009, belum terlihat adanya tindak lanjut dari Kemenag untuk mendukung kesetaraan gender dalam pendidikan.

⁵⁶ Sub komponen Proyek LAPIS yang didanai oleh AusAID.

Tantangan khusus yang dihadapi Kemenag adalah kesetaraan gender seringkali dipandang sebagai “barang impor” dari Barat walau kesetaraan gender sudah menjadi kebijakan nasional. Tantangan utama Kemenag yaitu untuk meningkatkan kapasitas secara internal untuk bekerjasama dengan semua lembaga pendidikan terutama kiai/pesantren dan menyebarluaskan pengertian bahwa bias gender tidak terdapat dalam agama Islam melainkan dari tafsir yang berbias gender serta diwarnai oleh pandangan patriarkis yang telah berlaku selama berabad-abad.

5.5 Kesetaraan Gender dalam Manajemen Berbasis Sekolah

Manajemen sekolah memiliki peran memayungi seluruh kegiatan sekolah untuk menjamin bahwa lingkungan sekolah mendukung pengalaman belajar yang tanggap gender. Pihak manajemen sekolah bertanggung jawab untuk menyediakan bahan ajar yang tanggap gender serta melatih kembali para guru dalam proses belajar mengajar yang tanggap gender. Selain itu, tanggung jawab pengelola sekolah adalah menyusun, melaksanakan serta memantau peraturan/perundangan yang akan mengubah sekolah menjadi lingkungan yang tanggap gender. Manajemen sekolah juga seharusnya menyediakan sumber daya manusia yang mampu menjalankan manajemen dan tata kelola (*governance*) sekolah yang bersifat tanggap gender. Apabila ada orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya, perempuan maupun laki-laki, maka pihak pengelola sekolah sebaiknya mendekati tokoh masyarakat dan memberi masukan kepada anggota masyarakat tentang pentingnya pendidikan.

Para pengawas dan kepala sekolah perlu dilatih agar mengerti pentingnya pengumpulan dan analisis data yang dipilah menurut jenis kelamin guna mendukung Manajemen Berbasis Sekolah yang efektif. Hal ini akan memungkinkan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan strategi serta pemantauan terhadap penghapusan kesenjangan gender dalam keikutsertaan (akses) maupun prestasi belajar murid di tingkat sekolah. Rencana Peningkatan Sekolah (*School Improvement Plans*) serta Evaluasi Diri Sekolah yang baru diperkenalkan tidak mewajibkan pengumpulan dan analisis data yang dipilah menurut jenis kelamin agar kesenjangan gender dalam keikutsertaan dan prestasi belajar di tingkat sekolah dapat ditemukan dan ditanggapi. Misalnya, mengapa kinerja murid perempuan dalam Bahasa Indonesia lebih baik dari kinerja murid laki-laki dan mengapa kinerja murid laki-laki lebih baik dari kinerja murid perempuan dalam IPA? Strategi apa yang dapat dilaksanakan oleh sekolah untuk mengatasi kekurangan kinerja murid laki-laki dan perempuan dalam mata pelajaran yang berbeda? Mengapa lebih banyak murid perempuan atau laki-laki putus sekolah serta apa yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk mencegah hal tersebut?

Semua program pelatihan calon kepala sekolah dan kepala sekolah harus mengikutsertakan kesetaraan gender dalam pendidikan. Para kepala sekolah perlu tahu bagaimana mengembangkan strategi untuk meningkatkan kinerja belajar di setiap mata pelajaran baik untuk murid laki-laki maupun perempuan. Para kepala sekolah harus bekerjasama dengan komite sekolah untuk membantu peningkatan kesadaran orang tua tentang pentingnya kehadiran anaknya di sekolah (pada saat penelitian lapangan, beberapa sekolah melaporkan bahwa ketidakhadiran menjadi masalah besar bagi murid laki-laki). Para kepala sekolah harus mengamati berapa kali guru memberi pekerjaan rumah serta apakah pekerjaan rumah tersebut diperiksa guru dan hasilnya dibicarakan dengan murid. Selain itu, perlu diamati sampai seberapa jauh pekerjaan rumah tersebut dikerjakan oleh murid laki-laki dan perempuan. Beberapa sekolah melaporkan bahwa murid perempuan lebih tekun mengerjakan pekerjaan rumah dibandingkan dengan murid laki-laki. Perbedaan ini menjadi lebih bermakna jika mengingat perbedaan kinerja antara murid laki-laki dan perempuan dalam mata pelajaran tertentu. Para kepala sekolah harus menjamin juga bahwa setiap murid memiliki buku ajar. Penelitian QEM menemukan bahwa hanya dua pertiga dari murid di 150 MTs di seluruh Indonesia mempunyai buku ajar untuk Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Survei tersebut menemukan juga bahwa murid yang memiliki akses dalam mendapatkan materi belajar dan yang mempunyai buku ajar untuk mata pelajaran tersebut cenderung memiliki sikap yang lebih positif tentang berkegiatan di sekolah.

Pengawas dan kepala sekolah perlu dilatih untuk menciptakan lingkungan sekolah yang ramah anak dan tanggap gender dan juga menegakkan ketaatan dalam kode etik yang tujuannya mencegah perilaku anti sosial. Kepala sekolah juga perlu dilatih strategi pencegahan terjadinya pelecehan dan intimidasi gender. Kemitraan dengan LSM terbukti sangat efektif di Kabupaten Sleman (lihat studi kasus di bawah).

Pengawas SMP-SMA di Klaten menyatakan bahwa, *"Kami belum dilatih pengarusutamaan gender dalam pendidikan. Dalam pengelolaan sekolah, termasuk evaluasi dan pengawasan, kesetaraan gender seharusnya wajib disertakan."*

5.5.1 Standar Pelayanan Minimal Sekolah

Standar Pelayanan Minimal (SPM) harus dipenuhi agar hasil peningkatan kapasitas tenaga pendidikan/kependidikan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kesetaraan gender dan mutu proses belajar mengajar. Standar yang termasuk dalam SPM misalnya penyediaan sarana dan prasarana sekolah, guru yang memenuhi kualifikasi serta bahan ajar. Banyak masyarakat kurang mampu di Indonesia yang masih belum memiliki sekolah yang baik dengan prasarana dan sarana yang memenuhi SPM dan syarat akreditasi⁵⁷. Syarat tersebut umpamanya toilet, persediaan air untuk fasilitas sanitasi dan ruang perpustakaan. Pada tahun 2008, hanya sekitar 32% SD/MI dan 63% SMP mempunyai ruang perpustakaan.

Sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah perempuan di Pulau Jawa cenderung mempunyai tingkat pencapaian SPM yang lebih tinggi. (2010 Studi QEM Madrasah⁵⁸). Hubungan positif antara kinerja murid dengan ketersediaan prasarana dan sarana serta tenaga kependidikan yang memenuhi syarat dan sumber daya belajar telah dibuktikan juga oleh survei QEM. Temuan ini memberi masukan kepada sekolah serta pemerintah pusat dan daerah dalam pengalokasian sumber daya. Selain itu, survei tersebut menggarisbawahi pentingnya pemantauan serta penggunaan dana secara khusus untuk mengatasi hal-hal tertentu yang masih berkekurangan. Studi yang melibatkan 150 madrasah (MTs) menemukan bahwa secara keseluruhan dan di semua kawasan, MTs hanya memenuhi 40% - 50% dari syarat fasilitas SPM yang berjumlah 20 syarat. Hanya 0,7% MTs yang memenuhi semua syarat dan sebanyak dua kali lipat yang tidak memenuhi sama sekali. Secara keseluruhan MTs di Pulau Jawa lebih baik dari MTs di kawasan Barat dan Timur Indonesia.

Seorang guru sekolah (SD) di daerah pesisir Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dalam diskusi kelompok untuk studi ini, mengatakan sebagai berikut:

"Tolong, saya mohon pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas memadai bagi kami, baru kemudian bisa dipikir tentang pengarusutamaan gender di sekolah kami."

Sekolah yang terletak di desa nelayan di pesisir Pulau Jawa ini tidak memiliki toilet sama sekali, apalagi ruang perpustakaan. Sekolah pernah membangun bangunan dari beton dan berlantai tanah, namun pembangunan tidak selesai. Keadaan fisik sekolah sangat jelek karena dikelilingi air laut yang sudah tercemar oleh banjir yang sering terjadi di daerah tersebut. Karena kondisi seperti itu, sekolah ini tidak memiliki lingkungan yang mendukung untuk kegiatan belajar mengajar. Sekolah dasar ini melaporkan bahwa 23 peserta didik putus sekolah pada tahun 2011 (16 laki-laki dan 7 perempuan).

Pada tahun 2008-2009, Kabupaten Gorontalo ikut serta dalam kegiatan peningkatan kapasitas manajemen pendidikan kabupaten⁵⁹. Kegiatan berbentuk pelatihan pemetaan sekolah secara partisipatif dengan menggunakan SPM sebagai ukuran. Pada kunjungan lapangan Tinjauan ini, pemangku kepentingan di Gorontalo melaporkan adanya perbaikan di semua sekolah sebagai hasil dari pelatihan tersebut dan sekarang diikuti dengan alokasi anggaran untuk perbaikan prasarana dan sarana, peningkatan proses belajar mengajar, dan pengembangan sekolah menengah pertama⁶⁰.

57 Asesor dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah menentukan status sekolah berdasarkan fasilitas yang tersedia sesuai dengan kriteria khusus. Status Akreditasi (A, B, atau C) yang diberikan kepada sekolah digunakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam merencanakan dan mengalokasikan dana untuk perbaikan sekolah.

58 Kementerian Agama, Penelitian Mutu Pendidikan di Madrasah (*Quality of Education in Madrassah Study*) yang dibiayai AIBEP. Laporan Utama.

59 MGP-BE *District Management Capacity Development Project* didukung UNICEF

60 ACDP005 Penelitian Studi Kasus, Gorontalo, April 2012

5.5.2 Kode Etik Sekolah

Sekolah membutuhkan kode etik yang secara jelas melarang diskriminasi oleh tenaga kependidikan dan murid agar sekolah memiliki lingkungan belajar yang aman dan dapat mendukung proses belajar mengajar dengan baik. Walaupun pelecehan oleh kepala sekolah, guru ataupun sesama murid jarang terjadi, namun jika hal itu terjadi, penanganannya seringkali dilakukan secara kurang tegas. Di dalam FGD dengan tenaga kependidikan di Kupang, didapatkan laporan mengenai kepala sekolah yang dituduh memaksa murid perempuan secara seksual dan sebagai sanksinya kepala sekolah tersebut hanya dipindah secara diam-diam ke sekolah lain di daerah pedesaan. Setiap kali seorang murid dilecehkan secara seksual dengan kata-kata atau tindakan fisik, baik oleh tenaga kependidikan ataupun oleh sesama murid, hal tersebut dapat mengurangi martabat dan rasa amannya, mengganggu pendidikannya serta mempengaruhi kemampuan mereka untuk merealisasikan semua potensi hidupnya.

Kode etik yang ditegakkan serta bertujuan untuk mencegah perilaku ketidakhadiran tanpa ijin / membolos juga sangat diperlukan. (Para guru melaporkan bahwa bolos menjadi masalah untuk murid laki-laki). Pada saat penelitian lapangan Tinjauan ini, seorang guru Matematika di Gorontalo menyatakan “Lebih banyak murid laki-laki daripada perempuan yang tidak mengikuti kelas Matematika karena tidak menyukai mata pelajaran tersebut.” Sangat penting untuk dijelaskan kepada orang tua tentang tanggung jawab mereka untuk menjamin agar anaknya hadir di sekolah. Mendorong kesetaraan gender serta menyadari dampak negatif dari perilaku yang anti sosial seperti *bullying* dan pelecehan seksual menjadi bagian penting dari kurikulum. Di salah satu kecamatan di Kabupaten Sleman dilaporkan bahwa kemitraan dengan LSM setempat sangat efektif dalam pemberdayaan murid untuk mengatasi masalah-masalah tersebut melalui pendekatan rekan setara (*peer to peer*) yang didukung oleh guru sebagaimana diceritakan di bawah ini.

Studi Kasus: Mendukung Kesadaran Gender dan Perilaku Anti Sosial, di Sleman, Jawa Tengah

Salah satu LSM di Kabupaten Sleman, Jawa Tengah (*Pusat Keluarga Berencana Indonesia* or PKBI) yang pembiayaannya didukung oleh lembaga donor, selain menghasilkan dana sendiri dari klinik kesehatan, menyediakan pelatihan bagi relawan yang berasal dari sekolah. Bermitra dengan pemerintah kecamatan untuk melatih 7 SMA pedesaan, LSM tersebut menyelenggarakan pelatihan rekan setara (*peer to peer*) bagi murid laki-laki dan perempuan dalam peningkatan kesadaran gender serta pencegahan *bullying* dan diskriminasi. Adapun fokus lain pelatihan termasuk pendidikan kesehatan reproduksi dan HIV/AIDS di sekolah-sekolah tersebut. Murid dan guru melaporkan dampak positif dari pendekatan ini. LSM tersebut juga menyelenggarakan pelatihan yang sama bagi organisasi kepemudaan.

Sumber: ACDP 005 Penelitian Studi Kasus, FGD Sleman DIY, Februari, 2012

Penelitian di Indonesia dan negara lain telah menemukan bahwa menghukum dengan memukul/ menampar murid (*corporal punishment*) di sekolah berdampak negatif terhadap hasil belajar. Murid cenderung enggan bicara dengan guru apabila ada ancaman kekerasan fisik atau lisan atau takut mendapat sindiran dari guru. Pelecehan dan intimidasi di antara murid dilaporkan menjadi masalah besar pada beberapa sekolah menengah, khususnya di antara murid laki-laki, sebagaimana dimuat oleh media massa baru-baru ini tentang beberapa sekolah di Jakarta. Studi QEM di madrasah (MTs) menemukan bahwa kode etik murid dan guru berkorelasi dengan prestasi belajar di mana korelasi tersebut lebih kuat di pulau Jawa dibandingkan Indonesia bagian Timur dan Barat.

Studi Kasus PKBM, Sleman: Model Praktik yang Baik (Best Practice) Pendidikan Non Formal.

PKBM yang bersangkutan merupakan salah satu dari 5 PKBM yang dipilih untuk program uji coba pengarusutamaan gender Kemdikbud di bawah koordinasi Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sleman menerima *block grant* untuk membiayai pelatihan tenaga PKBM oleh Pokja Gender setempat.

PKBM ini mendorong masyarakat agar mereka menerima semua peserta didik tanpa diskriminasi. Para tutor dilatih untuk mengenali stereotip gender dalam buku ajar serta bagaimana caranya menerapkan pendekatan pembelajaran yang bersifat tanggap gender serta manajemen berbasis kelas. Data peserta didik dipilih menurut jenis kelamin dan dianalisis, termasuk jumlah peserta didik dan hasil ujian per mata pelajaran. Silabus PKBM tersebut menyatakan bahwa perencanaan pembelajaran harus menghormati hak asasi laki-laki maupun perempuan. Tersedia fasilitas toilet yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan.

Semua peserta didik di PKBM ini berasal dari murid yang terpaksa putus sekolah karena kemiskinan dan sebagian kecil akibat kehamilan di luar pernikahan. Setiap tahun, PKBM ini menerima rata-rata 3 murid perempuan yang terpaksa putus sekolah karena hamil di luar pernikahan. Semua peserta didik diperkenalkan dengan kesetaraan gender. Kesadaran akan kekerasan gender dan pelecehan seksual termasuk dalam pelatihan dan kesetaraan gender diintegrasikan di seluruh silabus.

Sumber: ACDP 005 Penelitian Studi Kasus, FGD & Kunjungan PKBM, Kabupaten Sleman, Februari 2012

Kehamilan Di Luar Pernikahan dan Pendidikan Kesehatan Reproduksi. *Platform for Action* (Tujuan Strategis B1⁶¹) dari Konferensi Dunia PBB terkait Perempuan Keempat yang diselenggarakan di Beijing 1995 meminta pemerintahan semua negara untuk “menyediakan lembaga pendidikan yang menghilangkan semua hambatan bagi para remaja hamil dan ibu muda dalam memperoleh pendidikan termasuk, jika diperlukan, penitipan bayi yang terjangkau secara fisik maupun biaya serta pendidikan bagi orang tua/wali yang bertanggung jawab atas anak-anak ataupun adiknya yang masih berusia sekolah agar mereka mendorong anak/saudara mereka kembali sekolah atau melanjutkan sampai menyelesaikan pendidikannya.”

Para kepala sekolah menengah atas melaporkan kehamilan di luar pernikahan di sekolah mereka terjadi sebanyak rata-rata 1-2 kali setahun bagi murid perempuan kelas 12 (meskipun salah satu SMK di Jawa Barat melaporkan enam murid yang hamil di luar pernikahan pada tahun 2011)⁶². Kepala sekolah melaporkan bahwa murid yang berada dalam periode awal kehamilan diizinkan mengikuti ujian nasional atau diatur secara khusus agar mereka bisa mengikuti ujian nasional. Seorang kepala sekolah perempuan melaporkan bahwa tiba-tiba ditemukan murid yang sudah hamil tua. Kepala sekolah tersebut menyarankan agar kehamilannya dirahasiakan agar murid tersebut dapat tetap mengikuti ujiannya. Murid tersebut akhirnya melahirkan segera setelah lulus dan kemudian ia sendiri menjadi guru. Tindakan kepala sekolah yang tidak diskriminatif tersebut memungkinkan murid tersebut berhasil lulus dan kemudian bekerja serta memiliki penghasilan. Hal ini mungkin tidak akan terjadi jika tidak dibantu kepala sekolah yang bersangkutan⁶³.

Saat ini tidak ada kebijakan atau pedoman bagi kepala sekolah yang mengatur tentang perlakuan terhadap murid yang hamil di luar pernikahan di sekolahnya. Para kepala sekolah yang diwawancarai menyatakan bahwa adanya kebijakan yang jelas serta pedoman pelaksanaan akan memudahkan mereka dalam menghadapi masalah yang peka ini secara tanggap gender. Dilaporkan bahwa kebanyakan kepala sekolah tidak mendorong murid perempuan untuk terus bersekolah dan menyelesaikan ujian, terutama jika tidak ada dukungan orang tua. Sebaliknya murid perempuan yang hamil seolah ‘dipaksa’ untuk putus sekolah formal, mendapatkan cap buruk (*stigma*) dan sendirian menghadapi kehamilannya— sementara pasangan laki-laki yang menghamili dapat menyelesaikan pendidikannya tanpa diskriminasi atau mendapatkan cap yang buruk. Walaupun beberapa murid hamil bisa masuk pendidikan non formal (PKBM), masih banyak lagi murid perempuan yang kemudian putus sekolah. Beberapa tanggapan berikut muncul pada saat diskusi kelompok di tingkat kabupaten:

61 <http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/educa.htm#object1>

62 ACDP 005 FGD penelitian lapangan, di Sleman, Klaten, Kupang dan Indramayu, Januari-Maret, 2012

63 ACDP 005 FGD penelitian lapangan, di Sleman, Klaten, Kupang dan Indramayu, Januari-Maret, 2012.

Penelitian Studi Kasus: Pandangan tentang Murid Hamil di Luar Pernikahan

Kepala SMA Kabupaten Sleman mengatakan *“Untuk SMP dan SMA tidak ada kebijakan yang dapat mencegah murid perempuan hamil dari putus sekolah. Keputusan tentang hal tersebut sepenuhnya terserah pada sikap kepala sekolah”* (FGD, kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan, Januari, 2012).

Staf Dinas Pendidikan Kota Kupang menyatakan, *“Tidak ada kebijakan pemerintah dalam kasus atau peristiwa tersebut. Dari segi disiplin sekolah, memang murid hamil seharusnya dikeluarkan.”*

Sumber: ACDP 005 Penelitian Studi Kasus, Januari-Februari, 2012

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 menyertakan sasaran untuk sektor kesehatan yaitu pembinaan dan peningkatan keterlibatan untuk berpartisipasi dalam Keluarga Berencana melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan perilaku remaja dalam bidang kesehatan reproduktif, HIV/AIDS, narkoba, pendidikan keterampilan hidup serta pendidikan kehidupan keluarga bagi remaja. Peningkatan kerjasama antara Kemdikbud, Kemenag serta Kementerian Kesehatan diperlukan untuk meninjau kembali kurikulum untuk menjamin sinergi informasi pendidikan. Diperlukan juga pelatihan guru dalam metode pengajaran menyeluruh bagi hal-hal yang peka ini. Selain itu, diperlukan pelatihan kepala sekolah tentang bagaimana caranya meningkatkan kesadaran komunitas sekolah tentang pentingnya kurikulum kesehatan reproduktif bagi murid, terutama apabila materi tersebut kurang disetujui masyarakat.

5.6 Kesetaraan Gender di Pendidikan Tinggi

Sebagai akibat dari pola pikir dan stereotip gender tentang perbedaan bakat perempuan dan laki-laki dalam bidang Matematika dan IPA yang terjadi dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah, maka jumlah perempuan yang belajar IPTEK dan bidang terkait di tingkat perguruan tinggi lebih sedikit dari jumlah laki-laki. Stereotip gender mendorong perempuan untuk mengembangkan karir dalam bidang pengembangan anak, pendidikan dan kesehatan masyarakat, sedangkan laki-laki cenderung lebih banyak dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan hukum. Hal ini digambarkan dalam rasio jenis kelamin mahasiswa pada berbagai fakultas di Universitas Nusa Cendana di Kupang (lihat Tabel 4). Meskipun hal ini tidak semata buruk, namun mahasiswa perempuan sering didorong masuk ke beberapa bidang tertentu saja. Sikap tersebut telah mengalami sedikit penolakan dengan adanya peningkatan sektor manufaktur serta munculnya era revolusi teknologi digital. Belakangan ini semakin banyak remaja perempuan Asia, terutama di Cina, India, dan Korea Selatan, yang memandang pendidikan IPTEK dan kejuruan sebagai bidang yang menjanjikan dan meningkatkan peluang karir mereka.

Sikap dosen bisa membenarkan pandangan tradisional tentang bidang yang cocok bagi perempuan atau laki-laki. Beberapa negara tertentu telah membuat terobosan dengan perguruan tinggi setempat serta mahasiswa relawan untuk mendukung murid perempuan melanjutkan pendidikan dalam bidang IPA dan Matematika di perguruan tinggi. Selain itu, program tersebut mendorong sekolah agar mendukung murid perempuan untuk memilih IPA dan Matematika. Salah satu hal yang penting yaitu agar guru bimbingan dan konseling dilatih kesadaran gender untuk menjamin perlakuan mereka terhadap murid laki-laki dan perempuan setara pada saat memberikan bimbingan karir.

Tabel 4. Mahasiswa Menurut Fakultas di Universitas Nusa Cendana, Kupang

Fakultas	2010/2011		
	Terdaftar		
	Total	Laki-laki	Perempuan
FKIP/Keguruan dan Ilmu Pendidikan	7.810	3.314	4.496
Hukum	1.556	1.074	482
FISIP/ Ilmu Sosial & Politik	1.974	1.163	811
Pertanian	1.062	577	485
Peternakan	561	350	211
IPTEK	1.935	1.118	817
Kesehatan Masyarakat	839	301	538
Fisika	150	94	56
Kedokteran Hewan	458	304	154

Sumber: Universitas Nusa Cendana, Kupang

Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Yogyakarta menitikberatkan pada peningkatan kemampuan dosen dalam melaksanakan pembelajaran yang tanggap gender⁶⁴. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa sebagian besar dosen mengalami kesulitan dalam menyertakan kesetaraan gender ke dalam bahan ajar mereka. Para dosen kurang berpengalaman dalam mempersiapkan silabus/modul sendiri. Akibatnya, mereka tidak menetapkan tujuan pembelajaran yang mencakup sudut pandang gender dan mereka juga tidak mengembangkan strategi yang efektif untuk mengajar dan mengevaluasi proses belajar dengan cara yang tanggap gender. Beberapa PSW di daerah Malang telah berinisiatif memantau seberapa jauh topik perspektif gender disertakan dalam mata kuliah S1 (Sarjana), S2 (Magister), dan S3 (Doktor) di semua fakultas di perguruan tinggi. Selama penelitian lapangan Tinjauan ini, dilaporkan bahwa kebanyakan rektor perguruan tinggi belum mengerti pentingnya kesetaraan gender dalam pendidikan dan, oleh karena itu, tidak selalu mendukung pengarusutamaan gender.

5.6.1 Peran Pusat Studi Wanita/Gender Perguruan Tinggi

Selama ini, Pusat Studi Wanita (PSW) di seluruh Indonesia diharapkan akan berperan secara aktif untuk menyediakan layanan dan keahlian kesetaraan gender. Pada kenyataannya, PSW tidak disediakan dana yang cukup untuk dapat melakukan penelitian tentang kesetaraan gender dalam pendidikan formal dan memiliki kesempatan kecil dalam peningkatan kapasitas. Selama dasawarsa terakhir, PSW pada umumnya mengandalkan dukungan anggaran dari KPPPA, kegiatan yang dibiayai lembaga donor, atau kontrak dengan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan program. Salah satu perguruan tinggi di Kupang tidak menyediakan anggaran sama sekali untuk PSWnya di tahun 2012. Untuk mengatasi masalah dana tersebut, pada tahun 2010 Direktorat Pendidikan Tinggi Kemdikbud telah menganggarkan Dana Revitalisasi untuk peningkatan kapasitas PSW. Selama ini, sekitar 23 PSW Perguruan Tinggi telah menerima dana untuk peningkatan kapasitas pengarusutamaan gender serta penelitian dan pengembangan. Sebagai contoh, dosen laki-laki maupun perempuan di Padang, Sumatera Barat telah dilatih dalam pengarusutamaan gender yang dibiayai oleh Dana Revitalisasi tersebut.

Forum PSW di Malang memanfaatkan Dana Revitalisasi ini. Meskipun dananya terbatas, koordinasi antar PSW/PSG di daerah Malang tetap berjalan dengan baik. Forum tersebut sedang mempersiapkan perluasan jaringan PSW/PSG ke seluruh Jawa Timur. Keberhasilan ini terjadi antara lain karena adanya upaya memelihara hubungan kelembagaan antar sektor serta komitmen untuk bekerjasama meningkatkan kapasitas penyebarluasan pengetahuan tentang pentingnya kesetaraan gender.⁶⁵

64. Tim PSW UIN Sunan Kalijaga, *Kesenjangan Gender pada Kualitas Akademik dan Kemampuan Manajerial Staf Pengajar IAIN Sunan Kalijaga*. (Jakarta: PSW UIN Yogyakarta, unpublished, 2000).

65. AusAID/Universitas Indonesia. 2011. *Study of Knowledge Needs & Supply Constraints for Gender Research in Indonesia's Knowledge Sector. Final Report*. Jakarta.

Studi Kasus: Pandangan Tentang Peran Pusat Studi Wanita/Gender

Klaten, Staf PSW: "Pusat Studi Wanita perlu bekerjasama dengan LPMP dalam menyebarkan pengarusutamaan gender dalam kebijakan dan program pelatihan."

Sleman, Dosen UNY: "Pusat Studi Wanita di perguruan tinggi juga harus mengembangkan kapasitas dalam perguruan tinggi mereka sendiri."

Kupang, Dosen FKIP Universitas Nusa Cendana: "Tidak ada izin dari universitas apakah dosen boleh ikut kegiatan pengarusutamaan gender. Tidak ada keputusan/kebijakan pimpinan untuk menyelenggarakan anggaran tanggap gender. Diperlukan sumber daya untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender, tetapi anggaran tidak tersedia."

Sumber: ACDP 005 Penelitian Studi Kasus, Januari –Maret 2012.

5.7 Kesetaraan dalam Hasil Pendidikan

Kesetaraan dalam hasil pendidikan tercapai apabila semua murid perempuan dan laki-laki mendapat kesempatan yang sama untuk meraih prestasi akademik dan ketika hasil pendidikan ditentukan berdasarkan upaya serta bakat mereka. Meskipun kemajuan pendidikan di Indonesia sangat mengesankan, namun masih ada tantangan dalam mencapai kesetaraan dalam hasil pendidikan formal. Tantangan-tantangan tersebut termasuk adanya buku ajar yang memperkuat stereotip gender, kebiasaan mengajar dan mengelola kelas/sekolah yang menugaskan murid perempuan mengerjakan tugas yang dianggap berstatus rendah, pembatasan keikutsertaan anak perempuan dalam olah raga dan kegiatan ekstra kurikuler, perjalanan pulang pergi sekolah yang kurang aman bagi murid perempuan di beberapa daerah tertentu, dan pelecehan seksual. Stereotip gender masih mempengaruhi pilihan program pada pendidikan menengah atas dan tinggi yang kemudian berdampak pada jumlah pendapatan yang diterima dan mempersulit keikutsertaan perempuan yang berarti dalam ranah publik.

Sering kali murid perempuan dan laki-laki memilih bidang studi yang berbeda pada tingkat pendidikan menengah dan tinggi. Pembidangan yang berbeda, yang disebut juga pembidangan gender (*gender streaming*) sudah umum terjadi di dunia. Perbedaan bidang studi yang dipilih laki-laki dan perempuan pada gilirannya mengakibatkan perbedaan bidang pekerjaan di masa depan yang akan mempengaruhi tingkat pendapatan yang mereka terima. Di Indonesia, data menunjukkan bahwa laki-laki banyak bekerja dalam bidang IPTEK dan teknik sedangkan perempuan memilih bidang pendidikan, kesehatan dan administrasi (lihat Tabel 4). Faktor yang mengakibatkan pembidangan gender termasuk antara lain stereotip gender di tingkat keluarga, pasar tenaga kerja dan kelembagaan. Perbedaan norma dan harapan bagi laki-laki dan perempuan, termasuk norma yang ditanamkan dari usia dini melalui kurikulum sekolah dan gambaran tentang peran gender dalam buku ajar, cenderung mempengaruhi keinginan masing-masing gender dan pada akhirnya mempengaruhi pilihan bidang pendidikan.⁶⁶

CEDAW Bab 1, Pasal 10, menyatakan bahwa negara yang menandatangani Persetujuan ini akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin "keadaan yang sama untuk bimbingan karir dan pilihan pekerjaan, untuk kesempatan belajar dan mencapai gelar dari lembaga pendidikan di semua bidang di pedesaan maupun di perkotaan; kesamaan ini harus dijamin dalam pendidikan pra-sekolah, pendidikan umum, pendidikan teknis, profesional dan pendidikan tinggi, serta dalam semua jenis pelatihan kejuruan." CEDAW mendorong diberikannya kesempatan yang luas kepada perempuan untuk memiliki akses dalam program teknis dan pendidikan lain di mana jumlah perempuan lebih sedikit dari pada laki-laki. CEDAW juga berusaha untuk menghapus hambatan yang selama ini menghalangi keikutsertaan perempuan dalam berbagai karir dan program pendidikan kejuruan.⁶⁷

Di Indonesia, kesempatan perempuan tetap lebih sedikit dibanding dengan kesempatan untuk laki-laki karena faktor tradisi dan budaya. Pandangan umum yang terjadi adalah laki-laki dianggap sebagai kepala keluarga sedangkan perempuan sebagai manajer rumah tangga. Saat ini, dari pada mengubah, pendidikan cenderung memperkuat stereotip gender tradisional yang ada.

66. World Bank. April 2012. *Indonesia Economic Quarterly: Redirecting Spending*. Jakarta.

67. CEDAW and *Education Factsheet*. www.cedaw2011.org
<http://www.unwomen-eseasia.org/projects/Cedaw/cedawconventionfull.html>

5.8 Kesetaraan dalam Hasil di Luar Pendidikan (Eksternal)

Kesetaraan dalam hasil di luar pendidikan (eksternal) tercapai apabila ada kesamaan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk menggunakan sumber daya (*resources*), berkontribusi dalam kegiatan ekonomi, sosial budaya dan politik serta menikmati hasil dari kegiatan tersebut. Hal ini berarti kesempatan karir serta pendapatan laki-laki dan perempuan yang memiliki kualifikasi dan pengalaman yang sama juga harus setara. Walaupun dimensi kesetaraan ini berada di luar sistem pendidikan, namun pencapaian kesetaraan pendidikan menjadi pendorong serta memberi sumbangan terhadap pencapaian kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam bidang kehidupan lainnya termasuk pasar tenaga kerja dan rumah tangga.

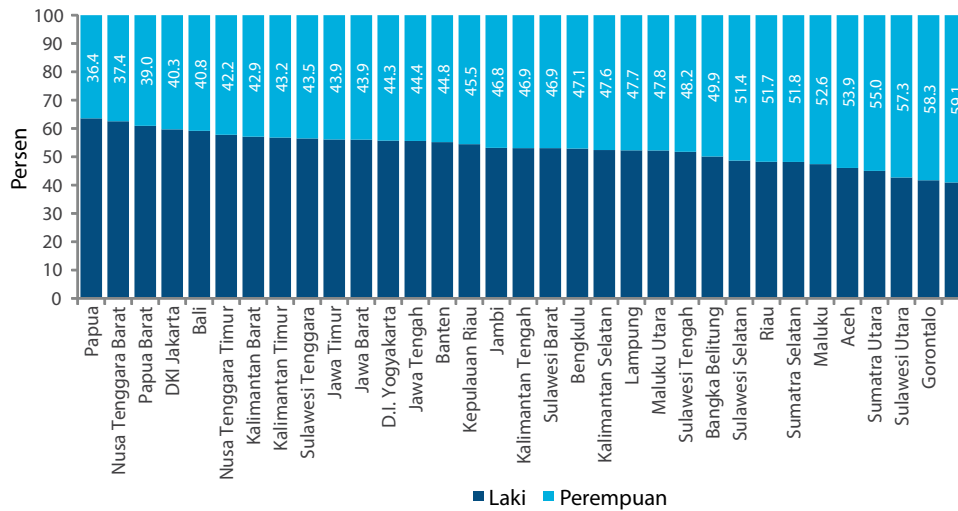
Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia masih belum mampu mengatasi ketidaksetaraan gender. Perbaikan kesempatan memperoleh pendidikan belum membawa peluang ekonomi yang lebih besar untuk perempuan di Indonesia. Perempuan cenderung bekerja dalam sektor informal dibandingkan dengan laki-laki dan cenderung melakukan pekerjaan yang pendapatannya lebih rendah. Meskipun kesenjangan dalam pendidikan telah berkurang, perempuan masih cenderung menjadi tenaga kerja setengah pengangguran dan dibayar lebih sedikit dari laki-laki untuk pekerjaan yang setara. Perempuan kurang memiliki kesempatan untuk memperoleh modal, tanah, jasa penyuluhan pertanian dan kesempatan untuk mengambil keputusan baik dalam ranah publik maupun pribadi.

Upaya-upaya mendorong kesetaraan gender dalam peluang ekonomi dan sumber daya produktif (tanah dan modal) dapat meningkatkan produktivitas ekonomi yang bermanfaat baik bagi laki-laki maupun perempuan. Bank Dunia memperkirakan bahwa "jika masyarakat Indonesia membagi sumber daya (*resources*) berdasarkan keterampilan dan kemampuan, bukan berdasarkan jenis kelamin, maka produktivitas per tenaga kerja dapat meningkat sebanyak 14%. Hal ini berdampak penting bagi pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan. Untuk semua negara di kawasan ini (Asia), peningkatan tersebut bisa mencapai 7 sampai 18 persen⁶⁸". Namun, perempuan memiliki kesempatan perolehan modal/kredit yang lebih kecil dari pada laki-laki; situasi ini dipersulit dengan sedikitnya kesempatan mereka untuk memiliki tanah yang merupakan salah satu bentuk agunan pinjaman. Di Indonesia, walaupun masih ada perbedaan gender dalam kesempatan memperoleh modal, namun data menunjukkan bahwa mendapatkan kredit usaha merupakan tantangan umum bagi pengusaha laki-laki maupun perempuan.

Norma-norma budaya merupakan hambatan utama bagi perempuan untuk maju dalam karier. Pandangan umum bahwa perempuan hanya cocok untuk urusan keluarga sering digunakan untuk membenarkan tindakan yang membatasi kesempatan kerja dan kemajuan perempuan dalam karirnya. Selama Tinjauan ini, para pihak terkait melaporkan bahwa di banyak tempat masih terdapat hambatan struktural dan budaya dalam pengisian lowongan/formasi dan kenaikan pangkat perempuan dalam pemerintah daerah yang sudah terdesentralisasi. Penguasaan laki-laki atas jabatan kepemimpinan, kenaikan pangkat, pengambilan keputusan dan pengisian lowongan/formasi terus memberikan kontribusi kepada berkurangnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam ranah publik. Rendahnya kesadaran gender di antara karyawan secara umum berdampak terhadap diskriminasi dan stereotip yang berkelanjutan yang pada gilirannya mengakibatkan rendahnya kesempatan bagi perempuan untuk berperan sebagai pemimpin dan mengambil keputusan.

68. World Bank. April 2012. *Indonesia Economic Quarterly: Redirecting Spending*. Jakarta.

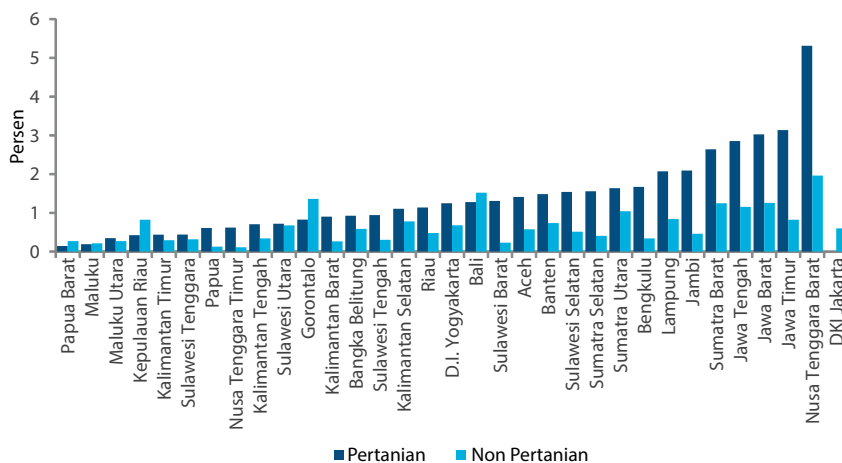
Gambar 28. Proporsi Pegawai Negeri Sipil Menurut Gender dan Provinsi, 2010



Sumber: BKN

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia jauh tertinggal dibandingkan negara lain karena sebagian besar perempuan bekerja di sektor informal dan sebagai pekerja migran tidak terampil. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Indonesia meningkat dari sekitar 45 persen pada tahun 1980 menjadi sekitar 55 persen pada 2008, namun masih tetap di bawah rata-rata kawasan Asia, yaitu sebesar 70 persen. Partisipasi angkatan kerja perempuan di sektor pertanian dan industri hampir sama antara tahun 1980 dan 2007. Sebagian besar peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan berasal dari partisipasi perempuan di sektor jasa. Pemisahan pekerjaan berdasarkan gender masih menjadi bagian dari perekenomian Indonesia. Sebagai contoh, data survei 2009 menunjukkan bahwa lebih dari setengah dari tenaga kerja perempuan di Indonesia bekerja di sektor perdagangan dibandingkan dengan seperempat dari tenaga kerja laki-laki di sektor yang sama. Pekerja perempuan juga cenderung bekerja di sektor pendidikan, kesehatan dan sosial.⁶⁹

Gambar 29. Tenaga Kerja Perempuan di Pertanian/Non Pertanian

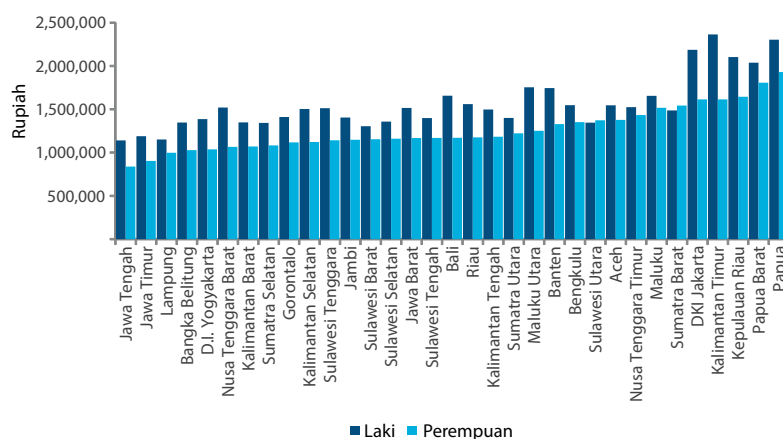


Sumber: Sakernas 2010, BPS

69 Ibid

Perempuan masih berpenghasilan lebih rendah dibanding laki-laki di semua sektor di Indonesia dan di semua negara di kawasan Asia. Pendapatan di sektor pemerintah lebih kurang sama, tetapi kesenjangan gender dalam hal upah di sektor jasa, industri dan pertanian di Indonesia termasuk yang terbesar di kawasan ini. Perempuan yang berpendidikan paling rendah mengalami kesenjangan upah paling besar. Survei perusahaan juga menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak bekerja sebagai pekerja kontrak sementara/tenaga tidak tetap dibandingkan laki-laki di perusahaan yang sama. Selain itu perusahaan yang menyediakan asuransi kesehatan bagi pekerja laki-laki juga menyediakan asuransi untuk seluruh keluarganya, sedangkan untuk pekerja perempuan hanya mencakup dirinya sendiri⁷⁰.

Gambar 30. Upah per Bulan Menurut Gender dan Provinsi (Sektor Non Pertanian 2010)



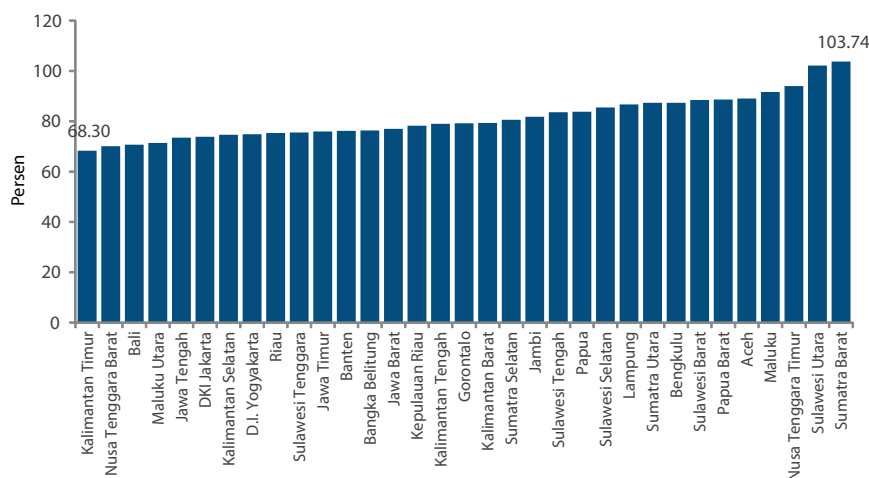
Sumber: Sakernas 2010, BPS

Keterlibatan perempuan dalam bidang politik meningkat dalam pemilu terakhir. Pada Pemilu 2009 sebanyak 101 perempuan terpilih dan merepresentasikan 18% dari semua anggota DPR/DPRD. Angka tersebut mencerminkan peningkatan sebesar 6% jika dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya. Namun di daerah tertentu tingkat keterlibatan perempuan jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan daerah lainnya (5.8% di Aceh, 7.2% di Nusa Tenggara Timur). Jumlah perempuan yang menempati jabatan senior dalam pemerintahan masih rendah, yaitu hanya 9% untuk Eselon 1. Di luar sektor pertanian, hanya 46.32% perempuan yang menjadi bagian dari angkatan kerja dan pada umumnya bekerja dalam sektor jasa dibandingkan dengan 83.6% laki-laki yang menjadi bagian dari pasar tenaga kerja. Walaupun perempuan mengalami kesenjangan pendapatan dibandingkan dengan laki-laki baik di sektor formal maupun informal (termasuk guru honorarium) serta kekurangan masukan dan dukungan untuk pelatihan dan pengembangan keterampilan, perempuan tetap memberikan sumbangan penting untuk peningkatan sektor pertanian dan pembangunan pedesaan. Mengurangi kesenjangan antara angkatan kerja laki-laki dan perempuan tetap merupakan tantangan berat yang harus dihadapi.⁷¹

70 Ibid

71 UNDP. 2009. Assessing Gender Responsive Local Capacity Development in Indonesia. Jakarta.

Gambar 31. Indeks Paritas Gender Upah per Bulan Menurut Provinsi (non pertanian), 2010



Sumber: Sakernas 2010, BPS

5.9 Kesimpulan

Walaupun Tinjauan ini menyoroti banyak tantangan dalam upaya pencapaian kesetaraan gender dalam pendidikan, tapi Tinjauan juga menyertakan banyaknya keberhasilan dan praktik yang baik (*good practice*) yang dapat dijadikan landasan bagi perkembangan selanjutnya. Tanggapan positif muncul dari peserta yang berjumlah 270 orang dalam 16 diskusi kelompok terfokus yang diselenggarakan oleh tim Tinjauan di lima Provinsi. Hasil dari diskusi kelompok adalah apabila ada pengarahannya mengenai pengarusutamaan gender dalam pendidikan dari Kemdikbud dan Kemenag dan pengarahannya tersebut dilengkapi dengan alokasi dana pendukung, maka instansi sudah siap untuk melaksanakannya. Sekolah-sekolah terpilih di beberapa provinsi, kabupaten dan kota sudah mulai memasuki proses tersebut dengan beberapa program uji coba. Kabupaten/kota lain juga melaporkan pengalaman positif dalam hal pengarusutamaan gender dalam sektor pendidikan untuk semua jenjang. Program perintis tersebut harus terus diperkuat dan dievaluasi sebagai contoh nyata yang baik (*best practice*). Pengetahuan tentang proses belajar mengajar serta alat-alat pendukung yang telah dikembangkan harus disebarluaskan.

Prioritas utama termasuk perluasan program dengan mengikutsertakan lebih banyak lagi sekolah melalui peningkatan kapasitas pengawas, kepala sekolah, guru, petugas perpustakaan dan guru bimbingan dan konseling. Hal tersebut dapat dicapai dengan menetapkan kesetaraan gender dalam pendidikan secara nasional melalui Kemdikbud dan Kemenag dalam bentuk strategi kesetaraan gender dalam pendidikan. Dibutuhkan pula upaya untuk terus meningkatkan kapasitas Pokja Gender tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam kemitraan dengan para ahli dari Pusat Kajian Wanita UN/UIN dan LSM. Peningkatan kapasitas diperlukan juga untuk perguruan tinggi dengan program pendidikan guru agar kesetaraan gender diarusutamakan dalam seluruh lembaga dan semua mata kuliah. Kelembagaan pemerintah untuk mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan sudah tersedia. Dengan peningkatan komitmen dan kapasitas maka dalam satu dasawarsa mendatang akan dihasilkan kemajuan yang jauh lebih banyak untuk kesetaraan bagi semua di dalam dan melalui pendidikan.

5.10 Rekomendasi

1. Strategi kesetaraan gender dikembangkan oleh Kemdikbud dan Kemenag (dengan masukan dari masing-masing Direktorat Jenderal) agar Kemdikbud dan Kemenag dapat:
 - Merumuskan Anggaran Tanggap Gender dan Laporan Anggaran Gender .
 - Mendukung setiap Direktorat Jenderal dalam mengembangkan dan mengintegrasikan rencana aksi dan anggarannya untuk mencapai sasaran strategis dalam kesetaraan gender.
 - Mendukung pemerintah daerah dalam melakukan hal yang sama
 - Menjamin rencana strategis tersebut tidak hanya menyangkut kesetaraan kesempatan (akses) melainkan termasuk juga kesetaraan dalam proses belajar mengajar, dan hasil dan prestasi belajar.
2. Menjamin bahwa semua kegiatan pengkajian ulang kurikulum untuk peningkatan mutu direncanakan sedemikian rupa sehingga tidak menyertakan bias dan stereotip gender. Buku ajar baru perlu diperiksa/disinggung sebelum diterbitkan untuk menjamin bahwa buku tersebut bebas dari bias dan stereotip gender. Penulis buku ajar perlu dilatih dan mendapatkan sertifikasi yang menjamin bahwa mereka tidak menggunakan gambar dan ilustrasi yang memperkuat stereotip gender.
3. Melakukan program pendidikan guru (*pre-service*) komprehensif yang mencakup kesetaraan gender di semua perguruan tinggi dan lembaga pendidikan guru maupun tenaga kependidikan. Program tersebut dimaksud untuk secara bertahap meningkatkan keterampilan guru maupun calon guru searah dengan pendekatan tanggap gender dalam manajemen berbasis sekolah, pengembangan kurikulum, dan proses belajar mengajar yang menggunakan metode modern.
4. Melaksanakan program pelatihan (*in-service*) komprehensif untuk pengawas dan kepala sekolah serta menggunakan pendekatan tanggap gender dalam manajemen berbasis sekolah, pengembangan kurikulum dan proses belajar mengajar yang menggunakan metode modern melalui:
 - Modul pelatihan untuk para pengelola/widyaswara/*tutor* LPTK, P4TK, LPPKS, LPMP dan Badan Diklat agar kesetaraan gender dapat dimasukkan ke dalam semua aspek pelatihan. Mengkaji ulang semua kursus yang sudah ada. Melatih widyaswara (*Master Trainer*) dalam penerapan pendekatan tanggap gender dalam semua aspek dan jenjang pendidikan.
 - Bekerja sama dengan Pokja Daerah, LPMPs, LPTKs dan Balai Diklat Kemenag untuk mengembangkan kemampuan dalam pelaksanaan kesetaraan gender di semua jenjang pendidikan.
 - Di tingkat kabupaten/kota, melatih widyaswara (*Master Trainer*) serta pelatih mata pelajaran dari sekolah inti (SD/MI), Sekolah Unggul atau Sekolah Model (SMP/MTs/SMA/MA) untuk menggunakan pendekatan tanggap gender dalam semua komponen pendidikan. Menyebarluaskan bahan pelatihan kepada sekolah satelit.
 - Meningkatkan kapasitas KKG dan MGMP (jaringan pengembangan profesi guru) serta KKKS, MKKKS (jaringan pengembangan profesi kepala sekolah). Menyediakan dana untuk membiayai pertemuan berkala, termasuk fasilitator, alat-alat bantu praktik serta penyebarluasan bahan.
 - Universitas Terbuka dan lembaga pendidikan lain yang menyediakan program pendidikan jarak jauh berbasis ICT dalam mengkaji ulang kursus/pelatihan guru untuk menjamin bahwa kurikulumnya searah dengan pendekatan tanggap gender yang lebih baik. Pendekatan tersebut termasuk manajemen berbasis sekolah, pengembangan kurikulum, dan proses belajar mengajar yang menggunakan metode modern.
 - Mengembangkan pedoman praktis (*handbook*) kesetaraan gender dalam pendidikan dengan menggunakan bahan pelatihan yang sudah ada⁷². Pedoman tersebut berisikan alat bantu bagi kepala sekolah, pengawas, guru, petugas perpustakaan serta guru bimbingan dan konseling yang dapat mereka gunakan dalam pengembangan strategi sekolah secara utuh (*whole school strategy*) demi kesetaraan gender.
5. Meningkatkan alokasi anggaran untuk peralatan dan bahan habis pakai perpustakaan (termasuk bahan bacaan yang menarik/*high interest reading material*) serta laboratorium (Ilmu Pengetahuan Alam dan komputer) di sekolah agar mencapai kesetaraan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan dalam proses belajar mengajar di semua bidang ajar.

72. Modul dan materi pelatihan untuk kesetaraan gender dalam pendidikan telah dikembangkan oleh berbagai pihak termasuk AIBEP, LAPIS (ELOIS,) IAPBE, dan BEC-TF. Pusat Studi Wanita/Gender dan Pokja Gender juga telah mengembangkan modul pelatihan.

6. Mewajibkan rektor di semua perguruan tinggi mengarusutamakan kesetaraan gender di seluruh kegiatan, termasuk pelatihan bagi semua dosen dan tenaga kependidikan. Mengkaji ulang dan memperbaharui semua mata kuliah yang bermuatan bias dan stereotip gender. Semua perguruan tinggi harus menghasilkan data yang dipilah menurut jenis kelamin tentang mahasiswa maupun dosen di semua bidang (jumlah mahasiswa, jumlah lulusan).
7. Penelitian dan pengembangan dalam kesetaraan kesempatan mendatang termasuk:
 - Apakah persepsi guru dan murid perempuan tentang kelemahan perempuan dalam bidang Ilmu Pengetahuan Alam menghalangi pencapaian prestasi belajar di sekolah menengah atas? Dan juga hal yang sama terkait persepsi untuk murid laki-laki dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Upaya ini juga termasuk analisis data PISA 2009 untuk mengetahui apakah ada perbedaan sikap dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam antara laki-laki dan perempuan dari golongan sosio-ekonomi yang berbeda. Melakukan survei-survei tambahan sebagai bahan masukan bagi pembaharuan kurikulum mendatang.
 - Penelitian tentang perbedaan laki-laki dan perempuan dari golongan sosio-ekonomi yang berbeda dalam hal kebiasaan membaca, hal-hal yang dianggap menarik untuk dibaca, serta sikap tentang membaca. Penelitian tersebut sebagai masukan dalam pembaharuan kurikulum bagian membaca dan menulis (*literacy*). Menganalisis data survei PISA 2006 tentang perbedaan sikap terhadap membaca antara laki-laki dan perempuan. Data nasional dari TIMMS dan PIRI mencakup hal yang serupa yang dapat dianalisis berdasarkan gender. Menganalisis data lain dari segi gender, termasuk survei-survei lain.⁷³
 - Kemdikbud dan Kemenag menyediakan dana untuk membiayai penelitian partisipatif serta studi lacak (*tracer study*) tentang semua indikator partisipasi dan pencapaian hasil. Hasil penelitian tersebut digunakan sebagai masukan dalam penetapan strategi bagi murid laki-laki dan perempuan dalam hal kesempatan, prestasi belajar, serta pengembangan karir.
8. Menyediakan insentif untuk murid laki-laki maupun perempuan yang menunjukkan kemajuan di sekolah (tidak hanya bagi murid yang menduduki peringkat tinggi di kelas).
9. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan pemetaan sekolah secara partisipatif untuk mengetahui sekolah mana yang telah mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Gorontalo sudah berhasil menerapkan model ini untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya. Setiap pemerintah kabupaten/kota perlu melaksanakan upaya aktif dalam menghapuskan kesenjangan mutu pendidikan di antara sekolah miskin dan kaya.
10. Mendorong pemerintah daerah agar bekerjasama dengan sekolah dan LSM serta melatih pengawas dan kepala sekolah untuk mengembangkan strategi untuk:
 - Mengurangi perilaku anti sosial (termasuk penyadaran tentang dampak yang timbul dari *bullying* dan pelecehan seksual) serta bekerjasama dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak, dan
 - mendorong kesadaran gender serta menyebarkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi di tingkat pendidikan menengah atas (lihat pada butir Kode Etik) bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan.
11. Untuk kesetaraan hasil dalam hal di luar pendidikan (eksternal), mengkaji ulang (tinjauan) kebijakan pasar tenaga kerja dari segi gender terutama proses dan strategi pengembangan karyawan dari sisi upah/gaji, status/jabatan, tunjangan, kenaikan pangkat dan umur pensiun.

73. Yang dimaksud survei lain termasuk survei QEM yang dibiayai oleh AusAID dan survei DBE3 yang dibiayai oleh USAID.



Bab 6

Ringkasan Saran/Rekomendasi

Ringkasan rekomendasi diambil dari berbagai rekomendasi yang telah disertakan dalam bab-bab di atas.

6.1 Lingkungan Kondusif

Saran/Rekomendasi	Penanggung Jawab	Pendukung
1. Rancangan Undang-Undang Kesetaraan Gender segera diselesaikan dan diundangkan	DPR	KPPPA, Kemhukham, Kementerian lainnya, MUI, LSM
2. Dibutuhkan Peraturan Menteri Kemdikbud dan Kemenag yang mewajibkan semua Direktorat Jenderal untuk mengarusutamakan kesetaraan gender dalam pendidikan di semua jenjang pendidikan.	Sekretaris Jenderal Kemdikbud dan Kemenag	Semua Direktorat Jenderal
3. Dibutuhkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mewajibkan semua pemerintah daerah dan DPRD untuk mengarusutamakan kesetaraan gender dalam pendidikan di semua jenjang pendidikan.	Direktorat Jenderal Administrasi Keuangan Daerah Kemdagri	KPPPA Dinas Pendidikan Provinsi dan Kab/Kota
4. Dibutuhkan Peraturan Menteri Agama mewajibkan semua Kantor Wilayah dan Kantor Departemen untuk mengarusutamakan kesetaraan gender dalam pendidikan di semua jenjang pendidikan.	Dirjen Pendidikan Agama (semua agama) Kemenag	Biro Perencanaan dan Balitbang - Diklat; Dinas Pendidikan Provinsi dan Kab/Kota

6.2 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan

Saran/Rekomendasi	Penanggung Jawab	Pendukung
1. Tinjauan ini mendukung rencana pemindahan Sekretariat Pengarusutamaan Gender, yang saat ini berada di bawah Direktorat Jenderal PAUDNI ke Biro Perencanaan di bawah Sekretaris Jenderal agar lebih mudah memprioritaskan pelaksanaan kesetaraan gender di pendidikan oleh seluruh Direktorat Jenderal di Kementerian.	Sekretaris Jenderal mengelola pemindahan Pokja PUG dan menyediakan tenaga staf penuh	Direktorat Jenderal PAUDNI
2. Sekretariat Pengarusutamaan Gender di bawah Biro Perencanaan Kemdikbud maupun Kemenag agar dikelola oleh staf yang berdedikasi tinggi serta terlatih. Staf tersebut tidak merangkap tugas (<i>full time</i>) agar dapat memberikan dukungan teknis untuk semua Direktorat serta memfasilitasi pengembangan strategi kesetaraan gender dalam pendidikan melalui kerja sama dengan semua Direktorat.	Kantor Sekretaris Jenderal Kemdiknas dan Kemenag	Biro Kepegawaian Kemdikbud dan Kemenag

Saran/Rekomendasi	Penanggung Jawab	Pendukung
3. Meningkatkan kesadaran para pimpinan Kemdikbud dan Kemenag serta Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota agar mereka lebih mengetahui dan mendukung kesetaraan gender dalam pendidikan.	Sekretariat Pokja dan Pokja PUG Kemdikbud dan Kemenag	Pusat Studi Wanita/Gender Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
4. Strategi kesetaraan gender dikembangkan di Kemdikbud dan Kemenag untuk dimasukkan dalam Renstra tahun 2015-2019. Strategi tersebut harus berisikan tujuan, sasaran yang jelas, serta indikator kuantitatif dan kualitatif. Indikator tersebut perlu diselaraskan dengan tujuan dan indikator Pendidikan Untuk Semua dan indikator kinerja pendidikan nasional. Indikator tersebut seharusnya tidak hanya menyangkut kesetaraan kesempatan (akses) melainkan kesetaraan kesempatan mengalami proses belajar mengajar, kesetaraan prestasi dan keberhasilan juga. (Lihat butir 1 dalam Bagian 6.3 Kesetaraan Kesempatan ((Akses)) di bawah ini).	Biro Perencanaan Kemdikbud dan Kemenag	Semua Direktorat Jenderal
5. Peningkatan kapasitas Pokja Gender di daerah. Pengarahan strategis yang jelas bagi Pokja tersebut tentang pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi agar Pokja tersebut dapat mempertahankan peningkatan mutu sekolah yang tanggap gender secara konsisten	Biro Perencanaan Kemdikbud dan Kemenag.	Pemerintah Daerah Pusat Studi Wanita/Gender
6. a. Kemdikbud mengadakan evaluasi resmi terhadap model uji coba kesetaraan gender dalam pendidikan yang dikembangkan di Kabupaten Sleman, Klaten serta Kabupaten/Kota lain. Evaluasi tersebut termasuk informasi tentang proses dan bahan sebagai rujukan bagi penyebarluasan.	a) Sekretariat PUG Kemdikbud	a) Direktorat Jenderal PAUDNI dan Balitbang, Kemdikbud
b. Kemenag mulai uji coba model kesetaraan gender untuk madrasah yang terletak di Kabupaten/Kota anggota program uji coba Kemdikbud. Uji coba model tersebut dilaksanakan melalui Pokja Gender yang dibentuk oleh Kemenag bekerjasama dengan lembaga setempat seperti UIN, IAIN, STAIN, dan Pusat Studi Wanita/Gender.	b) Sekretariat PUG Kemenag.	Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota b) Kanwil/Kandep Kemenag dan Pusat Studi Wanita/Gender
7. Pemerintah Indonesia dan lembaga donor membuat Nota Kesepahaman (MOU) untuk menjamin bahwa semua kegiatan pendukung peningkatan pendidikan yang didanai oleh donor juga mengarusutamakan kesetaraan gender secara menyeluruh dalam semua proyek dan program.	Biro Perencanaan Kemdikbud dan Kemenag	Lembaga donor
8. Kemdikbud dan Kemenag mengembangkan standar nasional kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pendidikan. Pedoman pelaksanaan bagi sekolah harus termasuk definisi sekolah tanggap gender dan cara sekolah mencapai hal tersebut melalui perencanaan dalam RKS dan RKAS.	Sekretariat Pokja PUG Kemdikbud dan Kemenag	Biro Perencanaan dan semua Direktorat Jenderal

6.3 Kesetaraan Kesempatan (AKSES) dalam Pendidikan

Saran/Rekomendasi	Penanggung Jawab	Pendukung
<p>1. Menjamin bahwa data yang dipilah menurut jenis kelamin dikumpulkan secara berkala oleh Kabupaten/Kota dari semua sekolah. Data tersebut termasuk semua indikator keikutsertaan dalam pendidikan dan prestasi belajar. Instrumen pengumpulan data tersebut harus dirancang sedemikian rupa agar mudah dikumpulkan dan dianalisis, termasuk:</p> <p>a. Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) bagi kepala sekolah dan pengawas yang mewajibkan data yang dikumpulkan dan dianalisis dipilah menurut jenis kelamin.</p> <p>b. Adanya peraturan yang mewajibkan kepala sekolah melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang bertujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan serta menghapus kesenjangan gender di tingkat sekolah.</p> <p>c. Mewajibkan analisis data yang dipilah menurut jenis kelamin dalam Rencana Perbaikan Sekolah (<i>School Improvement Plan/SIP</i>), Evaluasi Diri Sekolah (<i>School Self Evaluation/SSE</i>) yang baru serta Pemantauan Sekolah oleh Kabupaten/Kota (<i>Monitoring School by District/MSD</i>). Analisis tersebut bertujuan untuk menemukan serta menanggapi kesenjangan gender di tingkat sekolah dalam hal keikutsertaan pendidikan dan prestasi belajar.</p>	<p>BPS & PDSP Kemdikbud Biro Perencanaan Kemenag</p> <p>Badan Diklat dan Kemenag Kemdikbud</p> <p>Badan Pengembangan SDM dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kemdikbud</p> <p>Direktorat Jenderal Pendidikan Agama, Kemenag</p> <p>ibid</p>	<p>Kemdagri dan KPPPA Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota</p> <p>Sekretariat Jenderal Kemdikbud dan Kemenag</p> <p>Badan Diklat Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota</p> <p>Balitbang dan Kantor Sekretaris Jenderal Kemdikbud dan Kemenag</p>
<p>2. Menentukan peningkatan kinerja Kabupaten/Kota dan sekolah yang kinerjanya rendah sebagai prioritas. Pemerintah daerah harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan sistem yang dapat mengidentifikasi sekolah berisiko tinggi dan murid laki-laki maupun perempuan yang berisiko. • Mendukung sekolah agar dapat mencapai tujuan yang telah mereka tetapkan, termasuk kesetaraan gender. Menciptakan insentif bagi peningkatan kinerja diukur dengan tingkat retensi (tidak putus sekolah) serta prestasi belajar bagi murid laki-laki maupun perempuan. • Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan pemetaan sekolah secara partisipatif seperti model yang telah berhasil dilaksanakan di Gorontalo. Pemetaan tersebut dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal serta akreditasi di semua sekolah. Setiap Pemerintah Daerah harus menunjukkan upaya-upaya aktif dalam rangka penghapusan kesenjangan dalam pemerataan mutu, pendidikan di antara sekolah miskin dan kaya. 	<p>Dinas Pendidikan Provinsi & Kabupaten</p>	<p>Kemdikbud, Kemenag, Kemdagri, BPS, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota</p>

Saran/Rekomendasi	Penanggung Jawab	Pendukung
<p>3. a. Pengawasan ketat terhadap program Beasiswa Anak Miskin untuk menjamin bahwa dana subsidi diterima oleh anak sasaran – baik laki-laki maupun perempuan. Pelaksanaan pengawasan tersebut melalui pengumpulan data yang dipilah menurut jenis kelamin.</p> <p>b. Dipertimbangkan perluasan program tersebut untuk memperbanyak jumlah anak miskin – laki-laki maupun perempuan – yang melanjutkan ke pendidikan menengah pertama dan atas.</p>	<p>Semua Direktorat Jenderal yang terkait, Kemdikbud dan Kemenag</p> <p>Kantor Sekretaris Jenderal, Kemdikbud dan Kemenag</p>	<p>Semua Direktorat terkait dibawah Direktorat Jenderal yang ada</p> <p>Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah</p>
<p>4. Menyusun laporan tahunan kemajuan Kabupaten/ Kota dalam pencapaian indikator Pendidikan Untuk Semua dengan menggunakan data yang dipilah menurut jenis kelamin. Laporan tersebut berupa “foto” dari kenyataan di sekolah dan dapat menggambarkan kecenderungan dalam perkembangan sistem pendidikan di sekolah dan di daerah yang bersangkutan.</p>	<p>Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi</p>	<p>Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/ Kota</p>
<p>5. Melakukan penelitian tentang kesempatan memperoleh pendidikan (akses) bekerjasama dengan perguruan tinggi dan LSM. Penelitian tersebut mengamati a) anak remaja yang menikah dini dan b) murid perempuan yang hamil di luar pernikahan terutama di kelas 12. Penelitian tersebut bertujuan untuk lebih mengerti gejala putus sekolah antara murid tersebut serta pilihan kepala sekolah untuk membantu atau tidak membantu murid tersebut menyelesaikan pendidikan formalnya. Mempertimbangkan kebijakan dan pedoman bagi sekolah untuk menjamin bahwa murid tersebut bisa mengikuti ujian akhir sekolah mereka</p>	<p>Badan Litbang Kemdikbud dan Kemenag</p>	<p>Universitas, PSW/PSG</p>
<p>6. Melakukan penelitian lain tentang kesetaraan dalam kesempatan (akses) untuk lebih mengerti mengapa terjadi:</p> <p>a. tingkat mengulangi kelas lebih tinggi untuk laki-laki dari perempuan pada semua tingkat sekolah di kebanyakan provinsi. Analisis tersebut dilakukan di provinsi-provinsi yang menunjukkan tingkat mengulangi kelas yang tertinggi untuk laki-laki maupun perempuan. Analisis tersebut melihat keterkaitan tingkat mengulangi kelas dengan indikator lain seperti tingkat kehadiran (data dikumpulkan melalui kunjungan sekolah agar dapat diketahui kenyataan kehadiran oleh laki-laki maupun perempuan), tingkat putus sekolah, sumber daya yang tersedia di sekolah serta prestasi belajar.</p> <p>b. tingkat putus sekolah murid laki-laki maupun perempuan, praktik yang baik (<i>best practice</i>) yang sudah dilakukan oleh Kabupaten/Kota untuk menghindari putus sekolah serta membantu murid putus sekolah masuk kembali ke sekolah.</p> <p>c. Pemerintah daerah di Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang menunjukkan angka indeks paritas gender yang tinggi dalam jumlah murid melakukan analisis untuk menjelaskan kesenjangan tersebut, terutama di tingkat pendidikan menengah pertama dan atas.</p>	<p>Badan Litbang Kemdikbud dan Kemenag</p>	<p>Universitas dan PSW/ PSG Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/ Kota</p>

Saran/Rekomendasi	Penanggung Jawab	Pendukung
7. Pemerintah Kabupaten/Kota mengatasi rendahnya jumlah kepala sekolah perempuan yang memenuhi syarat untuk pendidikan menengah pertama dan terutamamenengah atas.	Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota	Kemdikbud, Kemenag, Kemdagri
8. Dalam upaya menjawab masih rendahnya keterwakilan dosen perempuan yang berkualifikasi di perguruan tinggi, maka perguruan tinggi melakukan studi awal (<i>baseline</i>) terkait.	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud dan Kemenag	Rektor, Wakil Rektor, Dekan dan Kepala Departemen

6.4 Kesetaraan Kesempatan dan Hasil dalam Pendidikan

Saran/Rekomendasi	Penanggung Jawab	Pendukung
1. Kemdikbud beserta Kemenag mengembangkan strategi dan rencana aksi kesetaraan gender dalam pendidikan (dengan masukan dari semua Direktorat Jenderal) agar Kemdikbud dan Kemenag dapat: <ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan Anggaran Tanggap Gender dan Laporan Anggaran Gender. • Mendukung setiap Direktorat Jenderal dalam mengembangkan dan mengintegrasikan rencana aksi dan anggarannya untuk mencapai sasaran strategis dalam kesetaraan gender. • Mendukung pemerintah daerah dalam melakukan hal yang sama • Menjamin rencana strategis tersebut tidak hanya menyangkut kesetaraan kesempatan (akses) melainkan termasuk juga kesetaraan dalam proses belajar mengajar, dan hasil dan prestasi belajar. 	Biro Perencanaan Kemdikbud dan Kemenag	Kementerian Keuangan dan seluruh Direktorat Jenderal Kemdikbud dan Kemenag
2. Menjamin bahwa semua kegiatan pengkajian ulang kurikulum untuk peningkatan mutu direncanakan sedemikian rupa sehingga tidak menyertakan bias dan stereotip gender. Buku ajar baru perlu diperiksa/disaring sebelum diterbitkan untuk menjamin bahwa buku tersebut bebas dari bias dan stereotip gender. Penulis buku ajar perlu dilatih dan mendapatkan sertifikasi yang menjamin bahwa mereka tidak menggunakan gambar dan ilustrasi yang memperkuat stereotip gender.	Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud dan Kemenag	Sekretariat PUG dan Pokja Gender Kemdikbud dan Kemenag
3. Melakukan program pendidikan guru (<i>pre-service</i>) komprehensif termasuk kesetaraan gender pada semua perguruan tinggi dan lembaga pendidikan guru maupun tenaga kependidikan. Program tersebut dimaksud untuk secara bertahap meningkatkan keterampilan guru maupun calon guru searah dengan pendekatan tanggap gender dalam manajemen berbasis sekolah, pengembangan kurikulum, dan proses belajar mengajar yang menggunakan metode modern. Mengembangkan matakuliah model khas daerah di FKIP di setiap daerah.	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Badan Pengembangan SDM dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kemdikbud dan Kemenag	Semua Direktorat untuk Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan Universitas, Pemerintah Kabupaten dan Sekolah

Saran/Rekomendasi	Penanggung Jawab	Pendukung
<p>4. Melaksanakan program pelatihan (<i>in-service</i>) komprehensif untuk pengawas dan kepala sekolah serta menggunakan pendekatan tanggap gender dalam manajemen berbasis sekolah, pengembangan kurikulum dan proses belajar mengajar yang menggunakan metode modern melalui:</p> <p>a) Modul pelatihan untuk para pengelola/widyaswara/tutor LPTK, P4TK, LPPKS, LPMP dan Badan Diklat agar kesetaraan gender dapat dimasukkan ke dalam semua aspek i pelatihan. Mengkaji ulang (tinjauan) semua kursus yang sudah ada. Melatih widyasarwa (Master Trainer) dalam penerapan pendekatan tanggap gender dalam semua aspek dan jenjang pendidikan.</p> <p>b) Bekerjasama dengan Pokja Daerah, LPMPs, LPKs dan Balai Diklat Kemenag untuk mengembangkan kemampuan dalam pelaksanaan kesetaraan gender di semua jenjang pendidikan.</p> <p>c. Di tingkat kabupaten/kota, melatih widyasarwa (<i>Master Trainer</i>) serta pelatih mata pelajaran dari sekolah inti (SD/MI), Sekolah Unggulan atau Sekolah Model (SMP/MTs/SMA/MA) untuk menggunakan pendekatan tanggap gender dalam semua komponen pendidikan. Menyebarluaskan bahan pelatihan kepada sekolah satelit.</p> <p>d. Meningkatkan kapasitas KKG dan MGMP (jaringan pengembangan profesi guru) serta KKKS, MKKKS (jaringan pengembangan profesi kepala sekolah). Menyediakan dana untuk membiayai pertemuan berkala, termasuk fasilitator, alat-alat bantu praktik serta penyebarluasan bahan.</p> <p>e. Universitas Terbuka dan lembaga pendidikan lain yang menyediakan program pendidikan jarak jauh berbasis ICT dalam mengkaji ulang kursus/pelatihan guru untuk menjamin bahwa kurikulumnya searah dengan pendekatan tanggap gender yang lebih baik. Pendekatan tersebut termasuk manajemen berbasis sekolah, pengembangan kurikulum, dan proses belajar mengajar yang menggunakan metode modern.</p> <p>f. Mengembangkan pedoman praktis (<i>handbook</i>) kesetaraan gender dalam pendidikan dengan menggunakan bahan pelatihan yang sudah ada. Pedoman tersebut berisikan alat bantu bagi kepala sekolah, pengawas, guru, petugas perpustakaan serta guru bimbingan dan konseling yang dapat mereka gunakan dalam pengembangan strategi sekolah secara utuh (<i>whole school strategy</i>) demi kesetaraan gender.</p>	<p>Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Badan Pengembangan SDM dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Badan Diklat dan Direktorat terkait Kemdikbud dan Kemenag</p>	<p>Badan Diklat Provinsi dan Kabupaten/ Kotadan Diklat Regional Kemenag</p>
<p>5. Meningkatkan alokasi anggaran untuk peralatan dan bahan habis pakai perpustakaan (termasuk bahan bacaan yang menarik / <i>high interest reading material</i>) serta laboratorium (Ilmu Pengetahuan Alam dan komputer) di sekolah agar mencapai kesetaraan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan dalam proses belajar mengajar di semua bidang ajar.</p>	<p>Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota</p>	<p>Direktorat Jenderal terkait Kemdikbud dan Kemenag dan Pemerintah Provinsi</p>
<p>6. Mewajibkan rektor di semua perguruan tinggi mengarusutamakan kesetaraan gender di seluruh kegiatan, termasuk pelatihan bagi semua dosen dan tenaga kependidikan. Mengkaji ulang dan memperbaharui semua mata kuliah yang bermuatan bias dan <i>stereotip gender</i>. Semua perguruan tinggi harus menghasilkan data yang dipilah menurut jenis kelamin tentang mahasiswa maupun dosen di semua bidang (jumlah mahasiswa, jumlah lulusan).</p>	<p>Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud dan Kemenag</p>	<p>Rektor, manajemen, dan staf</p>

Referensi

- ADB (2006) Indonesia: *Country Gender Assessment*. Manila. ADB
- ADB (2012). *Madrasah Education Development Project (MEDP) Gender Action Plan Implementation Review: Special Review Mission Draft Report (13-18 May 2012)*.
- ADSRI. 2011. *Policy Brief No. 5 Reproductive Health Services for Single Young Adults*. I. D.Utomo, P. Macdonald, A. Reimondos, T. Hull, A Utomo, Australian National University. Canberra
- AIBEP/Pemerintah Kabupaten Kupang. 2010. Modul Pengarusutamaan Gender Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Kupang.
- AusAID/Universitas Indonesia. 2011. *Study of Knowledge Needs & Supply Constraints for Gender Research in Indonesia's Knowledge Sector. Final Report*. Jakarta.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana: BNPB (2008), "Himpunan Peraturan Perundangan Tentang Penanggulangan Bencana"
- Iwu Dwisetyani Utomo & Peter Macdonald (2011) *Gender Depiction in Indonesian Primary and Secondary Textbooks: The Way Forward*. BAPPENAS/ANU/ADSRI
- BPS Statistics Indonesia (2010), "Hasil Sensus Penduduk 2010 Data Agregat Per Provinsi"
- BPS Statistics Indonesia (2009), "*Statistical Yearbook of Indonesia 2009 (Government)*"
- BPS Statistics Indonesia (2009), "*Trends of the Socio-Economic Indicators of Indonesia 2009*"
- BPS Statistics Indonesia (2009), "*Welfare Indicators 2009*"
- ILO (2009), "*Labor and Social Trends in Indonesia 2009: Recovery and beyond through decent work*"
- CIDA (2010) *Education Gender Equality*. Canada
- Clark, C. & Foster, A. (2005). *Children's and young people's reading habits and preferences: The who, what, why, where and when*. London: National Literacy Trust.
- Diarsvitri, W., I.D. Utomo, T.Neeman, A. Oktavian, 2011. *Sexuality among senior high school students in Papua and West Papua Provinces & implications for HIV prevention*. <http://dx.doi.org/10.1080/13691058.2011.599862>
- Hunt, F. (2008). '*Dropping out from school: A cross-country review of literature*.' CREATE Pathways to Access No 16. Consortium for Research on Educational Access, Transitions and Equity: University of Sussex.
- Ida Rosyidah & Iwu D. Utomo. 2011. *Policy Brief No.4 Gender in Islamic Studies Textbooks. Gender and Reproductive Health Survey*. Australia National University/ADSRI-ANU
- Iwu. D. Utomo & P. McDonald. 2011. *Policy Brief No.1. Gender Depiction in Indonesian Primary and Secondary School Textbooks: The Way Forward. Gender and Reproductive Health Survey*. Australia National University/ADSRI-ANU
- JICA (2011) *Country Gender Profile: Indonesia. Final Report*
- Lewin, K.M. (2007). '*Improving Access, Equity and Transitions in Education: Creating a Research Agenda*.' CREATE Pathways to Access Series, No 1. Brighton: University of Sussex.
- Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, (2009), "Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak"
- Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia (2008), "Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan"

- Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia (2008), "Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan"
- Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia (2008)," Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak"
- Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia (2008), "Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Di Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak"
- Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Pendidikan Nasional (2005),"Nomor 17/Men.PP/Dep.II/VII/2005, Nomor 18A Tahun 2005, Nomor 1/PB/2005"
- MONE. 2010. Satu Dasawarsa Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan, Jakarta
- MORA. February 2011. *Quality of Education in Madrasah Study. Final Report.*
- Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency (BAPPENAS) (2010), "A roadmap to accelerate achievement of the MDGs in Indonesia"
- Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency, "Report on the Achievement of the Millennium Development Goals Indonesia 2010"
- Nadya Fouad. 2008.*Tracking the Reasons Why Many Girls Avoid Science and Mathematics.* University of Wisconsin-Milwaukee. USA.
- OECD (2010) *PISA 2009 Results: What Students Know and Can Do – Student Performance in Reading, Mathematics & Science (Volume 1)*, OECD, Paris
- OECD (2011), *Report on the Gender Initiative: Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship.* OECD, Paris. www.oecd.org/gender
- Oxfam. 2005. "Beyond access for girls and boys: How to achieve good-quality, gender-equitable education." *Education and Gender Equality Series, Programme Insights.* London: OXFAM.
- Presiden Republik Indonesia (2000), "Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional"
- Republic of Indonesia (2010), "Implementation of the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women in INDONESIA During 2004 – 2009"
- Republic of Indonesia (2010), "Regulation on the President of the Republic of Indonesia Number 5, 2010 Regarding The National Medium-Term Development Plan 2010-2014. Book I: National Priority"
- Smeru. 2011. "Qualitative Impact Study for PNPM-Generasi and PKH on the Provision and the Utilization of the Maternal and Child Health Services and Basic Education Services in the Provinces of West Java and East Nusa Tenggara." *Research Report.* Jakarta: The Smeru Institute.
- State Minister for National Development Planning/Head of National Development Planning Agency "Decree No KEP.30/M.PPN/HK/03/2009 Regarding The Establishment of The Steering Committee and The Technical Team for Gender Responsive Planning and Budgeting"
- State Ministry For Women's Empowerment And Child Protection Republic Of Indonesia (2008), "State Ministry for Women's Empowerment and Child Protection"
- Suharti. 2012. *Schooling and Destiny: The Influences of Student, School, and District Characteristics on Education Performance in Indonesia. Working paper for PhD thesis,* Australian Demographic and Social Research Institute, Australian National University.
- Suharti. 2010. *Are Indonesian Girls Left Behind? The Evolution of Gender Gaps in Education. Presented at the 10th International Conference on Women in Asia, Canberra, 30 September, 2010*
- Presidential Instruction Republic of Indonesia Number 9 the Year 2000 on Gender Mainstreaming in National Development and Minister Of Home Affairs Regulation Number 15 Year 2008 on General Guidelines For in the Regions"

- Sziraczki, G. and A. Reerink (2004) *Report of survey on the school-to-work transition in Indonesia, GENPROM Working Paper No. 14*. Geneva: ILO.
- Tim PSW UIN Sunan Kalijaga, *Kesenjangan Gender pada Kualitas Akademik dan Kemampuan Manajerial Staf Pengajar IAIN Sunan Kalijaga*. (Jakarta: PSW UIN Yogyakarta, unpublished, 2000).
- Topping.T. 2012. *What Kids are Reading: The Book Reading Habits of Students in British Schools*. University of Dundee. Scotland. UK
- UNDP *Human Development Report 2010 & 2011*
- UNDP 2009. *Assessing Gender Responsive Local capacity Development in Indonesia*. UNDP Bangkok
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). 2004. *Education for all: The quality imperative*. Paris: UNESCO.
- UNESCO (2009). *Education for All Global Monitoring Report – Overcoming inequality: why governance matters*. Paris: UNESCO.
- UNESCO/UNGEI (2005). *Scaling Up Good Practices in Girls' Education*. Paris: UNESCO.
- UNESCO. 2009. *Promoting Gender Equality in Education: GENIA Toolkit*. UNESCO Bangkok.
- UNICEF (2009) *EFA Mid-Decade Assessment: Gender Equality in Education*. East Asia and Pacific. Bangkok.
- UNDP (2010), *"Women's Participation in Politics and Government in Indonesia"*
- UNIFEM (2009), *"Gender Equality Laws: Global Good practice and a review of five Southeast Asian countries"*
- USAID (2008). *"Education from a Gender Equality Perspective. Washington DC: USAID Office of Women in Development."*
- USAID DBE3. *Analysis of the current Situation of Islamic Formal Junior Secondary Education in Indonesia*
- World Bank. April 2012. *Indonesia Economic Quarterly: Redirecting Spending*. Jakarta.
- World Bank. 2012. *World Development Report: Gender Equality and Development*. Washington

Annex

Annex 1 Daftar Peraturan Pemerintah terkait Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan

NO NASIONAL	PERATURAN	ISI	DITERBITKAN	PELAKSANAAN
1.1	Konstitusi Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> Kewajiban bagi semua warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan bermutu (Pasal 31); Pemerintah harus menyediakan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dalam anggaran Tahunan (APBN). 	Sejak 1945 dan amandemen konstitusi	Kebijakan Pendidikan untuk Semua
1.2	UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.	<ol style="list-style-type: none"> Demokratis, kesetaraan dan non diskriminasi sebagai prinsip dalam pelaksanaan pendidikan (Pasal 4) Hak yang sama bagi semua warga negara dalam pendidikan Kewajiban Pemerintah untuk menyediakan layanan pendidikan dan menjamin pendidikan yang berkualitas dan non diskriminasi 	Diterbitkan tahun 2003	<ol style="list-style-type: none"> RENSTRA Kemendikbud 2010-2014; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan;
1.3	UU Nomor 17 Tahun 2006, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)	<p>Pengarusutamaan gender (PUG) adalah salah satu dari tiga isu lintas sektoral dalam pembangunan</p>	Sejak 2010	<p>Ditampung di Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014:</p> <ol style="list-style-type: none"> PUG sebagai satu dari tiga isu lintas sektor dalam pembangunan (PUG, tata kelola pemerintahan yang baik, dan pembangunan berkelanjutan Indikator gender
1.3	Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014	<ol style="list-style-type: none"> Pengarusutamaan gender adalah isu lintas sektoral dalam semua kegiatan pembangunan; Menyebutkan target tertentu (15 masalah dan 18 indikator) dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan. 	Januari 2010	<ol style="list-style-type: none"> Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Pendidikan 2010-2014. Merumuskan Kegiatan Anggaran Tahunan (RKA) berdasarkan isu dan indikator pada RPJMN
1.4	Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> Menginstruksikan semua dan Kepala Lembaga Negara di tingkat nasional, Gubernur, Bupati/Walikota untuk melaksanakan pengarusutamaan gender dalam proses pembangunan KPP memberikan bimbingan teknis untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender di tingkat pusat dan daerah Bertujuan untuk merumuskan kebijakan dan program yang responsif gender. 	Desember 2000 (hampir 10 tahun)	<ol style="list-style-type: none"> Dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008, Didirikan Satuan Kelompok Kerja dan focal point bagi pengarusutamaan gender dalam Pendidikan Pelaksanaan anggaran gender di beberapa program dan kegiatan prioritas sejak 2010.

NO	PERATURAN	ISI	DITERBITKAN	PELAKSANAAN
1.5	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah	Kewajiban untuk menyediakan 5 persen dari APBD (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mendukung pengarusutamaan gender di tingkat lokal	2005	
1.6	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Implementasi Pengarusutamaan Gender di Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> Mengintruksikan Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melaksanakan PUG pada proses perencanaan Mengatur POKJA di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; Melaksanakan perencanaan responsif gender 	Juni 2008	Semua provinsi memiliki POKJA PUG, beberapa di tingkat kabupaten /kota
1.7	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK 02 Tahun 2009 tentang Anggaran Percontohan yang Responsif Gender	<p>Tindakan afirmatif nasional untuk semua Kementerian</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengelola program yang terpilih dengan Pernyataan yang Responsif Gender di 7 Kementerian (KPPA, BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Kemdikbud, Kesehatan, Pertanian dan PU) Mengusulkan kegiatan tahun 2010 pada RKA 2010 terpilih 	Maret 2009	7 Kementerian menerapkan ARG terpilih berdasarkan Pernyataan Anggaran Responsive Gender
1.8	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK 02 Tahun 2010 tentang Anggaran Percontohan yang Responsif Gender	<p>Sebuah tindakan afirmatif nasional untuk semua Kementerian</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengelola program yang terpilih dengan Pernyataan yang Responsif Gender dari semua Kementerian pada urusan sosial dan ekonomi. Mengusulkan kegiatan tahun 2011 pada RKA 2011 terpilih 	Maret 2010	16 Kementerian menerapkan ARG berdasarkan Pernyataan Anggaran Responsive Gender
1.9	Keputusan Kementerian Keuangan nomor 93/PMK 02 Tahun 2011 tentang Anggaran Percontohan yang Responsif Gender	<p>Tindakan afirmatif nasional untuk semua Kementerian</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengelola program yang terpilih dengan Pernyataan yang Responsif Gender Mengusulkan kegiatan tahun 2012 pada RKA 2012 terpilih untuk setiap Eselon I dan II 		26 Kementerian menerapkan ARG berdasarkan Pernyataan Anggaran Responsive Gender
II Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan				
2.1	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender bidang Pendidikan di Departemen Pendidikan.	<ol style="list-style-type: none"> Semua unit organisasi dalam pendidikan harus mengintegrasikan gender dalam semua kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing unit organisasi Sanksi jika unit organisasi terbukti tidak melaksanakan pengarusutamaan gender 	November 2008	<ol style="list-style-type: none"> Fokus /poin utama gender dalam setiap unit organisasi utama; Di 32 Provinsi telah didirikan Satuan Kelompok Kerja di lembaga pendidikan Di Kabupaten/kota telah dibentuk 100 Unit Kelompok Kerja gender. Memberikan stimulan untuk mendukung program ini di tingkat provinsi.

NO	PERATURAN	ISI	DITERBITKAN	PELAKSANAAN
2.2	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tahun 2010-2014	<p>1. Latar Belakang Pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara Indonesia dan masing-masing memiliki hak untuk akses pada kualitas pendidikan yang relevan dengan minat dan kompetensi perempuan/ laki-laki tanpa memandang status sosial dan ekonomi, kelompok etnis, ras, agama, dan gender.</p> <p>2. Filosofi Keadilan sosial adalah untuk memastikan penyediaan keadilan dan kualitas pendidikan, penghapusan segala bentuk diskriminasi dan bias gender, pelaksanaan pendidikan untuk semua.</p> <p>3. Visi dan misi dalam pendidikan untuk 2010 - 2014 "Mengelola penyediaan pendidikan nasional terbaik untuk mengembangkan bangsa Indonesia yang komprehensif dan cerdas</p> <p>1. Ketersediaan untuk semua bidang 2. Aksesibilitas untuk semua kelompok sosial 3. Kualitas dan relevansi dengan kebutuhan kehidupan sosial, bisnis dan industri 4. Keadilan bagi masyarakat untuk mencapai kualitas pendidikan yang tinggi dan responsif terhadap keragaman sosial-budaya, ekonomi, geografi, jenis kelamin, dan lainnya. 5. Pastikan semua warga negara Indonesia mencapai pendidikan dan mampu menyesuaikan diri dengan persyaratan masyarakat, bisnis, dan industri.</p>	Oktober 2010	<p>1. Menyediakan alokasi anggaran untuk mendukung PUG di Kementerian Pendidikan setiap tahun</p> <p>2. Seluruh unit utama organisasi di Kemdikbud seharusnya melaksanakan PUG dalam program dan kegiatan</p> <p>3. Mentargetkan 32 provinsi melaksanakan PUG di tingkat provinsi;</p> <p>4. Mentargetkan 50% kabupaten/kota melaksanakan PUG di tingkat lembaga pendidikan dan unit sekolah.</p>
		<p>Misi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2010-2014 adalah untuk meningkatkan:</p> <p>1. ketersediaan 2. aksesibilitas 3. kualitas dan relevansi 4. persamaan 5. jaminan</p>		

NO	PERATURAN	ISI	DITERBITKAN	PELAKSANAAN
	Keputusan Depdikbud Nomor 060/P/2007 tentang Kelompok Kerja PUG. (Keputusan ini direvisi setiap tahun)	Tugas utama dan peran kelompok kerja; 1. Mengkoordinasikan program pembangunan pengarusutamaan gender dalam pencapaian kesetaraan gender dalam pendidikan 2. Mempersiapkan masukan standar perumusan kebijakan dan pengembangan untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pendidikan 3. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi dalam pengembangan program pengarusutamaan gender dalam pendidikan 4. Mempersiapkan masukan kebijakan dalam mengembangkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring evaluasi yang responsif gender dalam pendidikan 5. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pendidikan	Sejak 2002	1. Kelompok kerja PUG dalam pendidikan berada di bawah Direktorat Jenderal PAUD, Non Formal dan Informatika (PAUDNI) 2. Alokasi anggaran setiap tahun sejak 2002 (lihat matriks alokasi anggaran untuk PUG dalam pendidikan) 3. Di 32 Propinsi telah menetapkan unit Satuan kelompok Kerja (Pokja) di bawah Direktorat Jenderal PAUDNI. 4. 78 kabupaten/kota dibentuk Pokja sejak tahun 2009.
III Kementerian Agama				
3.1	Keputusan Nomor 15 Tahun 2000	Membentuk Satuan Tugas Gender di Kemenag untuk: 1. Memantau program pemberdayaan perempuan. 2. Memfasilitasi upaya pemberdayaan perempuan. 3. Membangun jaringan dengan lembaga pemerintah lainnya, organisasi berbasis perempuan, dan organisasi berbasis keagamaan berkaitan dengan pemberdayaan perempuan. 4. Mengadvokasi kepala departemen untuk pelaksanaan program pengarusutamaan gender	2000	
3.2	Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Agama No. 5/J/SA/1556/VI/2003	Memberikan mandat kepada semua kepala kantor wilayah untuk membentuk satuan tugas mereka sendiri. 54 Satuan Tugas ini dimaksudkan untuk berfungsi sebagai mediator, koordinator, dan komunikator pemberdayaan perempuan di lingkungan Kementerian Agama, di tingkat provinsi dan daerah.	Juli 2003	
3.3	Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Unit Pelaksana, Tugas dan Fungsi PUG	1. Menginformasikan semua unit organisasi Kemenag (Eselon I) untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender 2. Menyusun tugas dan fungsi Pokja PUG di Kemenag	2006	

NO	PERATURAN	ISI	DITERBITKAN	PELAKSANAAN
3.4	Surat Keputusan Menteri Nomor 93 Tahun 2011 tentang Pernyataan Responsif Gender	Tindakan afirmatif nasional untuk semua Eselon I dan Provinsi adalah untuk: a. Mengelola setidaknya satu program dengan Pernyataan Responsif Gender. b. Mengusulkan kegiatan tahun 2012 untuk setiap Eselon I dengan Pernyataan Responsif gender. c. Memperdalam isi dan memperluas penerima manfaat Materi Pengarusutamaan Gender untuk mempromosikan keluarga yang lebih harmonis untuk semua kelompok agama (Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha)	2010	1. Diadakannya kegiatan responsif gender di setiap Direktorat Jenderal di tingkat nasional, kecuali Direktorat Jenderal Haji. 2. Diadakannya kegiatan responsif gender di setiap Divisi dan setiap kelompok agama, kecuali Divisi Haji.
3.5	Kementerian Agama Nomor 479 Tahun 2006 tentang Komite Pelaksanaan untuk sosialisasi PUG bagi Bagian Perencanaan	1. Mempersiapkan dan melaksanakan sosialisasi PUG untuk bagian perencanaan di Kemenag Pusat dan Kanwil Agama Provinsi 2. Alokasi anggaran untuk mendukung PUG	7 Agustus 2006	
3.6	Kementerian Agama Nomor 486 Tahun 2006 tentang Merumuskan Tim Penyusun Rencana Kerja Pengarusutamaan Gender Tahun 2007	1. Merumuskan Pengarusutamaan Gender Rencana kerja di Depag tahun 2007 2. Alokasi anggaran untuk mendukung PUG	26 Juli 2006	
3.7	Departemen Agama Nomor 487 Tahun 2006 tentang perumusan Komite Implementasi untuk Sosialisasi tentang Hukum Kekerasan dan Perdagangan Manusia	Mempersiapkan dan melaksanakan sosialisasi dan advokasi tentang hukum kekerasan domestik dan perdagangan manusia untuk semua Kanwil Agama Provinsi	26 Juli 2006	
3.8	Kementerian Agama Nomor 488 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender 2006 di Kemenag	1. Merumuskan kelompok kerja pengarusutamaan gender di Kemenag pada tahun 2006 2. Mempersiapkan dan melaksanakan tugas dan kegiatan pengarusutamaan gender di Kemenag	26 Juli 2006	

NO	PERATURAN	ISI	DITERBITKAN	PELAKSANAAN
3.9	Kementerian Agama Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kemenag tahun 2010-2014.	<p>Visi Kementerian Agama adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir batin.</p> <p>Sejalan dengan visi di atas, Kementerian Agama memiliki misi untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama. 2. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama. 3. Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan. 4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. <p>Salah satu prioritas utamanya adalah untuk meningkatkan pemahaman agama dan rasa hormat terhadap toleransi dan harmoni, hak asasi manusia, gender dan keanekaragaman.</p> <p>Peningkatan kualitas pendidikan dasar 9 tahun untuk semua.</p> <p>Salah satu keluaran yang dibuat oleh Kemenag adalah Pusat Pelatihan yang menyediakan kurikulum, standar kompetensi, materi pembelajaran, dan manual untuk pelatihan teknis pendidikan agama</p> <p>Program Pendidikan Islam adalah untuk meningkatkan akses, kualitas, relevansi, daya saing, tata kelola, akuntabilitas, dan citra positif dari pendidikan Islam.</p> <p>Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pendidikan Islam adalah Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni.</p> <p>Tujuan peningkatan dalam APK dari 2010 ke 2014 adalah berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PPAUD dari 7,09% menjadi 7,65%, 2. Madrasah Ibtidaiyah (MI) dari 12,18% menjadi 13,01%, 3. Madrasah Tsanawiyah (MTs) dari 19,06% menjadi 18,28%, 4. Madrasah Aliyah (MA) dari 7,65% menjadi 8,63%, 5. Pesantren Salafiyah Ula dari 0,57% menjadi 0,69%, 6. Pesantren Salafiyah Wuustha dari 2,26% menjadi 2,58%, 7. Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) dari 2,61% menjadi 2,82%, 8. Paket A dari 0,07% menjadi 0,11%, 9. Paket B dari 0,27% menjadi 0,31%, 10. Paket C dari 0,57% menjadi 0,61%, dan 11. Pendidikan Tinggi Islam dari 2,25%, menjadi 3,00%. 	29 Januari 2010	NA

Annex 2 Rangkuman Kegiatan Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan Tahun 2002 - 2010

Tahun	Anggaran (Rupiah)	Tolok Ukur Keberhasilan				Data/Informasi
		Program/Kegiatan	Instrumen	Regulasi	Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	
2002	2 Milyar APBN	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembentukan Pokja pengarusutamaan gender dalam pendidikan tingkat pusat b. Rancangan Kertas Kerja pengarusutamaan gender pusat oleh PSW c. Pelatihan GAP & POP bagi staf perencanaan dan program di 5 unit utama Kemdikbud 	<ul style="list-style-type: none"> a. 10 penelitian tentang gender bidang pendidikan b. Studi hasil analisis bahan ajar 	SK Dirjen PLS untuk membentuk Pokja PUG dalam pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pokja PUG Kemdikbud b. Pokja PUG di 15 Propinsi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Data terpilah dalam kertas kerja PUG dalam pendidikan b. Situs PUG dalam pendidikan
2003	12 Milyar APBN	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Kertas Kerja oleh PSW di 5 Propinsi (Jabar, Jateng, Jatim, Sumbang dan NTT). b. Diskusi meja bundar untuk Eselon II dan III di 5 unit utama c. Pelatihan GAP & POP bagi staf perencanaan serta RTD bagi pengambil keputusan di 15 provinsi termasuk kabupaten/kota d. Penelitian tentang kebijakan pendidikan dan profil gender di 15 provinsi e. Penyusunan model dan modul Pendidikan Keluarga Berbasis Gender (PKBG) di 30 provinsi dan 30 kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kertas Kerja di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Barat dan NTT. b. Konsep Kertas Kerja dan Rencana Aksi (RAD) pengarusutamaan gender dalam pendidikan di 15 provinsi c. Konsep Toolkit bagi guru dan dosen d. Pedoman pelatihan analisis gender dalam pembangunan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> a. SK Dirjen untuk membentuk Pokja PUG dalam pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pokja PUG Kemdikbud b. Pokja PUG di 15 Propinsi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Data terpilah dalam kertas kerja PUG dalam pendidikan b. Situs PUG dalam pendidikan

Tahun	Anggaran (Rupiah)	Program/Kegiatan	Instrumen	Regulasi	Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Data/Informasi
		<ul style="list-style-type: none"> f. Penyusunan model dan modul Keadilan Gender dalam Pendidikan bagi perempuan yang termajinalkan di 4 kabupaten/kota g. Penyebarluasan bahan ajar bagi anggota IKAPI h. Situs i. Talkshow radio, iklan layanan masyarakat media cetak, terbitan/publikasi j. Koordinasi dan sinkronisasi program 				
2004	17,3 Milyar APBN dan 191.755.687 APBD	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemutakhiran data & revisi kertas kerja Pokja dan PSW b. Kertas Kerja dan Rencana Aksi (RAD) di 15 provinsi (Dinas Pendidikan, BAPPEDA, and PSW) c. Penyusunan konsep baru Kertas Kerja dan Rencana Aksi (RAD) di 30 kabupaten/kota di 15 provinsi d. Studi profil gender di 15 provinsi e. Penyusunan profil gender dalam pendidikan bagi 10 provinsi baru f. Peningkatan kapasitas GAP dan POP bagi peneliti di 25 PSW g. Talkshow radio, iklan layanan masyarakat media cetak, terbitan/publikasi h. Koordinasi dan sinkronisasi program 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kertas Kerja dan Rencana Aksi (RAD) di 15 provinsi b. Kertas Kerja di 30 kabupaten/kota c. Profil gender di 25 provinsi, d. Panduan peningkatan kapasitas pengarusutamaan gender dalam pendidikan e. Panduan penyusunan bahan ajar tanggap gender f. Panduan pelaksanaan keterampilan hidup bagi perempuan miskin 	SK Dirjen untuk membentuk Pokja PUG dalam pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pokja PUG Pusat bekerja/berfungsi b. Pokja PUG di 25 Propinsi 	<ul style="list-style-type: none"> a. pengkajian- ulang serta redaksional data b. Kertas kerja PUG Kem-dikbud

Tahun	Anggaran (Rupiah)	Program/Kegiatan	Instrumen	Regulasi	Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Data/ Informasi
2005	17.3 Milyar APBN 2.594.942.500 APBD	<p>a. Pemutakhiran data dan redaksional Kertas Kerja</p> <p>b. Revitalisasi Sub Pokja pada unit-unit utama</p> <p>c. Pemutakhiran Data dan isi/Isu-isu Kertas Kerja di 15 provinsi (PSW, Dinas Pendidikan dan BAPPEDA)</p> <p>d. Kertas Kerja dan Rencana Aksi pengarusutamaan gender dalam pendidikan di 10 provinsi (PSW, Dinas Pendidikan and BAPPEDA)</p> <p>e. Penyusunan konsep kertas kerja dan rencana aksi pada 45 kabupaten/kota di 15 provinsi</p> <p>f. Studi sistem pendataan pendidikan yang bersifat tanggap gender</p> <p>g. Tolok ukur gender dalam pendidikan</p> <p>h. Profil gender dalam pendidikan di 10 provinsi</p> <p>i. Peningkatan kapasitas GAP dan POP pada 10 PSW</p> <p>j. Pembinaan dan supervisi terhadap 25 provinsi yang menerima ABPN untuk pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran pendidikan</p>	<p>a. Kertas Kerja dan Rencana Aksi (RAD) di 45 kabupaten/kota</p> <p>b. Tolok ukur gender dalam pendidikan</p> <p>c. Kertas kerja pendidikan</p> <p>d. Pesan baku/standar tentang pengarusutamaan gender dalam pendidikan</p> <p>e. Panduan bagi Pokja pengarusutamaan gender tingkat provinsi dan kabupaten/kota</p>	<p>a. SK Dirjen untuk membentuk Pokja PUG dalam pendidikan</p> <p>b. SK Gubernur untuk membentuk Pokja PUG dalam pendidikan</p>	<p>a. Pokja PUG pusat bekerja/berfungsi</p> <p>b. Pokja PUG di 25 provinsi bekerja/berfungsi</p> <p>c. Pokja PUG di 45 kabupaten/kota</p>	<p>Hasil studi profil data gender dalam pendidikan</p>

Tahun	Anggaran (Rupiah)	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Keberhasilan	Regulasi	Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Data/ Informasi
2006	17,3 Milyar APBN dan 7.123.000.000 APBD	<p>a. Rencana aksi pengarusutamaan gender bagi masing-masing unit utama Kemdikbud</p> <p>b. Pengkaji-ulangan dan redaksional data pada 15 Kertas Kerja di 15 provinsi</p> <p>c. Kertas Kerja dan rencana aksi pengarusutamaan gender dalam pendidikan di 10 provinsi</p> <p>d. Studi penggabungan hasil studi para PSW</p> <p>e. Penyusunan model sekolah tanggap gender</p> <p>f. Analisis bahan ajar dari segi gender untuk bahan ajar pendidikan dasar dan menengah Talkshow melalui radio</p> <p>g. Koordinasi dan sinkronisasi program untuk 32 provinsi</p> <p>i. Penyediaan dan pengawasan dana APBN (dekon) untuk perencanaan pendidikan tanggap gender di 25 provinsi</p> <p>j. Pembinaan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pendidikan</p> <p>k. Evaluasi program pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pendidikan tahun 2002-2005</p>	<p>a. Kertas Kerja di 15 provinsi</p> <p>b. Hasil analisis dari segi tanggap gender terhadap bahan ajar pendidikan menengah pertama dan atas</p> <p>c. Pedoman studi pelaksanaan kebijakan pendidikan</p> <p>d. Panduan blok grant pengembangan model pendidikan pencegahan perdagangan manusia bagi perempuan dan anak</p> <p>e. Tolok ukur gender dalam pendidikan</p>	<p>a. SK Dirjen Selaku Ketua Pokja Gender</p> <p>b. SK Gubernur untuk membentuk Pokja PUG dalam pendidikan (Jateng, Jatim, Sumbang, NTT)</p>	<p>a. Pokja PUG Pusat bekerja/berfungsi</p> <p>b. Pokja PUG di 25 provinsi bekerja/berfungsi</p> <p>c. Pokja PUG di 45 kabupaten/kota bekerja/berfungsi</p>	<p>Pengkaji-ulangan dan redaksional data pada Kertas Kerja</p>

Tahun	Anggaran (Rupiah)	Program/Kegiatan	Instrumen	Regulasi	Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Data/ Informasi
2007	17,9 Milyar APBN dan 3.116.000.00 (4 prov) dan Kerjasama dengan AUSAid	<ul style="list-style-type: none"> a. Hibah untuk mendukung pengarusutamaan gender tingkat provinsi pada 32 provinsi b. Peningkatan kapasitas Pokja di 32 provinsi c. Rapat koordinasi pengarusutamaan gender dalam pendidikan bagi 32 provinsi d. Lokakarya pengarusutamaan gender dalam pendidikan bagi unit-unit utama Kemdikbud e. Koordinasi Pokja Kemdikbud 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pesan baku/standar pengarusutamaan gender dalam pendidikan b. Panduan sekolah tanggap gender c. Kesetaraan gender dalam pendidikan d. Model pendidikan keluar-ga/rumah tanggap gender (7 judul) e. Brosur, buku saku, stiker tentang PUG dalam pendidikan f. Kampanye di TV, radio dan koran 	<ul style="list-style-type: none"> a. SK Menteri No.060/P/2007 tentang Pokja PUG Kemdikbud b. Rancangan Permendiknas tentang Pedoman Pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan c. SK Gubernur untuk membentuk Pokja PUG dalam pendidikan (Jabar, Jateng, Jatim, Sumbar, NTT) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pokja PUG Pusat bekerja/berfungsi b. Pokja PUG di 25 provinsi bekerja/berfungsi 	<ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan dan analisis data oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP)

Tahun	Anggaran (Rupiah)	Tolok Ukur Keberhasilan			Data/ Informasi
		Program/Kegiatan	Instrumen	Regulasi	
2008	17.5 M APBN Pengarusutamaan Gender Provinsi APBD Hibah AusAID	<p>a. Penyusunan modul dan bahan pelatihan/kit bagi sekolah tanggap gender (PSBG)</p> <p>b. Penyusunan modul dan bahan pelatihan/kit anggaran tanggap gender</p> <p>c. Pembinaan uji coba pengarusutamaan gender tingkat kabupaten/kota</p> <p>d. Penyediaan bahan penyebarluasan dan advokasi pengarusutamaan gender dalam pendidikan</p> <p>e. Perencanaan program pengarusutamaan gender dalam pendidikan</p> <p>f. Fasilitasi peningkatan kapasitas di 33 provinsi</p> <p>g. Evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pendidikan</p> <p>h. Fasilitasi dan pembinaan tentang orientasi teknis pengarusutamaan gender dalam pendidikan</p> <p>i. Bimbingan, pendampingan dan orientasi teknis PUG</p> <p>j. Koordinasi pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pendidikan di unit utama Kemdikbud</p>	<p>a. Modul dan kit PSBG</p> <p>b. Modul dan kit anggaran tanggap gender</p> <p>c. Panduan Model PUG tingkat kabupaten/kota</p> <p>d. Brosur, spanduk, buku saku</p> <p>e. Data dan tolok ukur pendidikan tanggap gender</p> <p>f. Buku saku tentang PUG dalam Pendidikan</p>	<p>a. SK Menteri No.060/P/2007 tentang Pokja PUG Kemdikbud</p> <p>b. Permendiknas No 84/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan</p> <p>c. SK Gubernur untuk membentuk Pokja PUG dalam pendidikan pada setiap provinsi</p>	<p>a. Pokja PUG Pusat bekerja/berfungsi</p> <p>b. Pokja PUG di 32 provinsi bekerja/berfungsi</p>

Tahun	Anggaran (Rupiah)	Tolok Ukur Keberhasilan				Data/Informasi
		Program/Kegiatan	Instrumen	Regulasi	Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	
2009	17,4 Miliar APBN	<p>a. Panduan sekolah tanggap gender (PAUD, SD, SMP, SMA/SMK dan Perguruan Tinggi)</p> <p>b. Penyusunan pesan baku/standar PUG bidang pendidikan</p> <p>c. Pelatihan anggaran tanggap gender</p> <p>d. Penyusunan model dan uji coba PUG di tingkat kabupaten/kota</p> <p>e. Penyediaan bahan penyebarluasan dan perjuangan (advokasi)</p> <p>f. Fasilitasi peningkatan kapasitas untuk 33 provinsi</p> <p>g. Uji coba dan peningkatan kapasitas di 6 kabupaten/kota</p> <p>h. Evaluasi dan pemantauan PUG</p>	<p>a. Konsep panduan sekolah tanggap gender (PAUD, SD, SMP, SMA/SMK dan Perguruan Tinggi)</p> <p>b. Kampanye media masa PUG dalam pendidikan seperti brosur, spanduk, buku saku</p> <p>c. Pedoman pelaksanaan blok grant bagi mendukung kegiatan PUG di tingkat provinsi dan kabupaten/kota</p> <p>d. Profil gender dalam pendidikan</p> <p>e. Pedoman perencanaan dan penganggaran tanggap gender</p> <p>f. Kampanye media masa nasional seperti talkshow TV dan radio</p>	<p>SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pokja PUG dalam Pendidikan</p>	<p>a. Pokja PUG Kemdikbud</p> <p>b. Pokja PUG di 33 provinsi</p> <p>c. Pokja PUG di 6 kabupaten/kota</p>	
2010	(lihat 2011)	<p>a. Perencanaan dan pemrograman pengarusutamaan gender dalam pendidikan</p> <p>b. Fasilitasi peningkatan kapasitas untuk 33 provinsi</p> <p>c. Fasilitasi peningkatan kapasitas pengarusutamaan gender bagi 12 kabupaten/kota</p> <p>d. Evaluasi PUG</p> <p>e. Orientasi teknis pengarusutamaan gender dalam pendidikan tingkat provinsi dan kabupaten/kota</p> <p>f. Koordinasi PUG tingkat pusat</p>	<p>a. Panduan sekolah tanggap gender (PAUD, SD, SMP, SMA/SMK dan Perguruan Tinggi)</p> <p>b. Pedoman pelaksanaan blok grant bagi mendukung kegiatan PUG di tingkat provinsi dan kabupaten/kota</p> <p>c. Profil gender serta kampanye media masa tentang PUG dalam Pendidikan antara lain dengan brosur, spanduk, buku saku</p>	<p>SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pokja PUG dalam Pendidikan</p>	<p>a. Pokja PUG Kemdikbud</p> <p>b. Pokja PUG di 33 provinsi</p> <p>c. Pokja PUG di 12 kabupaten/kota</p>	

Tahun	Anggaran (Rupiah)	Tolok Ukur Keberhasilan			Data/ Informasi
		Program/Kegiatan	Instrumen	Regulasi	
2011	17,4 Milyar APBN dan 6,3 milyar APBD (Jabar, Jateng dan Jatim)	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan pengarusutamaan gender dalam pendidikan b. Peningkatan kapasitas dan fasilitasi untuk 33 provinsi c. Peningkatan kapasitas dan fasilitasi untuk 54 kabupaten/kota d. Evaluasi PUG e. Orientasi teknis pengarusutamaan gender dalam pendidikan tingkat provinsi dan kabupaten/kota f. Koordinasi PUG tingkat pusat 	SK Menteri Kemdikbud tentang Pokja PUG dalam Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pokja PUG Kemdikbud b. Pokja PUG di 33 provinsi c. Pokja PUG di 54 kabupaten/kota 	

Ringkasan Kegiatan Utama Pengarusutamaan Gender:

1. Jumlah Anggaran Nasional 2002-2011 sekitar Rp 136,1 miliar dan anggaran daerah (APBD Propinsi) sekitar Rp 16,1 miliar (kebanyakan dialokasikan oleh Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur).
2. Kegiatan Utama:
 - 2002 – 2003: difokuskan pada pembentukan Pokja di Depdiknas, peningkatan kapasitas Pokja, penelitian untuk merumuskan Kertas Kerja, pelatihan GAP/POP untuk Pokja, kampanye media.
 - 2003-2006: Pengembangan kapasitas pada unit utama di Depdiknas, peningkatan kapasitas Pokja Depdiknas, Dukungan terhadap PUG di 15 provinsi, peningkatan kapasitas untuk 15 Pokja Provinsi, Pelatihan GAP/POP di 15 provinsi, melanjutkan kegiatan merumuskan Kertas Kerja di 15 propinsi.
 - 2006-2008: peningkatan kapasitas di Unit utama Depdiknas, peningkatan kapasitas Pokja Depdiknas, kampanye media, dan evaluasi PUG. Juga mendukung PUG di 32 Provinsi untuk merumuskan Pokja, peningkatan kapasitas dan diskusi meja bundar bagi para pengambil keputusan, pelatihan GAP/POP, pelatihan kurikulum dan bahan ajar yang responsif gender, Kertas Kerja dan kampanye media.
 - 2009-2011: pelatihan GAP/POP, Pelatihan anggaran gender, pelatihan audit gender, penguatan status Pokja, kampanye media. Dukungan terhadap PUG di tingkat provinsi dan kabupaten/kota seperti pelatihan kurikulum dan bahan pengajaran yang responsif gender, peningkatan kapasitas untuk Pokja di tingkat propinsi, model percontohan di kabupaten terpilih untuk model PUG unit sekolah.
3. Institusi PUG (Pokja dan *focal point*)
 - Tingkat Pusat:
 - Kelompok kerja PUG (Pokja) di tingkat pusat (Depdiknas) yang didirikan pada tahun 2002 oleh Ditjen PAUDNI sebagai kepala Pokja yang direvisi setiap tahun sampai 2006
 - Meningkatkan status Kelompok Kerja PUG yang ditandatangani oleh Departemen Pendidikan Nasional mulai tahun 2007 sampai sekarang
 - *Focal point* adalah perwakilan dari unit utama Depdiknas
 - Tingkat Provinsi:
 - Kelompok kerja PUG (Pokja) di tingkat provinsi telah dibentuk di 32 provinsi yang ditandatangani oleh beberapa Gubernur dan beberapa Kepala Dinas Pendidikan di tingkat propinsi.
 - Focal point ditugaskan oleh Kepala Bidang di Dinas Pendidikan dan wakil dari setiap bagian di Dinas Pendidikan;
 - Tingkat Kabupaten:
 - Kelompok Kerja PUG (Pokja) di tingkat kabupaten/kota telah dibentuk di 54 kabupaten/kota yang ditandatangani oleh beberapa Bupati dan Walikota dan beberapa oleh Kepala Dinas Pendidikan kabupaten /kota.
 - Setiap kabupaten memiliki 2 kecamatan sebagai model percontohan PUG di unit sekolah (PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MAN, PKBM). Misalnya Kecamatan Tempel di Kabupaten Sleman dan Kecamatan Ceper di Kabupaten Klaten.

Annex 3 Definisi & Konsep Gender

Istilah **jenis kelamin** menggambarkan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan.

Sedangkan **gender** adalah konstruk sosial dan budaya, yang menunjukkan perbedaan ciri-ciri laki dan perempuan dan dengan demikian menunjukkan pula peran dan tanggung jawab masing-masing. Oleh sebab itu, isi peran dan ciri-ciri lain yang tergantung gender akan berubah dari waktu ke waktu dan di antara lingkungan budaya yang berbeda. Konsep gender termasuk pengertian tentang sifat, kemampuan dan perilaku yang diharapkan dari perempuan maupun laki (yaitu hakekat “ke-perempuan-an” dan “ke-laki-laki-an” yang disebut feminitas dan maskulinitas). Konsep gender ini berguna juga dalam menganalisis bagaimana caranya praktek-praktek pembedaan di antara laki dan perempuan dipelihara dalam kebiasaan sehari-hari.

Tingkat kesamaan (paritas) gender berupa hitungan kuantitatif. Paritas gender di bidang pendidikan berarti jumlah anak laki-laki dan perempuan yang menerima pelayanan pendidikan sama pada setiap tingkat pendidikan dan dalam bentuk yang beragam.

Keadilan gender adalah proses yang adil untuk laki maupun perempuan. Untuk menjamin keadilan tersebut, sering kali diperlukan aturan khusus untuk mengimbangi hal-hal yang mengakibatkan perempuan dan laki tidak “bermain” pada lapangan yang sama. Misalnya, dalam satu negara, jika jumlah mahasiswa laki lebih banyak daripada jumlah mahasiswa perempuan (terutama dalam bidang sains dan teknologi) bisa diberlakukan sistem kuota dalam penerimaan mahasiswa perempuan atau aturan lain yang memihak pada perempuan (disebut aksi afirmatif). Kebijakan tersebut dapat membantu mencapai jumlah mahasiswa perempuan yang sama dengan laki atau setidaknya paling sedikit lebih banyak mahasiswa perempuan terdaftar dalam bidang tersebut.

Kesetaraan gender berarti perempuan dan laki memperoleh kesetaraan dalam keadaan, perlakuan dan kesempatan untuk mencapai seluruh potensinya, hak asasi dan martabatnya serta untuk memberi sumbangan (dan menerima manfaat) dari proses pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik. Oleh sebab itu kesetaraan gender menuntut agar kesamaan maupun perbedaan laki dan perempuan serta peran masing-masing dihargai sama tinggi oleh masyarakat. Penghargaan sama tersebut akan terjadi apabila laki dan perempuan menjadi mitra sejajar dalam rumah tangga, lingkungan dan masyarakat luas. Keadilan gender merupakan salah satu sarana untuk mencapai kesetaraan gender.

Kesetaraan gender dalam pendidikan berarti anak perempuan dan anak laki dijamin dan benar-benar diberikan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam mengakses pendidikan, proses belajar-mengajar dan berhasil dalam pendidikan bermutu baik serta bebas dari stereotip.

Pengarusutamaan gender dalam pendidikan adalah proses penilaian dampak dari suatu tindakan yang sedang dipertimbangkan/direncanakan; yaitu dampak bagi perempuan maupun lelaki. Tindakan yang dimaksud termasuk peraturan/perundangan, kebijakan atau program pada semua tingkat pendidikan. Pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi untuk menjamin bahwa kepentingan dan pengalaman perempuan maupun laki menjadi bagian integral dari proses rancangan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pendidikan sehingga anak laki dan perempuan juga perempuan dan laki-laki dewasa mendapatkan manfaat yang sama sekaligus menjamin bahwa ketidaksetaraan tidak berlanjut. Tujuan akhir pengarusutamaan gender dalam pendidikan adalah pencapaian kesetaraan gender dalam pendidikan.

Pemberdayaan menyangkut manusia, baik perempuan maupun laki, yaitu kemampuan untuk mengambil alih kendali atas hidupnya sendiri: menetapkan kepentingannya, mengembangkan keterampilan (termasuk keterampilan hidup), membangun kepercayaan diri, memecahkan masalah dan meningkatkan kemandirian. Pendidikan mendukung proses pemberdayaan, antara lain dengan mendorong anak laki dan perempuan untuk mempersoalkan adanya ketidakadilan serta bertindak untuk mengubahnya.

Perempuan dalam Pembangunan adalah konsep yang didasarkan pada kesadaran bahwa perempuan mempunyai peran penting dalam proses pembangunan. Namun demikian, pendekatan WID belum tentu bisa mengubah hubungan laki-perempuan yang bersifat bertingkat atas-bawah (hierarkis) berdasarkan

gender. WID lebih banyak mendukung terpenuhinya kebutuhan praktis kaum perempuan, seperti pengembangan keterampilan perempuan untuk mencari nafkah (*income generating*).

Gender dan Pembangunan merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada tindakan untuk mengatasi ketidaksetaraan hubungan gender dalam seluruh siklus pembangunan (kesempatan akses, proses dan hasil) yang menghambat keikutsertaan perempuan secara penuh dalam proses pembangunan maupun dalam menerima manfaat pembangunan. Konsep GAD dikembangkan dari proses “belajar dari pengalaman” terhadap program dan kegiatan WID. GAD bertujuan agar laki maupun perempuan sama-sama ikut serta dalam mengambil keputusan dan berbagi manfaat. Pendekatan ini menekankan pada usaha strategis jangka panjang untuk mencapai tujuan akhir yaitu kesetaraan gender.

Perbedaan utama antara WID dan GAD adalah bahwa selama ini proyek-proyek WID cenderung melayani kebutuhan praktis khas perempuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan sehari-hari bagi perempuan maupun keluarganya tanpa analisis gender yang menyeluruh.

Kebutuhan praktis adalah kebutuhan fisik langsung sehari-hari seperti air, tempat tinggal, pakaian dan makanan. Memenuhi kebutuhan praktis perempuan tersebut menitikberatkan pada upaya, di antaranya membebaskan kaum perempuan dari tugas mengambil air, mendorong pendidikan keterampilan dan mendukung kegiatan yang menghasilkan pendapatan sehingga mengentaskan kemiskinan yang dihadapi oleh para perempuan dan keluarganya.

Kepentingan strategis gender bersifat jangka panjang, tidak harus menyangkut fisik/materi, sering kali berhubungan dengan perubahan struktural masyarakat. Intervensi yang berdasarkan kepentingan strategis gender menitikberatkan pada isu-isu mendasar terkait dengan subordinasi perempuan (atau jarang kali subordinasi laki) dan ketidakadilan gender. Dalam bidang pendidikan, kepentingan strategis gender menitikberatkan pada penciptaan lingkungan pendidikan yang mendukung pencegahan sikap dan perilaku yang berbias gender serta mendorong pemberdayaan perempuan dewasa maupun anak agar dapat mengambilalih kendali atas hidupnya sendiri dengan menjadi agen perubahan (*change agent*) yang aktif.

Analisis gender menyelidiki perbedaan pengalaman, pengetahuan dan kegiatan antara perempuan dan laki dalam lingkup tertentu. Analisis tersebut mengkaji perbedaan-perbedaan tersebut agar kebijakan, program dan proyek bisa mengenali dan memenuhi kebutuhan perempuan dan laki yang berbeda.

Oleh karena itu, analisis gender tersebut merupakan unsur yang tak terpisahkan dari analisis kebijakan yang secara khusus melihat bagaimana kebijakan publik akan mempunyai dampak yang berbeda terhadap perempuan dan laki. Analisis ini menyadarkan bahwa kebijakan maupun pelaksanaannya tidak mungkin bersifat netral terhadap gender, terutama dalam masyarakat di mana ada peran tertentu yang melekat pada laki atau perempuan. Analisis gender biasanya didukung oleh penggunaan informasi dan data yang dipilah menurut laki-laki dan perempuan serta membutuhkan pemahaman yang baik dan kepekaan terhadap lingkup sosial-budayanya.

Di bidang pendidikan, analisis gender dapat dimasukkan ke dalam analisis kurikulum untuk menilai bagaimana suatu kurikulum tertentu dapat berdampak pada sikap belajar, motivasi serta keberhasilan anak laki dan perempuan serta bagaimana mereka memahami diri mereka sendiri.

Buta gender adalah ketidaksadaran akan peran dan tanggung jawab anak laki/laki dewasa dan anak perempuan/perempuan dewasa yang diberikan kepada mereka oleh lingkungan dalam konteks dan latar belakang sosial, budaya, ekonomi dan politik yang spesifik. Proyek, program, kebijakan dan sikap yang buta gender serta tidak memperhitungkan adanya perbedaan peran dan kebutuhan tersebut mempertahankan status quo, dan tidak membantu mengubah struktur hubungan gender yang tidak setara. Misalnya, seorang guru buta gender mungkin berpikir bahwa pendidikan sekolah bersifat netral terhadap gender, karena tidak ada perbedaan antara anak laki dan perempuan dalam proses belajar mengajar. Namun, dalam kenyataannya, sikap stereotip dan bias gender di alam bawah sadar guru dapat mempengaruhi praktek di kelas dan menghasilkan perlakuan yang berbeda terhadap anak laki dan perempuan oleh guru yang bersangkutan.

Laporan anggaran gender adalah laporan pertanggungjawaban anggaran yang memuat pertanggungjawaban gender yang dihasilkan oleh suatu lembaga pemerintah untuk menunjukkan apa yang dilakukan program dan anggaran tersebut terhadap gender.

Netral terhadap gender adalah kata sifat yang menunjukkan sifat bahasa tertentu. Penggunaan bahasa netral terhadap gender mensyaratkan bahwa kata-kata yang kita gunakan tidak bermuatan bias terhadap perempuan atau laki. Pilihan kata yang tidak tepat memang dapat diartikan sebagai bias, diskriminatif atau merendahkan martabat, walaupun tidak dimaksudkan demikian. Contoh dalam bahasa Inggris, yaitu penggunaan kata *humankind* (manusia) yang mencakup perempuan maupun laki dibandingkan dengan istilah *mankind* (artinya manusia tapi *man*=laki) yang tampaknya tidak mencakup perempuan.

Dalam hal ini **analisis gender** amat penting, karena sistem/lembaga budaya, sosial, politik dan ekonomi yang ada belum tentu netral terhadap gender. Keyakinan bahwa pendidikan sekolah bersifat netral terhadap gender justru didasarkan pada kebutaan gender.

Kesadaran gender adalah kesadaran bahwa memang ada perbedaan sosial dan budaya antara perempuan dan laki dan kesadaran bahwa perbedaan tersebut merupakan perilaku yang diajarkan oleh masyarakat. Perbedaan tersebut mempengaruhi kemampuan perempuan untuk memperoleh dan mengatur kesempatan, termasuk kesempatan memperoleh dan mengatur sumber daya. Kepala sekolah yang sadar gender akan mengerti bahwa dia harus memberi perhatian khusus kepada cara pendidikan disampaikan kepada murid laki maupun perempuan karena masyarakat – dalam hal ini, guru - mungkin akan berbeda dalam menghargai murid laki dan murid perempuan. Hal ini bisa berdampak terhadap pembelajaran mereka.

Kepekaan Gender mencakup kemampuan menyadari dan menyadarkan orang lain tentang adanya perbedaan gender, termasuk isu-isu dan ketidaksetaraan gender serta kemampuan untuk memasukkan perbedaan tersebut ke dalam strategi dan tindakan. Namun kepekaan gender tidak berarti orang yang bersifat peka terhadap gender juga bersikap “tanggap gender” karena kepekaan gender tidak menjamin bahwa orang yang bersangkutan akan bertindak.

Kebijakan dan intervensi yang bersifat **tanggap gender** terkait dengan tindakan konkrit yang mencerminkan kebutuhan, harapan dan kemampuan khas bagi laki dan perempuan. Namun tindakan tanggap gender tersebut belum tentu menantang bias dan diskriminasi dalam kebijakan, praktek, gagasan dan keyakinan. Umpamanya kalau ada tempat di mana perempuan menghadapi kendala mereka tidak boleh keluar rumah pada malam hari, maka intervensi yang tanggap gender akan menjadwalkan pelatihan pada saat mereka dapat hadir yaitu pada siang hari. Intervensi semacam ini melayani kebutuhan perempuan (akan pelatihan) namun tidak menantang gagasan diskriminatif, yaitu bahwa perempuan tidak boleh keluar rumah pada jam-jam tertentu.

Kebijakan dan intervensi yang bersifat **transformasi gender** menantang bias dan diskriminasi dalam kebijakan, praktek, gagasan dan keyakinan. Pendekatan ini bekerjasama dengan perempuan maupun laki untuk mengusahakan transformasi (perubahan mendasar) terhadap ketidaksetaraan dalam hubungan gender melalui upaya penyusunan kembali hubungan/pembagian kuasa antar perempuan dan laki supaya lebih setara.

Diskriminasi gender dimaksud segala pembedaan, penghalangan atau pembatasan yang berdasarkan pada peran dan norma gender yang dibangun secara sosial atau budaya yang menghalangi seseorang untuk memenuhi hak asasi manusia. Perempuan yang mengalami diskriminasi didorong untuk tidak melanjutkan pendidikannya atau tidak mengambil jurusan yang dianggap maskulin, seperti teknik mesin. Laki juga bisa mengalami diskriminasi dalam arti yang sama, umpamanya kalau mereka diejek karena belajar di “bidang yang feminin” seperti keperawatan.

Indeks Paritas Gender dihitung sebagai perbandingan jumlah perempuan per laki dalam bidang tertentu (atau perbandingan jumlah laki per perempuan). Nilai GPI sebesar 1 menunjukkan paritas, yaitu jumlah/nilai perempuan sama dengan laki. Nilai GPI lebih besar atau lebih kecil dari 1 menunjukkan jumlah/nilai perempuan dan laki tidak sama.

Namun demikian paritas gender dapat terjadi apabila jumlah peserta perempuan maupun laki dalam bidang yang bersangkutan sangat kecil (seperti halnya pendidikan anak usia dini dan pendidikan menengah). Oleh sebab itu, menjadi sangat penting untuk melihat jumlah peserta absolut juga pada saat menghitung indek paritas.

Anggaran Tanggap Gender mengacu kepada analisis tentang dampak dari realisasi pendapatan dan pengeluaran pemerintah terhadap anak perempuan/perempuan dewasa dibandingkan dengan dampak terhadap anak lelaki/lelaki dewasa. ATG tidak menuntut bahwa anggaran harus dibagi menjadi anggaran perempuan dan anggaran laki. ATG juga tidak semata bertujuan menambah jumlah pengeluaran untuk program khusus perempuan. Melainkan ATG dapat membantu pemerintah memutuskan kebijakan mana yang perlu disesuaikan serta alokasi anggaran mana yang harus diubah untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

Data yang dipilah menurut jenis kelamin mengacu kepada data yang dikelompokkan menurut jenis kelamin sehingga tampak informasi tersendiri tentang perempuan dan laki. Data yang dipilah menurut jenis kelamin dapat mencerminkan peran, kenyataan dan keadaan umum dari perempuan dan laki dalam masyarakat. Sebagai contoh, tingkat ketunaaksaraan, tingkat partisipasi sekolah, tingkat melanjutkan sekolah, tingkat putus sekolah, tingkat kepemilikan usaha, tingkat partisipasi dalam angkatan kerja, perbedaan tingkat upah, jumlah orang yang dinafkahi (dependensi), tingkat kepemilikan rumah dan tanah, tingkat kredit dan hutang.

Sumber: UNGEI dan KPPPA

Annex 4 Ringkasan Laporan Studi Kasus Kabupaten/kota

Sleman (Yogyakarta)

Pendahuluan

Kabupaten Sleman merupakan salah satu Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan luas wilayah 57.482 ha atau 574,82 km² atau sekitar 18% dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara administratif Kabupaten Sleman terdiri atas 17 kecamatan, 86 desa, dan 1.212 padukuhan (BAPPEDA Kabupaten Sleman, 2010). Jumlah penduduk Kabupaten Sleman pada tahun 2009 ada 1.053.500 jiwa, terdiri atas laki-laki sebanyak 527.324 jiwa (49,95%) dan perempuan 526.176 jiwa (50,05%) (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2010). Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SD tahun 2009 sebesar 116,40%, terdiri atas APK laki-laki 142,68%, APK perempuan 96,85%. APK SMP rata-rata sebesar 115,87%, terdiri atas APK laki-laki 130,24 dan APK perempuan 102,71%. APK SMA/SMK sebesar 75,73%, terdiri atas APK laki-laki 86,85% dan APK perempuan 68,83%. Berdasarkan data tersebut terlihat adanya kesenjangan gender pada APK mulai jenjang SD hingga SMA/SMK dimana angka partisipasi kasar perempuan pada semua jenjang pendidikan lebih tertinggal dibandingkan laki-laki. Kondisi kesenjangan gender ini juga terjadi pada Angka Partisipasi Murni (APM) pada semua jenjang pendidikan. APM SD tahun 2009 rata-rata sebesar 99,16%, terdiri atas APM laki-laki 121,99% dan APM perempuan 83,35%. APM SMP rata-rata 81,0% terdiri atas APM laki-laki sebesar 90,93% dan APM perempuan 72,66%. APM SMA/SMK sebesar 53,89%, terdiri atas APM laki-laki 61,03% dan APM perempuan 48,51%.

Tinjauan Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan

a. Pengarusutamaan Gender di Provinsi

Gender Mainstreaming bidang pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta mulai dilaksanakan secara intensif sejak tahun 2006 hingga sekarang (2011). Kegiatan tersebut mulai sejak adanya *block grand* dana APBN dari Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2006 sebesar Rp 300 juta yang kemudian diberikan secara terus menerus dengan besaran dana Rp 300 juta pada tahun 2007 hingga 2008. Mulai tahun 2009 hingga sekarang besaran dana APBN menurun menjadi Rp 200 Juta. Sejak tahun 2008 pemerintah DIY memberikan dana APBD tingkat provinsi sebesar Rp 50 Juta dan dukungan dana APBD tersebut meningkat menjadi Rp 100 juta pada tahun 2009 dan Rp 220 Juta pada tahun 2010.

Struktur Organisasi Pengarusutamaan Gender dalam Pokja Pendidikan

Sejak tahun 2009 telah terbentuk Pokja PUG pendidikan pada tingkat provinsi dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 122 Tahun 2009 tanggal 29 Februari 2009 tentang Pembentukan Personalia dan Tim Sekretariat Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dan Anak Bidang Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2009. Ketua pokja PUG pendidikan dijabat oleh Kabid PNFI Dinas Dikpora Prov DIY. Sedangkan penanggung jawab Pokja PUG dan Anak Bidang Pendidikan adalah Kepala Dinas Dikpora Provinsi DIY. Selain itu, pada struktur kelembagaan pokja PUG dan anak bidang pendidikan terdapat penasehat yang dijabat oleh Ketua Tim Koordinasi Pembangunan Berperspektif Gender Provinsi DIY dan Komisi D DPRD Provinsi DIY.

Surat Keputusan tentang Pokja PUG dan Anak Bidang Pendidikan tersebut di atas di-update pada tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Provinsi DIY Nomor 019 Tahun 2010 Tanggal 8 Januari 2010 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY Nomor 192 Tahun 2011 Tanggal 11 Maret Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Tim Sekretariat Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2011. Perubahan struktur organisasi tersebut dilakukan karena adanya perpindahan pegawai antar Satuan kerja Perangkat Daerah.

Keanggotaan Pokja PUG

Pada tahun 2009, keanggotaan pokja di tingkat Provinsi DIY terdiri atas Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan dan Standarisasi Dinas Dikpora Provinsi DIY sebagai wakil ketua, Kepala Seksi (Kasi) Dikmas Bidang PNFI sebagai sekretaris, dan staf Bidang PNFI sebagai bendahara. Pada struktur organisasi tersebut terdapat jabatan tim ahli yang berasal dari unsur Pusat Studi Wanita Perguruan Tinggi di Yogyakarta. Secara keseluruhan, keanggotaan dan kepengurusan Pokja PUG dan anak bidang pendidikan telah melibatkan berbagai macam stakeholders baik pada Dinas Pendidikan maupun lembaga terkait seperti Badan Pusat Statistik, BAPPEDA, BPKB, Badan Pemberdayaan Perempuan dan masyarakat, serta PKK. Pada struktur kelembagaan tersebut juga ada perwakilan dari setiap kabupaten/kota di Provinsi DIY. (SK pokja PUG dan Anak Bidang Pendidikan tahun 2009, tahun 2010 dan tahun 2011 terlampir)

b. Pengarusutamaan Gender dalam pendidikan di Kabupaten Sleman

Gender mainstreaming di Kabupaten Sleman mulai dilaksanakan tahun 2005 dan 2006 dengan fasilitasi kegiatan yang di block grand-kan dari tingkat Provinsi DIY ke tingkat kabupaten Sleman melalui uji coba PUG pendidikan dengan dukungan dana sebesar masing-masing Rp 10 Juta. Mulai tahun 2007, ada dukungan dana APBD dari tingkat Kabupaten Sleman sebesar Rp 40.100.000,00, tahun 2008 sebesar Rp 25.900.000,00, tahun 2009 sebesar Rp 140.450.000,00. Mulai tahun 2010, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sleman mendapatkan dukungan dana sebesar Rp100 Juta rupiah dari Kemendiknas untuk uji coba PUG pendidikan dan pada tahun 2011 dukungan dana APBN tidak meningkat. Pada saat yang bersamaan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sleman mengalokasikan anggaran sebesar Rp 29.550.000,00 dana APBD tahun 2010, dan Rp 30.000.000,00 tahun 2011.

Struktur Organisasi PUG dalam Pokja Pendidikan

Pada tingkat Kabupaten Sleman, telah terbentuk Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Nomor 092a/KPTS/2005 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Bidang pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2005 tanggal 30 Juni 2005.

Pada tahun 2010 dilakukan pembaharuan SK melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Nomor 083/KPTS/2010 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan gender Bidang Pendidikan Kabupaten Sleman tanggal 24 Maret 2010 (SK Pokja terlampir).

Pada tahun 2005, Ketua pokja PUG dijabat oleh Kabid. PLSPD dan penanggung jawab adalah Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Sleman.

Pada tahun 2010, Ketua pokja PUG pendidikan dijabat oleh Kabid Pemberdayaan PNFI Dinas Dikpora Kabupaten Sleman. Sedangkan penanggung jawab Pokja PUG adalah Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Sleman.

Keanggotaan Pokja PUG

Keanggotaan pokja di tingkat Kabupaten Sleman terdiri atas Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman sebagai wakil ketua, Kasi Pendidikan Masyarakat sebagai sekretaris. Pada struktur organisasi tersebut terdapat jabatan Koordinator Tendik yang dijabat oleh Kabid Tenaga Pendidikan dan Kependidikan, Koordinator Kursis yang dijabat oleh Kabid. Pembinaan Kurikulum dan Kemuridan, Koordinator Srapras yang dijabat oleh Kabid. Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta koordinator Pemuda dan Olahraga yang dijabat oleh Kabid. Pemuda dan Olah Raga. Sedangkan anggota pokja dijabat oleh Kasubag Perencanaan dan Evaluasi, Kasi pendidikan Anak Usia Dini, Kasi pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Pengawas SMP dan SMA, pengawas TK/SD.

Selain anggota dari internal Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, pada kepengurusan pokja tersebut juga melibatkan stakeholders dari dinas terkait, yaitu Subdit. Pemberdayaan Perempuan, Badan KB, PP dan PA, Kepala SKB Sleman, Kabid. SDM BAPPEDA Sleman, Kasi Statistik Sosial, BPS Sleman, Kasi Mapenda Kantor Kementerian Agama Kab. Sleman, Kepala Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan Kesra Setda Kabupaten Sleman dan Ketua Ikatan penilik PNFI Kabupaten Sleman.

Rincian PUG di Kabupaten/Kota dalam Program Pendidikan selama Dasawarsa Terakhir

Aktivitas Gender Mainstreaming di tingkat provinsi DIY:

Aktivitas pokja *Gender Mainstreaming* di tingkat DIY mencakup hal-hal sebagai berikut:

Tahun 2006:

- 3.1. *Round Table Discussion* Kab/Kota
- 3.2. Pelatihan Sensitivitas Gender Bagi Stakeholders
- 3.3. Fasilitasi Penerapan Pendidikan Berperspektif Gender dengan menggunakan Bahan Ajar Responsif Gender pada TK/KB, SD, SMP, SMA, SMK, PKBM.
- 3.4. Sosialisasi PUG melalui TV
- 3.5. Publikasi artikel PUG melalui media cetak
- 3.6. Monitoring dan Pengawasan
- 3.7. Pengumpulan dan penyempurnaan Data Terpilah
- 3.8. Diklat GAP dan POP

Kegiatan tahun 2006 mendapat dukungan dana APBN dari Kemendiknas sebesar Rp 300 Juta.

Tahun 2007:

- 3.1. *Round Table Discussion* Kab/Kota
- 3.2. Pelatihan Sensitivitas Gender Bagi Stakeholders
- 3.3. Fasilitasi Penerapan Pendidikan Berperspektif Gender dengan menggunakan Bahan Ajar Responsif Gender pada TK/KB, SD, SMP, SMA, SMK, PKBM
- 3.4. Sosialisasi PUG melalui TV
- 3.5. Publikasi artikel PUG melalui media cetak
- 3.6. Monitoring dan Pengawasan
- 3.7. Pengumpulan dan penyempurnaan Data Terpilah
- 3.8. Diklat GAP dan POP

Kegiatan PUG bidang pendidikan pada tahun 2007 mendapat dukungan dana APBN dari Kemendiknas sebesar Rp 300 Juta.

Tahun 2008 - Permasalahan yang ditangani selama tahun anggaran 2008 melalui seleksi kegiatan yang menghasilkan keluaran terukur dan dukungan keuangan dapat dilihat berikut ini:

No	Isu	Kegiatan	Sasaran/Target	Output	Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Masih lemahnya koordinasi lintas sektoral dalam pelaksanaan PUG pendidikan	<i>Round Table Discussion</i> Kab/Kota	Koordinasi rutin bulanan, koordinasi lintas sektoral	Koordinasi lintas sektor yang efektif	APBN 300 Juta
2	Belum efektifnya Pokja PUG Pendidikan di Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen Daerah • <i>Rond Table Discussion</i> Kab/Kota tentang peningkatan Komitmen Para pengambil Kebijakan Kabupaten/ Kota 	Efektifnya peran Pokja di Kabupaten/Kota dan Komitmen daerah (SK Bupati Berikut APBD). <u>Peserta</u> : Pokja PUG 5 Kabupaten/Kota @ 20 orang= 100 orang	Program kerja Pokja Kabupaten/Kota dan <i>position paper</i>	APBD 50 juta

No	Isu	Kegiatan	Sasaran/Target	Output	Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Masih ada program yang belum berjalan optimal	Monitoring dan Pengawasan	Efektifnya kegiatan pokja kabupaten/kota di 5 kabupaten/ kota	Efektif dan peningkatan kualitas program	
4	Masih rendahnya wawasan gender di persekolahan formal dan non formal, pelatihan yang dilakukan belum sampai ke lingkup sekolah	Pelatihan sensitivitas gender bagi stakeholders	Meningkatnya wawasan dan komitmen stakeholders terhadap PUG Pendidikan. <u>Peserta:</u> 30 orang kepala TK/KB, SD, SMP, SMA, SMK, dan 5 orang komite sekolah SMP	Komitmen (kesediaan menerapkan pendidikan berwawasan gender di lembaga yang dipimpin)	
5	Belum ditemukan pola yang efektif dalam penerapan pendidikan berperspektif gender dengan bahan ajar responsif gender	Fasilitasi penerapan Pendidikan berperspektif gender dengan menggunakan bahan ajar responsif gender pada jenjang TK/KB, SD, SMP, SMA, SMK, PKBM	Ditemukannya pola implementasi pembelajaran responsif gender di pendidikan formal dan non formal. <u>Peserta:</u> TK/KB, SD, SMP, SMA, SMK, PKBM di 1 kecamatan setiap kabupaten/kota= 30 lembaga	Pola pembelajaran dengan bahan ajar responsif gender	
6	Masih terjadi bias gender dalam pemilihan jurusan/bidang studi murid SMP yang melanjutkan ke tingkat menengah atas dan murid SMA yang melanjutkan ke pendidikan tinggi	Sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender bagi guru BP untuk pembimbingan pemilihan bidang studi murid SMP dan SMA	Dihasilkan rumusan awal pola pembimbingan orientasi karir responsif gender di SMP dan SMA. <u>Peserta:</u> Guru BP SMP di 5 kabupaten/kota @ 10 orang= 50 orang, Guru BP SMA di 5 kabupaten/kota @ 4 orang= 20 orang	Guru BP mampu memberikan dan merumuskan pola bimbingan pemilihan bidang studi tingkat menengah atas yang responsif gender	
7	Masih terjadi bias gender dalam masyarakat dengan berbagai bentuknya	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi PUG Pendidikan melalui TV Buku kecil bagi murid: pencegahan kekerasan di sekolah, trafiking, Kesehatan Reproduksi Wanita 	Meningkatkan wawasan dan kepedulian masyarakat terhadap isu gender	Respon positif masyarakat terhadap PUG	
8	Perlunya updating data, kesamaan format antara lembaga pemilik data dan BPS	Data terpilah (pengumpulan dan penyempurnaan data terpilah)	Update data <i>position paper</i>	Peta Gender	
9	Kebijakan maupun perencanaan program belum ditelaah responsif gender. Hasil pelatihan masih sebatas pengetahuan dan simulasi	Resources, Bimbingan teknis GAP dan POP, Lokakarya kajian Perencanaan program	Analisis perencanaan pendidikan responsif gender. <u>Peserta:</u> 20 orang perencana program pendidikan (Dinas Pendidikan provinsi, kabupaten/kota, UPT Pusat di daerah, UPTD Dinas pendidikan)	Analisis Perencanaan Program Pendidikan responsif gender	

Program dan Kegiatan Pokja PUG Pendidikan Tahun 2009

1. Pelatihan Sekolah Berwawasan Gender (PSBG)
2. Sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender bagi stakeholders untuk menghasilkan panduan dan perangkat implementasi Sekolah Berwawasan Gender
3. Rintisan Implementasi Model PSBG pada jenjang TK/KB, SD, SMP, SMA, SMK, PKBM
4. KIE PUG pendidikan
5. Pelatihan Gender Budgeting
6. Lokakarya kajian Perencanaan program
7. Pertemuan Rutin Pokja
8. Monitoring dan Evaluasi

Dukungan dana APBN pada tahun 2009 sebesar Rp 200 Juta dan APBD Rp 100 Juta.

Program dan Kegiatan Pokja PUG Pendidikan Tahun 2010

1. Sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender bagi stakeholders
2. KIE PUG pendidikan
3. Pelatihan Implementasi Sekolah Berwawasan Gender (PSBG)
4. Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (Gender Budgeting)
5. Rintisan Implementasi Model PSBG di 30 lembaga pendidikan jenjang TK/KB, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, dan PKBM
6. Fasilitasi Implementasi Sekolah Berwawasan gender
7. *Capacity Building* (Penguatan Pokja) melalui pertemuan rutin bertema
8. Sosialisasi Pengembangan Bahan Ajar Berwawasan keadilan dan kesetaraan gender
9. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan

Dukungan dana APBN pada tahun 2010 sebesar Rp 200 Juta dan APBD Rp 220 Juta.

Program dan Kegiatan Pokja PUG Pendidikan Tahun 2011

1. Sosialisasi PUG Pendidikan
2. Pelatihan PPRG
3. *Training of Trainer* (TOT) calon nara sumber ahli PUG
4. Pertemuan rutin Pokja
5. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program PUG Pendidikan

Dukungan dana APBN pada tahun 2011 sebesar Rp 200 Juta.

Satu Dekade PUG Bidang Pendidikan di Kabupaten Sleman

PUG pendidikan di Kabupaten Sleman mulai dilaksanakan pada tahun 2005 dengan fasilitasi kegiatan yang di-*block grand*-kan dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten melalui uji coba PUG pendidikan. Kegiatan PUG pendidikan sejak Tahun 2005 hingga 2011 digambarkan sebagai berikut:

No	Tahun	Kegiatan	Capaian hasil	Dana (juta Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2005	Sosialisasi PUG dari Dinas Pendidikan Prov. DIY	Terbentuknya pokja Kabupaten	30,0/APBN
2	2006	Round Table Discussion	Tersusun <i>Position Paper</i> dan renja Gender Kab. Sleman	10,0/APBD Prov
3	2007	Penyusunan Bahan Ajar Responsif Gender	Bahan Ajar responsif Gender	20,1/APBD Kab.
	2007	Sosialisasi PUG	Sosialisasi PUG guru BP	20,0/ APBD Kab
4	2008	Penyusunan Bahan Ajar Responsif Gender	Bahan ajar PKn, Bahasa Indonesia	25,9/ APBD Kab
	2008	Sosialisasi PUG	Tersosialisasi PUG pada Kepala sekolah	
5	2009	Penyusunan Bahan Ajar Responsif Gender	Bahan ajar PKn, Bahasa Indonesia	100,0/ APBD Kab
	2009	Sosialisasi PUG Bidang Pendidikan	Tersosialisasi PUG Bidang Pendidikan pada pemangku kegiatan	
	2009	Round Table Discussion	Tersusun <i>Position Paper</i> 2009-2014	
	2009	Penyusunan Bahan Ajar Responsif Gender	Bahan ajar PKn, Bahasa Indonesia	40,45/ APBD Kab
6	2010	Penyusunan Bahan Ajar Responsif Gender	Bahan ajar Matematika, Bahasa Inggris	100,0/APBN
		Workshop <i>Focus Group Discussion</i>	Program kerja dan komitmen Pokja PUG Bidang pendidikan	
		Pembentukan Kawasan Satuan pendidikan Berwawasan gender	Terbentuknya Kawasan SPBG Kecamatan Tempel, di PAUD Assholikhin, TK Pertiwi, SD Klegung I, SMP I Tempel, SMA Pondokrejo, SMK I Tempel	
		PPRG	Program kerja dan komitmen PUG bidang pendidikan	
		Rapat Pokja	Perencanaan program dan evaluasi	
	2010	Penyusunan Bahan Ajar Responsif Gender	Bahan ajar Matematika, Bahasa Inggris	29,55/ APBD Kab
7	2011	Workshop Focus Group Discussion	Program kerja dan komitmen Pokja PUG pendidikan	100,0/APBN
		Pembentukan Kawasan Satuan pendidikan Berwawasan gender	Terbentuknya Kawasan SPBG Kecamatan Sleman, di PAUD Putra Sembada, TK ABA, SD Sleman 5, SMP N 2 Sleman, SMA N 1 Pandowoharjo, SMK 1 Tempel	
		PPRG	Tersosialisasinya Penganggaran responsif Gender pada UPT	
		Rapat Pokja	Perencanaan Program dan Evaluasi	
	2011	Penyusunan Bahan Ajar Responsif Gender	Bahan ajar Agama	30,0/ APBD Kab

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tujuan program PUG pendidikan adalah untuk membangun sensitivitas gender stakeholders pendidikan mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten kota dan satuan pendidikan formal, non formal maupun informal untuk selanjutnya mengujicobakan pelaksanaan PUG pendidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Kegiatan sosialisasi ditindaklanjuti dengan uji coba pelaksanaan PUG di satuan pendidikan mulai tahun 2010 dan 2011. Pada tahun 2010, kegiatan dilakukan di Kecamatan Tempel, mencakup 7 SPBG (Satuan Pendidikan berwawasan Gender) yaitu PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, PKBM. Pada tahun 2011 uji coba dilakukan di Kecamatan Sleman, mencakup 7 SPBG.

Hasil pembina pada SPBG adalah: adanya kemampuan guru/tenaga pendidik untuk mengintegrasikan kesetaraan gender pada materi bahan ajar dan proses pembelajaran. Penyusunan bahan ajar yang responsif gender sudah dilakukan sejak tahun 2008 yaitu dimulai dari mata pelajaran PKn dan Bahasa Indonesia untuk semua tingkatan. Pada tahun 2009 diperluas ke mata pelajaran IPA dan IPS, dan pada tahun 2010 diperluas ke mata pelajaran Matematika dan Bahasa Inggris. Pada tahun 2011 mulai memberanikan diri menyentuh pelajaran agama. Diharapkan kemampuan tersebut dapat mengimbas ke satuan pendidikan lain, yaitu: TK, PAUD, dan SMP.

Kelompok sasaran PUG dalam Pendidikan adalah

- Stakeholders pendidikan mulai tingkat provinsi, maupun kabupaten kota.
- Kepala sekolah pada satuan pendidikan yang digunakan sebagai daerah uji coba implementasi PUG.
- Guru pada satuan pendidikan yang digunakan sebagai daerah uji coba implementasi PUG.
- Komite sekolah dan orang tua murid.

Rangkuman pencapaian/dampak dari program PUG sampai kini dan praktek terbaik dari program PUG

- a. Hasil dari pelaksanaan PUG pendidikan di tingkat provinsi DIY adalah munculnya kesadaran tentang pentingnya nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender pada kalangan *policy makers* hingga muncul komitmen untuk memberikan dukungan dana APBD tingkat 1 (provinsi) dan APBD tingkat 2 (Kabupaten).
- b. Pada tingkat provinsi, dukungan dana APBD mulai diberikan pada tahun 2008 (tahun ke-tiga pemberian dana APBN) dengan dana APBD sebesar Rp 50 Juta. Dukungan dana APBD tersebut terus mengalami peningkatan menjadi Rp 100 Juta pada tahun 2009, Rp 220 juta pada tahun 2010.
- c. Model PUG yang diterapkan di tingkat provinsi diadopsi di tingkat kabupaten dengan fokus utama kegiatan adalah mengimplementasikan PUG pada tingkat satuan pendidikan formal, non formal maupun informal. Dilihat dari perkembangannya dari tahun ke tahun, maka luas cakupan program semakin melebar dari semula diujicobakan pada satu kecamatan, sekarang sudah diimplementasikan di sekolah uji coba pada 2 kecamatan. Integrasi perspektif gender juga mengalami perluasan dari semula hanya pada mata pelajaran PKn dan Bahasa Indonesia, meluas ke Matematika dan bahasa Inggris, dan sekarang sudah menyentuh bidang Agama.
- d. Untuk mempermudah implementasi PUG pada satuan pendidikan, pada tahun 2011 telah disusun "Modul Pengarusutamaan Gender pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Sleman". Modul tersebut berisi tentang Gender bidang Pendidikan, Pendidikan Responsif Gender, Manajemen Sekolah Berbasis Gender, Contoh Silabus, RPP, dan bahan ajar responsif gender untuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Ilmu Pengetahuan Sosial, Matematika, Bahasa Inggris, Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia, Pendidikan Kesetaraan, dan istilah-istilah terkait Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan.
- e. Hal-hal yang sudah dilakukan pada tingkat satuan pendidikan formal, non formal maupun informal antara lain: menyusun silabus dan rencana pembelajaran pada beberapa mata pelajaran responsif gender, membuat spanduk/pamflet untuk mengingatkan pentingnya integrasi gender pada satuan pendidikan tersebut, menyusun data pendidikan pada satuan pendidikan terpilah menurut jenis kelamin, menyediakan fasilitas kamar mandi dengan memisahkan kamar mandi bagi perempuan dan laki-laki.

- f. Pemerintah tingkat provinsi mensinergikan bantuan anggaran dari tingkat nasional dengan anggaran daerah. Cara yang dilakukan adalah membuat pola penggunaan keuangan yang berbeda antara dana dari tingkat nasional dengan dana daerah. Dukungan dana APBN untuk PUG pendidikan digunakan untuk *policy maker*-nya, yaitu untuk diklat kepala sekolah. Sedangkan dana APBD digunakan untuk kegiatan pada Satuan Pendidikan, mulai dari tenaga pendidik (guru) maupun tenaga kependidikan (TU).

Kesimpulan

Pencarian fakta mengidentifikasi tantangan dan rekomendasi (termasuk kebijakan, sistem, kapasitas, pencarian sumber daya dll.) guna memperkuat PUG dalam pendidikan, baik di Kemdikbud dan Kemenag

- a. Tantangan yang dihadapi untuk optimalisasi PUG pendidikan adalah: PUG pendidikan mestinya masuk ke semua jenjang, jalur maupun jenis pendidikan. Mengingat koordinator pelaksanaan PUG pendidikan dikoordinasikan oeg PNFI, maka daerah mengalami kesulitan untuk mengkoordinasikan dengan unit kerja lain di luar PNFI.
- b. Rekomendasi:
- 1) Pada masing-masing Direktorat di tingkat Kemendikbud harus ada fasilitasi dana untuk mendorong agar PUG di masing-masing jenjang, jalur dan jenis pendidikan bisa berjalan secara optimal, mulai dari layanan pendidikan PAUD, satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs), satuan pendidikan menengah (SMA/SMK/MA) hingga Perguruan Tinggi.
 - 2) Struktur organisasi pokja PUG pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten perlu direformasi dengan menempatkan penanganan PUG pada bidang Perencanaan Dinas Pendidikan tingkat Provinsi ataupun Kabupaten/Kota sebagai koordinator pelaksana PUG pendidikan.
 - 3) Perlu disusun instrumen untuk penyusunan basis data pendidikan terpilah menurut jenis kelamin disertai dengan pelatihan bagi perencana pendidikan di daerah tentang cara-cara mengolah data tersebut sebagai dasar perencanaan pembangunan pendidikan responsif gender.
 - 4) Mengingat cakupan penangan PUG pada tingkat satuan pendidikan sangatlah luas, maka *capacity building* perlu dioptimalkan dengan melatih SDM pada lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi guru seperti FKIP, P4TK, BDK (pada Kemennag), dstnya.
 - 5) Mengingat terbatasnya kapasitas SDM di tingkat pemerintah daerah dalam mempersiapkan SDM responsif gender, maka keberadaan Pusat Studi Wanita/Pusat Studi Gender perlu dioptimalkan sebagai mitra untuk melakukan *capacity building* maupun advokasi, khususnya dalam mempersiapkan kapasitas lembaga dan SDM daerah responsif gender.

Klaten (Jawa Tengah)

Pendahuluan

Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kabupaten Klaten dibagi menjadi 26 kecamatan, 391 desa dan 10 kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan 65.556 ha (655,56 km²) atau 2,014% dari luas Propinsi Jawa Tengah, yang luasnya 3.254.412 ha.

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kabupaten Klaten (angka sementara) adalah 1.129.862 jiwa, terdiri atas penduduk bertempat tinggal tetap sebanyak 1.129.169 jiwa dan penduduk bertempat tinggal tidak tetap sebanyak 693 jiwa. Penduduk yang bertempat tinggal tetap terdiri atas penduduk laki-laki sebanyak 554.094 jiwa dan perempuan sebanyak 575.075 jiwa. Perbandingan laki-laki dan perempuan (*sex ratio*) di Kabupaten Klaten adalah sebesar 96,35 persen. Hal ini menunjukkan penduduk perempuan di Kabupaten Klaten lebih banyak dibanding penduduk laki-laki, dengan perbandingan dari setiap 100 penduduk perempuan hanya terdapat 96 penduduk laki-laki. Seluruh kecamatan di Kabupaten Klaten juga memiliki *sex ratio* di bawah 100, yang berkisar antara 93,19 sampai 98,79 persen. (BPS Kabupaten Klaten, 2010).

Tinjauan Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan

a. Pengarusutamaan Gender di Provinsi

Gender Mainstreaming bidang pendidikan di Provinsi Jawa Tengah mulai dilaksanakan secara intensif sejak tahun 2003 hingga sekarang (2011). Kegiatan tersebut mulai dilakukan sejak adanya *block grand* dana APBN dari Kementerian Pendidikan Nasional.

Tabel 1. Dukungan dana APBN dan APBD untuk PUG Pendidikan

NO	TAHUN	APBD (Rp)	APBN (Rp)
1	2003	207.191.000	-
2	2004	715.687.000	470.290.000
3	2005	1.090.046.000	529.800.000
4	2006	1.375.000.000	559.800.000
5	2007	1.352.000.000	315.000.000
6	2008	1.500.000.000	450.000.000
7	2009	2.050.000.000	Belum ada info (menyusul)
8	2010	3.125.000.000	200.000.000
9	2011	3.487.500.000	200.000.000

Program dan kegiatan PUG Bidang Pendidikan Provinsi Jawa Tengah disusun dengan mengacu pada arah dan kebijakan PUG Departemen Pendidikan Nasional dan Renstra Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008.

Jenis program meliputi: (a) *Capacity Building*; (b) Rintisan Model Pendidikan Berperspektif Gender; (c) Rintisan Model Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender; (d) Fasilitasi Pelaksanaan Program PUG Pendidikan di Perguruan Tinggi.

Kegiatan *Capacity Building* meliputi: (a) *Round Table Discussion* PUG Pendidikan Provinsi–Kabupaten/Kota; (b) Pelatihan *Gender Analysis Pathway*; (c) Pelatihan Sensitivitas Gender; (d) Sosialisasi Bahan Ajar Responsif Gender; (e) Advokasi dan pendampingan Penyusunan *Position Paper* PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota; (f) Kelompok Kerja PUG Bidang Pendidikan Provinsi Jawa Tengah; (g) Penyusunan Media KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi); (h) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Rintisan Model Pendidikan Berperspektif Gender meliputi kegiatan-kegiatan: (a) Penyusunan dan Penggandaan Modul dan Suplemen Modul Penyadaran Gender bagi pendidik; (b) Pelatihan/TOT calon fasilitator pendidikan berperspektif gender; (c) BinteK dan Fasilitasi Pelaksanaan Rintisan Model Pendidikan Berperspektif Gender; (d) Monitoring dan evaluasi.

Rintisan Model Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender meliputi kegiatan-kegiatan: (a) Penyusunan dan Penggandaan Modul Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender bagi pendidik; (b) Pelatihan/TOT calon fasilitator pencegahan kekerasan berbasis gender; (c) BinteK dan Fasilitasi Pelaksanaan Rintisan Model Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender; (d) Monitoring dan evaluasi.

Fasilitasi Pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan di Perguruan Tinggi meliputi kegiatan: pelatihan sensitivitas gender bagi dosen, integrasi gender dalam mata kuliah dan pelatihan gender bagi mahasiswa.

Tujuan Program yang dilaksanakan meliputi: (a) Memberikan pemahaman tentang sensitivitas gender bidang pendidikan kepada stakeholders dan masyarakat; (b) Menyamakan persepsi tentang permasalahan gender di bidang pendidikan; (c) Membangun komitmen para pemangku kebijakan untuk peduli dan melaksanakan kebijakan/program PUG Bidang Pendidikan; (d) Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pendidik dalam mengintegrasikan perspektif gender dalam proses pembelajaran.

Sasaran program *Capacity Building* meliputi: (a) Para pemangku kebijakan bidang pendidikan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; (b) Stakeholders Bidang Pendidikan, yaitu Dinas/Instansi/Lembaga terkait; Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan. Sasaran Rintisan Model Pendidikan berperspektif Gender meliputi: (a) Pendidik; (b) Tenaga Kependidikan; (c) Peserta didik; (d) Kepala Sekolah. Sasaran Rintisan Model Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender meliputi: (a) Pendidik; (b) Tenaga Kependidikan; (c) Peserta didik; (d) Kepala Sekolah. Sasaran Fasilitas Pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan di Perguruan Tinggi meliputi: (a) Dosen; (b) Mahasiswa.

Langkah-langkah strategis yang ditempuh oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan PUG Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan *Position Paper* PUG Bidang Pendidikan Provinsi Jawa Tengah kurun waktu 2004-2008, sebagai pedoman dalam pelaksanaan program.
2. Penyusunan Modul dan Suplemen Modul Penyadaran Gender bagi pendidik.
3. Pembentukan Kelompok Kerja PUG Bidang Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, berperan sebagai pengelola dan pelaksana program.
4. Penunjukan *vocal point* di masing-masing Bidang lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
5. Penunjukan *vocal point* di masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
6. Penguatan jejaring kerjasama dengan Dinas/Badan/Lembaga dan Perguruan Tinggi dalam penyusunan rencana program, pelaksanaan dan evaluasi.
7. Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan program PUG Bidang Pendidikan di Kabupaten/Kota melalui Bintek dan pemberian dana stimulan.
8. Penyusunan RAD (Rencana Aksi Daerah) Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan tahun 2009 – 2013

Pemberian bantuan keuangan untuk seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah mampu mendinamisasi pelaksanaan PUG tingkat Kabupaten/kota mulai dari tingkat Dinas Pendidikan kabupaten/kota hingga ke tingkat satuan pendidikan formal maupun informal.

Mulai tahun 2011, kegiatan PUG pendidikan di Jawa Tengah tidak hanya dilakukan oleh Pokja PUG saja, tetapi sudah *mainstream* terintegrasi dalam salah satu program di Subdit Dinas Pendidikan Prov Jateng. Tahun 2011 sudah dilaksanakan uji coba anggaran responsif gender bidang pendidikan, yaitu pada Program Pendidikan Dasar, dengan kegiatan fasilitasi Penguatan Kurikulum, Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan KTSP Responsif Gender. Dukungan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 512.351.000,- dengan tujuan meningkatkan keterampilan Kepala Sekolah dan guru dalam mengembangkan kurikulum dan bahan ajar yang responsif gender. Sasaran kegiatan adalah Kepala Sekolah dan Guru SMP RSBI sejumlah 61 SMP, 122 kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, 122 orang guru Bhs. Indonesia, IPA, Matematika, ICT. Hasil yang diharapkan adalah tersedianya kurikulum dan bahan ajar yang responsif gender di SMP RSBI. Pada tahun 2012 anggaran PUG dari APBD I provinsi sebesar Rp 624.274.000 dengan kegiatan fasilitasi pengembangan KTSP dan bahan ajar responsif gender di SD RSBI dan SD Standar Nasional. Sasaran kegiatan ada 70 SD (18 SD RSBI dan 52 SD SN), 140 kepala sekolah dan wakil kepala sekolah SD, 140 orang guru kelas 4 dan 5 SD RSBI dan SD SN.

Struktur Organisasi Pengarusutamaan Gender dalam Pokja Pendidikan

Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program PUG Bidang Pendidikan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2004, membentuk Kelompok Kerja PUG Bidang Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, beranggotakan seluruh pejabat struktural lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan stakeholders yang relevan. Pokja PUG Bidang Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dikuatkan dengan Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Sebagai penanggung jawab PUG adalah Kepala Dinas Pendidikan dan ketua pokja PUG adalah kepala di bidang PNF. Anggota pokja PUG terdiri atas berbagai unsur, baik berbagai bidang pada Dinas Pendidikan, PT/PSW/PSG dan SKPD. Jumlah anggota pokja ada 32 orang.

b. Pengarusutamaan Gender dalam pendidikan di Kabupaten Klaten

PUG pendidikan mulai diimplementasikan di Kabupaten Klaten sejak tahun 2005 hingga sekarang (tahun 2011) dengan dukungan dana APBN, APBD I (dana Provinsi) dan APBD II (dana Kabupaten). Dukungan dana terkait dengan kegiatan gender dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Biaya Kegiatan Gender menurut Sumber Pendanaan Tahun 2005-2011

No	Tahun	APBN	ABD 1	APBD 2	Jumlah
1	2005	-	19.000.000	-	19.000.000
2	2006	20.000.000	-	91.000.000	111.000.000
3	2007	40.000.000	33.000.000	160.000.000	233.000.000
4	2008	160.000.000	33.762.500	169.250.000	
5	2009	385.000.000	150.000.000	41.400.000	
6	2010	845.000.000	35.000.000	386.500.000	
7	2011	150.000.000	80.000.000	125.000.000	355.000.000

Sumber: Pokja PUG Pendidikan Kabupaten Klaten.

Berdasarkan data yang ada, integrasi gender dalam bidang pendidikan dilakukan melalui beberapa program antara lain: Pemberdayaan Perempuan, Keaksaraan Fungsional Berbasis Gender, Pemberdayaan Perempuan pada Seni Karawitan, Pendidikan Keluarga Berbasis Gender (PKBG), Pemberdayaan Perempuan pada LPK (Lembaga Penyelenggara Kursus) dan PKBM (Pendidikan Keluarga Berbasis Masyarakat), penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG), Peningkatan Keterampilan Berwawasan Gender dampak Erupsi Merapi, Balai Kegiatan Belajar, dll.

Pada tahun 2010, dana untuk mendukung kesetaraan dan keadilan gender meningkat sangat tajam menjadi Rp 845.000.000. Hal ini terjadi karena adanya program/kegiatan Peningkatan Keterampilan Berwawasan Gender dampak Erupsi Merapi. Program tersebut hanya dilaksanakan 1 tahun saat terjadinya bencana alam berupa Erupsi Gunung Merapi.

Dari anggaran-anggaran tersebut, anggaran yang khusus diperuntukkan bagi kegiatan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan dari sumber dana APBN sejak tahun 2009-2011 setiap tahun ada Rp 100.000.000 dengan total anggaran Rp 300.000.000; dukungan APBD 1 (Provinsi) diberikan mulai tahun 2005 sebesar Rp 19 Juta untuk implementasi PUG pada satuan pendidikan di Kecamatan Ceper. Dana tersebut langsung diberikan kepada beberapa satuan pendidikan terpilih untuk uji coba implementasi PUG. Bantuan tersebut diberikan kepada 2 TK, 2 SD, 2 SMP, 1 SMA, 1 SMK, 1 PKBM.

Pada tahun 2006 tidak ada block grand dana dari APBD 1 dan tahun 2007 menerima bantuan dana sebesar Rp 38,5 Juta. Dana tersebut digunakan untuk workshop kesetaraan dan keadilan gender untuk ketua OSIS SMP sekabupaten Klaten sebesar Rp 33 Juta dan sosialisasi pencegahan kekerasan anak berbasis gender di 5 sekolah sebesar Rp 15,5 Juta.

Pada tahun 2008 diberikan block grand sebesar Rp 33.762.500 untuk bantuan dan workshop pencegahan kekerasan (Rp 12.662.500), kekerasan anak berbasis gender (Rp 20 Juta), dan Pameran PUG bidang pendidikan di STAN HAI Klaten sebesar Rp 1.100.000.

Pada tahun 2009 terdapat dukungan dana APBD 1 sebesar Rp 150.000.000 sebagai bantuan piloting model PUG provinsi pada pendidikan formal dan non formal kecamatan Trucuk. Pada tahun 2010 terdapat bantuan sebesar Rp 35.000.000 untuk penyelenggaraan PUG Pendi di 5 SMP dan 5 SMK/SMK.

Pada tahun 2011 terdapat bantuan dana APBD 1 sebesar Rp 80.000.000 dengan penggunaan untuk fasilitasi Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender di PKBM (Rp 15 Juta), fasilitasi Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender di KF dan LPK (Rp 15 Juta), dan Penyelenggaraan PUG pendidikan di 5 SMP dan 5 SMK/SMA di Kecamatan Gantiwarno. Dengan demikian, kegiatan PUG pendidikan di Kabupaten Klaten telah menyebar di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Ceper, Kecamatan Trucuk dan Kecamatan Gantiwarno.

Struktur Organisasi PUG dalam Pokja Pendidikan

Kelembagaan PUG di Kabupaten Klaten sudah terbentuk, baik kelembagaan PUG untuk seluruh SKPD tingkat Kabupaten, Pokja PUG pendidikan pada tingkat Kabupaten maupun Pokja PUG pada tingkat kecamatan.

Tabel 3. Kelembagaan PUG Pendidikan Kabupaten Klaten

SK	Penanda Tangan	Pananggung Jawab	Ketua Pokja	Anggota Pokja
Pokja PUG Kabupaten: Keputusan Bupati No. 411/402/2010 tentang Pembentukan Pokja PUG di Kab. Klaten, 6 Oktober 2010	Bupati	Pen. Jwb 1: Bupati Pen. Jwb 2: wkl Bupati	Merangkap anggota: Kepala BAPPEDA	Sekr meranagkap anggota: 1 Anggota: 26 orang
Pokja PUG Pendidikan: Keputusan Bupati nomor 421.1/128/2009 TENTANG Kelompok Kerja PUG bidang Pendidikan Kab. Klaten periode tahun 2009-2011, 12 Maret 2009	Bupati	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Klaten	Pembina Teknis: Kabid. PNF Ketua: Kasi Dikmas	Bendahara: Staf Dikmas Anggota: 22 orang
Pokja PUG Pendidikan tk. Kecamatan (Ceper)	Camat Ceper	-	Ka UPTD Pendidikan Kec. Ceper	Sekretaris: 2 orang, Bendahara: 1 orang 26 orang

Kabupaten Klaten telah memiliki pokja PUG Pendidikan dengan landasan hukum yang cukup kuat. Di tingkat Kabupaten telah dibuat satu SK PUG secara umum berdasarkan keputusan Bupati dengan keanggotaan seluruh dinas/SKPD di Kabupaten Klaten, satu SK Pokja PUG bidang pendidikan berdasarkan SK Bupati dengan keanggotaan terdiri dari unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dan satuan pendidikan formal maupun informal, serta satu SK Pokja PUG Pendidikan kecamatan ceper 2011-2013 dengan anggota terdiri atas unsur Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan formal maupun informal di wilayah Ceper. Keanggotaan Pokja PUG (terlampir dalam scan struktur organisasi).

Satu Dekade PUG Bidang Pendidikan di Jawa Tengah

Aktivitas Gender Mainstreaming di tingkat Provinsi Jawa Tengah meliputi:

a. Capacity Building bagi para pemangku kebijakan pendidikan.

Penguatan kelembagaan bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang permasalahan gender di bidang pendidikan, membangun sensitivitas gender, kepedulian dan komitmen para pemangku kebijakan untuk peduli pada permasalahan gender serta mau melaksanakan PUG Bidang pendidikan.

Kegiatan yang dilakukan meliputi:

1) Round Table Discussion PUG Pendidikan Provinsi–Kabupaten/Kota

Bentuk kegiatan: (i) Sosialisasi kebijakan dan program PUG Bidang Pendidikan; (ii) Workshop penyusunan rencana program dan penganggaran; (iii) PUG Bidang pendidikan; (iv) Workshop evaluasi dan review program PUG Bidang Pendidikan.

Sasaran kegiatan adalah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, meliputi (i) Pemangku Kebijakan bidang pendidikan; (ii) Stakeholders (Komisi DPRD yang membidangi pendidikan), (iii) Dinas/Instansi terkait, Perguruan Tinggi (PSW/G), (iv) Organisasi Kemasyarakatan; (v) Dewan Pendidikan; (vi) pendidik.

- 2) *Pelatihan Gender Analysis Pathway (GAP), bagi perencana pendidikan*
Sasaran kegiatan mencakup 35 Kabupaten/Kota, terdiri atas Unsur Dinas Pendidikan (Program, Dikdas, Dikmen dan PNF) dan Unsur Dinas terkait (BAPPEDA, Pemberdayaan Perempuan). Materi pelatihan GAP diarahkan pada penyusunan *Position Paper* masing-masing Kabupaten/Kota.
- 3) *Pelatihan Sensitivitas Gender bagi stakehotders*
Sasaran kegiatan meliputi Provinsi dan Kabupaten/Kota, mencakup: (a) Pemangku Kebijakan bidang pendidikan; (b) Stakeholders (Dewan Pendidikan, pendidik, Organisasi Kemasyarakatan).
- 4) *Sosialisasi bahan ajar responsif gender bagi penulis buku pelajaran dan penerbit*
- 5) *Advokasi dan pendampingan Penyusunan Position Paper PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota*
Advokasi dan pendampingan kepada Kabupaten/Kota dilakukan secara bertahap mulai tahun 2005.
- 6) *Kelompok Kerja PUG Bidang Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.*
Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program PUG Bidang Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dibentuk Kelompok Kerja PUG Bidang Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, beranggotakan seluruh Pejabat Struktural lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan stakeholders yang relevan. Pokja PUG Bidang Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dikuatkan dengan Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
- 7) *Penyusunan Media KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi).*
Jenis media KIE mencakup Booklet, Poster, Naskah Siaran Radio. Tujuan penyusunan media KIE untuk bahan sosialisasi sensitivitas gender bidang pendidikan melalui media cetak dengan bahasa yang sederhana.
- 8) *Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan*
Monitoring dilakukan untuk memantau bagaimana program PUG Bidang Pendidikan dilaksanakan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur apakah hasil pelaksanaan program sesuai dengan yang direncanakan. Pelaporan disusun sebagai bahan informasi dan dokumentasi.

b. Rintisan Model Pendidikan Berperspektif Gender

Rintisan model pendidikan berperspektif gender merupakan strategi yang ditempuh oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka memberikan pemahaman tentang perspektif gender kepada masyarakat melalui proses pembelajaran di-sekolah maupun luar sekolah, dengan memposisikan pendidik sebagai *focal point* pada satuan pendidikan masing-masing.

Rintisan Model Pendidikan Berperspektif Gender di laksanakan di: 2 TK/RA; 2 SD/MI; 2 SMP/MTs; 1 SMA/MA, 1 SMK dan 1 PKBM di 1 wilayah Kabupaten/Kota. Implementasi perspektif gender dalam proses pembelajaran pada tahap rintisan ini diarahkan pada 3 mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia, IPS dan PKN.

Kegiatan untuk mendukung pelaksanaan Rintisan Model Pendidikan Berperspektif Gender meliputi: (i) Penyusunan dan Penggandaan Modul dan Suplemen Modul Penyadaran Gender bagi pendidik. Modul dan Suplemen Modul merupakan media bagi para pendidik untuk memahami perspektif gender. Modul dan Suplemen Modul mengalami 4 kali review untuk penyempurnaan dan menyesuaikan dengan kebutuhan para pendidik; (ii) Pelatihan/TOT calon fasilitator pendidikan berperspektif gender, dimaksudkan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi para pendidik dalam mengimplementasikan perspektif gender pada proses pembelajaran. Sasaran kegiatan adalah pendidik pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPS dan PKN dari Sekolah/PKBM Rintisan Model yang ditunjuk. Masing-masing satuan pendidikan menunjuk 2 orang pendidik sebagai *vocal point*. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai koordinator/penanggung jawab pelaksanaan program Rintisan Model. Pendekatan pelatihan adalah partisipatory. Proses: pendidik diarahkan untuk mereformulasi bahan ajar menjadi responsif gender; menyusun silabus dan RPP yang responsif gender; dan simulasi mengajar.

c. Bintek dan Fasilitasi/Pendampingan Pelaksanaan Rintisan Model Pendidikan Berperspektif Gender

Fasilitasi berupa bantuan dana stimulan kepada sekolah/PKBM model, digunakan untuk melaksanakan KBM responsif gender, meliputi: penyusunan media pembelajaran responsif gender, penyusunan silabus dan rencana pembelajaran responsif gender. Fasilitasi/Pendampingan kepada Kabupaten/Kota dan sekolah model dilaksanakan selama 2 tahun. Monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program.

d. Rintisan Model Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menghapus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; melalui PUG Bidang Pendidikan, juga dikembangkan Model Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender. Program ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang Undang-Undang Perlindungan Anak; Undang-Undang PKDRT (Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga) dan Undang-Undang PTPO (Pencegahan terhadap Perdagangan Orang) kepada komunitas pendidikan. Rintisan Model pencegahan Kekerasan Berbasis Gender dilaksanakan di 2 SMP/MTs; 2 SMA/MA dan 1 SMK di 1 wilayah Kabupaten/Kota, dengan memposisikan pendidik Bimbingan Konseling sebagai fasilitator.

Beberapa kegiatan yang dilakukan meliputi: (i) Penyusunan dan penggandaan Modul Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender. Modul dan Suplemen Modul merupakan media bagi pendidik dalam pencegahan kekerasan berbasis gender, khususnya di sekolah; (ii) Pelatihan/TOT Calon Fasilitator Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender. Pelatihan diarahkan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi pendidik untuk berfungsi sebagai fasilitator maupun konselor terhadap pencegahan kekerasan berbasis gender di sekolah.

Sasaran kegiatan mencakup: (i) Pendidik BK, Agama, Penjaskes, Koordinator Kemuridan; (ii) Komite Sekolah; (iii) Unsur Dinas Pendidikan Kab/Kota.

Materi pelatihan mencakup: (i) payung hukum perlindungan perempuan dan anak; (ii) sensitivitas gender; (iii) NAPZA; (iv) Pendidikan Anak Sebaya dan Konseling. Selain pelatihan juga diberikan Bintek dan pendampingan Pelaksanaan Rintisan Model Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender. Untuk dapat melaksanakan program ini, masing-masing sekolah diberikan dana stimulan, digunakan untuk simulasi dan pembentukan *Peer Group*. Selain bintek juga dilakukan monitoring, evaluasi pelaksanaan program dan pelaporan.

e. Fasilitasi Pelaksanaan Program PUG Bidang Pendidikan di Perguruan Tinggi.

Fasilitasi pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan di Perguruan Tinggi dimaksudkan untuk menyosialisasikan perspektif gender kepada para dosen dan mahasiswa. Bentuk dan sasaran kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan Perguruan Tinggi masing-masing. Fasilitasi berupa dukungan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan yang diusulkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi. Bentuk kegiatan meliputi seminar, workshop dan pelatihan.

f. Rintisan Model Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Kabupaten Kebumen.

Tingginya komitmen Jawa Tengah dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan, mendapatkan penghargaan dari Departemen Pendidikan Nasional, diwujudkan dengan dipilihnya Kabupaten Kebumen menjadi lokasi Pilot Model PUG Bidang Pendidikan tingkat Kabupaten pada tahun 2008, dengan mendapatkan dukungan anggaran dari MCPM-AIBEP.

Penunjukan Kabupaten Kebumen sebagai lokasi Pilot Model melalui penilaian beberapa kriteria, antara lain: (i) Adanya komitmen para pemangku kebijakan untuk melaksanakan program PUG bidang pendidikan dengan dukungan APBD setempat; (ii) Sudah terbentuk Pokja PUG Bidang Pendidikan tingkat Kabupaten; (iii) Memiliki *Vocal Point* pendidikan berperspektif gender pada satuan pendidikan.

g. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program Pengarusutamaan Gender di Kabupaten/Kota: apakah sudah sesuai dengan rencana program. Monitoring dilakukan minimal 1 kali dalam setahun. Khususnya terhadap pelaksanaan rintisan model pendidikan berperspektif gender, evaluasi program dilaksanakan pada tahun 2007 bekerjasama dengan Pusat Studi Wanita, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana kemanfaatan dilaksanakannya Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan di Jawa Tengah. Hasil monitoring dan evaluasi dipakai sebagai bahan rujukan untuk penyempurnaan program pada tahun berikutnya.

Pengarusutamaan Gender Pendidikan di Kabupaten Klaten

PUG pendidikan di Kabupaten Klaten mulai dilaksanakan sejak tahun 2005 hingga 2011 dengan dukungan dana APBN, APBD 1 (provinsi) dan APBD 2 (Kabupaten)

Tabel 4. Program PUG Pendidikan Kabupaten Klaten Dana APBN

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Besar Dana/Tahun (Juta Rp)						
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Pemberdayaan Perempuan Kf Berbasis Gender di PKBM Duta Karya	20WB	-	-	-	20,0	-	-	-
2	Pemberdayaan Perempuan pada seni Kerawitan Manisrenggo	Manisrenggo	-	-	20,0	-	-	-	-
3	Pengembangan Kf Berbasis Gender di PKBM Melati	Kalikotes	-	-	20,0	-	-	-	-
4	PKBG PKBM Usaha Mandiri Kecamatan Kemalang	Kemalang	-	-	-	-	20,0	-	-
5	PKBG pada kelompok Kf 6 PKBM	6 kelompok Kf	-	-	-	120,0	-	-	-
6	PKBG di SKB Klaten, Manisrenggo, Cawas, Polan Harjo	SKB	-	-	-	20,0	20,0	25,0	25,0
7	PKBG di Paguyuban Sekar Budaya Jambakan	Bayat	-	-	-	-	20,0	-	-
8	Pemberdayaan Perempuan pada LPK dan PKBM	10 PKBM	-	-	-	-	225,0	-	-
9	Penyelenggaraan PUG bidang Pendidikan	2009 Juwiring 2010 Wedi 2011 Jogonalan	-	-	-	-	100,0		
								100,0	
									100,0
10	PKBG Aisyiah Kec. Gantiwarno	Gantiwarno	-	-	-	-	-	-	25,0
11	Peningkatan keterampilan Berwawasan gender Dampak Eropsi Merapi	13 PKBM	-	-	-	-	-	520,0	-
12	Balai Belajar Bersama	SKB	-	-	-	-	-	200,0	-
	Jumlah		-	20,0	40,0	160,0	385,0	845,0	150,0

Tabel 5. Implementasi PUG Pendidikan 2009-2011 Dana APBN di Kabupaten Klaten

No	Tahun	Jumlah	Kegiatan	Sasaran	Unsur peserta
1	2009	100 Juta	Sosialisasi PUG Pendidikan	100 orang	PAUD, TK, TKP, SDN, SMPN, SMA Muhamadiyah, SMK Juwiring, PKBM, Pokja PUG Pendidikan Juwiring, Dinas terkait tk. Kabupaten
			TOT Penyusunan Bahan Ajar Responsif Gender Bidang Pendidikan	30 orang guru	PAUD, TK, SD, SMPN, SMA Muh, SMK, PKBM, Tutor Kf, IGTKI, Pokja PUG Juwiring
			Penyusunan Program Kerja Pokja PUG pendidikan Kab. Klaten		
			Monev pilot PUG pendidikan	10 pilot PUG Pend	Kec. Juwiring

2	2010	100 Juta	Pelatihan Penyusunan silabus dan RPP bagi pendidik Formal dan Non Formal Wedi	40 orang	Kepala sekolah, guru IPS, PKn, Bhs. Indonesia, MGMP, Pokja PUG Wedi, Pokja PUG Kec. Cawas
			Sosialisasi PUG bidang pendidikan	100 orang	UPTD, Likmas, Pengawas, PKBM Kec Wedi, Kepala dan Guru TK, Kades dan Sekdes, PKK, Komite, Dewan Pendidikan, BAPPEDA, PP dan Forum Perlindungan Anak Kesra, Forum KF, TLD dan Penilik, MGMP, Camat, Tutor PAUD, Pokja PUG Kab.
3	APBN	100 Juta	Sosialisasi PUG		
			Pelatihan penyusunan Silabus dan RPP bagi pendidik formal dan non formal		
			Implementasi PUG pada satuan pendidikan formal dan informal		
			Pertemuan rutin		
			Monev		
			Pelaporan		
Jumlah Tiga ratus juta rupiah					

Sumber: Pokja PUG pendidikan Klaten, 2009-2011.

Dana APBN tahun 2009 digunakan untuk Sosialisasi PUG Bidang Pendidikan di Kecamatan Juwiring dengan peserta 100 orang dan TOT penyusunan bahan ajar responsif gender bidang pendidikan dengan jumlah peserta 30 orang. Peserta sosialisasi PUG bidang pendidikan ataupun TOT terdiri atas PAUD, TK, TKP, SDN, SMPN, SMA Muhammadiyah, SMKN, PKBM, Tutor, IGTKI, serta Pokja PUG tingkat Kecamatan Juwiring serta perwakilan dari Dinas Pendidikan dan SKPD terkait.

Dana APBN 2010 digunakan sosialisasi PUG bidang pendidikan di Kecamatan Wedi dengan sasaran 100 orang dan pelatihan penyusunan silabus dan RPP bagi pendidik formal dan non formal dengan sasaran 40 orang. Unsur yang diundang adalah TK, SD, SMP, SMA, MGMP SMP, SMA dan SMK, Pokja PUG **Kecamatan Wedi**, Tutor paket A, B, PAUD, KF dan PKBM, **Pokja PUG Kecamatan Cawas**. Sedangkan mata pelajaran yang dipilih adalah IPS, PPKn, Bhs. Indonesia.

Dana APBN 2011 digunakan untuk sosialisasi PUG bidang pendidikan di **Kecamatan Jogonalan** dengan sasaran 100 orang dan Pelatihan penyusunan silabus dan RPP bagi pendidik formal dan non formal dengan sasaran 40 orang. Unsur-unsur yang diundang terdiri atas TK, SD, SMP, SMA, MGMP SMP, SMA dan SMK, Pokja PUG **Kecamatan Wedi**, Tutor paket A, B, PAUD, KF dan PKBM, IGTKI, Pokja PUG **Kecamatan Jogonalan**. Sedangkan mata pelajaran yang dipilih adalah IPS, PPKn, Bhs. Indonesia.

Tabel 6. Implementasi PUG Pendidikan 2009-2011 Dana APBD I di Kabupaten Klaten

No	Tahun	Jumlah	Kegiatan	Sasaran	Unsur peserta
1	2009	150 Juta	Sosialisasi PUG Pendidikan	1 paket	
			Penyusunan Data Pilah Gender	1 paket	
			Pelatihan penyusunan silabus dan RPP bagi pendidik formal dan non formal/TOT focal Point	1 paket	
			Implementasi PUG pada satuan pendidikan	1 kecamatan	
			Penguatan kelembagaan PUG Pendidikan	1 lembaga	
			Monev dan pelaporan	1 paket	
2	2010	50 Juta	TOT Pilot Model Sekolah Berwawasan gender	5 sekolah SMP/ 5 skl SMA/SMK	30 orang SMA, SMK, SMP
3	2011	50 juta	TOT Pilot Model Sekolah Berwawasan Gender Pendidikan Formal dan Non Formal di Kec. Gan-tiwarno Kab. Klaten	SMA, SMK, SMP, SD, TKP, KB, PKBM, Pokja	

Pokja PUG pendidikan Klaten, 2009-2011.

Tabel 7. Program dan kegiatan PUG Pendidikan Kab. Klaten dana APBD 2

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Besaran Dana/Tahun (Juta Rp)						
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Diklat PUG	50 orang stakeholder	-	10,0	-	-	-	-	-
2	Penyus. Dokumen Kebijakan PUG	1 paket	-	10,0	-	-	-	-	-
3	KF berbasis gender	100 WB	-	71,0	-	-	-	-	-
4	Diklat teknologi tepat guna berwawasan gender	KBU berperspektif Gender	-	-	110,0	-	-	-	-
5	P2MBG	KBU, Keterampilan, TBM	-	-	50,0	-	-	-	-
6	KF berbasis gender di 26 kec.	40 Klp	-	-	-	130,0	-	-	-
7	P2MBG	KBU, Keterampilan, TBM	-	-	-	18,25	-	-	-
8	Peningkatan keterampilan perempuan membuat kue kering di SMKK	Penyelenggara KF	-	-	-	7,5	-	-	-
9	Peningkatan mutu keterampilan bagi perempuan latihan hantaran	Tutor KF	-	-	-	7,5	-	-	-
10	Penyusunan bahan ajar KF berwawasan gender	Tutor KF	-	-	-	4,0	-	-	-
11	Pameran PUG bidang pendidikan	Stan HAI di Klaten	-	-	-	2,0	-	-	-
12	Pendampingan piloting PUG	Sosialisasi UG	-	-	-	-	15,0	-	-
13	Evaluasi program PUG	Rapat koordinasi program	-	-	-	-	26,4	-	-
14	Peningkatan mutu keterampilan bagi perempuan dan laki-laki kurang mampu	Warga KF	-	-	-	-	-	40,0	-
15	Bantuan kelompok warga perempuan dan laki-laki yang masih buta aksara	Keterampilan bagi WB perempuan dan laki-laki	-	-	-	-	-	346,5	-
16	Kewirausahaan desa bagi keluarga rentan ekonomi berwawasan gender	100 orang	-	-	-	-	-	-	50,0
17	Bantuan kelompok warga perempuan dan laki-laki tindak lanjut buta aksara	20 kelompok	-	-	-	-	-	-	75,0
Jumlah			-	91,0	160,0	169,250	41,400	386,500	125

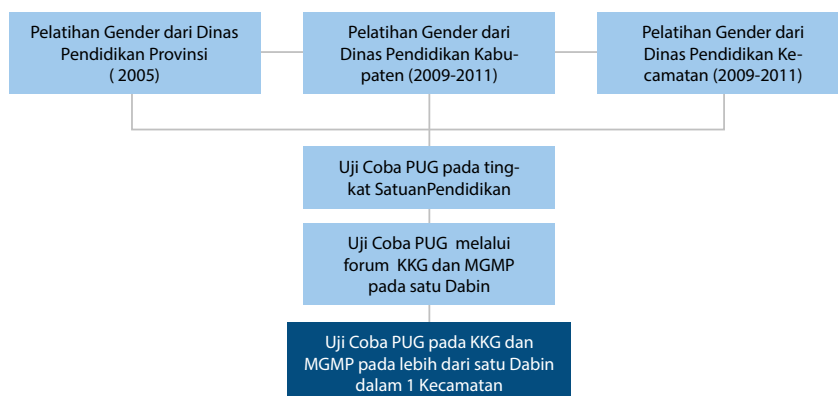
Dana APBD tingkat I (dari provinsi) sejak 2009 hingga 2011 digunakan untuk hal yang sama dengan sasaran sekolah dan kecamatan yang berbeda. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa cakupan kegiatan PUG bidang pendidikan di Kabupaten Klaten sudah menyebar luas di sebagian besar kecamatan, mulai dari Juwiring, Wedi, Jogonalan, Jatinom, Karanganyar, Trucuk, Klaten, Tulung, Bayat, dsbnya.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tujuan program PUG pendidikan adalah untuk membangun sensitivitas gender stakeholders pendidikan mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten kota dan satuan pendidikan formal, non formal maupun informal untuk selanjutnya mengujicobakan pelaksanaan PUG pendidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pelaksanaan PUG pendidikan di Kabupaten Klaten diawali dengan adanya pelatihan gender sejak tahun 2005 bagi tenaga pendidik yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Tingkat Provinsi. Setelah mengikuti kegiatan training, mereka kemudian mendapat *block grand* untuk menguji cobakan di satuan pendidikan dengan fasilitasi dana dari APBD 1. Besaran dana untuk uji coba gender pada tingkat satuan pendidikan bervariasi, bantuan dana terkecil sebesar Rp 1.500.000 untuk tingkat satuan pendidikan TK dan SD, Rp 2000.000 untuk Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Rp 1.000.000 untuk Cabang Dinas P dan K serta Rp 2.000.000 untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Klaten.

Pada Tahun 2006 tidak ada dukungan dana APBD 1, dan pada tahun 2007 hingga sekarang (tahun 2011) ada dukungan dana APBD 1 dengan peruntukan kegiatan yang secara garis besar bisa dikelompokkan dalam kegiatan: Workshop kesetaraan dan keadilan gender bagi OSIS dan Pencegahan Kekerasan Anak Berbasis Gender di Sekolah, Bantuan Piloting Model di Satuan Pendidikan Formal dan Informal, serta fasilitasi Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender.

Dukungan pendanaan pada APBD 1 membawa pengaruh pada adanya dukungan anggaran dari APBD 2 dengan jumlah anggaran yang berfluktuasi dari Rp 41.400.000 hingga Rp 386.500.000. Apabila dirumuskan dalam bentuk gambar dapat dilihat sebagai berikut:



Sumber: Dirumuskan berdasarkan informasi hasil FGD

Keterangan gambar:

KKG : Kelompok Kerja Guru

MGMP : Musyawarah Guru Mata pelajaran

Dabin : Daerah Binaan

Berdasarkan gambar tersebut di atas maka daerah mempunyai inisiasi untuk memperluas cakupan kegiatan PUG dari semula hanya dilakukan di tingkat satuan pendidikan pada satu daerah uji coba, meluas ke satuan pendidikan lain di luar sekolah uji coba dan kecamatan uji coba.

Berbagai bentuk implementasi PUG pada satuan pendidikan antara lain:

1. Membuat slogan-slogan terkait pengarusutamaan gender yang dipasang pada tempat-tempat yang mudah dilihat dengan harapan pesan tersebut dimengerti oleh guru/tenaga pendidik, tenaga kependidikan, orangtua murid, komite sekolah maupun murid (Contoh slogan terlampir)
2. Menyediakan data terpilah menurut jenis kelamin pada tingkat satuan pendidikan.
3. Melakukan review terhadap bahan ajar yang digunakan di satuan pendidikan dan hasil review tersebut digunakan sebagai dasar mendekonstruksi materi bias gender menjadi materi setara gender yang dituangkan dalam silabus, rencana pembelajaran (RPP) maupun Lembar Kerja Murid.

4. Memisahkan fasilitas Kamar Mandi dari semula dicampur untuk laki-laki dan perempuan kemudian dipisah untuk laki-laki dan untuk perempuan.
5. Menutup meja belajar dengan triplek dari semula terbuka di bagian depan menjadi tertutup di bagian depan.

(Sumber: Hasil FGD pada 20 Januari 2011 dan observasi kelas pada SD Negeri Meger Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten).

Pencapaian/dampak dan Praktek Terbaik

- a. Hasil dari pelaksanaan PUG pendidikan di tingkat provinsi Jawa Tengah adalah munculnya kesadaran tentang pentingnya nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender pada kalangan *policy makers* hingga muncul komitmen untuk memberikan dukungan dana APBD tingkat 1 (provinsi) dan APBD tingkat 2 (Kabupaten). Dukungan dana PUG pada tingkat provinsi terus mengalami peningkatan dari semula sebesar Rp 207.191.000 menjadi Rp 3.487.500.000. Dana tersebut diblock grand-kan ke seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan besaran dana pada awalnya antara Rp 35 Juta hingga Rp 150 juta, dan kemudian diberikan dengan besaran dana yang sama yaitu Rp 50 juta ke setiap kabupaten/kota.
- b. Model PUG yang diterapkan di tingkat provinsi diadopsi di tingkat kabupaten dengan fokus utama kegiatan adalah mengimplementasikan PUG pada tingkat satuan pendidikan formal, non formal maupun informal. Dilihat dari perkembangannya dari tahun ke tahun, maka cakupan program semakin melebar dari semula diujicobakan pada satuan pendidikan formal dan non formal terpilih pada satu kecamatan, sekarang sudah diimplementasikan di beberapa kecamatan.
- c. Penyusunan Modul tentang Sensitivitas Gender bagi Pendidik di Tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Panduan Penanganan Tindak Kekerasan berbasis Gender di Sekolah sangat membantu bagi kabupaten/kota dalam memandu pelatihan-pelatihan yang mereka selenggarakan.
- d. Hal-hal yang sudah dilakukan pada tingkat satuan pendidikan formal, non formal maupun informal antara lain: menyusun silabus dan rencana pembelajaran pada beberapa mata pelajaran responsif gender (PPKn, IPS dan Bhs. Indonesia, membuat spanduk/pamflet untuk mengingatkan pentingnya integrasi gender pada satuan pendidikan tersebut, menyusun data pendidikan pada satuan pendidikan terpisah menurut jenis kelamin, menyediakan fasilitas kamar mandi dengan memisahkan kamar mandi bagi perempuan dan laki-laki.
- e. Pemerintah tingkat provinsi mensinergikan bantuan anggaran dari tingkat nasional dengan anggaran daerah. Cara yang dilakukan adalah membuat pola penggunaan keuangan yang berbeda antara dana dari tingkat nasional dengan dana daerah. Dukungan dana APBN untuk PUG pendidikan digunakan untuk pelatihan bagi *policy maker*, sedangkan dana APBD digunakan untuk kegiatan pada Satuan Pendidikan, mulai dari tenaga pendidik (guru) maupun tenaga kependidikan (TU).
- f. Di tingkat Provinsi Jawa Tengah, PUG pendidikan sudah mainstream dan dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani pendidikan Dasar melalui uji coba anggaran responsif gender. Pada tahun 2011 kegiatan dilaksanakan di seluruh SMP RSBI di Provinsi Jawa Tengah, yaitu 72 SMP RSBI. Pada tahun 2012 uji coba dilaksanakan di seluruh SD berstandar Nasional dan SD RSBI di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Kesimpulan

Pencarian fakta mengidentifikasi tantangan dan rekomendasi (termasuk kebijakan, sistem, kapasitas, pencarian sumber daya dll.) guna memperkuat PUG dalam pendidikan, baik di Kemdikbud dan Kemenag

1. Keberhasilan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan di Jawa Tengah dan Kabupaten Klaten dipengaruhi oleh berbagai komponen kunci, antara lain:
 - a. adanya payung kebijakan, yakni Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008, dan SE Gubernur tentang uji coba anggaran responsif gender pada 15 SKPD di Jawa Tengah.
 - b. adanya komitmen dari para pemangku kebijakan untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender, dengan memberikan dukungan program maupun pendanaannya;
 - c. adanya kebijakan PUG Bidang Pendidikan Depdiknas yang memberikan dukungan teknis dan anggaran untuk *Capacity Building*;
 - d. penunjukan *Vocal Point* dan kuatnya jejaring kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan lembaga driver PUG, maupun dengan Pusat Studi Wanita/Gender.

2. *Position Paper* PUG Bidang Pendidikan yang telah disusun menjadi penting sebagai panduan/pedoman dalam melaksanakan program aksi;
3. Modul dan Suplemen Modul Sensitivitas Gender Bidang Pendidikan berfungsi sebagai media bagi pendidik dan stakeholders untuk memahami perspektif gender, khususnya di bidang pendidikan;
4. Rintisan Model Pembelajaran yang responsif gender merupakan strategi yang cukup efektif guna memberikan pemahaman tentang perspektif gender kepada masyarakat;

Rekomendasi:

- 1) Struktur organisasi pokja PUG pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten perlu direformasi dengan menempatkan penanganan PUG pada bidang Perencanaan Dinas Pendidikan tingkat Provinsi ataupun Kabupaten/Kota sebagai koordinator pelaksana PUG pendidikan.
- 2) Perlu disusun instrumen untuk penyusunan basis data pendidikan terpilah menurut jenis kelamin disertai dengan pelatihan bagi perencana pendidikan di daerah tentang cara-cara mengolah data tersebut sebagai dasar perencanaan pembangunan pendidikan responsif gender.
- 3) Mengingat cakupan penanganan PUG pada tingkat satuan pendidikan sangatlah luas, maka *capacity building* perlu dioptimalkan dengan melatih SDM pada lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi guru seperti FKIP, P4TK, BDK (pada Kemennag), dstnya.
- 4) Mengingat terbatasnya kapasitas SDM di tingkat pemerintah daerah dalam mempersiapkan SDM responsif gender, maka keberadaan Pusat Studi Wanita/Pusat Studi Gender perlu dioptimalkan sebagai mitra untuk melakukan *capacity building* maupun advokasi, khususnya dalam mempersiapkan kapasitas lembaga dan SDM daerah responsif gender.

Lampiran

Hasil pelaksanaan program secara kuantitatif sebagai berikut :

Kegiatan	TAHUN										
	2003	2004	2005		2006		2007		2008		
			Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Capacity Building											
Workshop	100								60	60	
Sosialisasi		300									
RTD		100	22	18	25	47	60	40	14	16	
Jumlah (Orang)	100	400	22	18	25	47	60	40	74	76	
2. Pelatihan											
Sensitivitas		120	137	243	111	191	139	186	183	180	
GAP/POP		80	25	15	13	17	13	17	21	31	
Bahan Ajar/RPP			17	23	21	14	15	15			
Program AIMDAMAI					17	23	20	60	13	27	
Jumlah (Orang)		200	179	281	162	245	187	278	217	238	
3. Modul											
Modul dan Suplemen		1490	3100		2000		1820		1922		
Position Paper		500	-		-		-				
Media KIE							600				
Jumlah (Buku)		1990	3100		2000		1820				
4. Rintisan Pendidikan Berperspektif Gender											
Jumlah (Kab/Kota)		6	6		6		8		9		
Jumlah Total		35 Kab/Kota, masing-masing Kab/Kota dilaksanakan di :									
(Kab/Kota dan Sekolah)		2 TK/RK ; 2 SD/MI ; 2 SMP/MTs ; 1 SMA/MA ; 1 SMK ; 1 PKBM									
		Mulai Tahun 2007, pengembangan di KKG dan MGMP									
		Tahun 2008, Pengembangan MBS Berperspektif Gender									
5. Rintisan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender											
Jumlah		-	4		3		3		3		
Jumlah Total		13 Kab/Kota, masing-masing Kab/Kota dilaksanakan di :									
(Kab/Kota dan Sekolah)		2 SMP/MTs, 2 SMA/MA, 1 SMK									
6. Simulasi Program AIMDAMAI											
Jumlah										2	
		2 Kab/Kota									

Catatan: Hasil kegiatan 2009-2011 tidak terdokumentasi dengan baik pada saat penelitian dilakukan.

Indramayu (Jawa Barat)

Pendahuluan

Kabupaten Indramayu terdiri dari 31 kecamatan dengan luas wilayah sebesar 204.011 hektar. Bupati Kabupaten Indramayu adalah seorang perempuan bernama Hj. Anna Sophanah (www.jabar.prov.go.id). Jumlah penduduk Kabupaten Indramayu pada tahun 2009 dapat dikatakan seimbang yaitu sebanyak 1.744.897 jiwa dengan komposisi 888.579 penduduk laki-laki (50,9 %) dan 856.318 penduduk perempuan (49,1 %) (Indramayu dalam Angka 2010).

Di Kabupaten Indramayu terdapat 1.126 sekolah yang terdiri dari 881 SD/MI, 144 SMP/MTs dan 101 SMA/SMK/MA. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu adalah seorang laki-laki bernama Dr. Drs. H. Suhaeli, M.Si.

Tabel 1. Daftar sekolah SD/MI (swasta dan negeri), SMP/MTs, SMA/MA/SMK tahun 2008/2009.

Tingkat	Negeri	Swasta	Total
SD/MI	868	13	881
SMP/MTs	62	82	144
SMA/MA/SMK	33	68	101
Total	963	163	1.126

Sumber: Jawa Barat dalam Angka 2010

Berdasarkan data pendidikan, diketahui bahwa angka APK (Angka Partisipasi Kasar) pada tahun 2005 untuk SD/MI dan SMA/SMK/MA adalah lebih tinggi pada murid laki-laki dibandingkan murid perempuan, untuk SMP/MTs adalah lebih tinggi pada murid perempuan dibandingkan murid laki-laki. Sedangkan APK (Angka Partisipasi Kasar) pada tahun 2008 untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA adalah hampir seimbang antara murid laki-laki dan perempuan. Secara detail sebagai berikut:

- APK untuk SD/MI laki-laki dan perempuan berturut turut pada tahun 2005 sebesar 104,05 dan 94,81 persen dan pada tahun 2008 adalah 103,52 dan 103,72 persen.
- APK untuk SMP/MTs laki-laki dan perempuan berturut turut pada tahun 2005 sebesar 60,53 dan 78,08 persen dan pada tahun 2008 adalah 75,83 dan 75,89 persen.
- APK untuk SMA/SMK/MA laki-laki dan perempuan berturut turut pada tahun 2005 sebesar 33,87 dan 19,77 persen dan pada tahun 2008 adalah 31,22 dan 32,83 persen.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Indramayu mengalami perkembangan pendidikan yang cukup signifikan dengan ditunjukkannya penurunan kesenjangan gender bidang pendidikan di SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.

Tinjauan Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan

K 2: Pelembagaan Pokja PUG di Provinsi

Kelompok kerja pengarusutamaan gender bidang pendidikan Propinsi Jawa Barat dibentuk sejak tahun 2005 yang berada di Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS). Secara gradual mulai dari tahun 2005 seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat telah menyusun *Position Paper* program pengarusutamaan gender yang sejalan dengan Renstra Pendidikan pada masing-masing Kabupaten/Kota tersebut. Pada tahun 2006 terlaksana kegiatan di 12 kabupaten/kota.

PUG bidang pendidikan sudah melakukan berbagai macam upaya dalam rangka mengatasi masalah PUG. Dana APBD yang dialokasikan untuk kegiatan pengarusutamaan gender di Propinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

- Dana APBD sudah ada sejak Tahun 2008 sekitar Rp 100 juta dan hanya dilaksanakan untuk kegiatan di beberapa sekolah di Cianjur (3 juta per orang).
- Tahun 2009 melalui anggaran APBD sebesar Rp 2,5 milyar yang digunakan untuk pelatihan, penyusunan buku profil, penyusunan buku analisis (sebesar Rp 2,1 milyar) dan dana *block grant* untuk

- 5 Kabupaten pilot yaitu yaitu Subang, Sukabumi, Tasik, Kota Bogor dan Karawang (sebesar 400 juta).
- Pada tahun 2010 sebesar Rp 1,907 milyar. Untuk tahun 2010 provinsi memberikan dana *block grant* kepada 21 Kabupaten/Kota sebanyak masing-masing Rp 25 juta untuk pembentukan Pokja gender tingkat kabupaten/ Kota.
 - Pada tahun 2011 sebesar Rp 1,943 milyar dengan cara diberikan bantuan langsung ke sekolah-sekolah. Kegiatan dengan dana APBD pada tahun 2011 adalah pemberian dana *block grant* atau bantuan sosial langsung untuk sosialisasi satuan pendidikan, yaitu sebesar Rp 7,5 juta untuk PKBM, Rp 10 juta untuk SD/SMP/SMA/SMK. Sebelum diberikan dana tersebut diberi pelatihan dahulu berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.
 - Pada tahun 2012, dana anggaran APBD (15 juta/ satuan pendidikan-PKBM, SD, SMP, SMA, SMK). Kabupaten Indramayu tidak mengajukan proposal untuk kegiatan tahun 2012.

Adapun bantuan dana APBN untuk Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

- Pada tahun 2006 dana dari APBN sebesar Rp 200 juta dengan kegiatan *capacity building*.
- Pada tahun 2007 dana dari APBN sebesar Rp 500 juta dengan kegiatan *capacity building*.
- Pada tahun 2008 dan 2009 dana dari APBN masing-masing sebesar Rp 300 juta dengan kegiatan *capacity building*.
- Pada tahun 2009 dana dari APBN sebesar Rp 300 juta dengan kegiatan *capacity building*.
- Pada tahun 2010 dana dari APBN sebesar Rp 200 juta dengan kegiatan di Kabupaten Garut dan Cianjur.
- Pada tahun 2011 dana dari APBN sebesar Rp 200 juta dengan kegiatan di Kabupaten Majalengka dan Kuningan yang digunakan untuk sosialisasi *capacity building*.

Data profil gender bidang pendidikan di Jawa Barat yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat adalah data tahun 2008 yang disusun pada Tahun 2010. Rencana penyusunan profil gender bidang pendidikan dilakukan pada tahun 2012 dengan menggunakan update data tahun 2009-2011.

K 2: Pelembagaan Pokja PUG di Kabupaten Indramayu

Sebagai informasi, Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (yang lintas sektoral) di Kabupaten Indramayu belum terbentuk sampai saat ini. Adapun kelompok kerja Pengarusutamaan Gender Pendidikan di Kabupaten Indramayu berdiri pada tahun 2007 dengan bantuan dana dari propinsi yang berasal dari APBN, namun kegiatannya tidak rutin. Berbagai hambatan seperti pergantian pimpinan mengakibatkan terhambatnya kegiatan pokja. Pada tanggal 10 Januari 2012 dibentuk kembali Kelompok kerja Pengarusutamaan Gender Pendidikan di Kabupaten Indramayu dengan nomor SK dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu Nomor 800/Kep.02-PLS/2012. Terdapat 12 orang anggota Pokja Pendidikan dengan ketua Kepala Bidang PLS.

Data profil gender bidang pendidikan di Kabupaten Indramayu belum ada sampai saat ini. Terdapat Profil Pendidikan Kabupaten Indramayu tahun 2010, namun data yang berkaitan dengan APS, APK dan APM tidak dipilah berdasarkan jenis kelamin.

Rincian PUG di Kabupaten/Kota dalam Program Pendidikan selama Dasawarsa Terakhir

K 2: Kegiatan Pokja PUG di Provinsi

Program dan kegiatan PUG Pendidikan Propinsi adalah sebagai berikut:

- Pada tahun 2006 dan 2007 melakukan kegiatan *capacity building* kabupaten/kota.
- Pada tahun 2008:
 - Penyusunan *Position Paper* PUG Bidang pendidikan Jawa Barat.
 - Melakukan kegiatan *capacity building* stakeholder di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dan di beberapa sekolah di Cianjur.
 - Kerjasama kemitraan dengan PSW Unpad, PSW UPI dan PSW IPB dan BPPKB Provinsi Jawa Barat.
- Tahun 2009:
 - Capacity building pada kabupaten/kota.
 - Pelatihan; penyusunan buku profil; penyusunan buku analisis.

- Pemberian *dana block grant* piloting di 5 Kabupaten yaitu yaitu Subang, Sukabumi, Tasik, Kota Bogor dan Karawang (masing-masing Rp 80 juta).
- Penyusunan buku “Keterkaitan Sistem Keluarga dan Sekolah terhadap Kenakalan Pelajar”.
- Penyusunan buku analisis bahan ajar yang responsif gender tingkat SD, SMP dan SMA/SMK.
- Pada tahun 2010:
 - Pembentukan kembali Pokja Gender Pendidikan di tingkat Provinsi.
 - Sosialisasi PUG tingkat pemangku kebijakan (Kasi/Kabid PNFI se Jawa Barat) dengan dana APBD.
 - Pelatihan PSBG untuk Kepala Sekolah tingkat SD, SMP, SMA/SMK se Jawa Barat (dana APBD).
 - Capacity building kabupaten/kota.
 - Pemberian dana *block grant* pada 21 Kabupaten/Kota untuk pembentukan Pokja gender tingkat kabupaten/ Kota (masing-masing Rp 25 juta).
 - Penyusunan profil gender tahun 2010.
- Pada tahun 2011:
 - Pemberian bantuan PUG langsung ke sekolah SD, SMP, SAM/SMK untuk sosialisasi silabus tingkat satuan pendidikan (masing-masing Rp 15 juta).
 - Pembuatan leaflet, poster dan buku pedoman PUG untuk bahan sosialisasi.
- Rencana kegiatan pada tahun 2012 :
 - Direncanakan mendapat dana APBN Rp 200 juta.
 - Direncanakan mendapatkan dana anggaran APBD yang jumlahnya belum tahu (15 juta/ satuan pendidikan-PKBM, SD, SMP, SMA, SMK).
 - Direncanakan untuk menyusun Profil Gender Tahun 2012 dan analisis bahan ajar.

K 2: Kegiatan Pokja PUG di Kabupaten Indramayu

Program dan kegiatan PUG Pendidikan Propinsi adalah sebagai berikut:

- Pokja Pendidikan Kabupaten Indramayu tidak mempunyai kegiatan rutin.
- Dukungan pemerintah sudah cukup banyak. Dana APBD provinsi pada tahun 2010 diberikan pada 3 sekolah yang mendapatkan Hibah untuk menerima bantuan (sasarannya SMK Swasta dan negeri). Untuk tahun 2010 ada bantuan untuk PKBM sebesar Rp 7,5juta, untuk SD sebesar Rp10 juta, SMP sebesar Rp10 juta, dan SMA sebesar Rp 10 juta dengan total dana sebesar Rp 37,5 juta. Untuk Dinas Pendidikan Kabupaten diberikan dana sebesar Rp 25 juta.
- Kegiatan yang dilakukan selama ini adalah menunggu mendapat undangan dari Pokja PUG Pendidikan Propinsi untuk dilatih gender bidang pendidikan. Pada tahun 2011 Pokja Pendidikan Kab. Indramayu mendapatkan dana Rp 60 juta dari APBD Propinsi namun tidak diambil karena proses administrasinya sangat rumit sehingga pegawai menjadi malas untuk membuat proposal. Disamping itu data pendidikan kabupaten tidak tersedia berdasarkan jenis kelamin sehingga sulit untuk menemukan isu gender dalam penulisan proposal.
- Pada tahun 2011 Pokja Pendidikan Kab. Indramayu mengajukan proposal dan mendapatkan dana Rp 100 juta dari APBN. Namun demikian dana tersebut kemudian dikembalikan lagi karena Pokja belum mampu dan belum siap untuk melakukan kegiatan. Rencana kegiatan adalah sosialisasi tentang responsif gender kepada Pokja dan tenaga pendidik serta penilik di Kab. Indramayu.
- Selama ini belum ada ketersediaan dana dari APBD Kabupaten dikarenakan pokja belum mampu meyakinkan bagian anggaran akan pentingnya integrasi gender ke dalam program-program pendidikan.
- Kabupaten Indramayu tidak mengajukan proposal ke Pokja Propinsi untuk kegiatan tahun 2012 dengan alasan prosedur rumit dan merepotkan.

Dinas Pendidikan dan Bapeda Kabupaten Indramayu telah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi pembinaan melalui program formal (sosialisasi secara langsung kepada sekolah-sekolah) dan informal (melalui pendidikan PLS/kediknasan/ lembaga-PKBM (pusat kegiatan belajar masyarakat, Lembaga Pendidikan Keterampilan (LPK). Dengan demikian tahapan kegiatan yang dilakukan pokja adalah masih pada tahap sosialisasi.

Terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007 tentang pendidikan di Kabupaten Indramayu yang berisi diantaranya:

- Pasal 5 Ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural dan kemajemukan bangsa.

- Bab XII tentang Pembinaan Kemuridan Pasal 26 Ayat 1 menyatakan bahwa pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat dan minat peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah; Ayat 2 menyatakan bahwa kegiatan pengembangan diri pada tingkat satuan pendidikan berupa pembentukan karakter dan pengembangan bakat, minat serta potensi peserta didik.
- Bab XVIII tentang Ketentuan Pidana Pasal 35 Ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang menolak pelaksanaan, tidak mendukung dan tidak memberikan kesempatan kepada anggota keluarganya untuk melaksanakan dan atau mengikuti wajib belajar 12 tahun dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Dengan demikian peraturan daerah tersebut secara tidak langsung menyebutkan adanya kesetaraan akses dan wajib belajar untuk murid laki-laki dan perempuan.

Selama ini di Kabupaten Indramayu belum dilaksanakan pelaksanaan baik pelatihan maupun pelaksanaan **Gender Responsif Budgeting**.

Berkaitan dengan pendataan pendidikan, Bagian perencanaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu bertanggung jawab dalam pendataan. Bagian perencanaan juga mempunyai format pendataan berdasarkan jenis kelamin. Pokja gender selama ini belum banyak bekerjasama dengan Bagian Perencanaan dalam pendataan pendidikan. Dalam keanggotaan struktur Pokjapun, Bagian Perencanaan tidak dimasukkan dalam keanggotaan pokja. Namun pada akhirnya data yang dipublikasi adalah data total tanpa dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Kendala yang dihadapi dalam pengumpulan data adalah minimnya biaya operasional. Metode pendataan yang digunakan oleh dinas adalah pendataan langsung yang dikumpulkan melalui sekolah-sekolah. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan oleh BPS adalah melalui metode sampling. Oleh karena itu ada perbedaan data antara BPS dan Dinas.

Setiap tahunnya disusun buku Indramayu dalam Angka. Publikasi terbaru adalah Indramayu dalam Angka 2011 (menggunakan data Tahun 2010), namun sayangnya tidak terpilah berdasarkan jenis kelamin.

Pelatihan gender diikuti oleh sebagian kecil (2 orang) saja dari anggota Pokja yang dilatih di Pokja Propinsi yaitu wakil ketua (kepala seksi Keaksaraan Fungsional) dan Sekretaris I (kepala seksi kesetaraan). Pelatihan yang diterima berupa konsep dan pengertian gender, gender analisis, *gender responsif budgeting* dan pendidikan sekolah berwawasan gender.

Pencapaian/dampak dari program PUG sampai kini dan praktek terbaik dari program PUG

Kondisi Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN), Kabupaten Indramayu

Di Kabupaten Indramayu terdapat 3 Madrasah Aliyah Negeri (MAN) dan 31 Madrasah Aliyah Swasta. Jadi hampir 92 persen Madrasah Aliyah adalah swasta. Tiga Madrasah Aliyah Negeri adalah MAN Indramayu, MAN Karangampel dan MAN Sukran (berbatasan dengan Kab. Subang).

Kepala sekolah menekankan bahwa dirinya sudah mendengar kata gender sejak lama, apalagi gender dalam artian jenis kelamin secara biologis. Bahwa secara biologis, perempuan adalah mengandung, melahirkan dan menyusui itu tidak bisa digantikan oleh laki-laki, sedangkan laki-laki tumbuh jakun, jenggot dan kumis, hal ini juga tidak bisa digantikan oleh perempuan. Tetapi jika pengertian gender dalam artian sosial, maka dapat dikaitkan dengan lahirnya Agama Islam di Arab dengan salah satunya alasannya karena masalah gender. Masyarakat Arab jahiliah jaman dulu seringkali beranggapan bahwa anak perempuan tidak punya arti apapun, sehingga jika anak perempuan lahir harus dibunuh saat itu juga. Islam lahir adalah untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.

Dikatakan oleh Kepala Sekolah bahwa dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan di segala bidang, sekolah MAN Indramayu memberikan akses dan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk mengenyam pendidikan:

- Murid MAN Indramayu 63 persennya adalah perempuan, dan sisanya 37 persen adalah murid laki-laki. Terdapat 21 Rombel (rombongan belajar) dengan kelas 10 sebanyak 7 kelas, kelas 11 sebanyak 7

kelas dan kelas 12 sebanyak 7 kelas. Akses murid laki-laki dan perempuan terhadap perguruan tinggi juga sama.

- Sekolah menyadari betul bahwa tanggung jawab bidang pendidikan agar murid laki-laki dan perempuan dapat mengikuti semua kegiatan ekstrakurikuler seperti pencak silat, paskibraka, pramuka KIR (kelompok Ilmiah Remaja), kesenian (band, marawis, marching band, kalografi, dan baca tulis Al-Quran).
- Khusus mengenai pengarusutamaan gender (PUG) diberi sosialisasi oleh Bapak Kepala Bidang Mapeda Islam Provinsi Jabar tentang Kesetaraan gender dalam bidang pendidikan, tetapi hanya informasi belum sampai pada implementasi di sekolah.
- Mengetahui ada Pokja PUG di Disdik baru mendengar saat tim diskusi pada tanggal 24 Januari 2012. Termasuk informasi adanya peluang mendapatkan dana PUG dari Provinsi maupun Kabupaten, sekolah MAN baru mengetahui karena selama ini belum pernah ada sosialisasi/ pelatihan mengenai PUG.

Pelaksanaan PUG di sekolah:

- Dalam rangka penerimaan peserta didik baru tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan karena murid diterima sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan. Faktanya adalah bahwa 63 persen adalah murid perempuan dan 37 persen adalah murid laki-laki.
- Akses perempuan di tingkat SMA/ MAN/ SMK adalah luar biasa, khususnya di MAN Indramayu. Dengan banyaknya murid perempuan di MAN dan SMK (di Eretan) memperlihatkan adanya pergeseran nilai bahwa dahulu perempuan tidak perlu sekolah tinggi karena pada akhirnya juga akan ke dapur, namun saat ini fakta menunjukkan adanya pergeseran pemahaman masyarakat dengan banyaknya anak perempuan yang sekolah.
- Ada kesenjangan prestasi murid di tingkat SMA/ MAN/ SMK antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan prestasi dari 21 kelas, rangking pertama dari 20 kelas adalah perempuan, dan rangking pertama dari 1 kelas adalah laki-laki. Hal ini disebabkan karena anak perempuan lebih tekun dan rajin.
- Berdasarkan data, murid perempuan unggul di mata pelajaran Bahasa, sedangkan laki-laki unggul di mata pelajaran matematika dan ekonomi.
- Akses murid laki-laki dan perempuan pada intra/ ekstrakurikuler adalah setara. Murid laki-laki dan perempuan mengikuti LKBB/ Lomba Ketangkasan baris berbaris tingkat Kabupaten dan mendapat pertama (16 murid dengan 12 perempuan dan 4 laki-laki).
- Ekskul yang wajib adalah Pramuka, PMR, paskibra untuk kelas 10 memilih salah satu; Seni: marching band dan band; Agama: marawis, al-quran, terjemah al-quran. Untuk keputrian ada tarbiyutmisia. Ekskul yang umumnya diminati oleh perempuan adalah paskibra, PMR, KIR (Kelompok Ilmiah Remaja), pencak silat, band, dan Qiroah. Ekskul yang umumnya diminati oleh laki-laki adalah sepakbola, dan marawis. Ekskul yang diminati secara berimbang oleh laki-laki dan perempuan adalah pramuka, marching band, dan kaligrafi.
- Murid perempuan saat ini sudah mulai aktif melakukan aktivitas di sekolah. Dahulu yang masuk ke ruang TU biasanya anak laki-laki untuk mengambil sarana karena yang menjadi Ketua Murid adalah laki-laki. Namun saat ini banyak dilakukan oleh murid perempuan karena sekitar 40 persen Ketua Murid adalah perempuan.
- Seringkali pada upacara bendera yang menjadi pemimpin upacara adalah perempuan.
- Tingkat *drop out* adalah sangat kecil yaitu hanya 1 murid perempuan (Kelas 12) karena masalah pergaulan/pacaran.
- Tidak ada kesenjangan gender dalam hal kehadiran murid, karena kehadiran merupakan salah satu syarat untuk mengikuti ujian, sehingga murid menjaga tingkat kehadirannya.
- Banyak murid perempuan yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Pada awalnya lulusan MAN difokuskan untuk melanjutkan ke jalur Departemen Agama. Namun dengan adanya perubahan kurikulum menjadi kurikulum yang disamakan dengan Departemen Pendidikan Nasional, maka menyebabkan murid tidak hanya melanjutkan ke jalur Depag, namun juga masuk ke Perguruan Tinggi umum (baik melalui jalur PMDK maupun tes) yaitu ke UNJ, UPI, UGM, UNSOED dan PT lainnya. Murid perempuan banyak yang masuk ke Perguruan Tinggi melalui jalur PMDK.

Pendataan Sekolah:

- MAN Indramayu membina 14 Madrasah Aliyah Swasta. Kendala pengumpulan data adalah adanya jumlah data yang berubah-ubah pada MA swasta. Sekolah swasta seringkali terlambat memberikan data dan mendapatkan informasi.
- Format data berasal dari pusat, karena Kemenag bersifat vertikal, mulai dari Kemenag pusat, Kemenag

Mapeda (Provinsi), dan Kasi Mapeda (Kabupaten) memberikan data yang berisikan data madrasah.

- Pengumpulan data dilakukan dalam waktu yang cepat yang merupakan salah satu kendala karena banyak sekolah swasta yang lokasinya berjauhan.
- Pengumpulan data awalnya dilakukan di 3 sekolah MAN negeri selanjutnya diberikan ke Kemenag.

Sarana dan Prasarana:

- Sekolah kekurangan 1 kelas, sehingga menggunakan salah satu aula untuk ruang kelas.
- Untuk toilet sudah terpisah berdasarkan jenis kelamin namun dalam penggunaannya belum terpisah.
- Hingga saat ini belum ada ruang ganti baju untuk murid. Murid biasanya ganti baju di salah satu ruangan di masjid.
- Sumber air berasal dari PDAM. Biaya pengeluaran untuk PAM, listrik dan telepon adalah sebesar Rp 3 juta lebih/ bulan.

Pelaksanaan PUG di Sekolah/ Madrasah

- Hingga saat belum pernah dilaksanakan kegiatan gender di sekolah, baru saat ini adalah yang pertama kali diberikan sosialisasi tentang gender.
- Pelatihan yang pernah diterima oleh guru MAN adalah pada tahun 2002 ada pendidikan kesehatan/ life skill education yang diadakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan UNESCO di Bandung yang mensosialisasikan mengenai gender. Guru yang diwakili MAN Indramayu adalah guru matematika dan guru penjas.

Kondisi Sekolah SMK Hasanudin-Eretan Kulon, Kabupaten Indramayu

Keadaan umum sekolah:

- SMK Hasanudin baru 5(lima) tahun berdiri di lingkungan keluarga nelayan.
- Berdasarkan data sekolah terdapat keseimbangan antara murid laki-laki dan perempuan mulai kelas 10 sampai 12. Perbandingan jumlah murid laki-laki dan perempuan dari kelas 10-12 relatif sama, dimana jumlah murid laki-laki sebanyak 110 orang dan jumlah murid perempuan sebanyak 108 orang. Murid SMK Hasanuddin ini terbagi menjadi delapan rombel (rombongan belajar). Dengan memperhatikan rombel ideal, menurut pengakuan kepala sekolah (Pak Royani) masih memerlukan tambahan empat rombel.
- Sebagian besar guru berstatus non PNS, dimana hanya ada satu orang yang berstatus PNS merangkap wakil kepala sekolah. Adapun kepala sekolah masih dirangkap oleh ketua yayasan. Perbandingan jumlah guru laki-laki dan perempuan relatif sama (tidak semua guru hadir dalam FGD, sehingga perlu dicek pada daftar guru).
- Menurut pengakuan kepala sekolah, murid SMK tidak dipungut uang sekolah, tetapi yang ada hanya uang praktek sebesar 30 ribu rupiah per bulan. Adapun biaya operasional dan gaji guru diambil dari iuran para nelayan, pembeli, donatur (sekitar 25 orang), sumbangan dari pengunjung rumah makan Pesona Laut (dimana pemiliknya merupakan ketua komite sekolah).
- Terkait dengan kegiatan PUG, SMK Hasanuddin telah mendapat bantuan (tahun 2007) dari Dinas Pendidikan Propinsi melalui Dinas Pendidikan Indramayu. Bantuan yang diterima digunakan untuk kegiatan sosialisasi bagi para murid dan rumah tangga disekitar SMK. Dalam kegiatan sosialisasi Gender, peserta yang hadir lebih banyak perempuan sekitar 90 persen (ibu rumah tangga karena suami pada umumnya pergi melaut).
- Dalam penerimaan murid tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dimana pilihan diserahkan kepada murid. Dalam belajar dan praktek tidak ada pemisahan atau perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kecuali hal-hal khusus, misalnya pelajaran tentang kecantikan, cara berpakaian dan lain-lain. Murid laki-laki dan perempuan mempunyai akses yang setara dalam pembelajaran di kelas dan penugasan sekolah.
- Pelajaran keterampilan hidup (*Life skills*) sebagai ekstrakurikuler diajarkan pada murid laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan antara murid laki-laki dan perempuan dalam mata pelajaran agama Islam seperti mengurus jenazah, dan lain-lain, kecuali ada yang khusus untuk perempuan tentang kewanitaan (keputrian), kegiatan perempuan sehari-hari (mungkin maksudnya kecantikan, berdandan dan lain-lain). Dalam kegiatan ekstra kurikuler seperti silat, seringkali yang menjadi ketua (istilah kepala sekolah komandan) adalah perempuan.

Nilai Pelajaran, Melanjutkan Sekolah dan Absensi:

- Prestasi murid perempuan dan laki-laki relatif sama. Hal ini terbukti dari rata-rata nilai pelajaran yang dicapai murid perempuan dapat dikatakan sama dengan murid laki-laki untuk pelajaran Bahasa Indonesia, Agama, PPKN, IPS, Ekonomi dan Matematika.
- Rata-rata nilai pelajaran yang dicapai murid perempuan lebih tinggi dari murid laki-laki untuk pelajaran Bahasa Inggris.
- Murid SMK Hasanudin lulus 100 persen pada saat Ujian Nasional (UN). Dalam dua tahun berturut-turut, murid SMK Hasanudin lulus semua (hasil UN). Sebanyak 80 persen murid yang lulus terserap (atau mendapat) pekerjaan.
- Selama tahun 2010 tidak ada murid yang putus sekolah
- Pada tahun 2010 murid yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi yaitu hanya 2 laki-laki dan 2 perempuan. Hal ini berarti bahwa ada kesetaraan murid laki-laki dan perempuan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi meskipun sangat minimal.
- Tingkat kehadiran murid perempuan lebih tinggi dibandingkan murid laki-laki. Alasannya tempat tinggal (akses transportasi) murid laki-laki pada umumnya lebih jauh dibandingkan dengan murid perempuan (ada sebagian kecil murid perempuan yang tempat tinggalnya jauh). Disamping itu pada saat musim melaut, murid laki-laki membantu ayahnya untuk pergi ke laut.
- Terkait data murid dan guru sudah terpilah menurut jenis kelamin, tetapi untuk pencapaian nilai murid belum terpilah (masih total). Format data juga belum standar dari Dinas Pendidikan.

Keadaan fasilitas sekolah cukup memadai, misalnya:

- Kamar kecil sangat terbatas jumlahnya. Idealnya perbandingannya adalah 2 kamar kecil untuk murid perempuan dan 1 kamar kecil untuk murid laki-laki. Toilet yang tersedia hanya satu, dimana penggunaannya lebih sering murid laki-laki. Sementara murid perempuan apabila ingin ke toilet biasanya pulang ke rumah masing-masing. Berdasarkan jumlah murid masih membutuhkan sebanyak 10 toilet yang direncanakan pengadaannya secara bertahap.

Data indikator pendidikan:

- Tahun 2007, putus sekolah 2 orang murid perempuan.
- Tahun 2008, tidak ada yang putus sekolah.
- Tahun 2009, putus sekolah satu orang murid laki-laki.
- Tahun 2010, tidak ada yang putus sekolah.
- Tahun 2011, pindah sekolah satu orang.
- Penyebab putus sekolah bagi murid laki-laki karena membantu orang tua melaut, sedangkan bagi murid perempuan karena menikah (pernikahan dini). Terkait dengan pernikahan dini, sebenarnya ada pencegahan dari pihak sekolah, namun karena pihak laki-laki memaksa, pihak sekolah tidak bisa menahan agar murid tersebut tetap sekolah.

Keadaan Lainnya:

- Partisipasi orangtua dalam kegiatan pertemuan di sekolah didominasi oleh para ibu (90% partisipasi) karena para ayah pergi melaut.
- Terdapat 2 (dua) guru yang mendapatkan pelatihan yang diselenggarakan di Pokja Pendidikan Propinsi pada bulan Juli 2010.
- Peraturan Kehadiran:
 - a. Murid harus datang di sekolah 10 menit sebelum pelajaran dimulai.
 - b. Murid yang terlambat dapat masuk ke kelas dengan ijin guru kelas.
 - c. Murid yang absen harus membawa surat dari orangtua (untuk 2 hari saja) atau surat dokter apabila absen lebih dari 2 hari.
- Peraturan Seragam:
 - a. Seragam abu-abu dan Hitam untuk hari Senin dan Selasa (pakai kerudung untuk murid perempuan).
 - b. Seragam putih dan hitam untuk hari Rabu dan Kamis.
 - c. Seragam Muslim untuk hari Jum'at.
 - d. Seragam Pramuka untuk hari Sabtu.
- Peraturan Umum Kegiatan Sekolah:
 - a. Memelihara keamanan, kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah.
 - b. Bertanggung jawab terhadap kehadiran sekolah mulai jam 6.30 pagi sampai pembelajaran selesai.

- c. Membaca Qur'an.
- d. Berpartisipasi dalam pembelajaran di kelas mulai jam 7.00 pagi sampai selesai.
- e. Menyediakan sendiri keperluan buku dan materi pembelajaran secara individu.
- f. Menikuti aktivitas sekolah.
- g. Melaporkan semua aktivitas ke wali kelas.
- h. Menjaga kebersihan sekolah.
- Larangan bagi Murid:
 - a. Tetap di kelas selama jam bejara.
 - b. Dilarang merokok, membawa minuman keras, atau mengkonsumsi narkoba.
 - c. Dilarang mencorat-coret tembok, bangku dan lingkungan sekolah lainnya.
 - d. Dilarang menikah selama menempuh masa sekolah.
- Sangsi Bagi Murid:
 - a. Peringatan verbal selama 3 kali sebelum peringatan tertulis.
 - b. Peringatan tertulis ke orangtua mengenai status murid di sekolah.
 - c. Persetujuan drop out sekolah dari komite sekolah dan dilaporkan ke Dinas Pendidikan.

Kondisi Sekolah SDN V-Eretan Kulon, Kabupaten Indramayu

Keadaan umum sekolah:

- Pada dasarnya kesetaraan akses di SDN V Eretan Kulon sudah dilaksanakan dalam pemberian Kegiatan Belajar pada murid laki-laki dan perempuan dan dalam pelaksanaan ekskul.
- Pengawas sekolah berharap dengan adanya FGD ini ada dampak bagi sekolah terutama perbaikan sarana kelas. Melihat situasi dan kondisi di sekolah sangat mengkhawatirkan. Meskipun situasi sangat minimu, namun memiliki prestasi yang tidak kalah dengan SD lainnya. Sekolah SDN V Eretan Kulon menjadi andalan di Kecamatan Kadanghaur karena beberapa prestasinya.
- Kendala alam seperti seringnya banjir di setiap saat karena hujan dan air laut pasang pada setiap bulannya yang membuat anak-anak terganggu kegiatan belajarnya. Meskipun demikian, murid tetap semangat dan termotivasi untuk terus belajar.
- Sarana dan prasarana sekolah sangat memprihatinkan. Kondisi lantai kelas sebagian dari tanah.
- Kamar kecil murid tidak tersedia sehingga murid harus pulang ke rumah untuk buang air kecil. Setiap hari ada piket dari murid kelas 4 sampai 6 untuk membawa seember air bersih untuk keperluan cuci tangan murid, mengepel kelas yang lantainya keramik dan mengepel ruang guru serta keperluan kamar kecil guru.

Keadaan murid

- Jumlah murid laki-laki sebanyak 242 orang, yaitu 145 murid laki-laki (59,92%) dan 97 murid perempuan (40,08%).
- Belum ada pendataan terpilah berdasarkan jenis kelamin baik pendataan murid, nilai murid maupun guru.
- Berdasarkan informasi wakil kepala sekolah, umumnya rata-rata nilai murid laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan nilai murid perempuan.
- Berkaitan dengan kehadiran, murid perempuan lebih rajin dibandingkan dengan murid laki-laki. Pada musim Barat anak laki-laki banyak yang tidak masuk ke sekolah, karena Hujan/masih tidur. Pada saat musim melaut, murid laki-laki ikut ke laut (biasanya murid kelas 4-6). Pada muridk kelas tinggi (Kelas 4-6) banyaknya murid perempuan tidak masuk pada musim kemarau karena harus bekerja mengolah ikan.
- Di kelas murid laki-laki lebih sering ribut dibandingkan dengan murid perempuan.
- Berkaitan dengan angka melanjutkan, maka untuk tahun 2011, sebanyak 100 persen murid laki-laki dan perempuan melanjutkan ke sekolah, khususnya ke ke MTs swasta di desa yang sama. Hal ini dikarenakan dekatnya lokasi MTs dengan tempat tinggal murid, dan karena faktor biaya yang gratis dari sekolah MTs tersebut. Sekolah MTs swasta ini memiliki program khusus untuk anak nelayan miskin.

Pelaksanaan PUG di sekolah tidak ada.

- Secara tertulis belum ada kebijakan yang responsif gender karena guru juga belum mengerti tentang konsep gender. Guru-guru masih dibebani oleh kondisi sarana dan prasarana dasar sekolah yang belum terpenuhi. Adapun tata tertib sekolah sudah ada yang menyatakan tidak boleh berkata-kata kasar kepada semua murid.
- Belum ada stupun guru yang pernah mendapatkan pelatihan gender. Pelatihan yang pernah diterima berkaitan dengan pengolahan hasil laut, pendidikan karakter dan metode pengajaran PAKEM.

Masalah yang dihadapi Murid dan Bantuan:

- Sebanyak 23 murid (16 laki-laki dan 7 perempuan) yang drop out karena alasan membantu ekonomi orangtuanya dan faktor malas. Umumnya masyarakat nelayan kurang menganggap pentingnya pendidikan mestikun biaya sekolah itu gratis.
- Adanya pemberian Bantuan Murid Miskin (BSM) sebanyak 62 murid. Tahun 2011/2012 sebanyak 26 murid perempuan dan 36 murid laki-laki mendapatkan BSM sebesar Rp180 000/tahun/murid yang diterima oleh orangtua.
- Adanya bantuan pertamina untuk murid miskin. Tahun 2011 sebanyak 24 murid mendapatkan bantuan berupa peralatan sekolah seperti tas, dan alat tulis.
- Masalah anak dipekerjakan di laut merupakan masalah yang mengganggu hak belajar anak. Anak laki-laki mempunyai nilai ekonomi tinggi, karena diajak orangtuanya untuk membantu melaut mulai dari sehari sampai 2 bulan.
- Masalah ekonomi pada anak perempuan dari keluarga miskin terutama yang tidak mampu melanjutkan ke SMP dan yang drop out, maka akan bekerja menjadi pembantu rumah tangga di rumah makan.

Rangkuman masalah, kesenjangan/tantangan dan rekomendasi

Ringkasan Isu dan Keadaan Lokasi:

- Dukungan pemerintah pusat dan propinsi sudah cukup banyak dalam meningkatkan pelaksanaan PUG di tingkat Kabupaten dan satuan pendidikan. Namun Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu masih belum menerima bantuan secara signifikan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu pernah mengembalikan dana dari APBN dan APBD pada tahun 2011 masing-masing sebanyak sekali.
- Di tingkat sekolah tidak ada yang diskriminasi dalam kegiatan belajar mengajar antara murid laki-laki dan perempuan. Pemberian bantuan murid miskin dan beamurid dari donor juga diberikan sesuai dengan kebutuhan murid laki-laki dan perempuan.
- Kebijakan kesetaraan gender belum mampu menjangkau setiap jenjang, jalur dan jenis pendidikan di daerah. Meskipun ada Perda Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007 tentang pendidikan yang menyatakan adanya denda bagi orangtua yang tidak menyekolahkan anaknya yaitu berupa ancaman kurungan maupun denda uang, namun masih ditemui masalah murid karena factor ekonomi. Sehingga kendala wajib belajar masih ditemui oleh sebagian murid laki-laki dan perempuan.
- Pelatihan dan sosialisasi gender di Kabupaten Indramayu masih sangat minim. Pernah ada pelatihan guru yang reponsif gender pada tahun 2010. Namun belum pernah diadakan lagi.

Rekomendasi untuk pihak Dinas Propinsi dan kabupaten:

- Peningkatan sinergisitas antar Pokja PUG Propinsi dan PUG Kabupaten agar masalah birokrasi dalam pencairan dana APBD dan APBN dapat lebih lancar dan sederhana.
- Peningkatan sinergisitas antar lintas sektoral (PUG Kabupaten/dan PUG Pendidikan di Dinas Pendidikan).
- Peningkatan sinergitas dari tiap lini untuk mempercepat PUG pendidikan di tingkat kabupaten. Selain itu Bagian PME (perencanaan, monitoring dan evaluasi) dilibatkan dalam Pokja PUG Pendidikan Kabupaten agar meningkatkan akses data bidang pendidikan.
- Peningkatan monev internal PUG di bidang pendidikan melalui komunikasi dengan Pokja Kabupaten, forum kepala sekolah (MK3S), dewan pendidikan dan komite sekolah.

Rekomendasi dari sekolah agar PUG dapat dilaksanakan di satuan pendidikan:

- Bagi sekolah yang sudah memenuhi persyaratan sarana dan prasarana dasar sekolah yang memadai seperti MAN Indramayu dan SMK Hasanudin Eretan Kulon, maka sosialisasi dan pelaksanaan PUG bidang pendidikan di satuan pendidikan pantas dan siap dilaksanakan.
- Namun bagi sekolah yang belum memenuhi persyaratan sarana dan prasarana dasar sekolah yang memadai seperti SDN V Eretan Kulon, maka sosialisasi dan pelaksanaan PUG bidang pendidikan di satuan pendidikan belum pantas untuk dilaksanakan.
- Peningkatan pemberian media KIE berkaitan dengan sosialisasi gender (software, buku panduan) ke satuan pendidikan agar civitas sekolah lebih paham tentang pengarusutamaan gender bidang pendidikan.
- Peningkatan sosialisasi mengenai PUG dengan menggunakan media KIE yang disusun berdasarkan pertimbangan local wisdom dan kebutuhan lokal.
- Dukungan dana untuk pelaksanaan PUG di sekolah.
- SDM yang handal dan mencukupi melalui training guru-guru.

Kota Kupang (Nusa Tenggara Timur)

Pendahuluan

A. Profil Nusa Tenggara Timur

NTT terletak di sebelah Selatan khatulistiwa di posisi 8 ° - 12 ° garis lintang dan 118 ° - 125 ° bujur timur. Batas NTT, utara: Laut Flores; Selatan: Samudera Hindia; Tenggara: Republik Timor Leste, dan Barat: NTB.

NTT merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 566 pulau. Ada 4 pulau besar di NTT termasuk Flores, Sumba, Timor dan Alor populer disebut FLOBAKemenag. NTT terdiri dari 21 kabupaten dan 1 kota. Banyak kelompok etnis yang tinggal di daerah yang agak tersebar yaitu Helong, Dawan, Tetun, Kemak, Marae, Rote, Sabu/Rae Havu, Sumba, Manggarai Riung, Ngada, Ende Lio, Sikka Krowe-Muhang, Lamaholot, Kedang, Labala dan Alor. Kondisi hidup beragama di NTT sangat harmonis. NTT memiliki 5 agama besar, yaitu: Katolik Roma, Protestan, Islam, Hindu dan Budhis cukup berkontribusi untuk kemajuan NTT khususnya di bidang pendidikan yang responsif gender dan komunitas sosial ekonomi di NTT.

Penduduk di NTT dari tahun ke tahun semakin meningkat. Data 2010 yang dibuat oleh BPS menunjukkan bahwa penduduk 4.679.316 orang dan sebanyak 2.355.782 adalah perempuan. Kabupaten TTS memiliki populasi tertinggi dengan 9,41% dari total penduduk, menyusul Kabupaten Belu 7,53% dan Kota Kupang 7,17%. Sebaliknya, kabupaten yang paling padat penduduknya adalah Sumba Tengah, Sabu Raijua dan Sumba Barat. Total populasi di tiga kabupaten ini masing-masing secara berurutan adalah 62.510 orang, 73.000 orang dan 111,023 orang.

Kebijakan pembangunan pendidikan seperti RPJMD NTT 2009-2014 sudah memasukkan kesetaraan gender di semua sektor termasuk pendidikan. Dalam Hukum Provinsi dan Perencanaan Strategis menyatakan bahwa penekanan kebijakan pendidikan dalam orientasi pemenuhan penyelenggara pendidikan dasar serta memperkuat pengembangan pendidikan menengah dan tinggi relevan dengan kebutuhan pembangunan.

Berdasarkan data dokumen dan statistik pendidikan, tampak kesenjangan gender di berbagai aspek pendidikan, aspek tertentu terdiri dari melek huruf dan partisipasi sekolah di tingkat pendidikan dasar dan pendidikan tinggi, dan partisipasi perempuan lebih kecil dari laki-laki.

Konstruksi budaya di NTT adalah dimana budaya laki-laki mendominasi. Hal ini terbukti dalam semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan perempuan jauh di belakang laki-laki dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari pembangunan.

B. Profil Kabupaten Kupang

Batas- batas Kabupaten Kupang: Utara dan Barat berbatasan dengan Laut Sawu; Selatan: Samudera Hindia Timur: Kabupaten TTS dan Republik Timor Leste. Kabupaten Kupang terdiri dari 29 kecamatan, 218 desa dan 22 kelurahan. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, penduduk Kabupaten Kupang sebanyak 303.989 orang. Penduduk laki-laki adalah 155.808 orang dan 148.190 orang adalah perempuan. Angka rasio seks adalah 105 (jumlah perempuan lebih 5% dari laki-laki). Tingkat pertumbuhan populasi dari 2,55 untuk tahun 2000-2010.

Budaya Kabupaten Kupang termasuk etnis Timor (Helong dan Dawan), etnis Sabu, Rote dan etnis dari kelompok berpindah (Flores, Sumba, Alor, Bugis, Jawa, dll) serta etnis yang berasal dari pengungsi Timor Timur. Agama mayoritas Kabupaten Kupang adalah Kristen.

Kebijakan pendidikan tercantum dalam peraturan Kabupaten No.5/2005 tentang rencana strategis kabupaten Kupang. Pada kenyataannya pendidikan formal menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia sepuluh tahun ke atas yang hanya lulus di sekolah dasar adalah 33,48% (Laki-laki 31,13% dan perempuan 35,77%) dan yang tidak atau belum memiliki pendidikan formal 42,31% (Laki-laki 44,32% dan perempuan 40,35%). Demikian pula, jika dilihat dari jenis kelamin, perempuan yang melanjutkan pendidikan ke SMP dan di pendidikan yang lebih tinggi lainnya masih lebih kecil

dibandingkan penduduk laki-laki (Statistik Kabupaten Kupang tahun 2010). Hal ini karena adanya pandangan lebih baik prioritas pendidikan diberikan kepada laki-laki dan pemahaman bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besar dalam membantu penghasilan keluarga sehingga mereka harus mendapat prioritas dalam pendidikan.

C. Profil Kota Kupang

Kupang merupakan salah satu kota sekaligus menjadi ibukota provinsi NTT. Di Kota administrasi Kupang terdiri dari 6 kecamatan dan 49 desa. Batas Kota Kupang: sebelah utara: Kupang teluk, selatan:Kecamatan Kupang Barat, Timur: Kecamatan Kupang Pusat dan barat: Kabupaten Kupang.

Sosial budaya kota Kupang ditunjukkan dengan berbagai etnis, yaitu: Timor, Rote, Sabu, Flores, Sumba dan Alor. Pada tahun 2008 penduduk kota Kupang adalah 286.306 orang, laki-laki 145.385 orang dan 140.921 perempuan. Jika dilihat dari agama mayoritas adalah Kristen sebanyak 164.120 orang dan selanjutnya diikuti oleh agama Islam dan Hindu.

Tinjauan Pengarusutamaan Gender di Pendidikan

Implementasi Kebijakan Pendidikan Responsif gender di NTT didukung oleh peraturan pemerintah sebagai berikut:

- Instruksi Presiden Nomor 9/2000 tentang pengembangan Pengarusutamaan Gender di Indonesia
- Peraturan Menteri Departemen Pendidikan & Kebudayaan Nasional No 15/2008 tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam Pendidikan,
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.84/2008 tentang Petunjuk Pengarusutamaan Gender untuk Pendidikan mulai pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai unit pendidikan.

a. Melembagakan Pengarusutamaan Gender ke dalam Kebijakan Pembangunan di NTT.

Untuk mempercepat upaya keadilan dan kesetaraan dan menindaklanjuti berbagai peraturan/perundangan dan berbagai peraturan pemerintah, Gubernur mengeluarkan SK Gubernur NTT No.8/2001 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender NTT, serta untuk memperkuat keputusan tersebut, pemerintah mengeluarkan SK Gubernur NTT No.20/2009 tentang tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT. Untuk mewujudkan KKG (keadilan dan Kesetaraan gender) dalam Pendidikan, kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT menerbitkan Surat Keputusan No.13/V/11/PK/2004 tentang kelompok kerja gender bidang pendidikan NTT. Kemudian diperbarui dengan Surat Keputusan No.909/721/PK/2007 tentang Kelompok Kerja gender sektor pendidikan di NTT. Diperbarui lagi dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan NTT No.421/18/PK/2008 tentang Kelompok Kerja Gender Sektor pendidikan di NTT.

b. Melembagakan Pengarusutamaan Gender ke dalam Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Kupang

Kabupaten Kupang telah melakukan berbagai upaya terkait dengan integrasi nilai-nilai pengarusutamaan gender di berbagai sektor, tugas dan fungsi pemerintah di kabupaten Kupang. Sehingga tidak mengherankan bahwa pemerintah kabupaten Kupang dipilih sebagai proyek percontohan pengujian Pengarusutamaan Gender dalam pendidikan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Hal ini didukung oleh semangat pemerintah daerah kabupaten dan dukungan dari bupati sebagai bagian dari kelompok kerja gender pendidikan di daerah. Kemudian diperbarui dengan Surat Keputusan pengarusutamaan gender No.139/SKEP/HK/2009 tentang Kelompok Kerja Gender di sektor Pendidikan di kabupaten Kupang.

Salah satu elemen kunci dari proyek percontohan adalah penulisan modul pengarusutamaan gender di bidang pendidikan. Modul tersebut dikembangkan oleh guru sekolah dasar, guru SMP dan SMA, PKBM, dan praktisi dan akademisi di tingkat provinsi; anggota kelompok kerja gender, fasilitator tingkat provinsi dan nasional. Secara keseluruhan proyek percontohan adalah bagian dari bantuan keuangan komunitas kepada Indonesia melalui AIBEP Australia (Australia Indonesia Basic Education Program, sebuah program bersama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia untuk Pendidikan Dasar).

c. Melembagakan Pengarusutamaan Gender ke dalam Kebijakan Pembangunan di Kota Kupang

Dengan penerbitan surat keputusan Walikota No.112/2004 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Kota Kupang, Surat Keputusan Walikota No.117/2004 tentang Focal Point Pengarusutamaan Gender dan No.176/2004 tentang kelompok kerja GSI, mencerminkan komitmen pemerintah untuk kota Kupang yang menjadi acuan bagi para pembuat kebijakan di semua bidang untuk pembangunan sektor. Pengarusutamaan gender dalam sektor pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang mengeluarkan Surat Keputusan No.801/2011 tentang pembentukan kelompok kerja sektor pendidikan di Kota Kupang, ini sesuai dengan moto kepala kantor “terus menangis di padang gurun dan bagi mereka yang kelaparan dan haus akan kebenaran akan menjadi sebuah oase dari pesan gender dalam hidupnya”.

Pengarusutamaan Gender Dalam Pendidikan

a. Program Pengarusutamaan Gender di Nusa Tenggara Timur.

Dengan koordinasi antara Pusat Studi Wanita dan Kelompok Kerja Gender di bawah kepemimpinan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Pemuda dan Olahraga, gubernur NTT telah mengelola beberapa program PUG di sektor pendidikan, termasuk:

- 1) 2003: Penelitian Program pada “Analisis Kebijakan Pendidikan”. Ringkasan eksekutif tersedia untuk kebutuhan dan permintaan masyarakat, namun tidak ada dokumen tertinggal karena relokasi sekretariat GWG (pokja gender).
- 2) 2004: Perluasan penelitian di tahun 2003 “Analisis Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Kupang”. Dokumen tidak ditemukan di kantor pokja gender (GWG) saat ini.
- 3) 2005: Penyelesaian Kertas Posisi, pelatihan untuk para pemimpin agama dan pemimpin masyarakat, PKBG, pembangunan kapasitas, pelatihan untuk pelatih. Anggaran dari APBN Rp200,000,000 dan dari APBD I tingkat provinsi Rp300,000,000. Alokasi anggaran dari APBD I digunakan untuk pengarusutamaan gender dalam sektor pendidikan, Kegiatan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Keluarga berwawasan Gender (PKBG), dan modal ventura.
- 4) 2006: sosialisasi gender, pengarusutamaan gender, pelatihan *gender analisis pathway (GAP)*, pelatihan untuk pelatih, peningkatan kapasitas untuk para pemimpin agama dan pemimpin masyarakat. Anggaran dari APBN Rp 200.000.000 dan dari APBD I Rp300. 000.000. Alokasi anggaran dari APBN tidak hanya untuk sektor pendidikan gender, juga untuk Aktivitas Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG), dan modal ventura.
- 5) 2007: *Roundtable Discussion* – diskusi *roundtable* (50 orang), tahap diskusi *roundtable* 2 (20 orang), pelatihan *gender analisis pathway (GAP)*, pelatihan untuk pelatih, pemberdayaan kelompok kerja, kampanye melalui media massa; membuat brosur, membuat billboard, update data berdasarkan jenis kelamin di Kota Kupang. Anggaran dari APBN Rp315.000.000 dan anggaran dari APBD I tidak tersedia.
- 6) 2008: diskusi *Roundtable*, pelatihan *Gender Analisis Pathway (GAP)*, penguatan kelompok kerja, advokasi, lokakarya Tinjauan responsif gender untuk bahan pengajaran, persiapan data terpilah di Kabupaten Kupang. Anggaran dari APBN Rp450.000,000 dan anggaran dari APBD I tidak dialokasikan karena anggaran diberikan kepada unit gender untuk perempuan dan anak gender di tingkat provinsi dan alasan lainnya adalah karena unit lintas sektor sehingga anggarannya ada di setiap Unit).
- 7) 2009: diskusi *Roundtable* tentang penganggaran responsif gender bagi para pemegang kebijakan, pertemuan reguler kelompok kerja PUG tingkat provinsi, lokakarya tentang analisis dan penyajian bahan pengajaran responsif gender, monitoring dan evaluasi program pengarusutamaan gender. Anggaran dari APBN Rp200.000.000 dan anggaran dari APBD tidak tersedia.
- 8) 2010: sosialisasi pentingnya isu-isu gender dalam pendidikan untuk masyarakat sipil, masyarakat dan pemimpin agama; advokasi pengarusutamaan kepada anggota legislatif periode 2009-2014 (belum dilaksanakan karena memiliki masalah internal di legislatif), sosialisasi sekolah yang responsif gender kepada para pemangku kepentingan pendidikan; persiapan sillabus dan rencana pelajaran yang responsif gender di sekolah formal dan non formal. Anggaran dari APBN Rp200.000.000 dan anggaran dari APBD tidak tersedia

- 9) 2011: Pokja Gender (GWG) dan PSW (WSC) telah melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:
 - a) Sosialisasi pengarusutamaan gender dalam pendidikan bagi para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan PAUD di kabupaten TTS.
 - b) Pelatihan PPRG bagi para perencana keuangan dan manajer sekolah dasar di kabupaten TTS
 - c) Pengembangan model pengarusutamaan gender pada pendidikan formal dan non formal di TTS dan Manggarai (di Manggarai tidak bisa dilaksanakan dan pindah ke kota Kupang karena kondisi cuaca, tidak ada transportasi yang tersedia untuk Manggarai).
 - d) Pelatihan dan persiapan silabus yang responsif gender untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial bagi murid SMP di kabupaten TTS.
 - e) Pengembangan model pengarusutamaan gender untuk pendidikan formal dan non formal di Kota Kupang (acara ini menggantikan kegiatan di Manggarai).

b. Program Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Kupang

Kabupaten Kupang dipilih sebagai daerah percontohan proyek pengarusutamaan gender oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Model proyek percontohan secara keseluruhan adalah bagian dari dukungan keuangan masyarakat yang disediakan oleh AIBEP-AUSAID, sebuah program kerjasama antara pemerintah Australia dan Indonesia untuk pendidikan dasar. Program percontohan dan anggaran telah digunakan untuk menjalankan kegiatan PUG:

- a. 2008: Advokasi, penyebaran model percontohan oleh kelompok kerja provinsi tentang pengarusutamaan gender bidang pendidikan di 2 kecamatan: Kupang Timur dan Kupang Tengah,
- b. Maret - April 2009: Advokasi, sosialisasi pembentukan kelompok kerja di kabupaten Kupang, bertemu dengan Bupati Kupang dan stafnya untuk mendapatkan dukungan Kemenag; dan kelompok kerja teknis difasilitasi oleh fasilitator gender dari tingkat provinsi dan kabupaten Kupang. Hasil dari kegiatan ini: menerbitkan surat keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Kupang.
- c. 2009: AIBEP dan Dinas Pendidikan telah melakukan banyak program PUG dalam pendidikan seperti
 - 1) Peluncuran model percontohan yang dihadiri oleh stakeholder (pemerintah dan LSM),
 - 2) Sosialisasi dan advokasi materi pelatihan yang responsif gender, *roundtable discussion*, persiapan dan merevisi bahan ajar, persiapan data terpilah, pelatihan manajemen, membuat anggaran responsif gender bagi para pemangku kepentingan pendidikan, penyusunan modul pengarusutamaan gender untuk sektor pendidikan.
 - 3) Pelaksanaan model percontohan di 2 kecamatan: Kupang Tengah adalah SD Katolik St Yoseph Noelbaki dan SMPN 1 di Kupang Tengah. Di Timor Kupang: Sekolah Dasar Inpres Nukurus, SMPN 5 dan juga PKBM Foppers. Semua kegiatan disponsori oleh AIBEP.
- d. 2010: Penerbitan modul pengarusutamaan gender untuk sektor pendidikan di Kabupaten Kupang (Anggaran dari AIBEP), sosialisasi anggaran responsif gender sektor pendidikan, pelatihan *Gender Analysis Pathway (GAP)*, pelaksanaan uji coba model di 2 kecamatan: Kupang Barat: SMP Negeri 1 dan SD Inpres Batakte, juga di kecamatan Fatuleu. Anggaran dari Direktur Jenderal PLS dan APBD I.
- e. 2011: Rencana untuk menerapkan model percontohan di 2 kecamatan: Takari dan Nekamese. Bapak Johni dan Ibu Yayuk telah mengurus untuk mengirimkan proposal untuk AIBEP Jakarta dan sampai sekarang kami masih menunggu tanggapan resmi dari AIBEP Jakarta.

c. Program Pengarusutamaan Gender di Kota Kupang

Kota Kupang baru membentuk Pokja Gender di Dinas Pendidikan. Kegiatan dipimpin oleh kelompok kerja pendidikan di Kupang dan yang belum pernah dilakukan selama 2011. Tidak ada anggaran, tidak ada sumber daya manusia dan staf yang bertanggung jawab untuk bergerak maju untuk menjalankan program PUG. Sebagai kelompok kerja gender yang baru dibentuk pada bulan Desember 2011. Kedua staf dan manajer di Dinas Pendidikan di kota Kupang perlu memperbarui pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola PUG. Partisipasi mereka dalam pelatihan dan lokakarya yang disediakan Pokja gender provinsi merupakan titik awal yang baik untuk meningkatkan kapasitas pokja gender di Kota Kupang.

Dampak dan Praktek Terbaik

Pengarusutamaan gender memiliki pengaruh strategi yang paling tepat untuk mencapai KKG. Tetapi kesenjangan gender masih terlihat di berbagai sektor kehidupan. Hal ini masih dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki yang merugikan perempuan. Untuk dapat mengubah tampilan dan pemahaman dan nilai-nilai bersama dalam masyarakat yang mendiskriminasi paradigma kemudian diarahkan untuk keadilan dan kesetaraan sektor pendidikan dinilai sebagai sektor yang paling strategis; dan dapat sebagai leading sector karena pendidikan dapat membentuk pola pikir manusia dari usia dini.

a. Praktik Terbaik

- 1) Publikasi modul "Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan Kabupaten Kupang",
- 2) Publikasi buku "Tuturan Adat" Dan PESAN mimbar pendekatan informal dengan pemimpin agama.
- 3) Pelaksanaan kegiatan gender dengan keterlibatan pemimpin agama dan pemimpin masyarakat.
- 4) Kegiatan gender di sekolah, yang melibatkan orang-orang kunci dari sekolah adalah kepala sekolah yang memiliki kekuasaan dan lebih mudah untuk menerapkan pengarusutamaan gender di sekolah.

b. Prestasi/dampak

- 1) Para guru dan pemangku kepentingan di sektor pendidikan memahami tentang pengarusutamaan gender
- 2) Beberapa guru dan stakeholder di sektor pendidikan mampu membuat silabus dan rencana pelajaran yang responsif gender.
- 3) Para pemangku kepentingan dan pembuat keputusan mampu membuat anggaran yang responsif gender di bidang pendidikan
- 4) Sekolah dapat membuat laporan bulanan yang terdiri dengan agregat data.

Persoalan yang Menantang Saat Ini dan Rekomendasi

Konstruksi budaya di NTT terkait dengan perbedaan peran, fungsi, tugas, status, sifat dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan secara alami tertanam terlalu lama dalam masyarakat telah menimbulkan kesenjangan gender bagi perempuan. Hal ini diakui bila pandangan/pemahaman akan nilai-nilai bersama masyarakat tersebut tidak mendapatkan strategi intervensi yang tepat, maka kondisi perempuan tidak akan mencapai status sosial yang tepat. Perempuan akan terus menjadi konsumen terpinggirkan, ter subordinasi dalam ruang domestik dan tempat kerja, terjebak stereotipi dalam kehidupan sehari-hari, dan berbeban ganda dikarenakan kekerasan. Hal ini jelas dilakukan dalam semua aspek kehidupan, perempuan jauh di belakang laki-laki dalam memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik.

a. Isu tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan

- 1) Perguruan Tinggi - universitas merupakan tempat para ahli PUG. Namun temuan fakta menunjukkan beberapa hal yang menarik untuk diselesaikan. Masalah-masalah yang muncul yang diidentifikasi adalah:
 - a) Manajemen: ada kesenjangan dalam jabatan struktural di perguruan tinggi. Dimana laki-laki mendominasi posisi struktural dibandingkan perempuan pengecualian di Universitas Kristen, Universitas Artha Wacana Universitas; anggaran belum terlaksana sebagaimana anggaran yang responsif gender.
 - b) Kurikulum: tidak ada studi gender di universitas, kecuali untuk briefing mahasiswa jurusan sosiologi dan pelayanan masyarakat/magang serta kursus studi gender di program pascasarjana.
 - c) Dalam pembelajaran: banyak murid perempuan yang memilih ilmu sosial dan murid laki-laki lebih suka ilmu pengetahuan yang mengarah ke karir profesional yang berbeda di masa depan.
 - d) Penelitian: penelitian gender tetap terbatas dalam kuantitas dan kualitas untuk mendukung PUG dalam pendidikan.

- 2) Pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan dasar 9-tahun merupakan prioritas untuk mencapai tujuan MDGs. Pengarusutamaan gender adalah bagian dari komitmen yang disepakati untuk memastikan pendidikan laki-laki dan perempuan mendapat layanan pendidikan dasar. Isu adalah:
 - a) Buku Teks: banyak buku teks yang membahas status dan fungsi perempuan dalam masyarakat banyak berpengaruh pada kesenjangan gender dalam proses pendidikan. Muatan paling banyak di buku teks, khususnya: sosial, Pancasila, pendidikan jasmani, bahasa Indonesia dan sastra, dan seni cenderung reponsive gender,
 - b) Akses perempuan lebih tinggi untuk departemen ilmu dasar seperti fisika, biologi, kimia sedangkan ilmu keteknikan seperti teknologi dan industri masih rendah.
- 3) Pemerintah Daerah.
Kebijakan pemegang dalam struktur pemerintahan didominasi oleh laki-laki, khususnya di lingkungan pendidikan, termasuk proses seleksi PNS untuk karir yang lebih tinggi dan posisi yang disebut Baperjakat, yang belum responsif gender. Kurang strategisnya posisi perempuan pengambil keputusan dalam pendidikan menyebabkan ketidaksetaraan gender tetap bertahan.
- 4) Masyarakat pada umumnya
Budaya mendominasi laki-laki masih kuat di NTT memungkinkan laki-laki lebih banyak daripada perempuan untuk pergi ke sekolah. Masyarakat secara keseluruhan percaya bahwa anak laki-laki (bukan perempuan) dalam pendidikan dan pemahaman bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besar dalam membantu penghasilan keluarga tetap kuat dalam kehidupan keseharian. Prioritas pertama PUG adalah mengubah pola pikir keluarga dan pendidikan di mana anak laki-laki dan perempuan akan menghabiskan hidup mereka. Budaya NTT seperti "belis" (mas kawin) pada saat pernikahan, terutama di beberapa etnis di Sumba, Rote, Flores Timur, dan Manggarai adalah contoh budaya terkait dengan kesetaraan dan keadilan gender. Adanya pernikahan dini bagi perempuan terutama di daerah pedesaan merupakan bukti.

b. Masalah menantang saat ini dan rekomendasi

Tantangan yang muncul untuk memperkuat pengarusutamaan gender dalam pendidikan bervariasi di berbagai sekolah dan manajemen pendidikan kabupaten. Fenomena yang paling umum ditemukan selama diskusi kelompok terfokus dengan administrator pendidikan, pengawas, kepala sekolah, dan guru adalah:

- 1) Masih kurang menyadari pengarusutamaan gender dan menerapkan keterampilan Gender Pathway Analisis (GAP).
- 2) Resistensi Budaya yang membawa asumsi bahwa laki-laki lebih unggul daripada perempuan,
- 3) Tidak ada komitmen dari pemerintah daerah dalam hal peningkatan pengarusutamaan gender, buktinya tidak ada anggaran dari APBD untuk pengarusutamaan gender.
- 4) Tidak ada dokumen yang terawat baik terkait dengan gender oleh staf dinas pendidikan dan kebudayaan di provinsi atau kabupaten ketika staf pindah ke kantor lain dimana semua data dan dokumen pindah ke kantor baru.
- 5) Rotasi manajer dan staf di dinas pendidikan dan kebudayaan di provinsi atau kabupaten terlalu cepat
- 6) Masih ada resistensi terhadap diri sikap staf/pemimpin, misalnya: pernyataan "kami mengurus masyarakat bukan hanya perempuan".
- 7) Pada kebijakan: tidak ada tindakan dari pengambil keputusan untuk melaksanakan pengarusutamaan gender di sektor lain,
- 8) Tidak semua sektor mempunyai data terpilah menurut jenis kelamin karena akan menambah beban kerja staf yang ditugaskan.

c. Rekomendasi untuk memperkuat pengarusutamaan gender dalam pendidikan

- 1) Perguruan Tinggi
 - a) Para pembuat keputusan di beberapa perguruan tinggi harus menggunakan Gender Analysis Pathway (GAP) untuk mengusulkan anggaran PUG,
 - b) Alokasi anggaran rutin untuk pusat studi wanita untuk menjalankan pengarusutamaan gender untuk pengembangan kapasitas internal di UNDANA.
 - c) Meningkatkan secara intensif penelitian, pelatihan, dan program pengembangan yang responsif gender,
 - d) Sosialisasi PUG untuk memperkaya metodologi dalam kurikulum penelitian di pendidikan tinggi
- 2) Pendidikan Dasar dan Menengah
 - a) Mengorganisir kompetisi untuk Sekolah yang responsive gender,
 - b) Mengkaji dan memperbarui buku pelajaran yang diperlukan dengan perspektif gender.
- 3) Pemerintah daerah dan masyarakat
 - a) Membangun jaringan dengan LSM, bekerja sama dengan para pemimpin agama, kemitraan dengan masyarakat untuk meningkatkan kegiatan KIE.

Penutup

Pengarusutamaan gender harus dilaksanakan secara terus menerus oleh semua pemangku kepentingan pendidikan di NTT dan setiap kabupaten. Kantor Dinas Provinsi atau kabupaten harus menyiapkan data terpilah menurut jenis kelamin laki-laki dan perempuan untuk manajemen pendidikan masa datang. APBD untuk menjalankan PUG harus tersedia.

Guru dan dosen menjadi pemegang pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pelatihan, penelitian dan pengembangan. Tokoh-tokoh kunci untuk PUG di sekolah menjadi sangat efektif untuk melakukan advokasi untuk memastikan bahwa murid laki-laki dan perempuan akan menjadi generasi masa depan yang responsif gender. Setiap ketua lembaga terkait gender harus diberikan wawasan tentang dampak rotasi staf dan pada keberlanjutan PUG dalam pendidikan. Guru dan dosen harus menjadi *front-liner*-garis depan untuk perubahan sosial dan budaya untuk mendukung PUG dalam pendidikan dan masyarakat.

Untuk target jangka pendek, Kantor Dinas Propinsi dan Kabupaten Pendidikan, Pemuda dan Olahraga harus bekerja untuk memperbarui bahan pembelajaran, pengembangan kurikulum berbasis sekolah, penulisan buku teks dan publikasi agar lebih berpihak pada keadilan gender dan menolak toleransi terhadap pelecehan dan cara yang kekerasan di sekolah.

Mr Maxwell Halundaka, Kepala Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang akan bergerak maju dengan kebijakan pemerintah untuk menghadapi masalah yang menantang pada program pengarusutamaan gender dalam pendidikan. Dia akan menggunakan Format Pelaporan tahun 2004 untuk mengelola pengelolaan data pendidikan berbasis gender. "Saya percaya bahwa dengan data akurat yang diperbarui secara rutin oleh sekolah dan diawasi oleh Kabupaten, kita semua akan memiliki pengarusutamaan gender yang lebih baik dalam perencanaan pembangunan pendidikan dan anggaran pendukung dari APBN dan APBD. Sekarang dan di sini, saya akan memimpin kegiatan PUG di sekolah".

Laporan Kunjungan Lapangan dan FGD Di Kupang

13-18 Februari 2012

Lampiran 1 - FGD dengan pengelola dan kebijakan Pendidikan Kabupaten

Kode*	Pertanyaan	Komentar
Komponen 2: Melembagakan Pengarusutamaan Gender		
2a 2b 2c	<p>1. Apakah peserta mempertimbangkan pengarusutamaan gender dalam pendidikan menjadi penting di kabupaten mereka dan mengapa?</p> <p>2. Apakah POKJA PUG Pendidikan telah dibuat? Kapan? Dan siapa yang menjadi anggota POKJA?</p>	<p>Beberapa kebijakan dipahami oleh beberapa peserta FGD termasuk anggota Pokja PUG, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instruksi Presiden Nomor 9/2000 tentang pengembangan Pengarusutamaan Gender di Indonesia. • Peraturan Menteri No 15/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dalam Pendidikan. • Peraturan Menteri Nomor 84/2008 tentang Pedoman PUG untuk Pendidikan di Pusat, Provinsi dan Kabupaten untuk Unit Pendidikan. <p>Beberapa Kebijakan provinsi disebutkan, termasuk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Gubernur No 8/2001 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di NTT. • Keputusan Gubernur Nomor 20/2009 tentang pelaksanaan PUG di kalangan internal Pemerintah Provinsi NTT. • Keputusan Kepala Dinas Provinsi Pendidikan dan Kebudayaan NTT No 13/V/11/PK/2004 tentang Kelompok Kerja gender untuk Pendidikan. Keputusan ini telah secara teratur diperbarui dengan Surat Keputusan No 909/721/PK/2007 dan Surat Keputusan No 421/18/PK/2008 <p>Beberapa kebijakan didirikan di dua Kecamatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan kabupaten Kupang menetapkan Surat Keputusan No 139/SKEP/HK/2009 tentang Kelompok Kerja Gender untuk Sektor Pendidikan. • Walikota Kota Kupang menandatangani Surat Keputusan No 112/2004 tentang Pengarusutamaan Gender di Kota Kupang • Walikota Kota Kupang menandatangani Keputusan Nomor 117/2004 tentang Focal Point untuk Pengarusutamaan gender • Walikota Kota Kupang menandatangani Surat Keputusan No 176/2004 tentang Kelompok Kerja GSI. <p>Kebanyakan kebijakan saat ini adalah Surat Keputusan 801/2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kota Kupang untuk merevitalisasi PokjaPUG sejak 18 Desember 2011 "(Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga EYS Kota Kupang).</p> <p>"Anggaran yang terbatas untuk program pengarusutamaan gender di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten" (Pokja Gender UNDANA).</p> <p>Meskipun beberapa langkah kebijakan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi dan Kabupaten, tampaknya bahwa "sebagian besar program dan kegiatan PUG di NTT tergantung dari dukungan nasional, baik dari sumber daya manusia dan keuangan. Tidak ada cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa PUG dalam pendidikan akan berkelanjutan di Kupang dan NTT pada umumnya "(PSW -UNDANA).</p> <p>"Sejak 2009 Kupang terpilih sebagai kota ramah anak di antara 21 Kabupaten di Indonesia. Oleh karena itu, peran perempuan dalam sistem perawatan keluarga adalah faktor kunci untuk pelaksanaan kebijakan daerah pembangunan kesejahteraan sosial "(Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kupang).</p>

Kode*	Pertanyaan	Komentar
		<p>"Kepala BAPPEDA Kupang mengatakan bahwa " lebih dari 30% manajer lokal di unit sektor publik adalah perempuan. Tapi, kontribusi mereka pada pembangunan perencanaan dan penganggaran responsif gender terbatas karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk analisis gender data untuk perencanaan."</p> <p>"Hal ini ditargetkan pada tahun pemilu 2014 bahwa 5 perempuan akan bergabung di DPRD di Kupang sehingga pengarusutamaan gender tidak hanya akan mendapatkan dukungan politik yang lebih tetapi juga alokasi keuangan untuk memperkuat kapasitas Pokja gender." (Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kupang).</p> <p>"Pengarusutamaan gender adalah penting bagi mahasiswa sarjana di perguruan tinggi pendidikan. Setiap murid akan mendapatkan pengarusutamaan gender selama program pra-pelayanan masyarakat/ magang"(Wakil Dekan III, Fakultas Pendidikan-UNDANA).</p> <p>"Kebijakan pengarusutamaan gender penting untuk mencapai kinerja terbaik dalam pelayanan publik dan mendukung kegiatan pengarusutamaan gender di sekolah. Data gender akan diberikan jika diminta tingkat nasional RI untuk melakukannya"(Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kupang).</p> <p>Guru SMAN 1 Kupang mengatakan bahwa "dia tidak pernah mendengar tentang kebijakan lokal pengarusutamaan gender di sekolah, program pelatihan gender, dan dukungan keuangan untuk belajar analisis gender."</p>
2a 3c	Dukungan peningkatan kapasitas apa yang telah disediakan untuk pengarusutamaan gender di tingkat kabupaten dan sekolah?	<p>"Pemerintah local telah mendukung PUG dalam hal fasilitas sekolah, sumber daya manusia dengan memberikan hibah reguler untuk semua sekolah negeri dan swasta"(Guru, kepala sekolah Sekolah, dan Pengawas).</p>
		<p>"Kami telah melakukan kerjasama sebelumnya dengan Pusat Studi Wanita dan beberapa focal point dari Kabupaten Kupang terdekat untuk menjalankan pengarusutamaan gender dalam mencapai lebih banyak sekolah yang menjadi sasaran. Pedoman Pengarusutamaan Gender untuk sekolah telah dicetak pada tahun 2010 oleh Kabupaten Kupang. Pedoman ini tersedia untuk program pelatihan pengarusutamaan gender"(Kepala Distrik Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kupang).</p>
2a 2b	3. Siapa yang bertanggung jawab & sumber daya apa yang ada di tempat untuk melembagakan PUG di kabupaten, kecamatan & sekolah (misalnya Pokja gender/gender focal point) Kemenag & Kemendikbud	<p>Pokja Gender yang baru bertanggung jawab untuk mengelola program pengarusutamaan gender didukung oleh beberapa pelatih dan fasilitator guru lokal yang berkualitas"(Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten, Kupang).</p>
		<p>"Bimbingan dan Konseling guru di setiap sekolah harus menjadi salah satu pemain utama yang memiliki inisiatif untuk membimbing murid sebelum lulus untuk melaporkan kembali ke sekolah, apakah mereka melanjutkan sekolah, bekerja, atau tidak bekerja." (Pengawas Sekolah).</p> <p>Setiap lembaga pendidikan terkait bertanggung jawab untuk PUG adalah untuk mencapai semua sekolah. "Kepemimpinan dari pemerintah Kabupaten adalah faktor kunci untuk memastikan kolaborasi yang efektif antara lembaga pendidikan lokal untuk melaksanakan PUG di Kupang." (LPMP).</p>

Kode*	Pertanyaan	Komentar
2a	4. Apakah PUG diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan daerah. Apa aktivitas & anggaran termasuk dalam rencana dan apa yang menjadi prioritas?	"Secara formal, Pokjagender adalah bagian dari divisi perencanaan di kota Kupang, tetapi tidak ada cukup data mengenai total anggaran untuk mendukung inisiatif lokal untuk kegiatan pengarusutamaan gender. Tampaknya Pokja tergantung pada keuangan nasional mendukung untuk mengelola setiap kegiatan pengarusutamaan gender "(PSW-UNDANA).
2a	5. Berapa banyak staf terlatih yang bertanggung jawab atas penganggaran yang responsif gender?	Tidak ada
	6. Berapa banyak yang telah dialokasikan dari APBD untuk anggaran responsif gender dan untuk kegiatan apa ?	<p>Tinjauan Dokumen menunjukkan bahwa "Pemerintah Provinsi mengalokasikan Rp 300 juta dari APBD tahun 2005 dan 2006. Sejak itu tidak memiliki dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi untuk menjalankan PUG dalam pendidikan. Sebagian besar dana untuk mengelola PUG di MTT disediakan oleh Pemerintah RI "(Divisi Perencanaan).</p> <p>Kabupaten Kupang adalah salah satu daerah uji coba untuk PUG yang bekerja sama dengan AIBEP. Kota Kupang adalah daerah penyebaran untuk PUG yang diharapkan dari tetangga, Kabupaten Kupang karena kota ini akan menjadi barometer untuk semua kebijakan dan program pembangunan di NTT. Apa yang telah dilakukan di Kota Kupang adalah pembentukan Pokja PUG. Inisiatif lokal lebih lanjut diperlukan dan difasilitasi oleh Provinsi atau Pemerintah RI Pusat adalah memungkinkan untuk meneruskan PUG di NTT "(Focal Point dan Master Trainer PUG).</p>
Komponen 3.1 Kesetaraan Akses		
3.1c	7 a. Apakah anggaran responsif gender diimplementasikan? Kapan? 7 b. Apakah anggaran responsif gender didasarkan untuk mengurangi kesenjangan gender dalam data kinerja kabupaten dari sekolah? Berikan contoh	"Dana khusus diperlukan setiap tahun untuk mendukung pengembangan basis data gender untuk pendidikan di Kota Kupang "(Kepala Bagian, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga dari Kupang).
3.1c	8. Apa tantangan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat terpilah menurut jenis kelamin dari semua sekolah?	<p>" Staf khusus yang ditugaskan untuk melakukan peran ini. Kurang bimbingan dan instrumen yang disediakan oleh Provinsi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi dan atau Kemenag untuk memfasilitasi sekolah dan madrasah untuk menyiapkan data terpilah menurut jenis kelamin "(PSW-UNG).</p> <p>Kupang Kabupaten dalam angka 2010 menunjukkan bahwa "penduduk laki-laki lebih rendah dari penduduk perempuan berusia sepuluh dan lebih yang menyelesaikan sekolah dasar mereka, masing-masing 31,13% dan 35,77%. Dan, laki-laki (44,32%) lebih tinggi dibandingkan perempuan (40,35%) yang tidak menyelesaikan pendidikan formal mereka."</p> <p>Kurangnya memperbarui pengetahuannya tentang pengarusutamaan gender, bahkan ada pula yang salah paham, membutuhkan program-program pelatihan yang ekstensif untuk mengatasi kesenjangan gender di daerah dalam pendidikan, kurikulum dan silabus manajemen, belajar dan mengajar, akses yang sama terhadap peningkatan kualitas sekolah." (UNDANA)</p>

Kode*	Pertanyaan	Komentar
9.	Apakah data menurut jenis kelamin tersedia di tingkat kabupaten untuk semua sekolah di 2010?	<p>Ya, Kupang memiliki data terpisah menurut jenis kelamin terbatas. Data terpilah menurut jenis kelamin saat ini tidak sedang dianalisis dan digunakan untuk pengembangan strategis dan perencanaan tahunan pendidikan kabupaten (PSW-UNDANA)</p> <p>“Kepala Dinas Pendidikan, pemuda dan Olahraga berjanji untuk mengembangkan dan menyediakan format khusus untuk mendukung sekolah untuk menyediakan survey sekolah yang responsif gender.” (Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan olah raga).</p> <p>Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga bertanggung jawab untuk mengelola 126 SD/MI, 49 SMP/MTs, 31 SMA/MA, dan 19 SMK sedangkan guru melayani 91.924 murid di sekolah swasta maupun publik “(Profil Kabupaten).</p> <p>Hal ini merupakan fakta menarik bahwa murid laki-laki lebih besar di SD/MI dan SMK; lebih banyak murid perempuan di SMA/MA, dan persentase yang sama murid laki-laki – perempuan di SMP/MTs. Data saat ini di tahun 2011/12, terdapat 126 SD/MI melayani 43.895 murid dengan 52% adalah anak laki-laki. Kemudian, ada sekitar 50:50 murid laki-laki – perempuan dihitung dari jumlah total 49 SMP/MTs, baik negeri maupun swasta. Terdapat 54,2% murid perempuan dan 45,8% laki-laki di SMA/MA. Selain itu, ada 56,3% dari 6.702 total murid SMK adalah laki-laki. (Statistik Murid 2011/2012 yang dihasilkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang 2012). Data-data ini belum digunakan untuk perencanaan tahunan dan penganggaran untuk merespon kebutuhan yang berbeda antara murid laki-laki dan perempuan oleh Dinas Pendidikan, pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang, oleh kepala sekolah sekolah dalam manajemen sekolah dasar, oleh guru dalam memberikan proses kelas dan proses belajar yang ramah gender untuk mencapai kinerja akademik yang lebih baik. (Profil Kabupaten Kupang).</p> <p>LPMP: Memiliki 7 manajer dalam kelompok struktural yang didominasi eselon 1 dan Eselon 2 dimana 4 dari 6 manajer laki-laki. Dari tahun 2005 sampai 2010, persentase staf administrasi pria meningkat dari 57,85 sampai 59,1 staf sebaliknya persentase perempuan menurun dari 42,2% menjadi 40,4% pada tahun 2010.</p>
2a 3.1c	10. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menganalisis data kinerja dari sekolah? Apakah mereka dilatih untuk menganalisis data dari perspektif gender?	Na.
3.1c	11. Apa perbedaan utama dalam data kinerja antara anak laki-laki & perempuan? Apa yang bisa dilakukan atau sedang dilakukan untuk mengatasi kesenjangan?	<p>Na</p> <p>Beberapa sekolah berpartisipasi dalam SSE. SSE juga harus mengintegrasikan disparitas gender ke SSE untuk memastikan kinerja sekolah berdasarkan NSE” (Kepala dan Pengawas Madrasah).</p>

Kode*	Pertanyaan	Komentar
3.1a 3.1c	12. Apakah isu-isu gender dan kemiskinan untuk anak laki-laki dan perempuan menjadi penghalang bagi mereka mengakses dan menyelesaikan 9 tahun penuh + pendidikan berkualitas? Bagaimana masalah ini ditangani melalui program?	
3.1	Apakah pedoman pemerintah dan pelatihan memadai untuk memungkinkan pengarusutamaan gender dalam pendidikan?	"Tidak cukup pedoman, materi pelatihan, dan instrumen untuk memperkuat program pelatihan gender di Kupang" (Guru dan pengawas).
3.2d	12. Apakah ada kebijakan dan praktik di lembaga Anda untuk memastikan kesetaraan dalam posisi kepemimpinan antara laki-laki dan perempuan di tingkat kabupaten dan sekolah?	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mengeluarkan SK. Nomor 801 tentang Pokja Gender di sektor Pendidikan di 18 Desember 2011.
Komponen 3: Penyampaian Kebijakan dan Program		
3.2	13. Apa kebijakan dan strategi kabupaten/rencana aksi kabupaten untuk pengarusutamaan gender di sekolah?	
3.2	14. Program dukungan apa dari pemerintah dan donor dalam PUG dalam pendidikan yang telah dilaksanakan dalam 10 tahun terakhir? Apa dampak yang mereka miliki?	"AIBEP telah mendukung pengarusutamaan gender sebagai bagian dari program pembangunan seluruh sekolah di Kabupaten Kupang dapat diakses untuk tindakan lebih lanjut di Kota Kupang." (kepala sekolah)
3.2d	15. Apakah sekolah memiliki kebijakan kesetaraan gender?	Na.
3.2b 3.2c	16. Apakah ada pelatihan guru atau kegiatan lain pada penerapan pengajaran dan proses belajar dan bahan ajar yang responsif gender di sekolah atau universitas?	"Kurang koordinasi antara unit pelaksanaan program lokal di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dan BAPPEDA harus diperkuat." (BAPPEDA)
3.1c 3.2	17. Apakah yang perlu pemerintah pusat dan provinsi lakukan untuk mempercepat pengarusutamaan gender dalam pendidikan di tingkat kabupaten?	Focal Points di Kabupaten Kupang mengatakan bahwa <ul style="list-style-type: none"> • Memperluas cakupan dari PUG untuk mencapai lebih banyak target bagi sub manajer Dinas Pendidikan Kabupaten, • Memperkuat peran Pokja gender di tingkat Provinsi untuk mem-berdayakan kapasitas Pokja gender di Kota Kupang. • Menyediakan manual dan instrumen untuk kampanye PUG di tingkat lokal oleh Kecamatan dan sekolah.
3.1c 3.2	18. Bagaimana pengarusutamaan gender dalam program pendidikan dimonitor & dievaluasi di tingkat kabupaten?	"Monitoring dan tim evaluasi harus ditetapkan untuk melakukan evaluasi jangka menengah dan tahunan pelaksanaan sosialisasi PUG dan advokasi di kabupaten dan sekolah." (Supervisor)

* Kode mengacu pada komponen tertentu dari kerangka Pengkajian. Silakan lihat kerangka

Lampiran 2 - FGD Dengan Personil Sekolah

Kode*	Pertanyaan	Komentar
Komponen 3.1 Kesetaraan Akses		
3.1c	<p>Apa perbedaan utama dalam data kinerja antara anak laki-laki & perempuan?</p> <p>Apa yang bisa dilakukan atau sedang dilakukan untuk mengatasi kesenjangan?</p>	<p>“Lebih banyak murid perempuan daripada murid laki-laki di SMKN 3 Kupang. (Kepala SMKN 3 Kupang).</p> <p>“Kedua murid dan murid belajar di setiap kelas.” (Kepala SMKN 3 Kupang).</p> <p>“Laki-laki cenderung lebih aktif daripada murid perempuan saat proses belajar di kelas. Perempuan cenderung lebih tepat waktu daripada laki-laki dalam setiap kegiatan sekolah. Guru harus memberikan perhatian yang sama untuk setiap murid” (SD Kristen Harmony, Kupang).</p> <p>“Murid perempuan lebih aktif daripada laki-laki dalam belajar Matematika dan Sains. Laki-laki dan Perempuan berpartisipasi dalam organisasi murid (OSIS)” (Kepala SMAN 1 Kupang).</p> <p>“Murid laki-laki dan perempuan mempelajari kurikulum yang sama tetapi kesenjangan belum dianalisa oleh masyarakat sekolah.” (Kepala SMPN 7 Kupang).</p> <p>“Guru wanita memiliki kesempatan lebih sedikit untuk mengembangkan rencana pelajaran dari laki-laki.” (Guru, SMAN 1 Kupang).</p>
3.1c	Apa tantangan pengumpulan data kinerja dipisahkan menurut jenis kelamin untuk dikirimkan ke kecamatan?	<p>“Tidak ada manual dan instrumen untuk menghasilkan data terpilah jenis kelamin untuk setiap sekolah” (SD Kristen Harmony, Kupang).</p> <p>“Data terpilah gender tidak tersedia. Data yang ada tidak digunakan untuk memahami isu-isu gender.” (Kepala SMAN 1 Kupang).</p> <p>Kepala SMPN 2 Kupang mengatakan bahwa “pengarusutamaan gender tidak diimplementasikan di sekolahnya meskipun pada 2008 ia bergabung dengan tim untuk mengembangkan silabus responsif gender.”</p> <p>“Guru SMKN 3 tidak pernah mendapat pengarusutamaan gender untuk pengelolaan sekolah, tapi kepala sekolah selalu perempuan.” (Guru SMKN 3)</p>
3.1c	Apakah ada perbedaan dalam kehadiran di sekolah antara anak laki-laki dan perempuan? Apa alasan? Apakah ada waktu-waktu tertentu bahwa kehadiran menurun untuk anak laki-laki/perempuan?	“Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan terkait dengan kehadiran di sekolah” (Kepala SMKN 3 Kupang).
3.1c 3.2c 3.2d	Apakah anak laki-laki mengungguli perempuan dalam ujian mata pelajaran tertentu dan sebaliknya? Apa nama mata pelajaran dan alasan?	<p>“Murid perempuan menunjukkan lebih baik daripada murid laki-laki” (Kepala SMKN 3 Kupang).</p> <p>“Murid laki-laki lebih aktif dalam mengajukan pertanyaan dari murid perempuan” (SD Kristen Harmony, Kupang)</p> <p>“Murid perempuan lebih banyak tampil lebih baik daripada laki-laki dalam prestasi akademik.” (Kepala SMPN 7 Kupang).</p> <p>Di SMAN 1 semua murid peringkat pertama dari kelas 1 sampai 3 adalah perempuan. (Kepala SMAN 1 Kupang).</p>

Kode*	Pertanyaan	Komentar
3.1a 3.1c	Sekolah dasar: Berapa banyak tahun lalu anak perempuan dan laki-laki dari kelas 6 tidak melanjutkan ke sekolah menengah pertama? Sekolah menengah pertama: Berapa banyak anak perempuan dan anak laki-laki tahun lalu dari kelas 9 tidak melanjutkan ke sekolah menengah atas? Apa alasan?	"Kebanyakan murid melanjutkan ke SMA/SMK." (Kepala SMPN 7 Kupang).
3.1a 3.1c	12. Apakah isu-isu gender dan kemiskinan untuk anak laki-laki dan perempuan menjadi penghalang bagi mereka mengakses dan menyelesaikan 9 tahun penuh + pendidikan berkualitas? Bagaimana masalah ini ditangani melalui program?	Na.
3.1a	Apakah sekolah memiliki toilet dan air minum terpisah untuk anak perempuan dan anak laki-laki?	Ya ada toilet pria dan wanita.
Komponen 3: Penyampaian Kebijakan dan Program		
3.2	Apa kebijakan dan strategi kabupaten/ren-cana aksi kabupaten untuk pengarusutamaan gender di sekolah?	"Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten melakukan pengarusutamaan gender di SMKN 3." (Kepala SMKN 3 Kupang). "Tidak bimbingan kabupaten untuk melaksanakan pengarusutamaan gender di sekolah." (Kepala SMAN 1 Kupang). "Dinas Pendidikan Kabupaten telah membentuk Pokja gender pada 18 Desember 2011." (Guru, SMAN 1 Kupang).
3.2	14. Program dukungan apa dari pemerintah dan donor dalam PUG dalam pendidikan yang telah dilaksanakan dalam 10 tahun terakhir? Apa dampak yang mereka miliki?	
3d	15. Apakah sekolah memiliki kebijakan kesetaraan gender?	
3.2b 3.2c	16. Apakah benar ada pelatihan guru atau kegiatan lain pada penerapan pengajaran dan proses belajar dan bahan ajar yang responsif gender di sekolah Anda?	Guru SMAN 1 mengatakan bahwa "ia tidak pernah memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengarusutamaan gender untuk meningkatkan keahliannya untuk melaksanakan pendidikan responsif gender."
3.2d	Kegiatan ekstra kurikuler apa yang ditawarkan oleh sekolah kepada anak laki-laki dan anak perempuan? Kegiatan mana yang lebih populer bagi anak perempuan atau anak laki-laki? Bagaimana anak laki-laki/perempuan didorong untuk mencoba semua kegiatan?	"Pramuka, Unit palang merah remaja, melakukan festival seni, pendidikan olahraga adalah kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan kedua anak laki-laki dan perempuan" (Kepala SMKN 3 Kupang). "Memasak di kelas dan pramuka yang disediakan untuk kegiatan ekstrakurikuler." (SD Kristen Harmony, Kupang) "Menari dan pentas seni yang lebih banyak diikuti peserta perempuan daripada laki-laki." (Kepala SMAN 1 Kupang). "Laki-laki suka bermain sepak bola. Perempuan suka melakukan tari dan bergabung ke klub Bahasa Inggris" (Kepala SMAN 1 Kupang).

Kode*	Pertanyaan	Komentar
3.2b	Berapa banyak guru di sekolah telah menerima pelatihan kesadaran gender melalui pelatihan guru <i>in-service</i> ? Apakah Kepala Sekolah & pengawas sekolah juga?	<p>“Hanya satu guru/kepala sekolah dilatih dalam pengarusutamaan gender di SMKN 3.” (Kepala SMKN 3 Kupang).</p> <p>“Dua orang guru dilatih, tetapi supervisor belum dan mereka enggan untuk mendapatkan pelatihan pengarusutamaan gender oleh guru.” (Kepala SMAN 1 Kupang).</p> <p>“Beberapa guru di SMAN 1 Kupang mendapat pengetahuan gender saat mereka terdaftar dalam program S2 di UNDANA.” (anggota PSW UNDANA)</p>
3.2d	Isu gender apa di sekolah yang merupakan prioritas untuk diatasi?	<p>Kepala sekolah dan guru mengidentifikasi isu-isu berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kurikulum dan pengembangan silabus yang responsive gender untuk setiap mata pelajaran • Metode pengajaran dan proses pembelajaran yang responsif gender. • panduan dan instrumen yang responsive gender untuk survey sekolah • pengumpulan data terpilah menurut jenis kelamin, analisis, dan digunakan untuk perencanaan pengembangan sekolah dan penganggaran (RKS dan RKAS). • Manajemen kelas yang responsif gender

*Kode mengacu pada komponen tertentu dari kerangka Pengkajian. Silakan lihat kerangka.

Pengamatan Ruang Kelas

Kode	Pengamatan	Komentar
3.2d	1. Bukti hukuman fisik dalam kelas	Hukuman fisik digunakan di SMPN 1 Kupang Tengah sejak beberapa murid (ex Timor Leste) kurang tepat waktu dan motivasi belajar rendah dibandingkan murid dari Kupang.
3.2c	2. Semua anak laki-laki dan perempuan memiliki akses ke buku teks yang dibutuhkan	Ya, sebagian besar murid memerlukan buku teks untuk setiap mata pelajaran dalam berbagai jenis dan tingkat pendidikan.
3.2c	3. Hasil kerja anak laki-laki dan perempuan sama-sama ditampilkan di dalam kelas	Ya, sebagian besar ruang kelas yang didirikan untuk mendukung pola campuran murid laki-laki dan perempuan
3.2c	4. Gaya mengajar – gaya mengajar dan belajar tradisional atau aktif	Sebagian besar guru menggunakan strategi mengajar-belajar tradisional

Lampiran 3 - FGD dengan Lembaga Pelatihan Guru

Peserta: Staf Lembaga Pelatihan Guru termasuk Lembaga Pendidikan, LPMP, Balai Diklat dibawah Pemerintahan Daerah Provinsi.

Kode*	Pertanyaan	Komentar
Komponen 2: Melembagakan Pengarusutamaan Gender		
2.1a	Apakah ada dukungan kepemimpinan untuk PUG? Apakah ada kebijakan PUG di lembaga-lembaga pelatihan guru?	<p>Ya. Dukungan kepemimpinan disediakan Oleh Rektor Universitas Darma Karya (Undarma) Karena beliau adalah salah satu <i>gender focal point</i> untuk Pengarusutamaan gender di NTT Ada, dengan memasukkan kesadaran gender dalam setiap kegiatan“(Rektor Universitas Darma Karya)</p> <p>“Ya. Dalam beberapa kesempatan Universitas Cendana (UNDANA) mengirim dosen ke berbagai organisasi perempuan untuk berpartisipasi dalam pengarusutamaan gender, mereka melatih peserta pelatihan provinsi untuk mengurangi kesenjangan gender“(Dosen Bimbingan dan Konseling).</p> <p>“Pengarusutamaan gender penting bagi mahasiswa di perguruan tinggi pendidikan. Setiap murid akan mendapatkan pengetahuan pengarusutamaan gender dan keterampilan selama program pra-pelayanan masyarakat/magang“(Wakil Dekan III, FKIP UNDANA).</p>
2.1	Apa sumber daya yang tersedia di tempat untuk PUG di lembaga	<p>Beberapa dosen sebelumnya terlibat dalam LSM berkomitmen untuk pelayanan terkait gender, seperti ‘Rumah Perempuan“(Rektor Universitas Darma Karya).</p> <p>“Dosen laki-laki dan perempuan telah dilatih pengarusutamaan gender di Padang, Jawa Barat, dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.” (Dosen Bimbingan dan Konseling)</p> <p>““Pokja gender di Provinsi harus melatih Pokja gender di Kabupaten. Semua produk Pokja gender di Propinsi dan Kabupaten harus disosialisasikan ke kecamatan ke sekolah/ma- drasah. Pengarusutamaan gender perlu dimasukkan dalam program pelatihan sertifikasi guru. Pokja harus melatih dinas pendidikan kabupaten untuk menerjemahkan pengarusutamaan gender ke dalam dokumen perencanaan (RKAL dan RPJM). Lebih baik untuk melatih widya Iswara dari LPMP dan lembaga pelatihan lainnya untuk mengembangkan modul, kurikulum, silabus, dan semua materi pelatihan untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender di pembelajaran di kelas“(Bimbingan dan Konseling Dosen, UNDANA).</p> <p>“Pada tahun 2009, beberapa staf dan widyaiswara dari LPMP berpartisipasi dalam pelatihan Pengarusutamaan Gender, dan kemudian juga melatih 40 peserta guru sekolah dasar. Pengarusutamaan gender tidak selalu diperlukan sebagai subjek eksklusif dalam program pelatihan di bawah program tahunan LPMP dan penganggaran. MGMP, KKG, M KS, MKKPS siap untuk membantu pengarusutamaan gender di semua tingkat dan jenis sekolah“(LPMP NTT).</p>

Kode*	Pertanyaan	Komentar
Komponen 2: Melembagakan Pengarusutamaan Gender		
		<p>“LPMP tidak pernah menjalankan program pelatihan khusus tentang pengarusutamaan gender, termasuk bagaimana mengembangkan kurikulum sekolah dasar dan rencana pelajaran responsif gender. LPMP bertugas membantu Pemerintah Kabupaten untuk memilih dan menguji calon kepala sekolah, pengawas, dan guru. Terkait dengan fungsi ini, LPMP dapat menerapkan kesetaraan gender terkait meritokrasi untuk pemilihan guru, kepala sekolah, dan pengawas” (LPMP NTT).</p> <p>LPMP dapat memperkenalkan manajemen basis sekolah yang responsive gender di daerah marjinal dan memperkuat interaksi belajar-mengajar responsif gender di dalam kelas” (LPMP NTT).</p> <p>“Kemenag percaya bahwa tiga lembaga - KKG, MGMP dan Pergakri - disediakan untuk kesadaran gender di sekolah. KKG untuk SD, MGMP untuk SMP; dan SMA tempat terbaik untuk mengarusutamakan gender dan mencapai 200 guru perempuan di sekolah swasta setiap tahun” (Kantor Kemenag, NTT).</p> <p>“Di Universitas Kristen Karya Dharma, perguruan tinggi pendidikan memiliki sumber daya manusia, tapi manual, instrumen, bahan belajar tidak tersedia untuk menjalankan pengarusutamaan gender.” (Sekolah Tinggi Pendidikan UKKD).</p> <p>Dewan Pendidikan, Penelitian Pelatihan, dan Pengembangan Provinsi mengatakan bahwa “tiga widya Iswara dilatih dalam Gender tetapi kurangnya dukungan kepemimpinan kepala lembaga untuk memasukkan PUG dalam kurikulum pelatihan.”</p>
3.2a	Apakah dosen dilatih kesadaran gender	<p>Setiap dosen, termasuk beberapa guru SMP dan SMA, belajar untuk gelar master di Undarma mengambil Pengarusutamaan Gender sebagai subjek utama selama satu semester.” (Rektor Universitas Darma Karya).</p> <p>“Dosen yang bertanggungjawab untuk Bimbingan dan Konseling dilatih oleh tim khusus dari PKK, program kesejahteraan keluarga.” (Bimbingan dan Konseling)</p> <p>“Sudah saatnya untuk mengusulkan Gender sebagai subyek yang terpisah sendiri dalam setiap program studi ilmu sosial di tingkat universitas.” (Universitas Kristen, NTT)</p> <p>“Salah satu isu menantang adalah rotasi staf dan manajer dari satu ke posisi lain yang dapat mencegah kebijakan dan program yang konsisten untuk menjalankan pengarusutamaan gender. BP4D mengikuti LAN (Lembaga Administrasi Nasional) di Jakarta.</p> <p>Pelatihan kurikulum dan silabus terdiri dari 14 program dan tidak ada cara untuk memasukkan gender dengan lembaga pelatihan lokal.” (Titik, BP4D, NTT)</p>
3.2a	Sampai sejauh mana kurikulum pelatihan guru responsif gender? Apakah kurikulum ditinjau dari perspektif gender?	<p>“Peran dan manfaat pemahaman gender harus digunakan untuk mengevaluasi kurikulum pelatihan.” (Rektor Universitas Darma Karya).</p> <p>“Hanya beberapa guru telah dilatih tentang analisis gender.” (Bimbingan dan Konseling)</p>

Kode*	Pertanyaan	Komentar
Komponen 2: Melembagakan Pengarusutamaan Gender		
3.2a	Apakah komponen ada kesadaran gender dalam kurikulum pelatihan guru?	<p>"Mahasiswa sarjana dan pascasarjana perlu memahami peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan." (Rektor Universitas Darma Karya).</p> <p>"Komponen Terbatas disediakan dalam kurikulum." (Bimbingan dan Konseling)</p> <p>"Jender harus dimasukkan sebagai bagian dari konten dalam kurikulum pelatihan dan setiap mata pelajaran untuk mahasiswa di setiap program studi." (Fakultas Pendidikan Universitas Cendana)</p>
3.2a 3.2c	Apakah guru dilatih untuk mengidentifikasi dan mengkaji teks, tes, penilaian dan bahan untuk menentukan apakah contoh dan bahasa yang digunakan bebas dari bias gender dan stereotip dan memastikan bahwa contoh mencerminkan keseimbangan pengalaman anak perempuan dan laki-laki.	<p>"Beberapa dosen dilatih tetapi tidak pernah tahu apakah mereka mempraktekkan pengarusutamaan gender dalam ruang kelas belajar." (Rektor Universitas Darma Karya).</p> <p>"Hanya beberapa dosen memiliki pengetahuan yang cukup dan keterampilan untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dalam buku-buku teks, tes, evaluasi." (Fakultas Pendidikan Universitas Cendana)</p>
3.2a 3.2c	Apakah guru dilatih tentang pendekatan untuk mengatasi gaya belajar yang berbeda/kebutuhan anak laki-laki dan perempuan?	<p>"Hanya beberapa focal point dapat menerapkan kesadaran gender dalam pengembangan belajar dan gaya mengajar di ruang kelas untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda antara anak laki-laki dan perempuan." (Rektor Universitas Darma Karya).</p>
3.2a 3.2d	Apakah murid diajarkan manajemen berbasis kelas yang responsif gender dan pentingnya akses yang sama dalam semua kegiatan ekstra kurikuler.	<p>"Pada dasarnya setiap mahasiswa diperlakukan sama oleh dosen. Pengamatan lebih lanjut dan tinjauan mendalam diperlukan untuk meningkatkan kinerja sekolah" (Fakultas Pendidikan Universitas Cendana).</p>
3.2	Tampilkan salinan peserta FGD tentang panduan 'Berwawasan gender' untuk sekolah dasar, menengah pertama dan menengah atas dan tanyakan berapa banyak peserta telah melihat salinan pedoman tersebut digunakan sebagai alat referensi dalam kurikulum pelatihan guru - catat respon peserta dari masing-masing institusi	<p>"Ya, dia tahu manual ini." (Rektor Universitas Darma Karya).</p> <p>"Murid belajar mengajar lebih banyak daripada pengajaran berbasis gender." (Bimbingan dan Konseling)</p> <p>"Kita semua tiga wakil di sini dan belum pernah melihat manual ini." (Kantor Kemenag, Kupang).</p>
3.2a	Apakah guru dilatih untuk memahami bagaimana persepsi atau harapan murid mereka laki-laki dan perempuan dapat mempengaruhi bagaimana mereka menilai kemajuan murid, menandai ujian, dan memberikan umpan balik.	<p>"Ya, guru membutuhkan program Pelatihan Gender." (Rektor Universitas Darma Karya).</p> <p>"Saya berharap analisis gender untuk dimasukkan dalam Pra pelatihan sertifikasi Guru bagi semua guru." (Bimbingan dan Konseling)</p>

* Kode mengacu pada komponen tertentu dari kerangka Pengkajian. Silakan lihat kerangka.

Lampiran 4 – Lembar Data untuk dilengkapi untuk Pusat Studi Wanita

Kode*	Pertanyaan	Komentar
Komponen 2: Melembagakan Pengarusutamaan Gender		
2.1a	Apakah ada dukungan kepemimpinan untuk PUG? Apakah ada kebijakan PUG di institusi tersebut?	“Dean akan memberikan izin untuk dosen untuk berpartisipasi dalam program pengarusutamaan gender.” (Fakultas Pendidikan Universitas Cendana)
3.2a	Apakah dosen dilatih kesadaran gender	“Beberapa dosen mendapat pengarusutamaan gender dan sekarang aktif memainkan peran dalam program penelitian pendidikan yang terkait gender.” (Fakultas Pendidikan Universitas Cendana)
3.2a 3.2c	Apakah dosen dilatih untuk mengidentifikasi dan mengkaji teks, tes, penilaian dan bahan ajar untuk menentukan apakah contoh dan bahasa yang digunakan bebas dari bias gender dan stereotip dan memastikan bahwa contoh mencerminkan keseimbangan pengalaman pada perempuan dan laki-laki’.	“Tidak ada kurikulum dalam program studi atau perguruan tinggi pendidikan UNDANA yang responsif gender.” (Fakultas Pendidikan Universitas Cendana)
3.2a 3.2c	Apakah dosen dilatih pendekatan untuk mengatasi gaya belajar yang berbeda/kebutuhan anak laki-laki dan perempuan	“Hal ini diperlukan dan disertakan dalam pelatihan khusus untuk sertifikasi pengajar sehingga mereka dapat menggunakannya saat sebagai pengajar profesional bersertifikat.” (Fakultas Pendidikan Universitas Cendana)
3.2e	Jelaskan peran Pusat Studi Perempuan dalam penelitian dan pendidikan gender dalam dasawarsa terakhir. Penelitian formal/informal dan peran penasihat Apa yang dimiliki Pusat yang dilakukan untuk pemerintah provinsi dan kabupaten dalam pengarusutamaan gender dalam pendidikan? Berikan contoh.	“Pusat studi Wanita menyediakan keahlian sumber daya manusia untuk Pokja PUG. Mempersiapkan rencana kerja tahunan dan menghasilkan laporan tahunan termasuk peserta lokakarya nasional, pelatihan, dan seminar” (PSW-UNDANA).
3.2e	Apa hubungan yang ada antara Pusat Studi Wanita dan lembaga pelatihan guru? Apakah PSW telah menyediakan keahlian peningkatan kapasitas dalam pengarusutamaan gender? Jelaskan.	“Tidak jelas untuk kedua Pusat Studi Wanita dan perguruan tinggi pendidikan, LPMP, dan lembaga pelatihan lainnya. Koordinasi yang buruk pada pengelolaan kesenjangan gender di pendidikan harus diberdayakan melalui pelatihan dan fasilitasi oleh Pokja Gender.” (PSW-Dinas Pendidikan, pemuda dan olahraga Provinsi)
3.2e	Apa kendala utama dalam melakukan penelitian pengarusutamaan gender dalam pendidikan.	“Sumber daya manusia, dukungan keuangan, dan pendampingan yang intensif diperlukan untuk sosialisasi, pelatihan, dan program penelitian.”
3.2d	Perbaiki apa yang telah terjadi dalam pengarusutamaan gender dalam institusi pendidikan tinggi dalam dasawarsa terakhir misalnya kebijakan gender, peningkatan jumlah perempuan dalam posisi kepemimpinan dll	
2.1c	Menyediakan data kecenderungan murid terpilah menurut jenis kelamin menurut mata pelajaran dan hasil ujian dalam 10 tahun terakhir. Perubahan apa yang telah terjadi dan mengapa?	“komunikasi Kurang langsung antara perguruan tinggi Pendidikan dan PSW menyebabkan kurangnya berbagi pengalaman dan sumber daya untuk perluasan gerakan pengarusutamaan gender di sektor pendidikan di sebagian besar kabupaten.” (Tenaga ahli gender dan Dosen)
3.2b	Apakah dosen dilatih untuk memahami bagaimana persepsi atau harapan murid mereka laki-laki dan perempuan dapat mempengaruhi bagaimana mereka menilai kemajuan murid, menandai ujian, dan memberikan umpan balik.	“Hanya beberapa dosen memiliki pengetahuan dan keterampilan dan kurang berpartisipasi dalam penelitian aksi di sekolah.” (PSW)
3.4	Apakah universitas melakukan penelusuran jenis pekerjaan masa depan dari lulusan menurut jenis kelamin. Jika data tersedia, apa yang dapat diceritakan dari data tsb ke kita?	Tidak ada data yang tersedia .

* Kode mengacu pada komponen tertentu dari kerangka Pengkajian. Silakan lihat kerangka.

Lampiran 5 – Data Kinerja Kabupaten

Kode*	Data	Komentar
Lembar Data Terpilah Menurut Jenis Kelamin 2000-2010 Data Kinerja Kabupaten		
3.1b	Tingkat Melek Huruf menurut rentang usia	Tingkat melek huruf penduduk Kupang usia 15-24 tahun telah meningkat pada tahun 2005 - 2009. Peningkatan angka melek huruf terjadi pada laki-laki daripada perempuan. Menariknya, pada tahun 2010 tingkat melek huruf telah menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
3.1b	Lama tahun Bersekolah	Dalam pendidikan - Disparitas tahun bersekolah telah berkurang, tapi masih relatif tinggi dibandingkan dengan tingkat Nasional. Tahun bersekolah rata-rata perempuan sekolah telah meningkat, tetapi lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki yang cenderung naik, sehingga kesenjangan gender masih relatif tinggi, terutama pada tahun 2007.
3.1b	IPG dari APK/APM	Pada tingkat sekolah dasar, kesenjangan partisipasi pendidikan telah berkurang. Angka partisipasi murni (APM) SD untuk laki-laki meningkat dari 84,0% pada 2006 menjadi 85,08%, dan untuk perempuan meningkat dari 77,25% menjadi 80,11%.
3.1b	Angka Kehadiran	
3.1b	Angka Mengulang	
3.1b	Angka Putus Sekolah	
3.1b	Angka Melanjutkan dari sekolah menengah pertama ke sekolah menengah atas/kejuruan	
3.1b	Partisipasi Murid menurut mata pelajaran/tingkat	
3.2d	a) Sekolah menengah atas/kejuruan b) Perguruan Tinggi	
3.1b	kinerja Ujian Nasional kelas 6 dan 9 dan menurut	
3.3a	mata pelajaran	
3.1b	tenaga kerja guru menurut tingkat sekolah, jenis/	
3.3	kualifikasi/sertifikasi	
3.1b	Toilet dan air minum terpisah di sekolah	
	Jumlah PAUD & pusat PPAUD swasta (umur 4-6) perkotaan/pedesaan. Apakah layanan PAUD tersedia untuk semua? Apa tantangan? Apakah jumlah anak laki-laki/perempuan hadir seimbang?	
3.1b	Rasio laki-laki terhadap perempuan dalam kepemimpinan/posisi manajemen (Eselon IV, III dan II) di	
3.2d	Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor Kementerian Agama, LPTK, universitas	
3.1b	Rasio perempuan terhadap laki-laki kepala sekolah	
3.2d	& pengawas sekolah	
3.1b	Data tentang kejadian pernikahan dini	Tidak ada data yang tersedia. Beberapa kasus kehamilan yang tidak diinginkan ditemukan di sekolah-sekolah dikunjungi
	Studi Kesiediaan Kabupaten yang ada hubungannya dengan gender	
3.1c	Mendapatkan pedoman/formulir yang dikeluarkan kecamatan untuk sekolah-sekolah untuk data kinerja setiap tahun (kita perlu tahu data apa yang diminta dari sekolah)	

* Kode mengacu pada komponen tertentu dari kerangka Pengkajian. Silakan lihat kerangka.

Lampiran 6 - Lembar Data Sekolah

Lembar Data Terpilah menurut Jenis Kelamin untuk sekolah yang dikunjungi (Silakan dapatkan data sebelum berkunjung ke sekolah)		
Kode*	Data	Komentar
	Tipe & nama sekolah, kecamatan, kabupaten, provinsi	SMPN 1 Kupang Tengah, District of Kupang, Jl. Timur –Raya Km 18 OEVELO NTT 85361.
3.2	Jumlah guru dengan kualifikasi di setiap kelas/jenis kontrak & gaji	Di SMPN 1 ada 91% dari 58 guru pemegang gelar S1 dan sudah bersertifikat dan 45% guru bersertifikat adalah perempuan. karakteristik guru dan tenaga pendidikan lain menurut status dan pengalaman disertakan. Data gaji tidak tersedia.
3.1c	Apakah sekolah memproduksi semua data kinerja dipisahkan menurut jenis kelamin yang diminta oleh kecamatan pada tahun 2010?	SMPN 1 Kupang Tengah menghasilkan data terpilah menurut jenis kelamin untuk murid dan 52% dari murid perempuan dalam tahun 2011/12.
3.1c	Dapatkan daftar data terpilah menurut jenis kelamin yang dihasilkan oleh sekolah & diserahkan ke kecamatan pada tahun 2010	Profil Sekolah setiap tahun diproduksi oleh Sekolah dan diserahkan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten. Instrumen ini termasuk data yang mencakup beberapa indikator yang diambil dari 8 standar pendidikan nasional. Murid berprestasi akademik diukur dengan UN dan skor UN menurut mata pelajaran dan dalam tiga tahun terakhir yang tersedia.
3.1c	Apakah ada kesenjangan dalam data yang dihasilkan oleh sekolah & diserahkan ke kecamatan? Jika ya, cari tahu mengapa dari kepala sekolah	
3.1c	Apa saja tantangan dalam pengumpulan data dipisahkan menurut jenis kelamin dari sekolah ke kecamatan dan ke kabupaten?	Sebagian sekolah memberikan data yang diminta oleh Pemerintah Daerah. Kurang inisiatif nya pihak sekolah untuk menyediakan data terpilah jenis kelamin untuk strategis pengembangan rencana dan penganggaran sekolah tahunan
3.1c 3.3a	Mendapatkan data dari sekolah jumlah murid yang terdaftar berdasarkan kelas & kehadiran untuk tahun 2010. Apakah ada perbedaan antara perempuan dan anak lelaki? Mintalah kepala sekolah/guru untuk alasannya mengapa?	SMPN 1 Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. terdapat 17 Laki-laki dan 17 guru perempuan PNS dan 4 laki-laki dan 8 perempuan honorer di SMPN 1 di Kupang Tengah. Untuk mendukung pembelajaran untuk 1045 murid dibagi menjadi 32 kelompok belajar, sekolah memiliki 16 staf administrasi. Jumlah murid meningkat dari 1013 menjadi 1103 pada tahun 2009 menurun menjadi 1045 pada tahun 2012. Skor mata pelajaran berbasis ujian nasional disediakan untuk 2009 dan 2010. Murid berasal dari keluarga yang berpenghasilan rendah dengan 92% memiliki penghasilan bulanan antara Rp 500.000 Rp 1.000.000 dan hanya 5% mahasiswa dari keluarga dengan penghasilan bulanan lebih dari Rp 1.000.000. (Profil Sekolah, SMPN 1 Kupang Tengah 2012)
3.3a 3.2c 3.3a	Dapatkan data untuk tahun 2010 untuk kelas 6 dan 9 hasil ujian (dan menurut mata pelajaran). Jika ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan tanyakan kepada Kepala Sekolah/guru alasan mengapa?	Data ujian murid menurut mata pelajaran yang tercakup dalam dua tahun terakhir. Sebagai contoh, nilai rata-rata untuk Bahasa Indonesia adalah 6,18 baik pada tahun 2009 dan 2010, untuk Matematika meningkat dari 6,12 pada 2009 menjadi 7,08 pada tahun 2010, untuk skor bahasa Inggris juga meningkat dari 5,33 ke 6,46, dan nilai ilmu pengetahuan mencatat peningkatan dari 5,97 ke 6,12 untuk periode yang sama. Skor berdasarkan jenis kelamin tidak dilaporkan. Selain itu, nilai ujian sekolah untuk mata pelajaran Civic, Ilmu Sosial, Fisik dan pendidikan Olahraga, Seni dan Budaya, TIK, dan Isi Lokal juga disediakan untuk tahun 2009 dan 2010. (Profil Sekolah, SMPN 1 Kupang Tengah 2012)
3.1b 3.1.c 3.2c	Dapatkan data tingkat melanjutkan dari SD ke SMP dan dari SMP ke SLTA untuk tahun 2010. Apakah ada kesenjangan dan apa alasan yang diberikan?	Sebagian besar murid lulus ujian nasional terus belajar untuk pendidikan SLTA. Data menunjukkan bahwa murid 80,15% pada tahun 2009 dan 93,12% pada tahun 2010 lulus dan melanjutkan pendidikan ke SMA.
3.1a	Dapatkan data putus sekolah untuk 2010. Apa alasan yang diberikan untuk anak laki-laki/perempuan putus sekolah?	Pada tahun 2006 ada 5 murid drop out. Dari 2007 sampai sekarang tidak ada data DO.
3.2d	Dapatkan salinan kode etik sekolah	

Lembar Data Terpilah menurut Jenis Kelamin untuk sekolah yang dikunjungi (Silakan dapatkan data sebelum berkunjung ke sekolah)		
Kode*	Data	Komentar
3.2b	Berapa banyak guru telah menerima pelatihan kesadaran gender?	Kepala sekolah merupakan <i>gender focal point</i> pengarusutamaan gender di Kabupaten Kupang.
2a	Apakah sekolah memiliki <i>gender focal point</i> ? (identifikasi orang untuk bertemu selama kunjungan sekolah)	Wilhelmus Geri, Kepala SMPN 1 Kupang Tengah, adalah pelatih master dan <i>gender focal point</i> untuk pengarusutamaan gender. Dan, Yayuk Handaniari, Kepala SMA 2 Timur Kupang, adalah <i>gender focalpoint</i> untuk pengarusutamaan gender sekolah di NTT.
3.2b 3.2c 3.2d 3.2e 3.2f	Kegiatan yang responsif gender Apa yang diterapkan sekolah?	Dengan menggunakan temuan dari observasi kelas, tampaknya lebih banyak guru akan selalu memasukkan kesadaran gender ke dalam proses pembelajaran di kelas. Menjalankan lokakarya untuk mengembangkan kurikulum dan silabus yang responsif gender. Yayuk H dan Wilhelmus tidak hanya pelatih utama bagi Pokja gender, tetapi juga bekerja membantu Pokja gender di kabupaten dan provinsi termasuk Pusat Studi Wanita di UNDANA.

* Kode mengacu pada komponen tertentu dari kerangka Pengkajian. Silakan lihat kerangka.

Gorontalo

1 – 5 April 2012

Pendahuluan

Pemerintah Pusat dan Daerah saat ini telah mengupayakan sumber daya manusia yang ada untuk mempromosikan pengarusutamaan gender dalam pendidikan. Tim ACDP yang bertanggung jawab untuk melakukan kajian satu dasawarsa pengarusutamaan gender di bidang pendidikan mengunjungi Provinsi Gorontalo dan Kabupaten untuk menilai pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pendidikan pada bulan April 2012. FGD dilakukan untuk mengumpulkan data kualitatif. Pengecekan dokumen yang relevan yang terkait dengan profil Provinsi Gorontalo dan Kabupaten dilakukan untuk memastikan data kuantitatif diperbarui. Temuan utama, diskusi, dan rekomendasi bagi pengarusutamaan gender ke depan diuraikan dan disampaikan dalam laporan ini.

Profil Provinsi Gorontalo

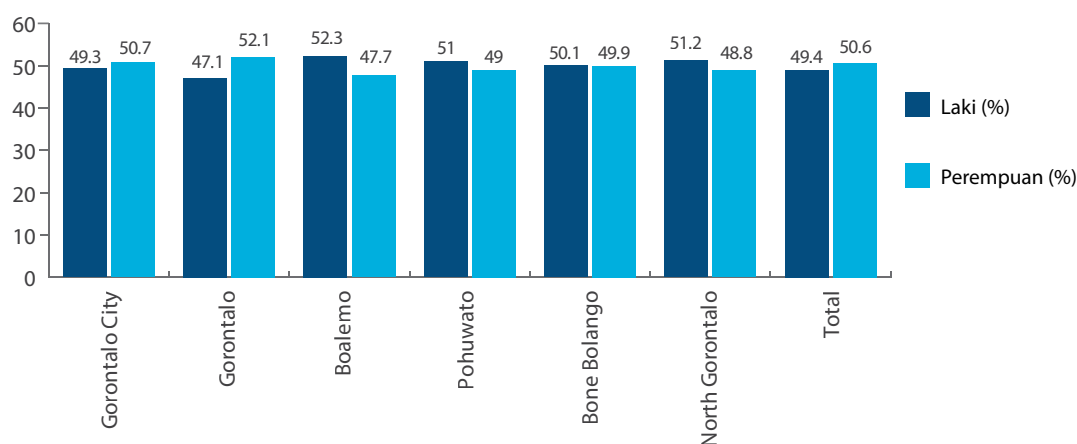
Motto yang bagus untuk sekolah. Moto yang dipromosikan oleh Dinas Provinsi Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (PPOR) di Provinsi Gorontalo adalah 'Tidak Ada Alasan Tidak Bersekolah', diterjemahkan secara bebas sebagai 'Tidak ada alasan untuk tidak pergi ke Sekolah.' Moto yang menarik yang memastikan bahwa semangat pendidikan untuk semua, baik laki-laki dan perempuan, sangat disesuaikan dengan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan dalam pelayanan pendidikan masyarakat.

Pendidikan sebagai Prioritas Pembangunan. Pemerintah Provinsi Gorontalo telah berkomitmen untuk menjalankan pengembangan sektor pendidikan sesuai Rencana Strategis Pendidikan Jangka Menengah. *Smart Gorontalo 2019* adalah visi pemerintah provinsi. Terpercaya dan pendidikan yang berkualitas tinggi adalah misinya. Penyediaan pendidikan yang murah, berkeadilan, berkualitas, dan bermanfaat bagi setiap murid merupakan pengelolaan bagi seluruh sekolah yang dibuat oleh para pemangku kepentingan lokal. Cepat, berketepatan waktu, berkualitas, disiplin, dan bertanggung jawab adalah nilai-nilai universal disepakati dibalik praktek yang baik dalam pelayanan pendidikan publik. Rencana strategis pendidikan telah menjadi salah satu referensi utama dan panduan praktis tentang bagaimana seseorang Walikota dan lima bupati di *Provinsi Gorontalo dalam mengelola pengembangan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk pengembangan sosial, ekonomi dan budaya saat ini.*

Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan. Saat ini, jumlah penduduk yang tinggal di Provinsi Gorontalo diperkirakan 1,070,690 dan 51% adalah perempuan (Tabel 1). Distribusi jumlah penduduk laki-

laki dan perempuan bervariasi di seluruh kabupaten. Perbedaan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Gorontalo lebih besar daripada Kota Gorontalo dan Provinsi Gorontalo. Ditemukan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak di Kabupaten Boalemo, Pohuwato, dan Gorontalo Utara. Sedangkan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang sama terdapat di Boalemo. Temuan ini menunjukkan bahwa setiap kabupaten mungkin memiliki sumber daya yang berbeda untuk menangani masalah gender yang terkait dengan kapasitas kelembagaan termasuk sumber daya manusia untuk memberikan solusi yang tepat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan bagi murid laki-laki dan perempuan.

Tabel 1. Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan 2011 (%)



Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tingkat Provinsi

Meningkatkan alokasi anggaran untuk Pendidikan. Anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan telah meningkat luar biasa selama sepuluh tahun terakhir di Provinsi Gorontalo (Tabel 2). Setidaknya dua temuan utama yang terungkap sebagai pembelajaran pengalaman: (1) total anggaran untuk pendidikan pada tahun 2011 telah meningkat dua belas kali lipat anggaran yang disediakan pada tahun 2001, (2) pertumbuhan *cost sharing* antara APBD dan APBN telah memberikan praktek yang baik untuk mendukung keuangan yang disediakan oleh Kemendikbud/Kemenag dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Tabel 2. Perkembangan Anggaran Pendidikan 2001-2011

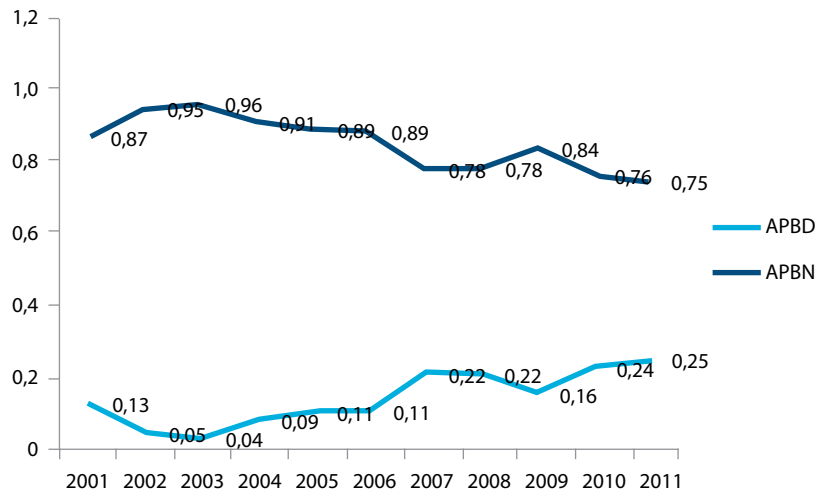
Tahun	SUMBER PENDANAAN		TOTAL
	APBD	APBN	
2001	2.390.600.000	16.000.000.000	18.390.600.000
2002	3.200.000.000	60.921.891.000	64.121.891.000
2003	2.561.763.618	68.338.289.000	70.900.052.618
2004	4.479.626.815	47.803.682.000	52.283.308.815
2005	10.500.000.000	86.558.840.000	97.058.840.000
2006	17.268.625.589	136.522.924.000	153.791.549.589
2007	37.138.413.048	135.480.892.000	172.619.305.048
2008	49.500.000.000	179.914.467.000	229.414.467.000
2009	55.000.000.000	288.809.364.000	343.809.364.000
2010	55.250.000.000	179.570.120.000	234.820.120.000
2011	55.650.000.000	166.459.102.000	222.109.102.000

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tingkat Provinsi 2012

Praktek yang Baik untuk Berbagi Biaya (cost Sharing) dalam Anggaran Pendidikan. Temuan yang paling signifikan adalah tentang kecenderungan *cost sharing* yang disediakan oleh APBN telah turun dari 95% menjadi 75% dalam dasawarsa terakhir (Tabel 3). Untuk periode yang sama, kecenderungan *cost sharing* yang disediakan oleh APBD sudah naik dari 5% sampai 25%. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan

pendidikan yang konsisten dan penyediaan sumber daya keuangan akan berdampak signifikan pada pencapaian pelayanan yang lebih baik pada pendidikan untuk semua. Kemendikbud percaya bahwa APBN telah digunakan dengan baik untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan pendidikan. Sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan APBD untuk pendidikan (Tabel 3), Pemerintah Provinsi telah lebih percaya diri dan memiliki kemampuan untuk mengelola suatu prestasi yang lebih baik pada penyediaan pendidikan untuk setiap murid tanpa memandang ras, agama dan gender.

Tabel 3. Cost-Sharing (Berbagi Biaya) untuk Pendidikan, 2001-2011



Pengarusutamaan Gender Dalam Pendidikan di Provinsi Gorontalo

Komitmen Pengarusutamaan Gender. Baik dewan eksekutif dan legislatif telah mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender. Gubernur Gorontalo dan Ketua DPRD sepakat untuk melembagakan PUG melalui pembentukan (a) Bidang Pemberdayaan Perempuan, (b) Perempuan dan Perlindungan Anak, dan (c) Bidang Sosial berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No 5/2007 tentang Organisasi dan Tata Kelola Organisasi dan Tata disebut Kerja (OTK) di Sekretariat Pemerintah Provinsi Gorontalo. Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi, sejak tahun 2008 Gubernur Gorontalo mengalokasikan dana dari APBD khusus dibuat untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender melalui beberapa program meliputi PPAUD, Pendidikan Non Formal (NFE), dan pendidikan masyarakat yang dikelola oleh Kepala Sub-bagian Pendidikan Informal dan Non Formal (INFE). Gubernur Gorontalo kemudian mengeluarkan Keputusan Gubernur (SK) No 189/4/DIKPORA/1308/2010 tentang Kelompok Kerja Gender Pendidikan. Dalam Peraturan ini Kepala Dinas PPOR, Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Kepala Biro Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan bertanggung jawab untuk PUG bidang pendidikan.

Kebijakan Pengarusutamaan Gender yang Diperbarui. Pada tahun 2012 Focal point untuk diperbarui dengan adanya Keputusan No.188.4/Dikpora/326/PNFI/2012. Focal Point memiliki tujuh kewajiban bagi PUG dalam Pendidikan: (1) mempromosikan PUG di Unit-unit Pendidikan, (2) memfasilitasi pengembangan perencanaan strategis sekolah yang responsif gender, dan (3) mengelola pelatihan, sosialisasi, advokasi dengan menargetkan manajer dan staf di sekolah, (4) melaporkan pelaksanaan PUG, (5) mendukung analisis gender untuk kebijakan pendidikan dan program, (6) mengembangkan data sekolah yang responsive gender, dan (7) mengelola koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait PUG lainnya. Focal point PUG saat ini memiliki 9 anggota dan 2 penasehat di Dinas PPOR Provinsi.

Selamat Datang Kepemimpinan Perempuan. Kepala Pokja gender di Dinas Pendidikan Provinsi mengatakan bahwa kepemimpinan perempuan di pemerintahan provinsi selalu terbuka di beberapa posisi. Kita semua menyambut beberapa Sekretaris perempuan yang ditunjuk di Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Bualemo.

Program Dominan PUG dalam pendidikan. Dinas PPOR Provinsi telah menyelesaikan lima kegiatan utama PUG: (1) sosialisasi PUG dalam pendidikan, (2) anggaran, perencanaan, dan pelatihan yang responsif gender, (3) Diskusi Kelompok Terfokus untuk sekolah, (4) Lokakarya pengembangan pembelajaran bahan ajar yang responsif gender, dan (5) pelaksanaan PUG berbasis pengajaran mikro di masing-masing sekolah yang terpilih di Pohuwato dan Gorontalo utara sebagai kabupaten percontohan.

Penguatan Peran Pengambil Kebijakan Lokal PUG. Pengarusutamaan gender telah menjadi urusan setiap lembaga public yang bertanggungjawab di bidang pengembangan pendidikan. Tahun lalu, Pokja gender di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi melaksanakan pertemuan pengembangan kebijakan lokal untuk penyegaran pentingnya PUG dalam sector pendidikan yang dihadiri supervisor program pendidikan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Biro Statistik Provinsi, Biro Pemberdayaan Perempuan di Sekretariat Pemerintah Provinsi, dan Pusat studi Wanita di Universitas Negeri Gorontalo.

Mengembangkan Bahan Belajar yang Responsif Gender. Bertempat di Hotel Zanur Mega tiga pelatih utama dari PAUDNI (INFE) dan PSW - UNG melakukan Diskusi *roundtable* - Meja Bundar yang melibatkan 50 peserta termasuk manajer dan staf dari Dinas Pendidikan, Pengawas tingkat Provinsi, dan guru SD/MTs dan SMP/MTs terpilih yang bertanggung jawab untuk mengajar pendidikan kewarganegaraan, pendidikan sosial, dan Bahasa Indonesia.

Program Pengembangan Kapasitas untuk PUG dalam Pendidikan. Dinas PPOR tingkat Provinsi melakukan program peningkatan kapasitas yang menargetkan 50 peserta termasuk Biro Perencanaan, Bagian PAUDNI (INFE), BPS Provinsi, Biro Pemberdayaan Perempuan, Pokja Gender Kabupaten, dan kepala sekolah SD/SMP.

PUG dalam Pendidikan untuk Kabupaten Percontohan. Lokakarya ini dilakukan untuk mengembangkan alat pembelajaran yang responsif gender dengan menargetkan 50 peserta yang diundang dari 5 kabupaten dan 1 kota, didukung oleh pengawas dari Pemerintah provinsi dan Dinas Pendidikan.

Pemantauan PUG dalam Pendidikan. Pemantauan difokuskan pada kabupaten percontohan, Pohuwato dan Gorontalo Utara. Temuan utama adalah untuk menemukan model pembelajaran yang responsive gender yang memenuhi syarat untuk diseminasikan ke kabupaten lainnya. Semua laporan proyek percontohan disampaikan kepada Dirjen PPAUD melalui Sub Direktorat Program dan Evaluasi.

Data terpilah menurut gender pada tahun 2012. Data pendidikan dan informasi yang relevan dianggap sebagai faktor keberhasilan kunci penting terhadap perencanaan, pengorganisasian, penganggaran, pemantauan, dan pelaporan pendidikan. Setiap anggota Pokja Gender Provinsi menyadari kesulitan untuk mendapatkan data yang dapat dipercaya dan diperbarui. Pokja Gender Provinsi Gorontalo yang berada di bawah pimpinan bagian Pendidikan Non Formal dan Informal (INFE) telah berupaya untuk bekerja mempersiapkan Kertas Posisi sebagai langkah awal untuk mengembangkan kebijakan data yang terpilah menurut gender dan menyiapkan rancangan sistem manajemen data menurut jenis kelamin. Pengumpulan data akan dilakukan. Kemudian analisa data akan diselenggarakan untuk menyediakan data terpilah menurut jenis kelamin. Ringkasan Eksekutif tentang kesenjangan gender dan implikasinya terhadap pembangunan akan diberikan dan dibahas untuk rencana tindak lanjut. Penyajian temuan utama terkait dengan parapemangku kepentingan akan dilakukan dalam serangkaian lokakarya dan pertemuan konsultasi. Identifikasi kebutuhan prioritas dengan para pembuat kebijakan direncanakan. Elaborasi dan integrasi isu-isu gender dalam program yang ada atau mengembangkan program baru akan disinkronisasi. Kegiatan tindak lanjut dan anggaran akan dibahas dan disepakati dengan semua pihak yang terlibat.

Program yang responsif gender dalam (SKPD) Unit Pelaksana Program. Pengarusutamaan gender adalah *cross cutting isu* – isu lintas sector sehingga kegiatan PUG yang telah dilaksanakan tidak saja di sector pendidikan namun juga di sector pengembangan social ekonomi. Di Gorontalo, program yang responsif gender telah diterapkan di beberapa SKPD seperti:

1. Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan tingkat Provinsi yang telah mengerjakan pengembangan kewirausahaan dan daya saing untuk Skala Bisnis Menengah.
2. Dinas Tenaga Kerja telah melakukan program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan peningkatan pasar tenaga kerja.
3. Dinas Perikanan Provinsi telah melakukan program tentang mengoptimalkan produksi perikanan dan pemasaran.

4. Lembaga Pengembangan Masyarakat Pedesaan dan Pendidikan Keluarga Provinsi telah mengelola program penguatan peran perempuan di daerah pedesaan.
5. Dinas Pelayanan Kesehatan Provinsi telah mengelola program pada penurunan tingkat kematian ibu dan perlindungan anak.
6. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Sosial Tingkat Provinsi telah mengelola program keterampilan (*life skill*) dan perlindungan perempuan; meninjau konsistensi kebijakan untuk meningkatkan kualitas anak dan perempuan, peningkatan kapasitas kelembagaan untuk gender dan anak.
7. Badan Pendidikan Keluarga Berencana Provinsi telah mengelola program pelatihan kecakapan (*life skill*).
8. Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi telah mengelola program tentang Perencanaan sosial budaya.

APBD untuk program Pendidikan Non Formal dan Informal (INFE) tahun 2011. Pengarusutamaan gender adalah salah satu urusan inti *INFE* di Provinsi Gorontalo. Didukung oleh APBD 2011 sebesar Rp 1.370.575.000 untuk, Dinas PPOR khususnya Bagian Pendidikan Informal dan Non Formal, mengelola program-program berikut yang ditujukan baik untuk murid laki-laki dan perempuan:

- a. Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PPAUD) didukung dengan dana Rp 433.187.000 untuk memfasilitasi PPAUD dengan berkoordinasi dengan Bank Dunia (Rp 177.800.000) dan publikasi atau sosialisasi Hari Buku Nasional (Rp 255.387.000).
- b. Program Pendidikan Non Formal (Kesetaraan) ini didukung dengan dana Rp 466.000.000, - untuk menjalankan Paket B (Rp 146.000.000, -), Paket C (Rp 199.100.000,-), dan Ujian Nasional untuk semua Paket A, B dan C (Rp 120.900.000,-).
- c. Program Pendidikan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp 471.388.000,- mencakup pengembangan pendidikan keterampilan (*life skill*) (Rp 283.388.000,-) dan promosi hari Melek Dunia Internasional 2011 (Rp 199.100.000,-).

Tantangan PUG di sekolah. Beberapa masalah yang menantang untuk pelaksanaan PUG di sekolah diidentifikasi selama kunjungan lapangan di Kabupaten Gorontalo adalah sbb:

- a. Kurangnya pemahaman tentang konsep-konsep gender, teknik analisis sederhana, dan aplikasi praktis PUG di setiap mata pelajaran untuk setiap tingkat dan jenis sekolah.
- b. Bias gender terjadi di mana-mana di lingkungan sekolah termasuk infrastruktur sekolah dan fasilitas, dibutuhkan buku teks dan bahan pembelajaran, dan bahan belajar lainnya.
- c. Secara sadar atau tidak sadar guru mempertahankan peran stereotip di sekolah dan begitu juga orang tua di rumah.
- d. Mitos dan peran paternalistik yang masih hidup menghambat murid laki-laki dan perempuan untuk memahami kesetaraan gender dan keadilan.
- e. Dalam kebanyakan kasus, banyak pembuat kebijakan pendidikan dan para pemangku kepentingan pendidikan tidak konsisten mengalokasikan anggaran dan menempatkan manajer PUG yang tepat untuk menilai dampak masa depan gender pada peningkatan kualitas pendidikan.
- f. Kurangnya kapasitas kelembagaan untuk terus mengelola sistem pendidikan yang responsif gender dalam semua tingkat manajemen.

Kapasitas dari Pusat Studi Wanita. Personil baru yang bertugas untuk menggerakkan PSW -UNG didirikan pada Februari 2012. Rektor dan Dekan dari berbagai jurusan/ fakultas telah memberikan izin secara formal untuk para dosen individu untuk berpartisipasi dalam sosialisasi PUG, pelatihan, seminar, atau lokakarya di luar universitas. Dari 2009 hingga 2011, beberapa pelatih/penasehat pengarusutamaan gender telah terlibat dalam beberapa kegiatan PUG di kabupaten, provinsi, dan kegiatan nasional. Beberapa pelatih PUG berpengalaman dan peneliti yang telah pernah bekerja dengan Pokja provinsi mensosialisasikan PUG, membangun kapasitas PUG, mengelola materi pembelajaran yang responsif gender seperti kewarganegaraan, Ilmu Sosial, dan Bahasa Indonesia.

Peran PSW dalam program pengarusutamaan gender. Pada tahun 2005, PSW telah bergabung di program-program berikut:

- a. Sosialisasi hasil penelitian tentang analisis gender dalam sektor pendidikan yang disponsori oleh Direktorat Pendidikan Non Formal dan Informal (NFI).
- b. Menyiapkan proposal penelitian tentang analisis gender dalam sektor pendidikan di Provinsi Gorontalo disponsori oleh Dir.Pendidikan Non Formal dan Informal (NFI).

- c. Rapat koordinasi untuk menyelesaikan proposal penelitian yang disponsori oleh Pemerintah Provinsi.
- d. Pertemuan nasional dengan Pemimpin Opini Perempuan yang disponsori oleh KPP.
- e. Pertemuan koordinasi dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disponsori oleh KPP.
- f. Seminar Internasional tentang Pemberdayaan Perempuan dan Tantangan Nasional disponsori oleh KPP.
- g. Lokakarya-lokakarya lainnya yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, kekerasan dalam rumah tangga, keluarga berencana, dll

Kesiapan Widyaiswara untuk mendukung PUG di sekolah. LPMP memiliki 9 Widyaiswara dan siap untuk mengikuti pelatihan PUG untuk pelatih untuk melaksanakan kegiatan PUG di masa datang, termasuk lokakarya lokal, program pelatihan, seminar, dan tinjauan kegiatan PUG di Sekolah Pelatihan manajemen. Fasilitas dan infrastruktur yang tersedia untuk mendukung program pelatihan PUG. Tidak tersedia dana untuk pengintegrasian gender pada program pelatihan di LPMP. Semua program pelatihan di LPMP tidak ditinjau dengan menggunakan perspektif PUG. Namun, beberapa topik dalam program pelatihan tertentu mungkin memiliki konten yang spesifik secara tidak langsung terkait dengan isu gender.

Memperkuat kerjasama antara PSW-UNG dan Pokja gender Provinsi. PSW-UNG memiliki beberapa ahli gender dan mereka siap membantu Pokja gender provinsi dalam berbagai program, termasuk penelitian dan pengembangan, pengembangan keluarga dan masyarakat, dan pelatihan dan pendidikan. Kebanyakan program saat ini tergantung pada anggaran yang dialokasikan oleh APBN dan APBD. Peran utama untuk PSW-UNG dalam jumlah program yang terbatas adalah sebagai nara sumber, penasihat, peneliti, dan pelatih. Program yang responsif gender dalam sektor pendidikan harus dikembangkan berdasarkan data yang diperbarui dan bergerak dari program tahunan sampai program jangka menengah yang memungkinkan kontribusi lembaga (bukan individual) dan dampak yang lebih besar untuk penyediaan layanan pendidikan publik.

Penguatan kerja sama antara PSW-UNG dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi (BPP-KB). BPP-KB adalah salah satu lembaga di garis depan untuk PUG yang berada di bawah Sekretariat Pemerintah Provinsi dan mendapat dukungan sumber daya keuangan yang teratur untuk melakukan PUG dengan target pendidikan keluarga. Selain program pendidikan perencanaan kesehatan keluarga yang terintegrasi, pelatihan keterampilan industri rumah, dan kampanye gizi untuk anak, BPP-KB akan memperkenalkan program baru pendidikan lingkungan untuk keluarga yang disebut Bina Lingkungan Keluarga. PSW-UNG dapat berkontribusi untuk melakukan survei baseline keluarga untuk memastikan sasaran penerima manfaat, perencanaan, pengorganisasian, dan pengukuran hasil yang tepat. Penelitian aksi partisipatif untuk mengembangkan kesejahteraan keluarga dapat dikelola oleh anggota PSW-UNG dengan dukungan BPP-KB dan mitra nasional lainnya.

Memperkuat hubungan antara PSW dan Fakultas Pendidikan. Ditemukan bahwa PUG di di UNG tidak efektif dan secara internal dilakukan oleh PSW-UNG. Kebanyakan penasihat/konsultan PUG yang tergabung dalam PSW berdasarkan komitmen pribadi, bukan komitmen kelembagaan. Jasa konsultasi dari PSW telah dilakukan untuk memfasilitasi mitra di luar UNG (*outward looking*) dan kurangnya upaya untuk mengajak kolega dan para dosen lainnya di UNG itu sendiri (*inward looking*). Temuan fakta yang teridentifikasi menunjukkan bahwa PSW harus menanggapi kebutuhan PUG secara internal untuk para dosen dari setiap jurusan di UNG khususnya jurusan pendidikan yang bertanggung jawab untuk pelatihan *pre-service* bagi guru saat ini dan masa datang di semua jenis dan tingkat sekolah.

Profil Kabupaten Gorontalo

Sejarah dan Demografi. Kabupaten Gorontalo terbentuk pada 26 November 1976 berdasarkan UU No 29/1959 dengan Istimewa sebagai ibukota. Pada tahun 1978, ibukota dipindahkan ke Limboto. Selama dua puluh lima tahun, Kabupaten Gorontalo merupakan kabupaten pertama yang dibagi menjadi dua kabupaten – yaitu Gorontalo dan Boalemo pada tahun 1999, dan singkat setelah UU Otonomi Daerah yang berlaku efektif, Bone Bolango kemudian membentuk sebagai kabupaten terpisah dari Kabupaten Gorontalo. Pada tahun 2010 jumlah penduduk adalah 385.154 yang tinggal di 191 desa dan 14 'Kelurahan'. Dilaporkan bahwa 51 desa adalah desa yang terisolasi dan marjinal, tersebar di 18 kecamatan dan didukung oleh wilayah daratan 2.124,60 km².

PNS mayoritas perempuan. Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo didukung oleh 3.272 guru termasuk 69% adalah perempuan dan 67% adalah PNS. Para guru PNS yang didominasi oleh perempuan sebagai pemain kunci dalam sektor pendidikan merupakan peluang terbuka untuk berkontribusi secara signifikan di masa depan dan berdampak lebih besar untuk program pengarusutamaan gender di sekolah.

Jumlah sekolah yang dikelola. Saat ini data yang diberikan oleh Bagian Perencanaan menunjukkan bahwa Kabupaten Gorontalo telah mengelola 1 319 sekolah dasar, 119 sekolah Menengah Pertama, 13 Sekolah Menengah, dan 11 sekolah kejuruan.

Daerah yang strategis untuk urusan barang dan pelayanan. Kabupaten Gorontalo perbatasan dengan Laut Sulawesi di sebelah Utara, Teluk Tomini di sebelah Selatan, Bone Bolango dan Bolaang Mongondow di bagian Timur, dan Kabupaten Boalemo di sebelah Barat. Kabupaten Gorontalo tidak hanya strategis sebagai daerah pinggiran perkotaan Kota Gorontalo yang didukung oleh pelabuhan laut dan bandara, infrastruktur dan fasilitas yang lebih baik, dan Universitas Gorontalo yang baru didirikan, tetapi juga daerah potensial untuk tumbuhnya agroindustri modern yang terintegrasi. Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo merespon untuk menyiapkan angkatan kerja berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan lokal dan nasional dalam hal pengetahuan dan keterampilan untuk mendukung pembangunan ekonomi sosial yang berkembang.

Pengarusutamaan Gender Dalam Pendidikan

Kebijakan Kabupaten untuk Pendidikan. Kepemimpinan PUG dalam pendidikan secara tidak langsung telah didukung oleh Bupati Gorontalo dengan komitmen yang sangat baik untuk meningkatkan kesetaraan dan kualitas pendidikan. Selama dua tahun (2009-2010), Bupati Gorontalo Bupati menandatangani enam belas Peraturan Bupati (lihat Tabel 4) untuk memandu Dinas pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo dan para pemangku kepentingan lainnya untuk mengelola pengembangan sistem pendidikan lokal yang dapat diakses oleh setiap murid tidak hanya yang tinggal di 205 desa/’kelurahan’ termasuk murid yang tinggal di 51 desa terpencil.

Tabel 4. Daftar Peraturan Bupati untuk Pendidikan, 2009 dan 2010

No. & Tahun	Peraturan Bupati
26/2009	a. Standar Pelayanan Minimum untuk Pendidikan
27/2009	b. Prosedur dan Operasi Standar Evaluasi Kinerja untuk Karyawan Pendidikan dan Guru
28/2009	c. Pengembangan Kurikulum Sekolah
29/2009	d. Manajemen Pendidikan Informal dan Non Formal
30/2009	e. Pengajaran Multi Kelas
31/2009	f. Penempatan dan Distribusi Guru
32/2009	g. Prosedur dan Mekanisme untuk Manajemen Data Pendidikan
33/2009	h. Pendidikan Anak Usia Dini
34/2009	i. Regrouping (Pendirian dan Integrasi) Sekolah
35/2009	j. Pedoman Perencanaan Pengembangan Sekolah dan Penganggaran
36/2009	k. Perguliran Guru
37/2009	l. Sertifikasi Guru.
38/2009	m. Pengembangan Kompetensi
62/2010	n. Praktik Terbaik untuk Manajemen Berbasis Sekolah
68/2010	o. Program Induksi Guru
72/2010	p. Sertifikasi Guru

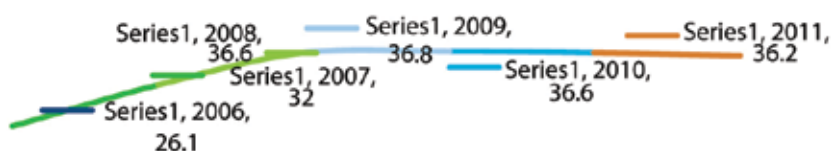
Sumber: Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo

Hanya satu – Kebijakan pro gender. Sebagian besar Peraturan Bupati dianggap netral gender. Hanya satu Peraturan Bupati yang secara eksplisit menyatakan keadilan gender seperti yang ditunjukkan pada Pasal 2 Peraturan Bupati No 29/2009 tentang Pengelolaan Pendidikan Informal dan Non Formal. Dinyatakan bahwa salah satu tujuan pendidikan adalah untuk memastikan pengembangan keadilan gender pada layanan pendidikan.

Peningkatan anggaran untuk pendidikan. Gorontalo tidak sekaya Kutai Kertanegara-Kalimantan Timur, namun baik Bupati dan DPRD telah mengalokasikan anggaran pendidikan dari APBD dengan proporsi terbesar dari total APBD. Selama enam tahun terakhir, anggaran tersebut telah meningkat secara signifikan untuk mendukung peningkatan berkelanjutan dari pelayanan pendidikan untuk masyarakat umum (Tabel 5). Anggaran pendidikan yang berkembang menunjukkan kemauan politik dan kapasitas untuk

meningkatkan penyediaan pendidikan untuk semua penduduk usia sekolah tanpa memandang jenis kelamin dan status sosial ekonomi. Anggota Komisi Pendidikan di DPRD mengatakan bahwa anggaran meningkat dari 26% menjadi 36% adalah untuk memastikan bahwa guru laki-laki dan perempuan mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dan hasil yang responsif gender.

Tabel 5. Persen Anggaran Pendidikan dari Total APBD, 2006-2011



Sumber: Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo.

Munculnya isu-isu PUG di sekolah. Kabupaten Gorontalo bukan menyelenggarakan program PUG percontohan di Provinsi Gorontalo. Tetapi telah begitu banyak pelajaran yang dapat dipetik dari program saat ini dan sebelumnya yang secara tidak langsung dan secara implisit menangani isu gender. Kebanyakan pengawas, guru dan kepala sekolah di Kabupaten Gorontalo menghadapi masalah berikut:

- Kurangnya pengetahuan tentang pengarusutamaan gender
- Resistensi/penolakan dari budaya yang dapat menghapuskan bias gender dalam materi pembelajaran,
- Munculnya stereotip yang tidak disengaja di sekolah/kelas.
- Kesalahpahaman tentang kesetaraan dan keadilan gender
- Kurangnya keterampilan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan data terpilah jenis kelamin,
- Kurangnya aplikasi praktis tentang gender berdasarkan data untuk mengembangkan RKS dan RKAS

Data terpilah menurut jenis kelamin dapat dikembangkan dengan menggunakan GIS MIS. Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo telah mengembangkan sistem manajemen data pendidikan terintegrasi:

- Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk pendidikan merupakan bagian dari pemetaan kualitas sekolah untuk memahami kondisi riil pendidikan baik di pedesaan maupun perkotaan termasuk infrastruktur dan fasilitas sekolah.
- Sistem Informasi Manajemen (SIM) pendidikan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan data dasar (*baseline*) pendidikan termasuk kualifikasi guru, distribusi, dan standar kompetensi.

Dalam MIS/GIS, data mencakup sebagian besar indikator pendidikan namun perlu tindakan lebih lanjut untuk mendapatkan data terpilah menurut jenis kelamin. MIS/GIS operator dapat menyediakan data terpilah menurut jenis kelamin dan mempublikasikan ke media massa cetak dan elektronik.

Pengarusutamaan Gender sebagai Isu Baru dalam Rapat Rutin. Isu gender harus dimasukkan sebagai bagian dari penjaminan mutu sekolah. Dinas Pendidikan Nasional kabupaten Gorontalo tidak hanya mengintegrasikan data dasar untuk baik sekolah dan madrasah, tetapi telah menyelenggarakan pertemuan bulanan rutin untuk mengidentifikasi masalah yang muncul dan menawarkan solusi untuk perbaikan mutu pendidikan yang menguntungkan bagi murid laki-laki dan perempuan. Banyak forum guru, kepala sekolah, dan pengawas diperlakukan sebagai kendaraan untuk mempercepat akses yang seimbang untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik dari sekolah.

Dukungan internasional untuk PUG di sekolah. Masyarakat internasional memiliki kewajiban untuk mengikuti perjanjian internasional termasuk PUS. Kemudian, pengarusutamaan gender selalu disertakan dalam sebagian besar proyek/program yang disponsori oleh lembaga internasional. Sebagai penerima manfaat program yang secara internasional dibiayai, Gorontalo telah berhasil melaksanakan program-program berikut:

- Better Education Reformed Managing Universal Teacher Upgrading (BERMUTU)* - Perubahan Pendidikan yang lebih baik Mendorong perbaharuan Guru secara Universal (BERMUTU) 2006-2009 disponsori oleh Bank Dunia berfokus pada sertifikasi guru dan penyediaan hibah untuk pemberdayaan guru (MGMP), supervisor (MKPS), dan forum sekolah kepala sekolah (MKKS).

- b. Pengarusutamaan Praktik yang Baik untuk Pendidikan Dasar - *Mainstreaming Good Practice for Basic Education (MGP-BE)* program 2007-2010. Program ini merupakan proyek gabungan yang menargetkan 42 Sekolah Dasar di dua kecamatan (Kecamatan Perkotaan dan Pedesaan) untuk mempromosikan manajemen berbasis sekolah dan praktek pembelajaran yang menyenangkan yang difasilitasi oleh UNICEF.
- c. Pengembangan Seluruh Kabupaten – Pengembangan Seluruh Sekolah (*WDD/WSD*) 2006-2010 telah didukung oleh AI-BEP-AUSAID untuk menyediakan infrastruktur sekolah dan sekolah baru yang dilengkapi dengan semua perangkat keras administrasi untuk memastikan bahwa murid di daerah terpencil memiliki akses yang sama untuk sekolah.
- d. Standar Pelayanan Minimum dalam pendidikan dasar ini disponsori oleh Asean Development Bank (ADB) pada tahun 2010. Proyek ini mendukung Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo untuk memenuhi indikator SPM dan standar dalam pendidikan dasar.

Pengarusutamaan gender dapat didukung oleh APBD. Dengan menggunakan data dasar dari GIS-MIS, PUG dalam pendidikan memungkinkan untuk diintegrasikan dengan program pembangunan berikutnya dalam sektor pendidikan. Para praktisi Pokja gender dan konsultan PSW harus memberikan perhatian bagaimana anggaran indikatif dan program pendidikan untuk 2011 - 2015 (Tabel 6) akan digunakan.

Tabel 6. Program Indikatif dan Anggaran untuk 2010-2012

Program	Rupiah
a. Kantor Pelayanan Administrasi	16.552.297.000
b. Meningkatkan fasilitas untuk manajer dan staf	11.400.000.000
c. Meningkatkan disiplin manajer dan staf	180.000.000
d. PPAUD	29.392.000.000
e. 9-tahun pendidikan dasar	79.720.330.000
f. Pendidikan SLTA	59.062.570.000
g. Penjaminan kualitas untuk personel guru dan pendidika	19.223.250.000
h. Pendidikan Non Formal	4.511.000.000
i. Manajemen Layanan Pendidikan	2.203.400.000
Total	222.244.847.000

Sumber: Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo

Inisiatif Keberpihakan pada yang miskin untuk menjangkau murid di desa-desa terpencil. Terdapat dua inisiatif unik untuk menjangkau murid laki-laki dan perempuan dari keluarga miskin, belajar di sekolah-sekolah yang miskin dan yang terletak di desa pinggiran dan terpencil telah diperkenalkan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo.

- a. Program Guru Bergulir – terdapat 60 guru senior dan tiga konsultan pendidikan dari UNG dikerahkan ke desa-desa terpencil dengan menggunakan Bus untuk mendidik semua guru berbasis penilaian kinerja guru dan untuk melakukan pemetaan kompetensi guru untuk karir guru selanjutnya dan pengembangan profesional.
- b. Program Pengajaran Multi-kelas - program ini dimaksudkan untuk mengatasi banyak sekolah di daerah terpencil yang memiliki murid sedikit dalam memenuhi SPM atau *ENS* karena keberhasilan program KB. Hal ini merupakan mekanisme penilaian kebutuhan antara guru dan murid. Melakukan re-grouping kelas yang lebih rendah (1, 2, dan 3) dan kelas lebih tinggi (4, 5, dan 6). Hari ini, guru di 25 Sekolah Dasar telah kembali dilatih sebagai multi kelas guru.

Data terpilah gender memerlukan analisa lebih lanjut. Sejak tahun 2006, Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo menyediakan dan secara teratur memperbarui data mentah melalui GIS-MIS. Dengan menggunakan SPM dan *NSE* sebagai kerangka kerja, data mentah yang tercakup dalam GIS MIS dapat menyediakan data dasar untuk pengolahan data dan analisa lebih lanjut oleh semua pemangku kepentingan. Mereka dapat menggunakan data untuk mengevaluasi sekolah mereka sendiri secara internal. Mereka dapat menggunakannya untuk pengembangan rencana pengembangan sekolah dan anggaran di setiap sekolah/madrasah.

Keterampilan yang diharapkan dalam menggunakan data sekolah yang responsif gender. Sekolah-sekolah/madrasah tidak memiliki data terpilah jenis kelamin, tetapi mereka tidak menyadari bahwa data tersebut memiliki arti bagi pengembangan sekolah yang responsive gender untuk mencapai keadilan gender. Kebanyakan Kepala

sekolah tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana menggunakan dan melihat manfaat sekolah dalam mencapai peningkatan kualitas yang lebih baik berdasarkan hubungan antara perspektif gender dan pelayanan pendidikan berkualitas bagi semua murid, baik laki-laki dan perempuan. Tim pengembangan Sekolah termasuk pengawas, kepala sekolah, guru, dan anggota komite sekolah membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan data dalam membentuk sistem pendidikan gender responsif. SMAN 1 Limboto dan SDN 1 Luwuo siap sebagai percontohan sekolah yang responsif gender.

Data Akuntabel untuk publikasi. Pelajaran dari pengalaman yang baik diambil dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo dimana Bagian Perencanaan menyediakan data yang diperbarui dan transparan yang diambil dari GIS-MIS. Satu set data mentah lengkap untuk setiap sekolah, dari PAUD sampai dengan SLTA, yang tersedia, secara teratur diperbarui, dan dapat diakses oleh semua satuan pendidikan termasuk SATKER lain di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Staf dinas pendidikan kabupaten terlatih baik dalam pengumpulan dan pengelolaan data. Tetapi mereka tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk bagaimana menerjemahkan data ke dalam data dasar yang responsif gender untuk kepentingan pengembangan program dan pengembangan pendidikan lokal.

Hambatan Program Penelitian PUG. Banyak spesialis gender dan pendidikan menegaskan bahwa gender saja bukanlah isu strategis bagi para pemimpin politik lokal atau prioritas pertama untuk pembangunan daerah. Mereka juga menyimpulkan bahwa program penelitian yang terkait gender selalu mendapatkan keuangan dan dana yang kurang oleh Pemerintahan Pusat dan Provinsi.

Dampak Program PUG dan Praktek Terbaik Yang Muncul

Pengarusutamaan gender diperkenalkan oleh Depdiknas sejak tahun 2006 di Provinsi Gorontalo. Pada periode yang sama didukung program internasional termasuk MGB-BE, AIBEP, BERMUTU, MSS, dan program pembelajaran ramah bagi anak UNICEF telah dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo. Dampak langsung dan tidak langsung dari pengarusutamaan gender dalam pembangunan pendidikan lokal ditunjukkan sebagai berikut:

- a. Pengarusutamaan gender di bidang pendidikan telah dilembagakan dalam beberapa peraturan Pemerintah Provinsi.
- b. Kelompok Kerja gender disebut Pokja gender telah dikelola untuk melanjutkan gerakan pengarusutamaan gender di sekolah.
- c. APBD disediakan untuk PUG oleh pemerintah provinsi
- d. Banyak Satker telah mengelola penerapan program dan anggaran yang responsif gender
- e. Pengarusutamaan gender dalam pendidikan terus dipromosikan melalui pelatihan, lokakarya, seminar, penelitian dan pengembangan.
- f. Model pengarusutamaan gender dari Puhwato Dan Gorontalo Utara menjadi sasaran untuk dikaji lebih lanjut dan disebarluaskan ke sekolah dan kabupaten lain.
- g. Pelatih gender senior yang terbatas bersedia untuk membantu pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pendidikan.
- h. Masalah-masalah yang menantang saat ini terkait kesetaraan dan keadilan gender telah menjadi domain publik dengan para pemangku kepentingan yang berbeda,
- i. Rasa memiliki tumbuh dikalangan aktifis gender di LSM, pakar gender di Universitas, dan gender fasilitator di sekolah yang mengarah ke komunikasi dan jaringan yang lebih baik.

Beberapa praktek yang baik teridentifikasi sebagai inisiatif lokal dalam mengelola perbedaan pelayanan pendidikan yang prospektif bagi pengarusutamaan gender dalam pendidikan lebih lanjut, termasuk:

- a. Dukungan kepemimpinan dan kebijakan pendidikan yang konsisten diperlukan untuk menjamin keberlangsungan pendidikan yang responsif gender.
- b. Data dasar Pendidikan adalah langkah pertama untuk kebijakan lokal dan pengembangan program pengarusutamaan gender di Kabupaten dan di sekolah.
- c. Program inisiatif lokal untuk menjamin akses dan kualitas layanan pendidikan yang sama untuk murid dari keluarga miskin (dan tinggal di daerah terpencil) merupakan hal yang layak untuk disesuaikan dalam penyertaan program pengarusutamaan gender di tingkat nasional dan lebih berkelanjutan di tingkat lokal.
- d. *Cost sharing* (berbagi biaya) antara APBN dan APBD merupakan hal yang baik untuk peningkatan kualitas pendidikan dan merupakan latihan yang baik untuk pengarusutamaan gender.
- e. Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja wajib membentuk manajemen sekolah yang responsif gender.
- f. Prinsip dari 'Biarkan manajer mengelola' merupakan faktor kunci keberhasilan untuk pengentasan kesenjangan gender dalam pendidikan.

- g. Melakukan tinjauan tentang kapasitas kelembagaan diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di masa depan dan program pendidikan.
- h. Pengarusutamaan gender untuk pendidikan membutuhkan praktik yang baik dari struktur berikut fungsi dan anggaran berikut program, bukan yang terbalik.

Rekomendasi Kebijakan dan Program

Dari temuan fakta dan diskusi dalam rangka peninjauan pengarusutamaan gender dalam pendidikan di Gorontalo telah memberikan rekomendasi terpilih sebagai berikut:

- a. Memperbarui kebijakan pendidikan dan peraturan di tingkat provinsi dan kabupaten untuk menjelaskan pengarusutamaan gender dalam pengelolaan pendidikan.
- b. Mengembangkan program dan anggaran pengarusutamaan gender dengan menggunakan data dasar sehingga setiap program dapat diukur kemajuan dan dampaknya dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
- c. Memperkuat jaringan kelembagaan, kerjasama, dan kemitraan untuk pelaksanaan kebijakan dan program pengarusutamaan gender.
- d. Mengembangkan program inisiatif lokal untuk pengarusutamaan gender yang secara budaya diterima oleh para stakeholder pendidikan setempat.
- e. Melakukan tinjauan model pengarusutamaan gender dari kabupaten percontohan dan kemudian hasilnya disebarakan ke sekolah dan kabupaten lain
- f. Melakukan pertemuan rutin informal antara PSW, BPP-KB, Pokja gender, perguruan tinggi pendidikan, dan institusi terkait lainnya untuk membahas isu-isu gender dan solusinya.
- g. Melakukan evaluasi internal di setiap universitas yang tertarik dalam melibatkan gerakan pengarusutamaan gender untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan untuk mendukung pelatihan, penelitian dan pengembangan pendidikan.
- h. Menggunakan desain praktik lokal terbaik dan menghasilkan beberapa manual untuk program pengarusutamaan gender di setiap jenis dan tingkat pendidikan.
- i. Melakukan pertemuan kelompok sebaya antara konsultan gender di universitas dan praktisi pengarusutamaan gender di lembaga-lembaga birokrasi di tingkat provinsi, kabupaten, dan sekolah untuk memperbarui literatur gender.

Laporan Kunjungan Lapangan dan FGD di Gorontalo

1-5 Maret 2012

Lampiran 1 - FGD dengan pengelola dan kebijakan Pendidikan Kabupaten

Kode*	Pertanyaan	Komentar
Komponen 2: Melembagakan Pengarusutamaan Gender		
2a 2b 2c	1. Apakah peserta mempertimbangkan pengarusutamaan gender dalam pendidikan menjadi penting di kabupaten mereka dan mengapa?	<p>Tujuh alasan yang ditemukan untuk me-reartikulasikan menurut peserta yang didukung oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kurangnya pengetahuan tentang PUG antara guru dan kepala sekolah, pengawas dan pengelola pendidikan di kabupaten dan propinsi, dosen di perguruan tinggi. Sebagian besar fasilitas dan prasarana sekolah dan bahan pembelajaran sekolah tetap gender bias. Guru tetap memelihara/membiarkan berbagai stereotip di sekolah dan kelas. Begitu juga orang tua di rumah, Kesalahpahaman tentang kesetaraan dan keadilan gender di kalangan pengelola pendidikan dan pembuat kebijakan adalah fenomena umum seperti ditunjukkan pada pendapat dan komentar mereka, Sebagian besar stakeholder yang bertanggung jawab atas perencanaan dan penganggaran pendidikan memiliki kemampuan yang sedikit untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan data terpilah menurut jenis kelamin dalam mengembangkan ARG (anggaran responsif gender), Kebanyakan anggota Pokja gender baru kurang memiliki kapasitas untuk mempromosikan dan mengkampanyekan PUG untuk menjamin pelaksanaan PUG di setiap unit pelayanan publik. Kebanyakan lembaga pelatihan guru termasuk LPMP, FKIP, Dewan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PSW, BPS, dan unit publik lain terkait lemah dalam membuat tindakan kolaboratif untuk PUG. <p>Gubernur Gorontalo dan DPRD sepakat untuk “melembagakan PUG melalui pembentukan (a) pembagian Pemberdayaan Perempuan, (b) Perempuan dan Perlindungan Anak, dan (c) Sosial berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No 5/2007 tentang Organisasi dan Tata Kelola Pemerintahan disebut Organisasi Dan Tata Kerja (OTK) di Sekretariat Pemerintah Provinsi Gorontalo.”</p> <p>“Sejak 2008, Lokal dana telah dialokasikan oleh APBD untuk pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender.” (Kepala Sub-divisi PNFI).</p> <p>Gubernur Gorontalo kemudian mengeluarkan Keputusan Gubernur (SK) No 188/4/DIKPORA/1308/2010 tentang Kelompok Kerja Gender Pendidikan. Dalam Peraturan ini Kepala PPOR, Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Sosial bertanggung jawab untuk PUG dalam pendidikan.</p> <p>Pada 2012 Focal point untuk PUG dibentuk dengan Keputusan No. 188.4/Dikpora/326/PNFI/2012 Keputusan tersebut memiliki tanggung jawab untuk (1) mempromosikan PUG di Unit Pendidikan, (2) memfasilitasi pengembangan perencanaan strategis sekolah yang responsif gender, dan (3) mengelola pelatihan, sosialisasi, advokasi dengan menargetkan manajer dan staf di sekolah, (4) melaporkan pelaksanaan PUG, (5) mendukung analisis gender untuk kebijakan pendidikan dan program, (6) mengembangkan data sekolah yang responsif gender, dan (7) mengelola koordinasi dengan berbagai pihak PUG lainnya. Focal point PUG saat ini mencakup 9 anggota dan 2 consultant di kantor Dinas PPOR Provinsi “(Kantor Dinas PPOR Provinsi).</p>

Kode*	Pertanyaan	Komentar
2.	Apakah POKJA PUG Pendidikan telah dibuat? Kapan? Dan siapa yang menjadi anggota POKJA?	<p>Kepala GWG di Dinas Pendidikan Provinsi mengatakan bahwa “kepemimpinan perempuan di pemerintahan provinsi adalah terbuka. Kita semua menyambut dengan ditunjuknya beberapa Sekretaris perempuan di Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Bualemo.”</p> <p>Pengarusutamaan gender telah menjadi urusan setiap instansi publik. Tahun lalu, Pokja gender di Dinas Pendidikan Provinsi menjalankan “pertemuan kebijakan pembangunan daerah untuk me-refresh pentingnya PUG di bidang pendidikan dengan pengawas provinsi, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Badan Pusat Statistik, Biro Pemberdayaan Perempuan, dan Pusat Studi Wanita di Universitas Negeri Gorontalo.”</p>
2a 3c	Dukungan peningkatan kapasitas apa yang telah disediakan untuk pengarusutamaan gender di tingkat kabupaten dan sekolah?	<p>Lima kegiatan utama yang saat ini telah dilakukan oleh Pokja gender Provinsi untuk mendukung PUG di tingkat kabupaten dan sekolah: “(1) sosialisasi PUG di sekolah yang terpilih, (2) pelatihan anggaran yang responsif gender, (3) Diskusi -roundtable -Meja Bundar (RTD) tentang PUG di sekolah, (4) lokakarya untuk mengembangkan kurikulum dan bahan pembelajaran berbasis sekolah yang responsif gender, dan (5) uji coba pengajaran mikro yang responsif gender di dua kabupaten: Pohuwato dan Gorontalo Utara “(Sub Bagian Kepala PNFI – Dinas Provinsi PPOR).</p> <p>“Pada 2011, ada 50 peserta bergabung dengan <i>RTD</i> diskusi <i>roundtable</i> di Hotel Sanur Mega bertujuan untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam kurikulum dan bahan pembelajaran berbasis sekolah untuk pendidikan dasar pertama dengan menargetkan tiga mata pelajaran sekolah: kewarganegaraan, Ilmu Sosial, dan bahasa Indonesia.” (Sekretariat Pokja gender Provinsi).</p> <p>“Bupati Gorontalo telah memberikan perhatian kepada peran perempuan di Pemerintahan kabupaten Gorontalo. Asisstent 3 Sekretaris Kabupaten/daerah (setda) dan beberapa kepala Unit Layanan Umum Kabupaten adalah perempuan. Anggaran lokal selalu dialokasikan untuk mendukung tiga kegiatan PUG: pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan “(Asisten 3/SetDa).</p> <p>Unit Pelayanan Pendidikan diselenggarakan untuk melayani pendidikan yang lebih baik di setiap tingkat dan jenis sekolah, dan dibenarkan oleh Peraturan Gubernur dan Bupati, ditambah lagi bahwa guru laki-laki dan perempuan dibutuhkan seperti yang dipersyaratkan dalam data SPM/MSS, dan pembelajaran ditingkatkan oleh guru, untuk peserta didik, dengan ketersediaan sarana dan prasarana “(Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan mantan Kepala Kantor Dinas Pendidikan Nasional Gorontalo).</p> <p>Dua set sistem manajemen data diselenggarakan yaitu “Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk pendidikan meliputi kualifikasi guru, distribusi, dan standar kompetensi sebagai indikator pertama untuk mencapai pendidikan untuk semua. Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah bagian dari pemetaan mutu sekolah untuk memahami kondisi riil pendidikan di daerah baik pedesaan dan perkotaan “(Kepala bagian Perencanaan- Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo).</p> <p>“APK untuk SMP mencapai 68% tahun ini dan SMA kurang dari ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo harus menilai mengapa APK rendah. Saya yakin, usia sekolah penduduk laki-laki dan perempuan di daerah terpencil tertinggal dibandingkan dengan mereka yang tinggal di kota. Beamurid merupakan strategi kunci untuk meningkatkan APK “(Dewan Pendidikan).</p>

Kode*	Pertanyaan	Komentar
		<p>"Murid di SMU dan MA sama-sama diberikan perhatian dan layanan yang sama untuk bersekolah/ke madrasah oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo. Ketika GIS MIS dikembangkan, Kemenag juga terlibat dan berpartisipasi dalam survey sekolah "(Kemenag).</p> <p>Anggota Komisi Pendidikan di DPRD mengatakan bahwa "kepemimpinan perempuan merupakan bagian dari sejarah Gorontalo termasuk Quin dari Mbui Bungale."</p> <p>"Alokasi meningkat dari 23% tujuh tahun yang lalu dan hari ini 36%. Kita harus memastikan bahwa pembelajaran yang responsif gender di sekolah dilakukan oleh guru laki-laki dan perempuan. PUG dan SPM di sekolah harus dikaitkan dengan cara yang lebih mudah bagi semua pemangku kepentingan sekolah "(Divisi Perencanaan).</p> <p>BAPPEDA menegaskan bahwa "Data terpilah gender akan dipertimbangkan untuk rencana jangka menengah dan tahunan melalui proses perencanaan selangkah demi selangkah dari unit terendah pelayanan publik yang disebut 'Kelurahan' untuk Kecamatan dan untuk Kabupaten."</p> <p>Pemimpin perempuan lebih peduli kepada masyarakat daripada laki-laki, maka, saat ini lebih banyak perempuan menjadi kepala Administrasi desa bernama Lurah/Kepala Desa. Banyak perempuan yang akan ditampung dalam pemerintahan lokal dan administrasi "(Dewan Pembangunan dan Kesejahteraan).</p>
2a 2b	Siapa yang bertanggung jawab & sumber daya apa yang ada di tempat untuk melembagakan PUG dikabupaten, kecamatan & sekolah (misalnya Pokja gender/ <i>gender focal point</i>) Kemenag & Kemendikbud	<p>PUG adalah isu lintas sektoral yang memberikan dampak kepada unit lokal yang bertanggung jawab untuk PUG. Pokja gender di Dinas Pendidikan Provinsi adalah resmi bertanggung jawab untuk PUG dalam Pendidikan didukung oleh Biro dari beberapa Kabupaten melalui 'perencanaan dan penganggaran, dan diberdayakan oleh anggota Pokja Kabupaten di setiap unit pelayanan publik, termasuk badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Lembaga Pendidikan, LPMP, PSW, dan lembaga pelatihan lainnya "(Sub Bagian KepalaPNFI – Dinas PPOR Provinsi).</p> <p>Dinas Pendidikan Nasioanl Kabupaten Gorontalo tidak hanya mengintegrasikan basis data gender yang meliputi sekolah dan madrasah, tetapi juga telah mengorganisir pertemuan bulanan rutin untuk mengidentifikasi masalah yang muncul dan menawarkan solusi untuk perbaikan mutu pendidikan "(Dinas Pendidikan Nasioanl Kabupaten Gorontalo).</p>
2a	4. Apakah PUG diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan daerah. Apa aktivitas & anggaran termasuk dalam rencana dan apa yang menjadi prioritas?	<p>"PUG terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dari 2006-2008, Namun tahun lalu PUG tidak termasuk sebagai 5 prioritas pertama dalam program pembangunan daerah "(Pokja gender - Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga).</p> <p>"Atau tahun anggaran 2011, hanya dua kabupaten Pohuwato dan Gorontalo Utara yang didukung untuk memperkuat kapasitas kelembagaan untuk GM." (Kepala Sub Bagian PNFI – Dinas PPOR Provinsi).</p>
2a	5. Berapa banyak staf terlatih yang bertanggung jawab atas penganggaran yang responsif gender?	<p>"Ada 50 peserta termasuk guru pendidikan dasar bagi masyarakat untuk bidang civic, ilmu sosial, dan Bahasa Indonesia. Pengawas sekolah dan staf kabupaten dari 6 kabupaten bergabung ke lokakarya untuk mengembangkan bahan pembelajaran berbasis gender pada tahun 2011 "(Kepala Sub Bagian PNFI- Dinas PPOR Provinsi).</p>
	6. Berapa banyak yang telah dialokasikan dari APBD untuk anggaran responsif gender dan untuk kegiatan apa ?	

Kode*	Pertanyaan	Komentar
Komponen 3.1 Kesetaraan Akses		
3.1c	7 a. Apakah anggaran responsif gender diimplementasikan? Kapan?	<p>"Dari 2009-2010 anggaran pembangunan daerah (APBD) untuk PUG meningkat dari Rp 30 juta menjadi Rp 50 juta." (Anggota Pokja Gender Provinsi).</p> <p>Sebagian besar alokasi anggaran lokal digunakan untuk memperkuat kapasitas melalui sosialisasi, pelatihan seminar, dan dan lokakarya. Kecuali BSM, tidak ada anggaran belum dialokasikan langsung untuk menguntungkan murid miskin "(Kepala Sub Bagian PNFI).</p>
	7 b. Apakah anggaran responsif gender didasarkan untuk mengurangi kesenjangan gender dalam data kinerja kabupaten dari sekolah? Berikan contoh	
3.1c	8. Apa tantangan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat terpilah menurut jenis kelamin dari semua sekolah?	<p>"Baik manual atau instrumen tertentu untuk pengumpulan data sekolah yang tersedia untuk membantu sekolah-sekolah dalam penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin." (Pengawas dan Kepala Sekolah).</p>
	9. Apakah data menurut jenis kelamin tersedia di tingkat kabupaten untuk semua sekolah di 2010?	<p>Sejak tahun 2006, Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo menyediakan dan secara teratur memperbarui data mentah melalui GIS-MIS. Menggunakan MSS dan NSE sebagai kerangka kerja, data mentah GIS MIS menyediakan data dasar untuk pengolahan data dan analisa lebih lanjut oleh semua pemangku kepentingan yang memiliki komitmen dan kapasitas untuk menkampanyekan gender ke sekolah-sekolah/madrasah.</p> <p>Sekolah/madrasah tidak memiliki data terpilah menurut jenis kelamin, tetapi mereka tidak menyadari bahwa hal tersebut memiliki arti bagi pembangunan sekolah yang responsif gender untuk mencapai keadilan gender. Kepala sekolah kebanyakan tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana menggunakan dan melihat manfaat gender pada sekolah untuk mencapai peningkatan kualitas yang lebih baik berdasarkan hubungan antara perspektif gender dan pendidikan berkualitas bagi semua murid, baik laki-laki dan perempuan "(Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas) . .</p>
2a 3.1c	10. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menganalisis data kinerja dari sekolah? Apakah mereka dilatih untuk menganalisis data dari perspektif gender?	<p>"Pelajaran yang baik disediakan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo di mana Biro perencanaan mengelola GIS MIS pada data pendidikan. Satu set lengkap data mentah untuk setiap sekolah, dari PAUD sampai SMA, yang tersedia, secara teratur diperbarui, dan dapat diakses untuk semua satuan pendidikan termasuk SATKERS lain di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan "(Dinas Pendidikan Nasional Kab.Gorontalo).</p> <p>"Staf pendidikan di kabupaten terlatih untuk pengumpulan data dan manajemen. Tapi mereka tidak memiliki kapasitas yang cukup pada bagaimana menerjemahkan data dasar ke dalam data yang responsif gender untuk pengembangan program pengembangan pendidikan lokal "(Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo).</p> <p>"Tim Pengembangan Sekolah termasuk pengawas, kepala sekolah, guru, dan anggota komite sekolah membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan data untuk pembentukan sistem pendidikan yang responsif jender "(Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo).</p>

Kode*	Pertanyaan	Komentar
3.1c	11. Apa perbedaan utama dalam data kinerja antara anak laki-laki & perempuan? Apa yang bisa dilakukan atau sedang dilakukan untuk mengatasi kesenjangan?	<p>Dengan menggunakan data dari dua sekolah, terdapat lebih banyak murid perempuan daripada murid laki-laki dan guru. Pada tahun 2012 SMAN 1 Limboto memiliki 63% (37) guru perempuan dan 79% dari total murid juga perempuan "(Profil Sekolah).</p> <p>"Lalu, perempuan cenderung memiliki skor yang lebih tinggi daripada laki-laki dalam Sejarah dan Matematika." (Guru).</p> <p>"Baik murid dan murid di SMAN 1 diwawancarai selama kunjungan sekolah memiliki preferensi untuk melanjutkan studi dalam ilmu sains di universitas-universitas luar Gorontalo (Murid).</p> <p>"Para guru kebanyakan kurang pengetahuan tentang PUG. Metode sederhana dan analisis teknis tentang data murid dan guru terpilah gender dibutuhkan untuk memperkuat bagaimana menggunakan data untuk RKS/RKAS "(Guru dan Kepala Sekolah).</p> <p>Data dari SDN 1 Luwoo Kecamatan Talaga Jaya menunjukkan ketertarikan dan prestasi akademik yang berbeda. Seorang mahasiswa lebih suka matematika sementara tiga murid lebih memilih bahasa Indonesia. Hal ini ditemukan bahwa seorang murid perempuan di sekolah ini mengungguli para murid laki-laki. Proses belajar yang responsif gender dan model pembelajaran menyenangkan yang diterapkan di semua sembilan kelas untuk semua mata pelajaran didukung oleh dinding penuh warna, LCD dan televisi. "(Observasi Kelas)</p>
3.1a 3.1c	12. Apakah isu-isu gender dan kemiskinan untuk anak laki-laki dan perempuan menjadi penghalang bagi mereka mengakses dan menyelesaikan 9 tahun penuh + pendidikan berkualitas? Bagaimana masalah ini ditangani melalui program?	<p>Beberapa murid yang tinggal di daerah perkotaan dari keluarga miskin tidak melanjutkan sekolah ke SMP atau SMA terutama karena mereka menjadi pekerja yang dibayar di bawah umur dan rendah di pasar tradisional. Dan, banyak murid yang tinggal di desa-daerah terpencil dari keluarga petani miskin tidak melanjutkan sekolah ke SMP atau SMU karena mereka menjadi pekerja yang dibayar di bawah umur dan rendah terutama selama sesi panen di sawah "(Kepala Sekolah).</p> <p>Untuk menanggapi masalah ini, Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo menawarkan "sekolah sore atau malam ditambah dengan kunjungan guru untuk mencegah diskontinuitas sekolah untuk murid miskin."</p> <p>Orang tua miskin Banyak yang percaya bahwa "anak-anak mereka adalah tenaga kerja maka mereka lebih memilih untuk meminta anak-anak mereka untuk menghasilkan uang daripada untuk melanjutkan SMP atau bahkan SMA." (Bimbingan dan Konseling Guru).</p> <p>"Sekolah bahkan pada pendidikan dasar tidak dirasakan oleh banyak orangtua di daerah pedesaan dan terpencil sebagai hal yang berharga bagi keluarga dalam waktu singkat. Mengubah pola pikir untuk orang tua diperlukan. Hari ini, Program Pendidikan Keluarga yang disebut Bina Lingkungan Keluarga dipromosikan pada tahun 2012 untuk mensosialisasikan nilai-nilai jangka panjang pendidikan kepada orang tua miskin. Bekerja sama dengan sektor lain, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga berencana akan memperkenalkan program baru di program pembangunan industri rumahan menargetkan orang tua miskin sebagai satu paket dengan beasiswa bagi para murid untuk mencegah murid menghentikan sekolah ke jenjang SMP dan SMA "(Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana).</p>
3.1	Apakah pedoman pemerintah dan pelatihan memadai untuk memungkinkan pengarusutamaan gender dalam pendidikan?	<p>"Penyediaan panduan PUG terbatas. Para peserta pelatihan gender yang ada belum difasilitasi untuk menghasilkan pedoman yang lebih sederhana kemudian secara optimal digunakan untuk menyebarluaskan PUG di setiap sekolah tempat guru bekerja, dan juga mereka tidak dikerahkan untuk melakukan kampanye PUG ke sekolah-sekolah lainnya yang terdekat." (Guru dan alumni dari program pelatihan PUG).</p>

Kode*	Pertanyaan	Komentar
3.2d	12. Apakah ada kebijakan dan praktik di lembaga Anda untuk memastikan kesetaraan dalam posisi kepemimpinan antara laki-laki dan perempuan di tingkat kabupaten dan sekolah?	Selalu ada ketidakpastian bagi perempuan dan laki-laki yang memegang posisi hari ini di era pemerintah daerah otonom. Dalam kebanyakan kasus, perubahan pemimpin politik akan merubah posisi kepemimpinan di kabupaten dan sekolah (Kepala Sekolah).
Komponen 3: Penyampaian Kebijakan dan Program		
3.2	13. Apa kebijakan dan strategi kabupaten/ rencana aksi kabupaten untuk pengarusutamaan gender di sekolah?	"Baik Asia Foundation dan LSM lokal telah bersama-sama bekerja dengan Biro Perencanaan Pendidikan di Kabupaten Gorontalo untuk memfasilitasi pertemuan bulanan rutin untuk koordinator MKKS, MGMP, dan KKG untuk mengatasi pengajaran dan pembelajaran dan perbaikan mekanisme. Hal ini akan menjadi salah satu strategi untuk mengatasi ketimpangan gender dan mencapai banyak sekolah untuk menjamin akses dan kualitas yang sama terhadap prestasi belajar murid yang lebih tinggi terlepas dari jenis kelamin mereka "(Biro Perencanaan Pendidikan – Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo).
3.2	14. Program dukungan apa dari pemerintah dan donor dalam PUG dalam pendidikan yang telah dilaksanakan dalam 10 tahun terakhir? Apa dampak yang mereka miliki?	<p>"Promosi PUG oleh Pokja gender provinsi lambat. Selama dua tahun PUG tidak didukung oleh APBD karena PUG tidak dianggap prioritas pertama dari 5 prioritas. Bahkan saat ini, hanya dua kabupaten yang didukung untuk melaksanakan PUG dalam pendidikan sebagai program percontohan. Program PUG tampaknya sebagian besar tergantung pada dukungan keuangan nasional "(Kepala Sub Bagian PNFI –Dinas PPO Provinsi).</p> <p>"Sangat menarik bahwa mantan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo mengatakan bahwa "kita telah melakukan banyak program dan mengalokasikan dana untuk meningkatkan manajemen sekolah dasar yang relevan dengan apa disebut dalam PUG. Contoh, penerapan Sistem Informasi Geografi dan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan meliputi pengembangan data jenis kelamin terpisah, data dasar untuk mengembangkan perencanaan strategis dan tahunan, Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, dan bahkan titik mulai untuk pengembangan lebih lanjut dari sekolah yang responsif gender . "</p> <p>"Pada 2011, ada ahli gender kurang dari 5 dari PSW di Universitas Negeri Gorontalo bergabung dengan pelaksanaan PUG di Provinsi Gorontalo." (Pokja gender Provinsi Gorontalo).</p>
3.2d	15. Apakah sekolah memiliki kebijakan kesetaraan gender?	Kode etik tersedia untuk murid di hampir setiap sekolah, termasuk SDN 1 Luwoo - Telaga Jaya dan SMAN 1 Limboto dikunjungi oleh tim review. (Dokumen School)
3.2b 3.2c	16. Apakah ada pelatihan guru atau kegiatan lain pada penerapan pengajaran dan proses belajar dan bahan ajar yang responsif gender di sekolah atau universitas?	"Pelatihan ini dilakukan oleh provinsi dan mencapai tidak lebih dari 50 peserta per tahun. Hanya satu guru di SDN 1 Luwoo mendapat pelatihan PUG di Bogor pada tahun 2003. Dia telah melakukan pekerjaan yang baik untuk penyebaran PUG di sekolah sendiri dan memfasilitasi guru sekolah lain melalui KKG. Dia berharap untuk mendapatkan dukungan reguler untuk memfasilitasi guru lain di sekolah tetangga dekat sekolah untuk mengatur manajemen kelas responsif gender untuk memastikan bahwa baik anak laki-laki dan perempuan mendapatkan akses belajar dan kualitas yang sama untuk pembelajaran yang menyenangkan yang memimpin prestasi akademik yang lebih baik dan membangun karakter "(KKG koordinator. dan Guru).
3.1c 3.2	17. Apakah yang perlu pemerintah pusat dan provinsi lakukan untuk mempercepat pengarusutamaan gender dalam pendidikan di tingkat kabupaten?	"Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo mengundang Pokja gender nasional untuk menyaksikan PUG di Kabupaten Gorontalo untuk "menggunakan dan menganalisis data yang terpilah gender yang tersedia di GIS/ SIM dan memaksimalkan pertemuan forum guru reguler sebagai kendaraan untuk percepatan PUG di sekolah".

Kode*	Pertanyaan	Komentar
3.1c 3.2	18. Bagaimana pengaruh- utama gender dalam program pendidikan dimonitor & dievaluasi di tingkat kabupaten?	"Pokja gender Provinsi memantau kegiatan PUG pada 2011, tetapi tidak merekomendasikan tindak lanjut yang serius oleh pemerintah baru." (Kepala Bagian PNFI). "PSW harus mengambil inisiatif untuk membantu Pokja gender di provinsi dan kabupaten dan memobilisasi alumni mantan peserta pelatihan PUG untuk mempersiapkan dan melakukan monitoring dan fasilitasi terhadap kegiatan PUG di masa depan di Gorontalo" (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi dan BAPPEDA).

* Kode mengacu pada komponen tertentu dari kerangka Pengkajian. Silakan lihat kerangka

Lampiran 2 - FGD Dengan Personil Sekolah

Kode*	Pertanyaan	Komentar
Komponen 3.1 Kesetaraan Akses		
3.1c	Apa perbedaan utama dalam data kinerja antara anak laki-laki & perempuan?	"Lebih banyak murid perempuan daripada laki-laki di SMP 2 Limboto, tetapi proses belajar sama-sama diberikan tanpa memandang gender mereka." (Kepala sekolah) Pengawas menjelaskan bahwa "di banyak sekolah murid laki-laki duduk terpisah dari perempuan dalam satu kelas. Tapi mereka tidak tahu apa artinya. Mereka tidak tahu apa implikasi belajar untuk kedua anak laki-laki dan perempuan, termasuk apa yang terbaik bagi pengelolaan kelas" (pengawas SD).
	Apa yang bisa dilakukan atau sedang dilakukan untuk mengatasi kesenjangan?	"Di SDN Negeri 2 Bulila pemimpin pertemuan tiap hari Senin adalah selalu laki-laki. Saat membersihkan kelas, menyapu lantai adalah perempuan, laki-laki menempatkan kursi di atas meja. Banyak guru dan murid percaya bahwa anak laki-laki dianggap lebih kuat dibandingkan anak perempuan" (Guru). "Di SMAN 1 Limboto, populasi murid perempuan adalah dua kali lebih banyak dibanding pria. Para guru perempuan adalah 75% dari guru total" (Profil Sekolah). Kepala SMP Widiyakrama menunjukkan bahwa "perempuan dibandingkan laki-laki mengungguli di hampir semua mata pelajaran sekolah mereka belajar karena perempuan cenderung lebih tepat waktu dalam menyampaikan tugas mereka. Saat ini, ada satu laki-laki untuk setiap dua murid perempuan." Di SDN 1 Luwoo jumlah murid laki-laki dan perempuan hampir sama dalam jumlah untuk setiap kelas. Secara umum, menurut 4 murid diwawancarai selama kunjungan lapangan, mereka mengatakan bahwa perempuan lebih memiliki prestasi akademik dan non akademik yang lebih tinggi" (Kepala sekolah SD). "Sebagai sekolah yang paling favorit, beberapa murid juga membuat kelompok berdasarkan status sosial ekonomi untuk bermain game saat waktu istirahat." (Guru).
3.1c	Apa tantangan pengumpulan data kinerja dipisahkan menurut jenis kelamin untuk dikirimkan ke kecamatan?	"Kita tidak tahu bagaimana menganalisis dan menggunakan data sekolah untuk mengukur kinerja sekolah/madrasah" (SDN 1 Luwoo). "Kita tahu bahwa bidang akademis perempuan melebihi bila dibandingkan dengan laki-laki dalam Bahasa Indonesia, Matematika, dan Kewarganegaraan, kita semua guru dan kepala sekolah tidak tahu bagaimana untuk mengevaluasi data responsif gender di SMPN 1 Limboto." (4 guru dan kepala sekolah). "Kebanyakan guru kelas di SDN Negeri 2 Bulila dan SMAN 1 Limboto tidak menyadari pentingnya data terpilah menurut jenis kelamin sebagai sarana untuk menyediakn model mengajar dan belajar." (Guru).

Kode*	Pertanyaan	Komentar
3.1c	Apakah ada perbedaan dalam kehadiran di sekolah antara anak laki-laki dan perempuan? Apa alasan? Apakah ada waktu-waktu tertentu bahwa kehadiran menurun untuk anak laki-laki/perempuan?	<p>“Lebih banyak murid laki-laki daripada perempuan tidak bergabung dengan kelas belajar Matematika di SMP 1 Limboto karena mereka tidak menyukainya.” (Guru Matematika).</p> <p>“pengawas PAUD mengatakan bahwa “murid laki-laki lebih menyukai permainan di luar kelas daripada yang di dalam. Sebaliknya, perempuan yang lebih memilih untuk tinggal di dalam kelas daripada bermain di luar.”</p> <p>“Hanya satu guru laki-laki untuk PAUD di Gorontalo Kabupaten.” (Pengawas, Guru, dan Kepala Divisi Perencanaan).</p> <p>Dalam banyak kasus, “. lebih banyak murid laki-laki dari perempuan yang berasal dari keluarga miskin harus bekerja dan meninggalkan sekolah di SMP 2 Limboto.” (Guru dan Kepala Sekolah).</p> <p>“Karena lebih banyak guru laki-laki daripada perempuan, sebagian besar guru khawatir akan kehilangan panutan bagi anak laki-laki dibandingkan anak perempuan di PAUD.” (Guru).</p>
3.1c 3.2c 3.2d	Apakah anak laki-laki mengungguli perempuan dalam ujian mata pelajaran tertentu dan sebaliknya? Apa nama mata pelajaran dan alasan?	<p>Guru di SDN 1 Luwoo mengatakan bahwa “lebih banyak murid perempuan daripada murid laki-laki yang memenangkan kompetisi olah raga.” (Kepala Sekolah).</p> <p>Sebagai sekolah yang baik SMAN 1 Limboto menunjukkan bahwa “nilai tertinggi untuk ujian nasional adalah memungkinkan untuk baik laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2010, nilai tertinggi milik laki-laki. Tapi, pada 2011, perempuan adalah pencetak gol terbaik untuk Ujian Nasional. Matematika olimpiade milik laki-laki. Dan, Ilmu sains olimpiade milik perempuan” (Kepala Sekolah).</p>
3.1a 3.1c	Sekolah dasar: Berapa banyak tahun lalu anak perempuan dan laki-laki dari klas 6 tidak melanjutkan ke sekolah menengah pertama? Sekolah menengah pertama: Berapa banyak anak perempuan dan anak laki-laki tahun lalu dari klas 9 tidak melanjutkan ke sekolah menengah atas? Apa alasan?	<p>“Menurut guru dan kepala sekolah, “hanya ada satu anak di SDN 2 Bulila tidak melanjutkan ke SMP karena kemiskinan. Orang tuanya tidak membolehkan dia melanjutkan sekolah karena dia adalah anak laki-laki ‘baik’, ia sudah dapat mengarahkan ‘Bentor’, ia menjual sayuran di pasar tradisional setiap hari, dan tentu saja ia menghasilkan uang untuk keluarga “.</p> <p>“Selain pemberian beasiswa kepada anak-anak, mendukung dana untuk orang tua juga penting sebagai paket terpadu untuk mencegah drop out (pengawas sekolah dan kepala sekolah).</p> <p>“Kepala Sekolah harus mengkampanyekan kepada orang tua tentang pendidikan dasar 9-tahun selama pendaftaran dan setiap orang tua diminta untuk menandatangani surat perjanjian untuk memastikan bahwa anak perempuan dan anak laki-laki akan terus untuk menyelesaikan SMP” (Kepala Sekolah).</p> <p>“Last year, we have 10 DO students in SMPN 2 Limboto, both 6 males and 2 females. SMPN 2 is running two types of SMP, regular and open SMP. In fact, Open SMP offers a 4-day classroom meeting with tutors and two day self learning at home. Students in open SMP have currently had a higher risk to DO. They do not only need BOS, but also intensive learning facilitation by visiting tutors with flexible times for learning.” (School Profile).</p> <p>“Tahun lalu, kita memiliki 10 murid DO putus sekolah di SMPN 2 Limboto, mereka 6 laki-laki dan 2 perempuan. SMPN 2 menjalankan dua jenis SMP, yaitu SMP reguler dan terbuka. Bahkan, SMP Terbuka menawarkan 4-hari pertemuan kelas dengan tutor dan dua hari belajar mandiri di rumah. Murid di SMP terbuka saat ini memiliki risiko lebih tinggi untuk putus sekolah. Mereka tidak hanya perlu BOS, tetapi juga perlu fasilitasi belajar intensif dengan mengunjungi tutor dengan waktu fleksibel untuk belajar” (Profil Sekolah).</p> <p>“Penelusuran Studi untuk alumni SMP/SMA membutuhkan perhatian lebih setiap sekolah untuk memastikan bahwa ada keterkaitan dengan pendidikan berikutnya dan karir kerja.” (Guru, Kepala Sekolah, dan pengawas).</p>

Kode*	Pertanyaan	Komentar
3.1a 3.1c	12. 12. Apakah isu-isu gender dan kemiskinan untuk anak laki-laki dan perempuan menjadi penghalang bagi mereka mengakses dan menyelesaikan 9 tahun penuh + pendidikan berkualitas? Bagaimana masalah ini ditangani melalui program?	
3.1a	Apakah sekolah memiliki toilet dan air minum terpisah untuk anak perempuan dan anak laki-laki?	"SMAN 1 Limboto memiliki 700 murid dan membutuhkan toilet lebih banyak dan terpisah untuk laki-laki dan perempuan. Banyak murid dan beberapa guru tidak menyadari fungsi toilet yang dipisahkan di sekolah-sekolah"(Guru).
Komponen 3: Pelaksanaan Program PUG di sekolah/madrasah		
3.2	Apa kebijakan dan strategi kabupaten/rencana aksi kabupaten untuk pengarusutamaan gender di sekolah?	"Pada tahun 2009, PSW diminta untuk menjadi penasihat untuk membantu Pokja gender Provinsi untuk menjalankan sosialisasi PUG untuk sekolah percontohan di kabupaten. Selain itu, anggota lainnya juga membantu penelitian kebijakan dan mempromosikan pengembangan keterampilan bisnis rumah."(anggota PSW).
3.2	14. Program dukungan apa dari pemerintah dan donor dalam kesetaraan gender dalam pendidikan yang telah dilaksanakan dalam 10 tahun terakhir? Apa dampak yang mereka miliki?	"UNICEF memperkenalkan proses belajar yang menyenangkan untuk memastikan kualitas pembelajaran, proses, dan output yang sama baik untuk laki-laki dan perempuan." (Guru SDN 1 Wuloo).
3d	15. Apakah sekolah memiliki kebijakan kesetaraan gender?	Na
3.2b 3.2c	16. Apakah ada pelatihan guru atau kegiatan lain pada penerapan pengajaran dan proses belajar dan bahan ajar yang responsif gender di sekolah Anda??	Na. "Ada 6 peserta dari 18 jumlah peserta FGD yang terlibat dalam sosialisasi PUG, lokakarya, atau diskusi." (Guru).
3.2d	Kegiatan ekstra kurikuler apa yang ditawarkan oleh sekolah kepada anak laki-laki dan anak perempuan? Kegiatan mana yang lebih populer bagi anak perempuan atau anak laki-laki? Bagaimana anak laki-laki/perempuan didorong untuk mencoba semua kegiatan?	"Beberapa kegiatan ekstrakurikuler ditawarkan kepada murid perempuan dan laki-laki di SDN 1 Luwoo termasuk Karate, marching band, Pramuka Anak Perempuan/anak laki-laki, bulu tangkis, bola voli, dan tari tradisional. Tahun lalu Moh Iqbal kelas 5 memenangkan persandingan Dудukeke tingkat provinsi"(Murid).
3.2b	Berapa banyak guru di sekolah telah menerima pelatihan kesadaran gender melalui pelatihan guru <i>in-service</i> ? Apakah Kepala Sekolah & pengawas sekolah juga?	Na. "Ada 7 dari 18 total peserta FGD telah bergabung sosialisasi gender. Semua kepala sekolah dan kepala sekolah yang belum terlatih PUG"(Kepala Sekolah).
3.2d	Isu gender apa di sekolah yang merupakan prioritas untuk diatasi?	Kurang pengetahuan antara guru tentang PUG di sekolah.

*Kode mengacu pada komponen tertentu dari kerangka Pengkajian. Silakan lihat kerangka

Lampiran 3 - FGD dengan Lembaga Pendidikan, UNG dan LPMP.

Kode*	Pertanyaan	Komentar
Komponen 2: Melembagakan Pengarusutamaan Gender		
2.1a	Apakah ada dukungan kepemimpinan untuk PUG? Apakah ada kebijakan PUG di lembaga-lembaga pelatihan guru/tenaga pengajar?	<p>"Rektor dan Dekan banyak di berbagai perguruan tinggi/fakultas telah memberikan izin formal untuk dosen individu untuk menugaskan tugas-tugas rutin mereka dalam mengajar untuk mengikuti sosialisasi, pelatihan, seminar, atau lokakarya PUG di luar universitas "(Semua anggota PSW dan Mantan Kepala PSW -UNG.).</p> <p>"Kami widyaiswara di LPMP. Kami tidak tahu apa tentang PUG. Direktur saya adalah perempuan. Tapi, kami tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan pelatihan PUG "(Widyaiswara LPMP).</p> <p>"Setiap kegiatan yang berkaitan dengan PUG di provinsi dan kabupaten merupakan bagian dari komitmen individu, tidak selalu kerjasama kelembagaan." (Tim PSW).</p> <p>"Dari 2009 hingga 2011, beberapa pelatih/penasehat PUG telah terlibat dalam beberapa kegiatan PUG kabupaten, provinsi, dan peristiwa nasional." (anggota PSW).</p> <p>Tidak ada rencana sistematis terkait tindakan yang dikembangkan untuk mensosialisasikan PUG secara internal di UNG. Personil baru untuk menjalankan PSWC-UNG yang didirikan pada Februari 2012 (Kepala PSW).</p>
2.1	Sumber daya apa yang tersedia di tempat untuk PUG lembaga?	<p>"Kami memiliki 9 widyaiswara dan siap untuk mengikuti pelatihan PUG untuk pelatih untuk menjalankan kegiatan PUG masa depan, termasuk lokakarya lokal, program pelatihan, seminar, dan Tinjauan kegiatan PUG dalam pengelolaan sekolah." (Dosen di UNG dan Matematika Widyaiswara di LPMP).</p> <p>" sarana dan prasarana Pelatihan tersedia untuk mendukung program pelatihan PUG. Tidak tersedia dana untuk integrasi gender pada program pelatihan di LPMP "(LPMP).</p> <p>"Hanya sedikit berpengalaman pelatih dan peneliti PUG yang telah pernah bekerja dengan Pokja gender provinsi untuk mensosialisasikan PUG, untuk membangun kapasitas PUG, mengelola materi pembelajaran responsif gender di kewarganegaraan, Ilmu Sosial, dan Bahasa Indonesia." (Tim PSW dari Lembaga Pendidikan).</p>
3.2a	Apakah dosen dilatih kesadaran gender	Na
3.2a	Sampai sejauh mana kurikulum pelatihan guru responsif gender? Apakah kurikulum sudah ditinjau dari perspektif gender	"Semua program pelatihan di LPMP tidak menggunakan perspektif PUG. Namun, beberapa topik dalam program pelatihan tertentu mungkin memiliki konten yang spesifik yang secara tidak langsung terkait dengan isu Gender "(Widyaiswara Fisika, LPMP).
3.2a	Apakah ada komponen kesadaran gender dalam kurikulum pelatihan guru?	Baik Sekolah Tinggi Pendidikan dan LPMP belum pernah mengkaji kurikulum pelatihan guru menggunakan perspektif gender di pra dan pada program pelatihan guru "(LPMP). "Ada satu program studi menguraikan kesehatan, reproduksi wanita, dan keluarga berencana." (Pendidikan Lingkungan)
3.2a	Apakah guru dilatih untuk mengidentifikasi dan mengkaji teks, tes, penilaian dan bahan untuk menentukan apakah contoh dan bahasa yang digunakan bebas dari bias gender dan stereotip dan memastikan bahwa contoh mencerminkan keseimbangan pengalaman anak perempuan dan laki-laki.	"Metode dan analisis sederhana dimasukkan ke dalam pelatihan guru PAUD. Tapi tidak ada pelatihan tentang konten untuk melakukan analisis dampak gender "(Dosen Pendidikan Ekonomi).
3.2a	Apakah guru dilatih tentang pendekatan untuk mengatasi gaya belajar yang berbeda/kebutuhan anak laki-laki dan perempuan?	"Guru PAUD memiliki pengetahuan tentang hal ini dari media massa dan berita, tetapi mereka tidak mendapatkannya dari program pelatihan PUG." (PAUD).

Kode*	Pertanyaan	Komentar
3.2a 3.2d	Apakah murid diajarkan manajemen berbasis kelas yang responsif gender dan pentingnya akses yang sama dalam semua kegiatan ekstra kurikuler.	"Pembelajaran yang menyenangkan penuh dengan praktik pembelajaran yang responsif gender dan perlakuan pengajaran remedial "(dosen PAUD).
3.2	Tampilkan salinan peserta FGD tentang panduan 'Berwawasan gender' untuk sekolah dasar, menengah pertama dan menengah atas dan tanyakan berapa banyak peserta telah melihat salinan pedoman tersebut digunakan sebagai alat referensi dalam kurikulum pelatihan guru - catat respon peserta dari masing-masing institusi	"Widyaiswara belum tahu buku-buku ini. Kecuali 6 peserta yang telah dilatih PUG, sebagian besar peserta FGD belum pernah melihat buku manual "(peserta FGD).
3.2a	Apakah guru dilatih untuk memahami bagaimana persepsi atau harapan murid mereka laki-laki dan perempuan dapat mempengaruhi bagaimana mereka menilai kemajuan murid, menandai ujian, dan memberikan umpan balik.	Tidak ada pengetahuan, tidak ada praktek.

* Kode mengacu pada komponen tertentu dari kerangka Pengkajian. Silakan lihat kerangka.

Lampiran 4 – Lembar Data untuk dilengkapi untuk Pusat Studi Wanita UNG.

Kode*	Kode*	Kode*
Komponen 2: Melembagakan Pengarusutamaan Gender		
2.1a	Apakah ada dukungan kepemimpinan untuk PUG? Apakah ada kebijakan PUG di institusi tersebut?	Rektor UNG menandatangani Surat Keputusan tentang PSW -UNG tanggal 17 Januari 2012 dan memberikan tugas-tugas wajib untuk tim PSW untuk (1) pelaksanaan koordinasi, memantau, dan mengevaluasi penelitian dan penelaahan terhadap pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat sosial, budaya dan Pariwisata, advokasi dan hak asasi manusia dan (2) memberikan laporan kepada Rektor melalui kepala penelitian Pusat UNG (Surat Keputusan 179/UN47.A2/KP/2012). Di bawah kepemimpinan Tineke Wolok, PSW didukung oleh empat kelompok penelitian dan 19 anggota. Pusat Studi Wanita (PSW) adalah bagian dari Pusat Penelitian di UNG. Secara kelembagaan, PSW pasif selama tiga tahun terakhir. Anggota PSW Banyak yang masih belajar untuk program pascasarjana (bahkan beberapa sudah kembali ke UNG) untuk menyelesaikan program master/doctoral mereka. Struktur dan tim WSC baru sedang dalam proses untuk menggantikan tim PSW lama. (Kepala Pusat Penelitian).
3.2a	Apakah dosen dilatih kesadaran gender	"Banyak dosen bergabung dengan tim PSW sebagian besar telah terlibat dalam kegiatan PUG yang berbeda, termasuk seminar, sosialisasi, diskusi pelatihan. Tapi, anggota yang baru dibentuk tim PSW belum dilatih PUG. FGD ini baik untuk membantu tim PSW saat ini untuk berbagi tentang apa PUG. (FGD – temuan fakta)
3.2a 3.2c	Apakah dosen dilatih untuk mengidentifikasi dan mengkaji teks, tes, penilaian dan bahan ajar untuk menentukan apakah contoh dan bahasa yang digunakan bebas dari bias gender dan stereotip dan memastikan bahwa contoh mencerminkan keseimbangan pengalaman pada perempuan dan laki-laki'.	"Dua dosen dilatih tentang topik terkait. Dosen lainnya belum "(Pokja Gender).

Kode*	Kode*	Kode*
Komponen 2: Melembagakan Pengarusutamaan Gender		
3.2a	Apakah dosen dilatih pendekatan	"Hanya beberapa dosen dilatih. Yang lainnya perlu sesi pelatihan khusus untuk memahami dan mengembangkan mode yang berbeda dari pembelajaran praktek untuk memenuhi kebutuhan anak laki-laki dan perempuan "(Supervisor).
3.2c	untuk mengatasi gaya belajar yang berbeda/kebutuhan anak laki-laki dan perempuan	
3.2e	Jelaskan peran Pusat Studi Perempuan dalam penelitian dan pendidikan gender dalam dasawarsa terakhir. Penelitian formal/informal dan peran penasihat Apa yang dimiliki Pusat yang dilakukan untuk pemerintah provinsi dan kabupaten dalam pengarusutamaan gender dalam pendidikan? Berikan contoh.	<p>Pada tahun 2005, PSW telah bergabung di program-program berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi hasil penelitian tentang analisis gender dalam sektor pendidikan yang disponsori oleh Dirjen-PNFI. • Menyiapkan usulan penelitian tentang analisis gender dalam sektor pendidikan di Provinsi Gorontalo disponsori oleh Dirjen-PNFI. • Rapat koordinasi untuk menyelesaikan proposal penelitian yang disponsori oleh Pemerintah Provinsi. • Pertemuan Nasional dengan Pemimpin Opini Wanita disponsori oleh KPP. • Rapat koordinasi dengan Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang disponsori oleh KPP. • Seminar Internasional tentang Pemberdayaan Perempuan dan Tantangan Nasional disponsori oleh KPP. • Lokakarya lainnya yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, kekerasan dalam rumah tangga, keluarga berencana, dll <p>Dari tahun 2005 sampai 2006, dua proyek penelitian telah dilakukan tentang Kebijakan Pendidikan yang Responsif gender di Provinsi Gorontalo, yang disponsori oleh Dirjen-PNFI. "Beberapa ahli PUG dari PSW-UNG telah bekerja sama dengan Pokja gender Provinsi sejak tahun 2006 untuk menjalankan kegiatan PUG yang diselenggarakan oleh Pokja gender GWG di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi. Mantan Tim PSW telah membantu PSW untuk mengelola program uji coba PUG di dua kabupaten: Pohuwato dan Bualemo "(Presentasi Laporan Tahunan oleh Kepala PNFI).</p>
3.2e	Apa hubungan yang ada antara Pusat Studi Wanita dan lembaga pelatihan guru? Apakah PSW telah menyediakan keahlian peningkatan kapasitas dalam pengarusutamaan gender? Jelaskan.	"Tidak ada hubungan kelembagaan formal didirikan antara Fakultas Pendidikan, PSW, dan LPMP "(peserta FGD).
3.2e	Apa kendala utama dalam melakukan penelitian pengarusutamaan gender dalam pendidikan.	<p>"Banyak pemimpin Fakultas dan dosen berpikir bahwa "gender saja bukan merupakan isu strategis bagi para pemimpin politik lokal atau prioritas pertama untuk pembangunan daerah." (Sekolah Tinggi Ilmu Sosial)</p> <p>Yang lain mengatakan bahwa " penelitian terkait gender kurang mendapatkan dukungan keuangan dan dana oleh Pemerintahan Pusat dan Propinsi." (Fakultas Ekonomi).</p> <p>"Tim PSW Baru siap untuk belajar dengan mantan tim PSW untuk memperkuat kapasitas kelembagaan PSW saat ini. Rencana kerja tahunan akan dibahas untuk mempercepat transisi perubahan organisasi "(Tim PSW baru).</p>
3.2d	Perbaikan apa yang telah terjadi dalam pengarusutamaan gender dalam institusi pendidikan tinggi dalam dasawarsa terakhir misalnya kebijakan gender, peningkatan jumlah perempuan dalam posisi kepemimpinan dll	"Pengarusutamaan gender terkadang ada di atas dan ada di bawah, demikian situasi di UNG. Dari 2006 hingga 2007, PSW secara aktif terlibat dalam kampanye PUG menargetkan pada pendidikan, kesehatan, dan sektor pekerjaan. Kebanyakan ahli PUG terus belajar untuk Magister dan Doktor. Pada 2012, PSW baru didirikan dan konsolidasi intensif diperlukan "(Pokja gender).
2.1c	Menyediakan data kecenderungan murid terpilah menurut jenis kelamin menurut mata pelajaran dan hasil ujian dalam 10 tahun terakhir. Perubahan apa yang telah terjadi dan mengapa?	

Kode*	Kode*	Kode*
Komponen 2: Melembagakan Pengarusutamaan Gender		
3.2b	Apakah dosen dilatih untuk memahami bagaimana persepsi atau harapan murid mereka laki-laki dan perempuan dapat mempengaruhi bagaimana mereka menilai kemajuan murid, menandai ujian, dan memberikan umpan balik	

* Kode mengacu pada komponen tertentu dari kerangka Pengkajian. Silakan lihat kerangka.

Lampiran 5 – Data Kinerja Kabupaten

Kode*	Data	Komentar
Lembar Data Terpilah Menurut Jenis Kelamin untuk Data Kinerja Kabupaten 2000-2010		
3.1b	Angka melek huruf menurut rentang usia	Tingkat melek huruf kelompok usia 15-24 telah mencapai 95,55 persen pada 2010, terdiri dari 95,55 persen melek huruf untuk perempuan dan 94,69 persen untuk laki-laki tahun 2010
3.1b	Lama tahun Bersekolah	Rata-rata tahun bersekolah tahun 2009 mencapai 6,95 tahun untuk perempuan dan 6,6 tahun untuk laki-laki, ini berarti bahwa baik perempuan dan laki-laki dapat menyelesaikan sampai sekolah dasar (kelas VI).
3.1b	IPG dari APK/APM	Partisipasi murni SD (tahun 1 sampai 6) APM 101,22% dengan partisipasi yang sama untuk anak perempuan (94,7%) dan anak laki-laki (95,02%). Sementara itu, partisipasi murni sekolah menengah pertama (tahun 7 sampai 9) dan di sekolah menengah atas (tahun 10 sampai 12), pencapaian APM anak perempuan lebih tinggi dari laki-laki.
3.1b	Angka Kehadiran	
3.1b	Angka Mengulang	Pada tahun 2010, untuk semua tingkat pendidikan, angka mengulang perempuan lebih kecil dari laki-laki.
3.1b	Angka Putus Sekolah	Pada tahun 2010, untuk semua tingkat pendidikan, tingkat putus sekolah perempuan lebih kecil dari laki-laki.
3.1b	Angka Melanjutkan dari sekolah menengah pertama ke sekolah menengah atas/kejuruan	Pada tahun 2010, tingkat melanjutkan ke sekolah menengah perempuan lebih tinggi dari laki-laki (dengan IPG adalah 102,80%), tingkat melanjutkan ke tingkat menengah atas perempuan lebih kecil dari laki-laki (dengan IPG adalah 94,34%).
3.1b 3.2d	Partisipasi Murid menurut mata pelajaran/tingkat a) Sekolah menengah atas/kejuruan b) Perguruan Tinggi	
3.1b 3.3a	kinerja Ujian Nasional kelas 6 dan 9 & menurut mata pelajaran	
3.1b 3.3	tenaga kerja guru menurut tingkat sekolah, jenis/kualifikasi/sertifikat	Pada tahun 2010, persentase guru bersertifikat untuk perempuan di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama lebih tinggi daripada laki-laki, dan sebaliknya untuk sekolah menengah atas.
3.1b	Toilet dan air minum terpisah di sekolah	
	Jumlah PAUD & pusat PPAUD swasta (umur 4-6) perkotaan/pedesaan. Apakah layanan PAUD tersedia untuk semua? Apa tantangan? Apakah jumlah anak laki-laki/perempuan hadir seimbang?	
3.1b 3.2d	Rasio laki-laki terhadap perempuan dalam kepemimpinan/posisi manajemen (Eselon IV, III dan II) di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor Kementerian Agama, LPTK, universitas	
3.1b 3.2d	Rasio perempuan terhadap laki-laki kepala sekolah & pengawas sekolah	

Kode*	Data	Komentar
Lembar Data Terpilah Menurut Jenis Kelamin untuk Data Kinerja Kabupaten 2000-2010		
3.1b	Data tentang kejadian pernikahan dini	Tidak ada data yang tersedia. Beberapa kasus kehamilan yang tidak diinginkan ditemukan di sekolah-sekolah yang dikunjungi
	Studi Kesiadaan Kabupaten yang ada hubungannya dengan gender	
3.1c	Mendapatkan pedoman/formulir yang dikeluarkan kecamatan untuk sekolah-sekolah untuk data kinerja setiap tahun (kita perlu tahu data apa yang diminta dari sekolah)	

* Kode mengacu pada komponen tertentu dari kerangka Pengkajian. Silakan lihat kerangka.

Lampiran 6 - Lembar Data Sekolah

Lembar Data Terpilah menurut Jenis Kelamin untuk sekolah yang dikunjungi (Silakan dapatkan data sebelum berkunjung ke sekolah)		
Kode*	Data	Komentar
	Tipe & nama sekolah, kecamatan, kabupaten, provinsi	SDN 1 Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Limboto Kabupaten Gorontalo.
3.2	Jumlah guru dengan kualifikasi di setiap kelas/ jenis kontrak & gaji	Kebanyakan guru telah memenuhi syarat, 10 guru memiliki gelar S1 dan 4 guru memegang D2 dan D3.
3.1c	Apakah sekolah memproduksi semua data kinerja dipisahkan menurut jenis kelamin yang diminta oleh kecamatan pada tahun 2010?	Pada tahun 2012 data terpilah menurut jenis kelamin hanya tersedia untuk jumlah murid dan guru misalnya 9 guru perempuan. Dari 2008 sampai 2012, jumlah murid meningkat sedikit dari 302 menjadi 337 murid dan proporsi laki-laki menurun dari 57,6% menjadi 50,7%.
3.1c	Dapatkan daftar data terpilah menurut jenis kelamin yang dihasilkan oleh sekolah & diserahkan ke kecamatan pada tahun 2010	Hanya dua variabel: guru dan murid.
3.1c	Apakah ada kesenjangan dalam data yang dihasilkan oleh sekolah & diserahkan ke kecamatan? Jika ya, cari tahu mengapa dari kepala sekolah	
3.1c	Apa saja tantangan dalam pengumpulan data dipisahkan menurut jenis kelamin dari sekolah ke kecamatan dan ke kabupaten?	Tidak ada manual, tidak ada panduan Bagaimana menggunakannya untuk pengembangan sekolah internal termasuk RKS dan RKAS.
3.1c 3.3a	Mendapatkan data dari sekolah jumlah murid yang terdaftar berdasarkan kelas & kehadiran untuk tahun 2010. Apakah ada perbedaan antara perempuan dan anak lelaki? Mintalah kepala sekolah/guru untuk alasannya mengapa?	Data tentang jumlah murid menunjukkan kesetaraan yang sangat baik antara anak laki-laki dan anak perempuan untuk setiap kelas 2007-2012.
3.3a 3.2c 3.3a	Dapatkan data untuk tahun 2010 untuk kelas 6 dan 9 hasil ujian (dan menurut mata pelajaran). Jika ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan tanyakan kepada Kepala Sekolah/guru alasan mengapa?	Na
3.1b 3.1.c 3.2c	Dapatkan data tingkat melanjutkan dari SD ke SMP dan dari SMP ke SLTA untuk tahun 2010. Apakah ada kesenjangan dan apa alasan yang diberikan?	
3.1a	Dapatkan data putus sekolah untuk 2010. Apa alasan yang diberikan untuk anak laki-laki/perempuan putus sekolah?	
3.2d	Dapatkan salinan kode etik sekolah	kode etik tersedia untuk murid yang terkait dengan pakaian, belajar jadwal, murid, hak dan kewajiban, dll
3.2b	Berapa banyak guru telah menerima pelatihan kesadaran gender?	Semua guru di SDN1 Luwoo telah diberi pengetahuan umum dan keterampilan oleh Focal Point internal.

2a	Apakah sekolah memiliki <i>gender focal point</i> ? (identifikasi orang yang diajak untuk bertemu selama kunjungan sekolah)	Seorang guru perempuan telah ditetapkan sebagai Focal Point sejak 2003.
3.2b 3.2c 3.2d 3.2e 3.2f	Kegiatan yang responsif gender Apa yang diterapkan sekolah?	Pembelajaran yang menyenangkan menjamin kesempatan yang sama bagi perempuan dan anak lelaki untuk menyuarakan komentar/pendapat dan tindakan dalam proses pembelajaran oleh semua guru di semua kelas.

Lembar Data Terpilah menurut Jenis Kelamin untuk sekolah yang dikunjungi (Silakan dapatkan data sebelum berkunjung ke sekolah)

Code*	Data	Comments
	Tipe & nama sekolah, kecamatan, kabupaten, provinsi	SMAN 1 Limboto, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo
3.2	Jumlah guru dengan kualifikasi di setiap kelas/ jenis kontrak & gaji	Pada 2012, sebagian besar guru memenuhi kualifikasi S1 dan 70% adalah guru perempuan (SMAN1 Profil).
3.1c	Apakah sekolah memproduksi semua data kinerja dipisahkan menurut jenis kelamin yang diminta oleh kecamatan pada tahun 2010?	Na
3.1c	Dapatkan daftar data terpilah menurut jenis kelamin yang dihasilkan oleh sekolah & diserahkan ke kecamatan pada tahun 2010	Data guru dan murid saja. Ketika mahasiswa yang terdaftar di kelas XI dan XII proporsi murid dalam kelompok ilmu sosial adalah sama. Temuan menunjukkan bahwa murid perempuan lebih banyak tiga kali dari murid laki-laki dalam kelompok ilmu pengetahuan.
3.1c	Apakah ada kesenjangan dalam data yang dihasilkan oleh sekolah & diserahkan ke kecamatan? Jika ya, cari tahu mengapa dari kepala sekolah	Na
3.1c	Apa saja tantangan dalam pengumpulan data dipisahkan menurut jenis kelamin dari sekolah ke kecamatan dan ke kabupaten?	Data yang responsif gender belum dianalisis dan digunakan dengan benar oleh sekolah sebagai data dasar untuk mengembangkan RKS dan RKAS sehingga Penjaminan kualitas sekolah dan perbaikan dapat terus dikelola dan semua target dapat diukur dan dipantau oleh semua supervisor.
3.1c 3.3a	Mendapatkan data dari sekolah jumlah murid yang terdaftar berdasarkan kelas & kehadiran untuk tahun 2010. Apakah ada perbedaan antara perempuan dan anak lelaki? Mintalah kepala sekolah/guru untuk alasannya mengapa?	Lebih banyak perempuan dibandingkan dengan laki-laki di kelas X.
3.3a 3.2c 3.3a	Dapatkan data untuk tahun 2010 untuk kelas 6 dan 9 hasil ujian (dan menurut mata pelajaran). Jika ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan tanyakan kepada Kepala Sekolah/ guru alasan mengapa?	
3.1b 3.1.c 3.2c	Dapatkan data tingkat melanjutkan dari SD ke SMP dan dari SMP ke SLTA untuk tahun 2010. Apakah ada kesenjangan dan apa alasan yang diberikan?	
3.1a	Dapatkan data putus sekolah untuk 2010. Apa alasan yang diberikan untuk anak laki-laki/perempuan putus sekolah?	
3.2d	Dapatkan salinan kode etik sekolah	Tersedia untuk terjemahan
3.2b	Berapa banyak guru telah menerima pelatihan kesadaran gender?	nol
2a	Apakah sekolah memiliki <i>gender focal point</i> ? (identifikasi orang yang diajak untuk bertemu selama kunjungan sekolah)	Tidak, tidak ada satupun guru yang dilatih PUG
3.2b 3.2c 3.2d 3.2e 3.2f	Kegiatan yang responsif gender Apa yang diterapkan sekolah?	Tidak ada

* Kode mengacu pada komponen tertentu dari kerangka Pengkajian. Silakan lihat kerangka.

Annex 5 Daftar Para Pemangku Kepentingan

I Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)		
1.	Mrs. Dra. Nina Sardjunani, M.A	Deputi Bidang Sumber Daya Manusi dan Kebudayaan
2.	Mr. Dr. Ir. Subandi Sardjoko, M.Sc	Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
II Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional (Kemdikbud)		
Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat		
1.	Ibu. DR. Ella Yulaelawati	Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi		
2.	Bapak Prof. Dr. Joko Santoso	Dirjen Pendidikan Tinggi
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah		
3.	Bapak Hamid Muhammad, Ph.D	Dirjen Pendidikan Menengah
Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini		
4.	Bapak Dr. Gutama	Sesditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal
Tim Sesditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal		
4.a.	Bapak Agus	Kepala Personalia
4.b.	Bapak Pahala	Kepala Sub. Direktorat
4.c.	Ibu Enah	Kepala Sub Direktorat
5.	Bapak Dr. Erman Syamsudin, S.H. M.Pd	Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
Tim Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini		
5.a.	Ibu. Dra. Lestari	Kepala Pembelajaran
5.b.	Bapak. Edi, S.S	Sekretaris Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP-PMP)		
6.	Ibu Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd	Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pendidik
Tim Pusat Pengembangan Profesi Pendidik		
6.a.	Ibu Dian Wahyuni	Kepala Bidang Pengembangan Profesi Pendidik Pendidikan Dasar
6.b.	Bapak Arif	Kepala Bagian
6.c.	Bapak Sitanggang	Kepala Sub bagian
7.	Bapak Dr. Ir. Bastari., M.A	Kepala Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan BPSDMP - PMP
Biro Perencanaan		
8.	Bapak Ananto Kusuma Seta., Ph.D	Kepala Biro Perencanaan
Badan Penelitian dan Pengembangan		
9.	Bapak Dr. Ir. Hari Setiadi	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
III Kementerian Agama (Kemenag)		
1.	Bapak Prof. DR. Nassarudin Umar	Wakil Kementerian Agama
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam		
2.	Bapak Prof. Dr. Nursyam	Dirjen Pendidikan Islam
2.a.	Bapak Nanang	Kepala SubDit, Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
Direktur Pendidikan Madrasah		
3.	Bapak Prof. Dedi Ubaedi	Direktur Pendidikan Madrasah
Biro Perencanaan		
4.	Ibu Nurmahmudah	Kepala Bagian Anggaran
5.	Bapak Besar	Kepala Sub Bagian
IV Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)		
Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Sosial dan Hukum		
1.	Ibu Sally Astuti, M.Sc	ASDEP Gender dalam Pendidikan
Tim ASDEP Gender dalam Pendidikan		
1.a.	Ibu Nurhaeti Kasim	Kepala Sub Bagian

V Kementerian Pekerjaan Umum		
Sekretariat Pengarusutamaan Gender		
1.	Bapak Budi Prasetyo	Kepala Sekretariat Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender
2.	Ibu Lila Noerhayati	Wakil Kepala Sekretariat Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender
Tim Sekretariat Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender		
a.	Ibu Adi Sasuji	Anggota Sekretariat
b.	Ibu Ineke Indrarini	Anggota Sekretariat
VI Tenaga Ahli Kelompok Kerja Gender		
1.	Bapak Prof. DR. Fazli Djalal	Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat
2.	Ibu DR. Yulfita Raharjo	Tenaga Ahli Gender
VII AUSAID		
1.	Bapak Brian Spicer	Ketua Tim Kualitas Pendidikan – Kemdikbud
2.	Ibu Karen Taylor	Tenaga Ahli Pendidikan Internasional – Kemdikbud
3.	Bapak Russell Keogh	AIPE – SSQ – Kemenag
4.	Bapak Abdul Munir	AIPE – SSQ – Kemenag
5.	Bapak Robert Kingham	AIPE – SSQ – IFC
VIII USAID		
1.	Bapak Stuart Weston	Ketua Tim – USAID DBE 3 Project
IX UNICEF		
1.	Ibu Seema Agarwal	Kepala Unit Pendidikan
2.	Ibu Niloufar Pourzand, Ph.D	Kepala, Kebijakan Sosial dan Monitoring
X Bank Dunia		
1.	Ibu Ita Rosita	Unit Pendidikan
XI ACDP – 001		
Penelitian Strategi Pengembangan Anak Usia Dini		
1.	Bapak Anthony Dewees	Ketua Tim
XII Koordinator Lapangan		
1.	Ibu Prof. Ismi Dwi Astuti	Koordinator Lapangan untuk Sleman, Jogjakarta & Klaten, Jawa Tengah
2.	Ibu DR. Herien Puspitawati	Koordinator Lapangan untuk Indramayu, Jawa Barat
3.	Ibu Prof. Mien Ratoe Oedjoe	Koordinator Lapangan untuk Kupang, NTT
4.	Ibu Tineke Wolok	Koordinator Lapangan Untuk Gorontalo
5.	Ibu DR. Lilian Rachman	Kepala Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Gorontalo

Annex 6 Daftar Peserta

Kelompok Diskusi Terfokus (FGD) Untuk Penelitian Lapangan

SENIN, 16 JANUARI 2012		FGD I MANAJEMEN & PEMBUAT KEBIJAKAN PENDIDIKAN SLEMAN, JOGJAKARTA		
NO.	NAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	POSISI & LEMBAGA/INSTANSI
1.	Endra Santosa	√		Kabid PNFI Dikpora Provinsi
2.	Siti Hendratiningsih		√	Kabid PPPA
3.	Halim Sutono	√		Sekretaris Dikpora
4.	Arif Kurniawan	√		Ketua Komisi D – DPRD Sleman
5.	Pranama	√		Kabid Sosbud BAPPEDA
6.	Agnes Kurnia		√	Badan KBPMPP Sleman
7.	Sri Wantini		√	Kabid Pemb. Kurikulum & Kemuridan
8.	Sunu Darsono	√		Kasi Mependa Kemenag Sleman
9.	Masagudi	√		Ka SKB Sleman
10.	Warjianto Panca Wasono	√		MKPS Sleman
11.	Drs. Subagyo	√		Kepsek (MKKS) Sleman
12.	Endang Purwanti		√	MGMP PKN (SMPN 2 Tempel)
13.	Tri Worosetyaningsih		√	MGMP IPS Sleman (SMPN 2 Ngemplak)
14.	Rita Supriyatmi		√	MGMP IPA Sleman (SMPN 2 Ralati)
15.	Nuratiwiyono	√		MGMP Bahasa Indonesia Sleman (SMPN 2 Depok)
16.	Bintang	√		PKBI Sleman (Dircab)
17.	Baskoro	√		Kabid PPNFI Sleman
18.	Haryanti		√	Forum PAUD Kab Sleman
19.	Sugiyono	√		Kasi Dikmas
20.	H. Susilowati		√	PSW – UGM
21.	Niken H		√	PSW – UGM
TOTAL		12	9	21

SELASA, 17 JANUARI 2012		FGD II LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SLEMAN JOGJAKARTA		
NO.	NAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	POSISI & LEMBAGA/INSTANSI
1.	Munafirin	√		Pengawas PAI Kemenag – Kab. Sleman
2.	Ida Uswatun Hasanah		√	Pengawas PAI Madya – KabSleman
3.	B. Budi Salidyo	√		BLPT
4.	Nining Herdiana		√	BPKB Provinsi DIY
5.	Sriyanti		√	PPPPTK Matematika
6.	Wagiran	√		UNY
7.	Sri Hartuti		√	BKD/Sek. BKD
8.	Nalayah J.F		√	PPD - UNY
9.	Sukajiyanto	√		Dinas Dikpora
10.	Ambar Sulastyaningrum		√	Dinas Dikpora
11.	Endang Dyah Rini		√	Dinas Dikpora
12.	Sugeng R	√		Dinas Dikpora
13.	Sarjilah		√	Widyaswara LPMP DIY
14.	Endra C	√		PNFI Provinsi DIY
15.	Haryanti		√	Forum PAUD
16.	Sugiyono	√		Sek. PUG Bidang Pendidikan - Sleman
17.	Rita Supriyatmi		√	MGMP IPA (SMPN 2 Relati)
18.	Warjianto Panca Warsono	√		Pengawas Bahasa Inggris
19.	Endang Purwanti		√	MGMP PKN/Vocal Poit(SMPN 2 Tempel)
20.	Bambang Edy Baskara	√		Kabid PPNFI
TOTAL		9	11	20

RABU, 18 JANUARI 2012		FGD III UNIT PENDIDIKAN SLEMAN, JOGJAKARTA		
NO.	NAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	POSISI & LEMBAGA/INSTANSI
1.	dr. Sunini		√	Pengelola TPA – Kb PSI Sleman
2.	Elfi Seseti		√	-
3.	Muhastariyanto	√		Penilik Dinas Pendidik SOKA – Kab. Sleman
4.	Suratmin	√		Penilik Dikpora – Kab Sleman
5.	Purwanta	√		Penilik Dikpora – Kab Sleman
6.	W. Panca Wasono	√		Pengawas SM
7.	Slamet Tazyono	√		Tutor
8.	Sri Sumilah		√	Penilik Dikpora
9.	Dwi Wahyuno	√		Ketua PKBM Ngudi Ngelmu
10.	Siti Rejeki Andayani		√	Tutor KF PKBM
11.	Sutarni		√	Sekretaris PKBM Ngudi Ngelmu
12.	Sukarji Yauta	√		Dikpora Sleman
13.	Endang Dyah Rini		√	Dikpora Sleman
14.	Yuli Haryanto, S.Pd	√		Tutor PKBM
15.	Sunaeli	√		Pengelola PKBM
16.	Soimahyalim	√		Pendidik
17.	Nunuk Heri	√		Pendidik
18.	Yohana Sari SP		√	Pendidik
19.	Yusta Ruminah		√	Pendidik
TOTAL		11	8	19

KAMIS, 19 JANUARI 2012		FGD I MANAJEMEN & PEMBUAT KEBIJAKAN PENDIDIKAN KLATEN, JAWA TENGAH		
NO.	NAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	POSISI & LEMBAGA/INSTANSI
1.	Susilo Adi	√		Dinas Pendidikan Prov. Jateng
2.	Ema Rachmawati		√	BP3AKB Prov Jateng
3.	Rochaeningsih		√	P2TP2A
4.	Mujas	√		BAPPEDA
5.	Siti Maryam		√	Staff CCRAIS
6.	Drs. Dwi Purwanto, M.M	√		Dewan Pendidikan
7.	H. Sunardi, S.Pd	√		Ka. Dinas Pendidikan
8.	Drs. H. Sunaryo, M.M	√		Kabid PNF
9.	Sidik Pramana	√		Staf Subbag Perencanaan Dinas Pendidikan
10.	Eva Agustinawati		√	Sekretaris P3G LPPM UNS
11.	Krishananto	√		Kasi PNF
12.	Mulyono, S.Pd	√		Ketua MGMP IPS (SMP)
13.	Drs. Kusmarjono	√		Ketua MGMP PKN
14.	Haryani, S.Pd		√	MGMP Bahasa Indonesia
15.	Sri Sudadi, S.Pd		√	KKG SD
16.	Waguyono	√		PKBI Klaten
17.	Umawati		√	BAPPEDA ProvJ ateng
18.	Sriyana		√	PP & KB
19.	Endang HS		√	Kasubag PP KB
TOTAL		10	9	19

JUMAT, 20 JANUARI 2012		FGD II UNIT PENDIDIKAN KLATEN, JAWA TENGAH		
NO.	NAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	POSISI & LEMBAGA/INSTANSI
1.	Sutadiyono, S.Pd	√		Ka. SD Meger Ceper
2.	Hesti Harsono, S.Pd	√		Ka. SMP N 2 Juwiring
3.	Sumadi, S.Pd	√		Ka. SMA N 1 Ceper
4.	Sri Suyatna		√	SMK N 1 Juwiring
5.	Novi Wijayanti, S.Sos		√	Guru SMPN I Jogonalan
6.	Puji Hastuti, S.Pd		√	Guru SMPN 2 Juwiring
7.	Harsono, S.Pd	√		Guru SMPN I Wedi
8.	Yosefine Jalal R, S.Pd		√	Guru SMK VI Jogonalan
9.	Purwanto, S.Pd	√		Guru SMAN I Ceper
10.	Drs. Sriyoto	√		Guru SMAN 3 Klaten
11.	Dra. Tatik Windrawati		√	Guru SMAN 3 Klaten
12.	Rita Tri Isdiningsih		√	Guru SMP Maria Asumta Klaten
13.	Maryono, S.Pd	√		Guru SMAN I Ceper
14.	Lahimi, S.Ag		√	Guru PAI SMPN 6 Klaten
15.	Mulyadi, S.Ag	√		Guru SMAN 3 Klaten
16.	Sandiman, S.Ag	√		Guru SDN I Sukorejo Wedi
17.	Sri Rahmawati		√	Guru SDN Meger Ceper
18.	Drs. H. Sunaryo, M.M	√		Kabid PNF Dinas Pendidikan
TOTAL		10	8	18

SABTU, 21 JANUARI 2012		FGD III LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KLATEN, JAWA TENGAH		
NO.	NAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	POSISI & LEMBAGA/INSTANSI
1.	Drs. Mujiyanto Paulus, M.Pd	√		Widyaswara LPMP Jateng
2.	Dr. Mulida Hadrina H. S.Pd., M.Pd		√	Widyaswara LPMP Semarang
3.	Sri Hartati, M.Pd	√		Widyaswara LPMP Semarang
4.	Drs. Sri Harjana, M.M	√		Pengawas SMP/SMA
5.	Drs. Sidik Purnomo, M.Pd., M.M	√		Pengawas SMP/SMA
6.	Drs. E. Wigyasundoro, P.Pd	√		Pengawas SMP/SMA
7.	Drs. H. Suparno, M.Pd	√		Pengawas SMK
8.	Siany Indria, S.Ant. M.Hum		√	Dosen FKIP UNS
9.	Sunaryo	√		Dinas Pendidikan Klaten
10.	Drs. Muhroji Arifin, S.Ag. M.Pd	√		Kasi Diklat Teknis Balai Diklat Semarang
11.	Sholihin	√		WI/BDK Semarang
12.	Rullies Naeny		√	Widyaswara/BDK Semarang
13.	Diah Uswatun		√	Widyaswara
TOTAL		9	4	13

SELASA, 24 JANUARI 2012		FGD I MANAJEMEN & PEMBUAT KEBIJAKAN PENDIDIKAN & PROVINSI INDRAMAYU, JAWA BARAT		
NO.	NAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	POSISI & LEMBAGA/INSTANSI
1.	M. Nur Sudana	√		BAPPEDA
2.	H. Fahruri	√		Kemenag
3.	H. Zainal Arifin	√		Ka. MAN Indramayu
4.	Drs. Tatang Sutarni	√		Staff PNFI Disdik Provinsi Jawa Barat
5.	Lilis Widaningsih		√	POKJA Gender Disdik Jawa Barat, PSW - UPI
6.	Sarimanah		√	Staff PNFI Disdik Provinsi Jawa Barat
7.	H. Ridwan	√		Kasi PAUD Bidang PLS Disdik Kab. Indramayu
8.	Sugiyanto	√		SDN Eretan Kulon V
9.	Eti Nurhaeti		√	Kasubid PUG BPPKB
10.	Hj. Ampera Megawati		√	Kasi Dikmas
11.	H. DR. Akil, M.Pd	√		Kabid. PLS
12.	Ristoyo	√		Kasi Kesetaraan
TOTAL		8	4	12

RABU, 25 JANUARI 2012		FGD II UNIT PENDIDIKAN MAN INDRAMAYU INDRAMAYU, JAWA BARAT		
NO.	NAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	POSISI & LEMBAGA/INSTANSI
1.	Misbahussurur	√		Guru Matematika
2.	Moh. Dasim	√		Komite
3.	Neni K		√	Guru Bahasa Inggris
4.	Tuti Nurbaeti		√	Guru Konseling (BK)
5.	Eva Azizah		√	Guru Bahasa Arab
6.	Chikmatin		√	Guru Bahasa Indonesia
7.	Wawan A	√		Guru Fisika
8.	Reni Murniwati		√	Guru Komputer
9.	Taufik Ismail	√		Guru Bahasa Indonesia
10.	Hj. Ampera Megawati		√	Kasi/ PSM
11.	H. Yusup Tajiri	√		Ka TU
12.	Zaenal Arifin	√		Kepala Sekolah
TOTAL		6	6	12

KAMIS, 26 JANUARI 2012		FGD III UNIT PENDIDIKAN SDN ERETAN KULON V INDRAMAYU, JAWA BARAT		
NO.	NAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	POSISI & LEMBAGA/INSTANSI
1.	Dedi Supriyadi	√		Guru Kelas
2.	Ika Nofika, S.Pd		√	Guru Kelas
3.	Muriah		√	Guru Kelas
4.	Jamah	√		Guru Kelas
5.	Sugianto	√		Wakil Kepala Sekolah
6.	Tardi	√		Guru Kelas
7.	Toto B	√		Guru Kelas
8.	Alfiana Awaludin		√	Guru Kelas
9.	Insan Sunalam, S.Pd	√		Penilik PLS
10.	Hartono, S.Pd	√		Pengawas SD
11.	Hj. Ampera Megawati		√	Kasi
TOTAL		7	4	11

JUMAT, 27 JANUARI 2012		FGD IV UNIT PENDIDIKAN SMK HASANUDIN ERETAN KULON INDRAMAYU, JAWA BARAT		
NO.	NAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	POSISI & LEMBAGA/INSTANSI
1.	Jaeni, S.Pd	√		Wakil Kepala Kurikulum
2.	Siti Faridah, S.Ag		√	Guru Agama
3.	Elinda Oktaviani, S.Pd		√	Guru Bahasa Inggris
4.	Oom Komariyah, S.Pd	√		Guru Konseling (BK)
5.	Lukito, S.Pd	√		Guru Matematika
6.	Hj. Sri Ampera Megawati		√	Kasi Dinas Pendidikan
7.	Royani	√		Kepala Sekolah
TOTAL		4	3	7

TANGGAL SELASA, 14 FEBRUARI 2012		FGD I MANAJEMEN & PEMBUAT KEBIJAKAN PENDIDIKAN KUPANG, NTT		
NO.	NAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	POSISI & LEMBAGA/INSTANSI
1.	Johana K. Wolo		√	Guru/ SMKN 3 Kupang
2.	Adelfintje M. Ndolu		√	Guru/ SMKN 3 Kupang
3.	Martha Ratu		√	Guru/ SMAN 1 Kupang
4.	Marsalina Djamiraga		√	Guru/ SMAN 1 Kupang
5.	Sandy Paliana		√	Guru/ SMAN 1 Kupang
6.	K. Flora Suciadi, S.Pd		√	Pengawas Sekolah
7.	Merry Dudde		√	Guru/ SMA 1 Kupang
8.	Dominggus Bessik	√		Kemenag Kota Kupang
9.	Mismanan L. Nubatonis	√		Kemenag Kota Kupang
10.	Bapa Muda	√		Kepala Sekolah SMA 1 Kupang
11.	David E. Nenta	√		Kepala Badan Pendidikan
12.	Thobias Tobe	√		Pengawas Unit Pendidikan t
13.	Yoel Oematan	√		Kepala Sekolah SMPN 2 Kupang
14.	Bajjules Toko	√		Guru/ SMAN 1 Kupang
15.	Dominggus Tonmo	√		Guru/ SMAN 1 Kupang
16.	Merry Sado, S.Pd., M.M		√	Pengawas
17.	Elisabeth Ningtias		√	Kasi Bimas Katholik, Kemenag Kupang
18.	Reny Laurensia		√	Guru/ SMKN 3 Kupang
19.	Grefer E.D. Pollo, M.Pd	√		Kepala SMPN 1 Kupang
20.	Jusuf Gadi Rammang	√		Kasi OSIS Dians PPO – Kota Kupang
21.	Anna M. Labina		√	Kasi SDM
22.	Elen Amalo, S.Pdk		√	Kepala Sekolah SDK Hosana
23.	Alex R. Ate	√		Kasie Kesetaraan Dinas
24.	Max H. Halundaka	√		Kadis PPO – Kota Kupang
25.	Elly Warata		√	Kabag BAPPEDA – Kota Kupang
26.	Domianus Mo Dirjeno	√		Kepala Bidang/ PPO
27.	Henny Agoepa		√	Kepala Seksi KF
28.	Wely N.A. Hayer, SS.M.Pd	√		Kurikulum SD GMT Bonipai 345
29.	Jekri Node Solo	√		Pengawas Kota Kupang
30.	Wilhelmus Geri	√		Kepala Sekolah SMPN 1 Kupang Tengah
31.	Yayuk Hardaniari		√	Kepala Sekolah SMAN 2 Kupang Timur
TOTAL		16	15	31

RABU, 15 FEBRUARI 2012		FGD II LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KUPANG, NTT		
NO.	NAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	POSISI & LEMBAGA/INSTANSI
1.	Jonathan Loebisa, S.Pd	√		Pengawas Pendidikan Kristen -Kemenag Kota Kupang
2.	Rubertus Runesi, S.Pd	√		Pengawas Pendidikan Kristen -Kemenag Kota Kupang
3.	Harmanus Haning, S.Pd	√		Pengawas Pendidikan Kristen -Kemenag Kota Kupang
4.	Mijael Boimeno, S.Pd	√		Dosen FKIP IPS
5.	Agustisi Martarina, M.Ak		√	LPMP Widyaswara
6.	Steafanus Jelau, S.Pd., M.M	√		LPMP Widyaswara
7.	Octovianus Ndoen	√		LPMP Widyaswara
8.	Dra. PR. Ratuleore, M.Pd., KONS		√	Dosen Konseling
9.	Drs. Wara S. Dominikus, M.Sc	√		PD III FKIP Undana
10.	Prof. M.N. Noach, Ph.D	√		Rektor Undana
11.	Maria Lobo		√	Dosen Matematika, FST Undana
12.	Dr. Joyce Kansil		√	Kabag. Pemb. Perempuan, SETDA Kota Kupang
13.	Nur Julqurniati		√	Staf BP4D Prov. NTT
14.	Titik Kristinawati, S.Pd., M.A		√	Calon Widyaswara, BP4D Prov. NTT
15.	Dr. Ir. L. Meichael Riwabako, M.Si	√		Sekretaris Lemlit Undana
16.	Drs. Marta Mail		√	Dosen FAP
17.	Drs. Wawo Walter	√		Dosen FKIP BI
18.	Daryati, S.Pd		√	Dosen FKIP
TOTAL		10	8	18

KAMIS, 16 FEBRUARI 2012		FGD III UNIT PENDIDIKAN KUPANG, NTT		
NO.	NAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	POSISI & LEMBAGA/INSTANSI
1.	Elen Amalo		√	Kepala Sekolah SD Kristen Hosana
2.	Monika MoDjo		√	Kepala Sekolah K8/TK Kristen Hosana
3.	Syafrudin Sabong	√		Kepala Sekolah SMPN 7 Kupang
4.	Cyntia M. Fangidae		√	Murid SMAN 1 Kupang
5.	Yaved Tanesib	√		Wakil Bid. Akademik
6.	Jublina GA, S.Th.		√	Kepala Sekolah SDK Harmony
7.	Dece Fanggi, SST., Par		√	Guru Pengamatan SMAKN 3 Kupang
8.	Lusia I.N Mandala		√	Kepala Sekolah SMK 3 Kupang
9.	Willem J.A. Nubatonis	√		Koordinator BK
10.	Martha Ratu		√	Guru Biologi SMAN 1 Kupang
11.	Marsalina Djmiraga		√	Guru Kimia SMAN 1 Kupang
12.	Sandy N. Paliama	√		Guru Bahasa Inggris SMAN 1 Kupang
13.	Bepa Mude	√		Kepala Sekolah
14.	Christian Riwu	√		Kelompok Kerja Murid (POKJA Kemuridan)
15.	Megadian D. Aprianggi		√	Murid SMKN 3 Kupang
16.	Bayulus Tako	√		Guru SMAN 1 Kupang
17.	Max H. Halundaka	√		Kasi PPO Kota Kupang
18.	Henny Agripa		√	Kepala Seksi KF
TOTAL		8	10	18

SENIN, 1 APRIL 2012		FGD I MANAJEMEN & PEMBUAT KEBIJAKAN PENDIDIKAN GORONTALO, GORONTALO		
NO.	NAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	POSISI & LEMBAGA/INSTANSI
1.	Adnan Entengo	√		DPRD Kabupaten Gorontalo
2.	Abdul Razak	√		Kesbang Belimas Kabupaten Gorontalo
3.	Syamsul Baharudin	√		Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Gorontalo
4.	Jefri Kadjudju	√		Radio SMEK FM
5.	Mashudi Nggok	√		Kemenag Kabupaten Gorontalo
6.	Yusron H	√		Dewan Pendidikan (Sekretaris)
7.	Zubair Pomalingo	√		Dinas Pendidikan
8.	Syafruddin	√		Sekretaris BPP – KB
9.	Drs. Han Rastu., M.M	√		Asisten Administrasi
10.	DR. Lilian Rahman., M.Pd		√	Ka. BPP & KB
11.	Fatmah Tuna., S.Ag		√	Kabid PUG
12.	Jhon Rahman	√		Kadis Diknas Kabupaten Gorontalo
13.	Moh. Yasin	√		Sekretaris/PNF
14.	Marwan Daler	√		Kabid Dikmen
15.	Yulius B. Yusuf	√		Kabid Dikdas
TOTAL		13	2	15

SELASA, 2 APRIL 2012		FGD II UNIT PENDIDIKAN GORONTALO, GORONTALO		
NO.	NAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	POSISI & LEMBAGA/INSTANSI
1.	Dr. Baharudin Reyas., MM	√		Kepala Sekolah SMPN 2 Limboto
2.	Drs. Adam Delri	√		Komite SMPN 2 Limboto
3.	Maryam Uli		√	Kepala Sekolah SMPN 1 Limboto
4.	Sriyanti Maku		√	Guru SMPN 1 Limboto
5.	Rapia Bahoea		√	Kepala Sekolah SMA 1 Limboto
6.	Fristo Kau	√		Komite
7.	Herliono	√		Wakil Kepala Sekolah SMPN Widyakrama
8.	Rustam Mustafa, M. Pd.	√		SMPN 1 B.Pantai
9.	Irwan Potale	√		Guru SMAN 1 Limboto
10.	Suleman Talik	√		Kepala Sekolah SDN 1 Luwoo
11.	Trisno Domili	√		Komite SDN 1 Luwoo
12.	Abubakar Harun	√		Guru SDN 1 Luwoo
13.	Welfin Tuna., S.Pd., M.M.	√		Kepala Sekolah SDN 2 Bulila
14.	Maharani Moh., S.Pd.		√	Guru SDN 2 Bulila
15.	Yurni Domili., S.Pd.		√	Komite SDN 2 Bulila
16.	Gafar Puluitulawa	√		Pengawas SMP/SM
17.	Abd. Rajak Baiku	√		Pengawas SD
18.	Nurwun Wektosono	√		Pengawas PAUD
19.	Abdullah Ulesy	√		Komite SMP 1 Limboto
20.	Magda Porijato		√	Komite
TOTAL		14	6	20

KAMIS, 5 APRIL 2012		FGD III LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN GORONTALO, GORONTALO		
NO.	NAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	POSISI & LEMBAGA/INSTANSI
1.	Siti Pratiwi Husain		√	Fakultas Ekonomi & Bisnis
2.	Lamto Miri Alin Amali		√	Fakultas Ekonomi & Bisnis
3.	Melizubaida Mahmud		√	Fakultas Ekonomi & Bisnis
4.	Lusiana M. Tijow		√	Fakultas Sosial
5.	Mutia CH. Thalib		√	Fakultas Sosial
6.	Nurhayati Tine		√	Fakultas Pendidikan (PGSD)
7.	Salma Z.B		√	Fakultas Pendidikan & Bisnis
8.	Jusna Ahmad		√	PSW (FMIPA)
9.	Elya Nusantari		√	PSW
10.	Irvin Novita Arifin		√	Fakultas Pendidikan (PAUD)
11.	Yowan Tamu		√	PSW
12.	Simin A. Rauf	√		LPMP Gorontalo
13.	Ato Rahman	√		LPMP Gorontalo
14.	Sunarty Eraku		√	PSW
15.	Rosma Kadir		√	Dosen Fakultas Bahasa Inggris FSB UNG
16.	Nirwan Zunus		√	PSW
17.	Helay Alam		√	Dosen FEB
TOTAL		2	15	17

Annex 7 Daftar Sekolah yang Dikunjungi

NO	Nama Kabupaten/Kota	Nama Sekolah yang dikunjungi				
		PAUD/TK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/MAN	PKBM
1.	Sleman	PAUD Putera Sembada I			MAN Temple	Ngudi Ilmu
2.	Klaten		SDN 1 Meger	SMPN 2 Juwiring		
3.	Kota Kupang	SMKN		SMPN 7	SMAN 1	
4.	Indramayu		SDN Eretan Kulon		MAN 1 Indramayu	SMK Hasanudin
5.	Kab Gorontalo		SDN 1, Luwoo		SMAN 1 Limboto	

Kredit Foto

Sampul depan	Foto Kemdikbud, Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat
Halaman x	Foto Uni Eropa
Halaman xviii	Foto Kemdikbud, Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat
Halaman 8	Foto Kemitraan Pendidikan Australia Indonesia
Halaman 14	Foto Kemitraan Pendidikan Australia Indonesia
Halaman 22	Foto Kemdikbud, Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat
Halaman 46 (atas & bawah)	Foto Kemdikbud, Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat
Halaman 53	Foto ACDP
Halaman 76 (atas & bawah)	Foto Kemdikbud, Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat
Sampul belakang	Dari pojok kiri atas searah jarum jam: Foto dari kioslaris.wordpress.com Foto dari 123rf.com Foto dari hjf-ringan.blogspot.com Foto dari internet Foto dari budaya-indonesia.org Foto dari hjf-ringan.blogspot.com

